



IT'S A POLITICS

Rekam Jejak Pengalaman Perempuan
Dalam Pemilu 2014

IT'S A POLITICS

Rekam Jejak Pengalaman Perempuan
Dalam Pemilu 2014

kalyanamitra
Pusat Komunikasi dan Informasi Perempuan
Women's Communication and Information Centre

Jakarta, Indonesia
Desember, 2015

IT'S A POLITICS

Rekam Jejak Pengalaman Perempuan Dalam Pemilu 2014

Penanggungjawab Program:

Listyowati

Tim Penulis:

Hegel Terome, Ika Agustina, Listyowati, Mia Rosmiati,
Puansari Siregar, Rena Herdiyani,

Penyunting:

Hegel Terome

Penerbit:

Kalyanamitra

Jl. SMA 14 No.7 RT 009/09, Cawang, Jakarta Timur 13630

Tel 62-21-8004712; Fax 62-21-8004713

E-mail: ykm@indo.net.id

Website: www.kalyanamitra.or.id

Edisi Pertama: Desember 2015

Desain cover dan Tata letak:

Tumbuhdihati

Penerbitan Buku ini sebagian didukung oleh Yayasan TIFA

Copyrights@2015 by Kalyanamitra and Tifa Foundation. All rights reserved. This book may not be reproduced, in whole or in part, in any form without written permission from the publishers.

DAFTAR SINGKATAN

AD/ART	: Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Aleg	: Anggota legislatif
Balita	: Bayi dibawah lima tahun
Bawaslu	: Badan Pengawasan Pemilu
BKKBN	: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
Balon	: Bakal calon
Bapilu	: Badan pemenangan pemilu
Caleg	: Calon anggota legislatif
Dapil	: Daerah pemilihan
DPD	: Dewan Pimpinan Daerah
DPP	: Dewan Pimpinan Pusat
DPR RI	: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DCT	: Daftar Calon Tetap
DCS	: Daftar Calon Sementara
DPS	: Daftar Pemilih Sementara
DPT	: Daftar Pemilih Tetap

DPW	: Dewan Pimpinan Wilayah
DPN	: Dewan Pimpinan Nasional
DPC	: Dewan Pimpinan Cabang
DPP	: Dewan Pimpinan Pusat
Garnita	: Garda wanita
Gerindra	: Partai Gerakan Indonesia Raya
Golkar	: Partai Golongan Karya
Hanura	: Partai Hati Nurani Rakyat
Hp	: Handphone
HMI	: Himpunan Mahasiswa Islam
HKTI	: Himpunan Kerukunan Tani Indonesia
IAIN	: Institute Agama Islam Negeri
ICMI	: Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia
Jamsostek	: Jaminan sosial tenaga kerja
KAHMI	: Kesatuan Aksi Himpunan Mahasiswa Islam
Kohati	: Korps HMI wati
Komnas	
Perempuan	: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
Kordapil	: Koordinator daerah pemilihan
KNPI	: Komite Nasional Pemuda Indonesia
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
KPUD	: Komisi Pemilihan Umum Daerah
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
KPPS	: Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

Lansia	: Lanjut usia
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
LDI	: Lembaga Dakwah Islam
Mapala	: Mahasiswa pecinta alam
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
Nasdem	: Partai Nasional Demokrat
Ormas	: Organisasi masyarakat
ODHA	: Orang dengan HIV/AIDs
PAC	: Pengurus Anak Cabang
Panwaslu	: Panitia pengawas pemilu
Parpol	: Partai politik
Pemda	: Pemerintah daerah
Pemilu	: Pemilihan umum
Pilkada	: Pemilihan kepala daerah
Pileg	: Pemilihan legislatif
Pilpres	: Pemilihan presiden
Pramuka	: Praja muda Karana
Posko	: Pos koordinasi
PAN	: Partai Amanat Nasional
PB	: Pengurus Besar
PD	: Partai Demokrat
PDIP	: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
PKB	: Partai Kebangkitan Bangsa
PKPI	: Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia

PKK	: Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
PLKB	: Penyuluh Keluarga Berencana
PNPM	: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
PPP	: Partai Persatuan Pembangunan
PKS	: Partai Keadilan Sejahtera
REPDEM	: Relawan Perjuangan Demokrasi
RT	: Rukun Tetangga
RW	: Rukun Warga
Santika	: Barisan putri keadilan
Satpol PP	: Satuan polisi Pamong Praja
Sekjen	: Sekretaris jenderal
SK	: Surat Keputusan
SMS	: Short Message Services
SMA	: Sekolah Menengah Atas
Timses	: Tim sukses
Tupoksi	: Tugas pokok dan fungsi
TPS	: Tempat Pemungutan Suara
UU	: Undang-Undang
WALHI	: Wahana Lingkungan Hidup
WPP	: Wanita Persatuan Pembangunan
WTA	: Women's Tennis Association

DAFTAR ISI

BAGIAN PERTAMA

Latar Belakang Masalah	1
------------------------------	---

BAGIAN KEDUA

Profil Calon Anggota Legislatif Perempuan Yang Terpilih	25
--	----

BAGIAN KETIGA

Profil Calon Anggota Legislatif Perempuan Yang Tidak Terpilih	205
--	-----

BAGIAN KEEMPAT

Strategi Pemenangan Pemilu	247
----------------------------------	-----

BAGIAN KELIMA

Kesimpulan dan Rekomendasi	269
----------------------------------	-----

DAFTAR PUSTAKA	281
-----------------------------	------------

Ibu Pertiwi

kulihat ibu pertiwi
sedang bersusah hati
air matamu berlinang
mas intanmu terkenang

hutan gunung sawah lautan
simpanan kekayaan
kini ibu sedang susah
merintih dan berdoa

(Ismail Marzuki)

BAGIAN PERTAMA

LATAR BELAKANG MASALAH

Pengantar

Politik bagi kaum perempuan Indonesia bukanlah hal yang baru, karena sejak kolonisasi Belanda hal itu telah mereka perjuangkan. Dengan masuknya gagasan demokrasi ke Hindia Belanda yang dibawa oleh kaum kolonial awal abad 19, kemudian di Indonesia marak wacana dan praktik politik yang menuntut kebebasan dan kemerdekaan dari penjajahan. Berbarengan dengan keadaan itu, perjuangan politik perempuan mencapai titik konsolidasinya saat berlangsung Kongres Perempuan I di Jogjakarta pada 22-25 Desember 1928. Kongres ini terjadi beberapa bulan setelah Kongres Pemuda, 28 Oktober 1928, yang menegaskan pentingnya Indonesia yang bersatu, berdaulat, dan merdeka. Tentulah bagi kaum perempuan Indonesia dan gerakannya, kongres itu menjadi tonggak sejarah yang sangat penting dan menentukan dalam menandai dinamika politik perempuan masa pra kemerdekaan (*Susan Blackburn*, 2004: 11-31). Dan secara lebih spesifik, keputusan politik yang tekstual diambil pada Kongres Perempuan Indonesia di Bandung pada Juli 1938.¹

1 Kongres diikuti berbagai perkumpulan perempuan, di antaranya Poetri Indonesia, Poetri Boedi Sedjati, Wanito Tomo, Aisjiah, Wanita Katolik dan Wanita Taman Siswa. Kongres diketuai oleh Ny. Emma Puradiredja. Isu yang dibahas dalam Kongres antara lain, partisipasi perempuan dalam politik, khususnya mengenai hak dipilih. Saat itu pemerintah kolonial telah memberikan hak dipilih bagi perempuan untuk duduk dalam Badan Perwakilan. Mereka di antaranya adalah Ny. Emma Puradiredja, Ny. Sri Umiyati, Ny. Soenarjo Mangunpuspito dan Ny. Sitti Soendari yang menjadi anggota Dewan Kota (*Gementeraad*) di berbagai daerah. Akan tetapi karena perempuan belum mempunyai hak pilih maka perempuan menuntut supaya mereka pun diberikan hak memilih. Kongres diikuti berbagai perkumpulan perempuan, di antaranya Poetri Indonesia, Poetri Boedi Sedjati, Wanito Tomo, Aisjiah, Wanita Katolik dan Wanita Taman Siswa. Kongres diketuai oleh Ny. Emma

Dalam konteks demokrasi, maka hak politik (memilih dan dipilih) di Indonesia mulai berlaku sejak pemerintahan Soekarno-Hatta hingga pemerintahan saat ini. Pemilu yang pertama dilaksanakan pada masa Soekarno-Hatta tahun 1955 hingga berakhirnya kekuasaan mereka pada 1965². Kemudian pemerintahan Orde Lama tersebut digantikan oleh pemerintahan Orde Baru, yang melakukan beberapa kali Pemilu (1971-1997). Bagi kaum perempuan Indonesia dan gerakannya, pencapaian berkali-kali Pemilu yang ada itu, baik dari sisi kuantitas dan kualitas politik perempuan, belumlah memadai.

Dengan runtuhnya kekuasaan otoritarian Orde Baru dibawah pimpinan Soeharto pada 1998, maka ruang demokrasi kian terbuka lebar bagi rakyat untuk menyelenggarakan hak politiknya yang ditandai dengan pemberlakuan pemilu langsung. Dalam kondisi demikian, arena politik parlementarian bagi kaum perempuan Indonesia terhampar di hadapan mata dengan sokongan *affirmative action*³ 30

Puradiredja. Kongres memutuskan: 1) Tanggal 22 Desember diperingati sebagai “Hari Ibu” dengan arti seperti yang dimaksud dalam keputusan Kongres tahun 1935; 2) Membangun Komisi Perkawinan untuk merancang peraturan perkawinan yang seadil-adilnya tanpa menyinggung pihak yang beragama Islam.

- 2 Selama masa Presiden Soekarno (1945-1965) yang melewati beberapa era seperti Revolusi fisik, Demokrasi Parlementer, dan Demokrasi Terpimpin, hanya sekali terjadi Pemilu, yaitu Pemilu 1955. Pemilu ini terjadi pada masa pemerintahan Perdana Menteri Burhanuddin Harahap dari Masyumi (29 Juli 1955-2 Maret 1956). Akan tetapi peraturan yang dijadikan landasan dalam pemilihan umum 1955 adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 yang telah disusun pada masa pemerintahan Perdana Menteri Wilopo dari PNI (30 Maret 1952-2 Juli 1953).
- 3 Mudiwati Rahmatunisa (2014), mengutip pendapat *Drude Dahlerup*, mengapa tindakan afirmasi penting bagi perempuan dalam politik adalah karena pertama, bahwa perempuan berjumlah separuh penduduk dunia sehingga memiliki hak pula untuk menduduki separuh kursi yang tersedia di parlemen dunia (argumen keadilan); kedua, perempuan memiliki pengalaman yang berbeda secara biologis dan konstruksi sosial yang harus direpresentasikan (argumen pengalaman); ketiga, perempuan dan laki-laki sebagian besar memiliki kepentingan yang berlawanan sehingga laki-laki tidak dapat mewakili kepentingan perempuan (argumen

persen keterwakilan perempuan di DPR RI dan DPRD, dan di kepengurusan partai-partai politik.⁴

Dalam UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR RI, DPD dan DPRD disebutkan, bahwa partai-partai politik peserta pemilu harus memenuhi syarat 30 persen keterwakilan untuk calon anggota legislatif perempuannya. Kemudian dalam PKPU No. 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR RI dan DPRD Provinsi/Kabupaten disebutkan bahwa partai-partai politik berkewajiban memenuhi syarat 30 persen keterwakilan untuk calon anggota legislatif perempuan di tiap daerah pemilihan (dapil). Misalnya, dari tiga calon legislatif yang diusulkan oleh partai-partai politik peserta pemilu, maka harus ada seorang calon anggota legislatif perempuannya. Dengan diberlakukannya kebijakan afirmasi 30 persen keterwakilan perempuan itu, setidaknya mampu mendongkrak jumlah anggota legislatif perempuan di DPR RI dan DPRD Provinsi dan Kabupaten dalam Pemilu 2014 yang lalu.

Jumlah anggota legislatif perempuan di DPR RI hasil Pemilu 2004-2009 lalu berkisar 11 persen (61 kursi). Angka tersebut

kepentingan kelompok).

- 4 UU No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pasal 8, Peserta dan Persyaratan Mengikuti Pemilu: (1) Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan: a. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik; b. memiliki kepengurusan di 2/3 (dua pertiga) jumlah provinsi; c. memiliki kepengurusan di 2/3 (dua pertiga) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan; d. menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat; e. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota; f. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan sebagaimana pada huruf b dan huruf c; dan g. mengajukan nama dan tanda gambar partai politik kepada KPU. (2) Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu sebelumnya dapat menjadi Peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya.

meningkat cukup signifikan pada Pemilu 2009-2014 yaitu menjadi 18 persen di DPR RI (103 kursi), 16 persen di DPRD Provinsi (321 kursi), 12 persen di DPRD Kabupaten/Kota (1857 kursi). Hasil kajian oleh Puskapol UI (2013) menunjukkan bahwa calon anggota legislatif perempuan di Indonesia masih memperoleh sokongan masyarakat pemilih secara bermakna. Dari total suara pemilih yang sah pada tahun 2009 (104.099.785 suara), maka 16.134.959 suara (30,96%) diberikan kepada calon anggota legislatif perempuan, sehingga rata-rata perolehan suara mereka mencapai 4337, sedangkan calon anggota legislatif laki-laki sebesar 7523. Dari 77 daerah pemilihan (dapil) yang ada, maka hanya 8 dapil yang perolehan suara calon anggota legislatif perempuannya yang masih rendah, sedangkan dapil lainnya sangatlah bervariasi.

Besaran angka perempuan menjadi anggota legislatif masih dapat ditingkatkan apabila partai-partai politik yang mengusungnya berbesar hati mengedepankan lebih banyak lagi kader perempuannya masuk menjadi calon anggota legislatif daripada mendorong kader laki-lakinya. Temuan Puskapol UI tersebut memperlihatkan bahwa ada 20 Kabupaten/Kota yang perolehan suara calon anggota legislatif perempuannya di atas 30 persen. Ini memperlihatkan betapa wilayah pemilihan tersebut cukup ramah bagi perempuan.

Keberhasilan calon anggota legislatif perempuan dalam meraih suara terbesar pada Pemilu 2014 yang lalu perlu kita apresiasi secara positif. Seperti kita ketahui bersama, bahwa tidaklah mudah bagi mereka untuk memenangkan pemilu, akibat ketatnya persaingan di internal partai masing-masing dengan kultur patriarkalnya yang dominan dan harus menghadapi pesaing-pesaingnya dari partai politik lainnya serta situasi masyarakat yang minimal keberpihakannya terhadap perempuan yang menggeluti politik. Meskipun

tersedia afirmasi 30 persen untuk keterwakilan perempuan, namun tembok rintangan mesti mereka hadapi guna meraup suara sebanyak-banyaknya dalam pemilu yang lalu, di tengah-tengah keterbatasan modalitas politik, sosial, dan ekonomi yang dimiliki.

Modalitas politik mengacu kepada ada tidaknya dukungan politik sepenuh-penuhnya dari masyarakat pemilih maupun dari partai-partai politik pengusung calon anggota legislatif perempuan yang secara konkrit tampak melalui dukungan suara yang diberikan kepada mereka dalam setiap pemilu. Menjelang Pemilu 2014 yang lalu misalnya, modalitas politik calon anggota legislatif perempuan tampaknya masih rendah karena partai-partai politik banyak yang belum memenuhi syarat 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen. Selain itu, masih terlihat minimnya perempuan yang terlibat dalam kepengurusan di partai-partai politik yang ada, dengan kisaran 747 orang (30,3%) dari total calon legislatif (*Formappi*, 2013). Padahal keterlibatan perempuan di kepengurusan partai-partai politik akan berdampak sangat positif dalam proses seleksi terhadap kader-kader perempuan partai untuk menjadi kandidat-kandidat legislatif dalam setiap periode pemilu yang ada.

Modalitas sosial merujuk kepada hubungan-hubungan sosial yang terbangun selama ini antara calon anggota legislatif perempuan dengan masyarakat pemilihnya (konstituen) di daerah pemilihan (dapil). Modalitas ini pada Pemilu 2014 yang lalu juga kelihatan masih rendah karena banyak dari mereka yang berelasi sangat singkat yaitu 6 bulanan di wilayah pemilihan sehingga intensitas keterkenalan dan popularitasnya sangat dangkal.

Sistem rekrutmen anggota atau kader oleh partai-partai politik untuk menjadi calon anggota legislatif juga menjadi

faktor berpengaruh dalam setiap pemilu. Rekrutmen tersebut di Indonesia berjalan secara tidak profesional. Anasir-anasir primordialisme sangat kuat bermain di partai-partai politik, seperti kedekatan keluarga, etnis, agama, dan lainnya. Partai politik yang ada belum memiliki standar, kriteria, dan prosedur yang jelas dalam merekrut anggota atau kader partainya, sehingga kesannya bersifat asal-asalan dan instan. Itu terlihat dari perekrutan yang berbasis popularitas calon yang dipandang dapat mendulang perolehan suara partai terkait. Perekrutan calon-calon anggota legislatif perempuan oleh partai-partai politik pun masih bersifat 'Jakarta sentris'. *Formappi* (2013) menunjukkan, bahwa 58,7 persen calon anggota legislatif perempuan berdomisili di luar daerah pemilihannya. Oleh karena itu, kedekatan psikologis mereka dengan konstituennya menjadi sukar terbangun, karena jurang yang lebar itu. Kedekatan psikologis membutuhkan intensitas interaksi yang panjang, mendalam, dan dinamis. Atas dasar itu, maka partai-partai politik peserta pemilu banyak yang mempergunakan jalan pintas dengan cara merekrut calon yang berlatar belakang artis atau pengusaha yang dianggap populer oleh masyarakat pemilih dan memiliki kekuatan finansial besar untuk menopang logistik partai terkait.

Modalitas ekonomi menunjuk kepada tersedia tidaknya dana yang dimiliki calon anggota legislatif perempuan untuk membeayai pemilunya. Terkait ongkos politik yang teramat mahal untuk menjadi anggota legislatif inilah yang menyebabkan mereka sekurang-kurangnya harus menyediakan dana sekitar Rp 1-6 milyar. Padahal ketersediaan dana bagi mereka adalah masalah yang sangat rumit daripada bagi kalangan laki-laki. Kalangan perempuan memiliki pertimbangan yang berhati-hati dalam mengeluarkan setiap rupiah dana pemilunya. Mereka sadar

bahwa tak mungkin mengandalkan dukungan sponsor atau donatur, karena sponsor atau donatur ragu-ragu terhadap peluang keterpilihan perempuan di dalam pemilu. Dengan begitu, calon anggota legislatif laki-laki lebih banyak peluangnya mendapatkan dukungan sponsor atau donatur karena dianggap berpeluang memenangkan pemilu.

Banyak calon anggota legislatif perempuan yang tidak berani mencalonkan diri kembali pada Pemilu 2014, karena trauma atas kehilangan dana dan energi saat Pemilu 2009 sebelumnya. Walaupun mungkin keadaannya tak seburuk dampak yang diakibatkan oleh hilangnya dana, namun persoalan budaya juga ikut membayang-bayangi mereka dalam mengikuti pemilu. Adat istiadat dan norma sosial yang masih mendiskriminasi perempuan untuk terlibat dalam real politik, tampak dominan berlaku di masyarakat. Budaya ini berdampak buruk terhadap otonomi, kebebasan, dan kemandirian mereka untuk secara total menekuni politik.

Perempuan senantiasa menghadapi tembok tebal ketidakseriusan partai-partai politik dalam memenuhi afirmasi 30 persen keterwakilan perempuan yang menjadi kewajiban hukum untuk dilaksanakan (konstitusional). Partai-partai politik peserta Pemilu 2014 yang lalu, karena tidak memiliki sistem rekrutmen anggota atau kader yang mumpuni, maka merekrut perempuan secara 'instan' demi memenuhi persyaratan perundang-undangan. Mereka kurang mendukung sepenuhnya kader-kader perempuan yang loyal, berintegritas, berpengalaman, dan berkemampuan optimal dalam praktik politik. Maraknya praktik politik uang di tubuh partai-partai politik telah menumbuhkan 'budaya korup' di kalangan manusianya. Di tengah-tengah masyarakat pun membiak calo-calo suara atau mafia pemilu yang menambah parah persoalan yang harus dihadapi calon anggota legislatif perempuan

dalam setiap pemilu. Itulah mengapa sebagian besar kader perempuan di partai-partai politik akhirnya merasa enggan bahkan kecewa untuk tidak mau mencalonkan diri menjadi wakil rakyat. Suasana kebatinan ini tidaklah kondusif bagi perempuan untuk terlibat aktif dalam politik. Pada gilirannya, perempuan harus lebih meningkatkan strategi 'perjuangan'-nya guna memenangkan afirmasi 30 persen untuk keterwakilan perempuan di tingkat DPR RI, DPRD, dan kepengurusan partai politik.

Belajar dari pengalaman perempuan yang berhasil menjadi anggota legislatif pada pemilu yang lalu maupun dari mereka yang belum berhasil adalah strategi yang baik yang dapat dikerjakan oleh perempuan lainnya yang mungkin akan bertarung pada pemilu mendatang. Kebanyakan mereka ternyata mempunyai pengalaman yang menarik dalam memperjuangkan hak politiknya dan berhasil menang pada Pemilu 2014 yang lalu. Akan tetapi, pengalaman-pengalaman mereka yang menarik itu tidak secara intensif kita dokumentasikan agar dapat menjadi pembelajaran politik yang bermakna bagi perempuan lainnya.

Demokrasi, Politik Perempuan, dan Pemilu

Dalam konteks ini, apabila kita telisik pemikiran zaman Yunani Kuno, maka dapat dipahami bahwa prinsip dasar demokrasi ialah pengaturan, pembatasan, dan pengelolaan kekuasaan di kalangan raja, ningrat ataupun para bangsawan, sehingga rakyat kebanyakan (*demos*) dapat terlibat di dalamnya. Demokrasi adalah bentuk tawar-menawar (negosiasi kekuasaan) antara rakyat dengan penguasa (kerajaan) melalui kelembagaan politik tertentu ataupun dengan jalur parlementarian (masa modern). Tawar-menawar itu meliputi upeti yang harus dibayarkan, kewajiban berperang, dan jaminan keamanan terhadap diri

pribadi ketika melakukan perjalanan dari dan ke wilayah tertentu serta perlindungan terhadap hak-hak atas harta kekayaan yang dimiliki seseorang. Pada zaman moderen, makna demokrasi berkembang semakin kompleks baik dari segi 'sistem' dan 'proses' politik parlementariannya karena mencakup konstituen yang meluas, keputusan-keputusan dan pembuatan kebijakan-kebijakan publik yang terus berkembang. Akan tetapi, seluruh perkembangan tersebut tetap berpusat dalam sistem parlementarian (*Norman Schofield and Itai Sened, 2006: 1-2*).

Di Indonesia, makna demokrasi memiliki tautan historis yang panjang, karena awalnya digelar dengan adegan kolonisasi Barat awal abad 19. Sebelumnya, Indonesia berada dalam kekuasaan raja-raja, bangsawan, ningrat ataupun sistem tuan tanah. Banyak raja yang berkuasa di Indonesia (nusantara) sejak zaman pra Hindu-Budha hingga Islam. Demokrasi sebagai gagasan dan praktik kekuasaan ala Barat diperkenalkan oleh kolonial Belanda melalui politik kolonialnya maupun hasil pembelajaran para pendiri bangsa yang bersentuhan dengan peradaban Barat pada masa itu. Belanda pernah memperkenalkan dewan rakyat (*volksraad*) kepada rakyat Indonesia pada pra kemerdekaan. Semua itu merupakan proses politik yang mematangkan pandangan-pandangan orang Indonesia dalam merumuskan model demokrasi yang akan dikembangkannya kelak. Meskipun demikian, tidak ada gagasan dan praktik demokrasi yang tak berdialog atau berinteraksi dengan tradisi-tradisi kekuasaan lokal di Indonesia, sehingga dalam perjalanannya makna demokrasi pun sedikit banyak terpengaruhi oleh konteksnya, kebiasaan, dan perilaku orang Indonesia. Inilah yang disebut psikologi demokrasi di Indonesia.

Apa hubungannya demokrasi dengan politik perempuan? Makna demokrasi moderen di Barat pun makin berbobot

dibandingkan dengan konsep awalnya, sehingga di banyak negara hal itu mengalami perubahan-perubahan yang harus menyesuaikan diri terhadap kepentingan-kepentingan dan kebutuhan-kebutuhan yang ada. Salah satu sarana demokrasi adalah prinsip keterwakilan (politik representasi). Argumen yang diajukan untuk menjawab persoalan ini ialah bahwa tidak mungkin menempatkan semua orang dengan berbagai kepentingannya di suatu wadah politik pada saat yang bersamaan. Bagaimana, misalnya, mengelola kepentingan 250 juta orang Indonesia pada saat yang bersamaan? Oleh karena itu, cara yang paling masuk akal sehat dalam mengatasi persoalan itu ialah melalui 'representasi kekuasaan' dengan menunjuk dan menyepakati wakil-wakil kepentingan untuk memperjuangkan kehendak dan kebaikan bersama (*common goods*). Dengan demikian, demokrasi moderen adalah demokrasi representatif, artinya kekuasaan rakyat dikelola oleh perwakilannya di parlemen untuk kemaslahatan semua orang guna mencapai tujuan tertentu.

Representasi politik mengalami perdebatan-perdebatan ataupun perbedaan pandangan yang beragam dari waktu ke waktu. Dari perbedaan yang ada itu, salah satu rumusan yang cukup lugas menjabarkan makna representasi sebagai "kegiatan-kegiatan yang mewakili suara-suara, pandangan-pandangan, dan aspirasi-aspirasi warga negara di dalam proses pembuatan kebijakan-kebijakan publik. Representasi politik berlangsung ketika aktor-aktor politik menyuarakan, membela, menyimbolkan dan bertindak atas nama yang lainnya di arena politik. Secara umum ada empat komponen dasar dalam representasi politik, yaitu *pertama*, pihak yang mewakili (para wakil, suatu organisasi, gerakan, agen negara, dsb.); *kedua*, pihak yang diwakili (konstituen, klien, dsb.); *ketiga*, sesuatu yang diwakilkan (opini, perspektif, kepentingan, diskursus, dsb.), dan *keempat*, panggung di

mana kegiatan keterwakilan itu berlangsung (konteks politik, dsb.). Tujuan representasi politik ialah memberikan dasar legitimasi (kesahan) terhadap lembaga-lembaga demokrasi dan memberikan insentif kelembagaan bagi pemerintah untuk lebih bertanggung jawab terhadap warganya” (*Hanna Fenichel Pitkin*, 1967: 1-11).

Apabila demokrasi bergerak di atas pijakan politik representasi, sedangkan kaum perempuan adalah subjek politik dan warga negara, maka bagaimana kepentingan politik mereka diekspresikan? Pierre Bourdieu menjelaskan bahwa ketimpangan gender dalam politik muncul melalui bentuk “ketidaksadaran androsentris”. Ketidaksadaran inilah yang terdapat di belakang semua dominasi politik laki-laki. Bentuk-bentuk dominasi simbolis dan segala contoh selama ini yang bekerja secara tak kasat mata dan seakan bersifat alamiah, kemudian mewujud dalam bentuk kekerasan simbolis. Dengan demikian, kepentingan politik perempuan pun dapat terjatuh kedalam bentuk ketidaksadaran itu (*Jeremy F. Lane*, 2006: 101-103). Perempuan harus menyadari bahwa politik representasi bukanlah jaminan bahwa kepentingan mereka akan terwakilkan begitu saja tanpa tindakan afirmasi dan kendali yang ketat untuk mengelola seluruh sumberdaya politik yang tersedia.

Demokrasi dan politik perempuan dalam dunia moderen adalah entitas yang sesungguhnya memiliki keterkaitan satu sama lain, meskipun di zaman Yunani Kuno, perempuan, anak-anak, dan kaum budak tidak memiliki ruang politik sebagai ‘warga polis’ (negara-kota). Akan tetapi dalam dunia moderen, hak politik menjadi hak asasi manusia yang fundamental yang berlaku universal, sehingga kaum perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Tak sekedar pengakuan terhadap adanya hak politik sebagai hak asasi manusia, kaum perempuan pun mendapat tantangan

penuh untuk berpartisipasi dalam proses-proses politik yang ada. Kaum feminis gelombang pertama di Eropa dan Amerika awal abad 19 misalnya, mereka mengkritisi pentingnya hak memilih bagi kaum perempuan, selain hak kebebasan dan pendidikan, yang sebelumnya tidak pernah ada. Di Inggris pada abad 19, kalangan perempuan yang boleh memilih sangat dibatasi, yaitu hanya mereka yang berpendidikan, priyayi, ningrat, dan mampu menunjukkan harta atau kekayaan pribadi (misalnya, rumah). Bagaimana dengan kalangan perempuan budak dan kelas bawah? Tentu hak memilih itu hanyalah angin surga (*Barbara Arneil*, 1999: 1-9).

Kaum feminis gelombang kedua mendorong agar hak politik kaum perempuan kian urgen dan mendasar diperjuangkan, selain hak-hak asasi lainnya, dengan semboyan mereka yang sangat terkenal: “yang personal adalah politis”. Dalam gerakan demokrasi, wacana feminis ini menjadi diskursus publik yang sangat menarik yang secara global memunculkan tanggapan-tanggapan yang kritis. Kepentingan demikian pada gilirannya diakomodir di dalam Deklarasi HAM universal yang selanjutnya dijabarkan dalam konvensi hak sipil dan politik, CEDAW⁵, Beijing+20⁶, dan konvensi lainnya. Dalam perjalanannya, beberapa negara bahkan memperluas konvensi tersebut kedalam konteks nasional atau regional

5 *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW), Part II, Article 7: “States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in the political and public life of the country and, in particular, shall ensure to women, on equal terms with men, the right: (a) To vote in all election and public referenda and to be eligible for election to all publicly elected bodies; (b) To participate in the formulation of government policy and the implementation there of and to hold public office and perform all public functions at all levels of government; (c) To participate in non-governmental organizations and associations concerned with the public and political life of the country.

6 *Beijing Declaration and Platform for Action*, Part G. Women in power and decision-making, article 181-195.

masing-masing, misalnya di Uni Eropah, Amerika, Afrika, dan ASEAN.

Berbagai konvensi internasional tersebut secara moral dan legal mengikat negara-negara pihak untuk mengkonkritisasi isi konvensi kedalam hukum-hukum nasional di masing-masing negara pihak untuk diterapkan secara konsisten dan konsekuen. Meskipun sanksi tegas secara legal tidak dikenakan kepada negara-negara pihak yang melanggar konvensi tersebut, namun secara kewajiban moral dan etis akan tercela dalam tata pergaulan global.

Demokrasi (politik, ekonomi, hukum, dsb.) hanya mungkin diwujudkan melalui proses-prosesnya. Proses demokrasi itu adalah pemilihan umum (*general election*). Pemilu adalah wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat. Corak dan prosedur pemilihan umum berbeda-beda dari satu negara ke negara lainnya. Ada negara yang memusatkan perhatiannya kepada dimensi 'substansi' demokrasi, namun ada pula yang tertarik kepada dimensi 'prosedur'-nya. Dalam zaman neo-liberalisme sekarang, karena negara dikurangi fungsi dan perannya akibat dominasi pasar bebas yang kuat (*less state*), maka dimensi substansi terabaikan. Secara pragmatis (*American style*) pasar lebih menitik-beratkan dimensi procedural daripada substansi, sehingga pengembangan demokrasi lebih banyak ke arah itu. Muncul perdebatan publik mengenai bagaimana memadukan dimensi substansi dengan prosedural karena keduanya bagai dua sisi dari mata uang? Dualisme cara berpikir muncul akibat paradigma 'sarana-tujuan' di zaman moderen (*ends-means paradigm*).

Demokrasi yang substansial setidaknya dapat kita temui di sila keempat Pancasila. Perwujudannya melalui praktik-praktik politik yang berjalan dinamis dari waktu ke waktu, dari rezim ke rezim. Dengan menguatnya paradigma sarana-

tujuan tersebut, pasca reformasi 1998 Indonesia secara *vulgar* menerapkan demokrasi prosedural. Akibatnya, negara dan rakyat berfokus kepada tatacara, teknik, mekanisme, aturan, dan yang terkait dengannya. Orang menjadi bersifat praktis dan pragmatis, sedangkan dimensi etis dan moral kurang mendapatkan tempat dalam cara berpikir dan bertindak menjalankan demokrasi. Asalkan sesuai dengan tatacara atau prosedur, maka semua hal sudah benar, meskipun esensinya belum tentu benar. Kebenarannya menjadi kebenaran prosedural, bukan kebenaran substantif. Demokrasi Pancasila mensyaratkan adanya proses deliberasi (musyawarah untuk mufakat, dialog, bersehati, gotong royong, dsb.) dalam rangka memperdalam makna demokrasi (*deepening democracy*). Dengan penekanan terhadap tatacara semata, maka proses deliberasi untuk mencapai keadilan publik akan tersingkirkan. Kita akan kehilangan suasana kebatinan bahwa hidup adalah kebaikan tertinggi (*life as the highest good*) (Hannah Arendt, 1958: 313).

Pemilu adalah wujud kehendak dan kedaulatan rakyat dalam berbangsa dan bernegara, yang dinyatakan secara tegas dalam UUD 1945 (amandemen keempat) pada BAB VIIB, Pasal 22E. Sistem memilih dan mengganti penyelenggara negara di lembaga eksekutif maupun legislatif, di tingkat nasional maupun daerah, melalui pelaksanaan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, transparan, dan akuntabel. Pemilu adalah mekanisme di dalam demokrasi yang kita anut saat ini. Dengan penjelasan tersebut, kaitan erat antara demokrasi, politik perempuan, dan pemilu tidak dapat dipisahkan. Demokrasi moderen memungkinkan perempuan menguji makna politiknya melalui pemilu. Sebaliknya, demokrasi moderen menjadi mendalam maknanya ketika politik perempuan terwujudkan di dalamnya.

Kebijakan Negara dan Tindakan Afirmasi

Pilar demokrasi adalah representasi politik yang dilaksanakan oleh partai politik melalui mekanisme perwakilan maupun oleh non partai politik berdasarkan representasi substantif. Sistem pemilu di Indonesia untuk memilih anggota DPR RI, DPRD, DPD, setidaknya harus memenuhi indikator-indikator representasi⁷:

1. Keseimbangan keterwakilan penduduk (DPR) dengan keterwakilan daerah (DPD) untuk memelihara integrasi wilayah dan nasional demi tercapainya keputusan politik nasional yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, alokasi kursi dan pembentukan daerah pemilihan (dapil) harus berdasarkan keseimbangan tersebut.
2. Representasi politik secara kolektif melalui partai politik untuk kepentingan bangsa seimbang dengan representasi politik secara individual oleh kader partai politik untuk kepentingan konstituen.
3. Keseimbangan representasi substantif (ide, gagasan) dengan representasi deskriptif (aspirasi dan kepentingan suatu kelompok tertentu). Misalnya keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga (DPR RI, DPRD, DPD), meskipun masih di atas kertas kebijakan. Diskusi mengenai representasi substansi dan deskriptif terus berlangsung, umpamanya apakah aspirasi dan kepentingan perempuan hanya dapat diwakilkan sejatinya oleh perempuan atau dapat dilaksanakan oleh laki-laki?
4. Keseimbangan keterwakilan berbagai unsur masyarakat dengan akuntabilitas wakil rakyat kepada konstituen.

⁷ Kemitraan, *Merancang Sistem Politik Demokratis: Menuju Pemerintahan Presidensial Yang Efektif*, 2011, hlm. 14-16.

5. Keseimbangan antara metode 'delegasi' dengan metode 'mandat' yang diemban oleh wakil rakyat terhadap kepentingan dan preferensi konstituennya. Sebagai delegasi, maka wakil rakyat harus senantiasa berkonsultasi dengan konstituennya dalam pembuatan keputusannya yang menyangkut kebijakan publik yang adil, sedangkan sebagai penerima mandat, mereka tidak perlu berkonsultasi dengan konstituennya dalam menetapkan kebijakan publik, namun hanya mempertanggungjawabkannya pada akhir masa jabatan mereka.
6. Keseimbangan dalam pengambilan keputusan di DPR RI, DPRD, DPD, tidak hanya membuka kesempatan deliberasi yang cukup luas bagi para anggota setiap fraksi dibawah koordinasi fraksi, namun juga kesempatan luas bagi partisipasi publik, khususnya berbagai organisasi masyarakat sipil, dalam proses pembuatan keputusan.

Dapat kita lihat pada tabel, bahwa angka keterwakilan perempuan di DPR RI sejak Pemilu 1955 hingga Pemilu 2014, menunjukkan urgensinya afirmasi 30 persen dilaksanakan secara konsisten.

Pemilu	Total Anggota DPR RI	Total Anggota Perempuan	Persentase (%)
1955	272	17	6,25
1971	460	36	7,83
1977	460	29	6,30
1982	460	39	8,48
1987	500	65	13
1992	500	62	12,50

1997	500	54	10,80
1999	500	45	9,00
2004	550	61	11,9
2009	560	101	17,86
2014	560	97	17

Angka keterwakilan perempuan yang ada itu belum signifikan untuk mengagregasi kepentingan mereka bila dicermati dari sisi jumlah pemilih perempuan secara nasional, yang angkanya terus bertumbuh dari pemilu ke pemilu. Jika dikembalikan kepada makna demokrasi sebagai keterjaminan keterwakilan semua kelompok masyarakat agar terwadahi kepentingannya, maka kenyataannya tidak demikian. Angka keterwakilan yang tampak itu belum mencerminkan angka kritis (*critical mass*) 30 persen.

Tindakan afirmasi yang didorong oleh gerakan perempuan⁸ baru mendapatkan respon dari negara pada Pemilu 1999. Tanggapan tersebut dituangkan dalam bentuk tindakan khusus sementara⁹ 30 persen keterwakilan perempuan di

8 Gerakan perempuan ini diwakili oleh berbagai organisasi perempuan yang memperjuangkan hak-hak perempuan terutama hak politik perempuan dan juga organisasi masyarakat sipil lainnya yang mendorong keterbukaan publik terhadap perempuan yang berpolitik, selain itu, mendesak pemerintahan reformasi mengubah perundangan-undangan atau aturan-aturan hukum yang membatasi perempuan dalam berpolitik.

9 Ketentuan mengenai tindakan khusus sementara (*affirmative action*) pasca Reformasi 1998 berupa kuota 30 persen keterwakilan perempuan di dalam daftar calon legislatif. Selanjutnya, Pemilu 2004 aksi afirmasi ini diakomodasi di dalam UU No.31 Tahun 2002 tentang Partai Politik dan UU No.12 Tahun 2003 tentang Pemilu. Pemilu 2009, kebijakan tersebut diatur di dalam UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan UU No.10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR RI dan DPRD. UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik diubah melalui UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik lebih menegaskan lagi bahwa pendirian dan pembentukan partai politik menyertakan 30 persen keterwakilan perempuan, demikian pula di tingkat kepengurusan partai politik di provinsi dan kabupaten/kota harus menyertakan 30 persen keterwakilan perempuan.

DPR yang kemudian hari dipersyaratkan kepada partai-partai politik agar memberlakukan kebijakan tersebut di ranah kepengurusan partai. Persoalannya adalah bahwa kebijakan negara atau publik yang dituangkan dalam bentuk UU Pemilu dan UU Parpol itu tidak serta-merta memicu tindak langkah partai-partai politik mengadopsi dan menerapkannya secara konsisten. Banyak terjadi tarik-ulur di internal partai-partai politik untuk memberlakukan kewajiban hukum tersebut dengan berbagai alasan kepentingan. Kebijakan negara yang minimal itu, apabila tidak disertai sanksi hukum yang tegas terhadap partai-partai politik, pasti akan merugikan kaum perempuan dalam berpolitik.

Banyak orang mengkhawatirkan demokrasi perwakilan moderen karena ketidak-mampuannya mewakili kelompok-kelompok marginal, seperti kaum perempuan. Berbagai kepentingan yang dilegislati oleh parlemen dalam bentuk undang-undang, anggaran, dan pengawasan terhadap eksekutif, kerap bias politik maskulin. Maka semua itu akhirnya takkan menjawab kebutuhan kaum perempuan. Secara ideal, kepentingan dan pengalaman hidup perempuan mampu diperjuangkan oleh mereka sendiri (*politics of presence*), meskipun secara teoritis hal itu mungkin diaspirasikan oleh kalangan laki-laki (*politics of ideas*). Akan tetapi, teori feminis tertentu berpandangan bahwa laki-laki tidak dapat menyuarakan atau menarasikan kepentingan perempuan, karena mereka tidak mengerti dan memahami 'dunia hidup' (*Lebenswelt*) perempuan.

Dengan kebijakan negara yang mengafirmasi politik kehadiran perempuan melalui UU, sebagaimana pula termaktub dalam UUD 1945 (amandemen keempat), maka diharapkan kehadiran perempuan di DPR RI, DPRD, dan di partai-partai politik bertumbuh secara signifikan, sehingga angka kritis tersebut dapat dilampaui. Politik kehadiran ini

harus dimaknai dengan berkembangnya dimensi kualitatif dengan perspektif feminis yang lebih baik dan praktik politik yang adil gender yang dipertanggungjawabkan oleh anggota legislatif perempuan.

Selama ini muncul kesan di publik bahwa pertumbuhan jumlah anggota legislatif perempuan di parlemen pusat maupun daerah tidak otomatis menjawab peningkatan kualitas politiknya. Masyarakat perempuan mengkritisi bahwa politik anggota legislatif perempuan di parlemen sangat 'maskulin' dan tidak memperjuangkan hak-hak perempuan secara spesifik. Mereka tidak menjalankan 'politik keberbedaan' (*politics of difference*) sebagai wakil masyarakat perempuan. Mengapa hal itu terjadi? Karena kemungkinan besar mereka yang duduk di parlemen lahir dalam arus pusaran 'politik maskulin' partainya. Nilai-nilai dan budaya organisasi partai merekalah yang menggembleng mereka menjadi seperti itu, ditambah dengan kondisi masyarakat yang ada. Bila perspektif dan tindakan politik mereka di parlemen kurang mewakili kepentingan perempuan, maka bagaimana publik perempuan dapat menyokong mereka?

Kebijakan negara dalam mengafirmasi kehadiran perempuan di parlemen dan partai-partai politik yang ada hendaknya disertai dengan perubahan-perubahan budaya organisasi partai-partai politik yang lebih adil gender serta penyempurnaan sistem pemilu yang ada sekarang, yang lebih ramah perempuan, terbuka, akuntabel, sehingga memungkinkan perempuan secara lebih luas dapat berkiprah di dalamnya. Selama ini, uji coba sistem pemilu dengan berbagai variabel teknisnya malah menghambat perempuan masuk ke dunia politik. Belum lagi soal runyamnya mekanisme rekrutan, politik uang, dan ongkos pemilu yang mahal, semua itu meminggirkan perempuan

dari arena politik. Dengan kuatnya paradigma pasar bebas dalam sistem pemilu kita, maka eksistensi politik perempuan dalam arena demokrasi makin terancam.

Partai Politik dan Rekrutmen Kader Perempuan

Kita pahami bersama bahwa partai politik adalah wahana demokrasi yang penting, karena melaluinya representasi kekuasaan publik diejawantahkan di parlemen dalam rangka mencapai visi bersama bangsa. Penyelenggaraan representasi tersebut dipandu oleh aturan-aturan, mekanisme, dan prinsip tertentu. Dalam UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR RI, DPRD, dan DPD (Bab III, Bagian Kesatu, Pasal 7-8) dinyatakan, bahwa peserta pemilu adalah partai politik. Partai politiklah yang mendaftarkan calon anggota legislatif perempuannya ke KPU/KPUD. Tak semua partai politik dilengkapi dengan sistem rekrutmen yang handal dengan tim seleksi yang terdiri atas perempuan pimpinan partai. Bisa saja perekrutan calon anggota legislatif perempuan berlangsung tanpa kriteria yang jelas, tidak transparan, dan seterusnya. Dalam konteks afirmasi 30 persen keterwakilan perempuan, jelas tidak semua partai politik peserta Pemilu 2014 yang lalu memuat kebijakan itu di dalam AD/ART-nya. Kalaupun mungkin dimuat di dalam AD/ART-nya, namun belum menjamin bahwa hal itu dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan konsisten. Padahal kebijakan tersebut amat penting bagi partai-partai politik guna menjamin bahwa rekrutmen calon anggota legislatif perempuannya berjalan secara berkesinambungan.¹⁰

Dari pengalaman-pengalaman perempuan dari beberapa partai politik yang tak berhasil terpilih pada Pemilu 2014

10 Kalyanamitra, *Focus Group Discussion*, 16 September 2015.

yang lalu¹¹ menjelaskan, bahwa di partai mereka tidak ada tim seleksi yang terdiri atas pengurus atau pimpinan perempuan partai yang berpihak kepada afirmasi 30 persen keterwakilan perempuan. Disinyalir bahwa elite pimpinan partai politik mereka sangat berkuasa dalam menentukan dan mendominasi keputusan mengenai 'siapa' yang akan menjadi calon anggota legislatif perempuan. Dalam kasus tertentu, beberapa orang calon didukung oleh elite pimpinan partainya masing-masing, namun dalam perjalanannya, mereka mesti berjuang mengalahkan calon anggota legislatif laki-laki ataupun calon anggota legislatif perempuan yang lebih senior yang memiliki kedekatan dengan elite pimpinan partai. Walaupun dukungan seperti bendera partai, spanduk, umbul-umbul, dana dalam jumlah tertentu diberikan oleh partai politik mereka, namun hal dalam penggalangan suara pemilih, banyak dari mereka yang kurang didukung. Mesin-mesin partai mereka di tingkat lapangan ternyata tidak berjalan optimal dalam mendulang suara. Bahkan, mesin-mesin partai lebih mendukung mereka yang lebih banyak menyetorkan dana ke partai atau diharapkan mampu mendongkrak perolehan suara.

Dengan sistem pemilu yang sekarang ada yang mengandalkan besaran perolehan suara, maka kompetisi di kalangan calon anggota legislatif perempuan di dalam masing-masing partai politik bertambah sengit. Belum lagi harus menghadapi para pesaing di luar partai-partai mereka. Konflik ini menjadi salah satu faktor mengapa penggalangan suara untuk calon anggota legislatif perempuan di daerah pemilihan tidak optimal seperti yang diharapkan. Ditambah dengan faktor kehendak bebas masyarakat pemilih dalam menentukan pilihannya, maka sempurnalah kesulitan yang mereka hadapi.

11 Kalyanamitra, *ibid.*

Dengan UU Pemilu yang mensyaratkan ambang batas suara tiap partai politik yang semakin tinggi agar lolos di parlemen, maka banyak partai politik yang mengalami penggerusan perolehan suara mereka, karena terdistribusi ke banyak partai. Akibatnya ialah, bahwa penggalangan suara untuk calon anggota legislatif perempuan kurang diperhitungkan oleh partai politik mereka, karena dipandang kurang menguntungkan dalam mendongkrak suara partai.

Calon anggota legislatif perempuan juga menghadapi gempuran politik uang di masyarakat pemilih. Banyak calo suara atau makelar pemilu bermunculan di masyarakat saat menjelang pemilu. Mereka menggalang suara pemilih dengan membayar agar memilih calon tertentu. Politik uang yang marak di internal partai politik dan di masyarakat dipicu oleh sistem politik yang transaksional dan korup. Partai-partai politik gagal dalam melahirkan kader-kader perempuan yang handal yang mampu memimpin partai dan menjadi wakil rakyat di parlemen, karena tidak tersedia sistem rekrutmen yang profesional. Partai terkait sangat bergantung pada dan ditentukan oleh figur-figur laki-laki yang itu-itu saja (dinasti). Ini memperlihatkan betapa tidak terjadi regenerasi kepemimpinan yang mumpuni di partai-partai politik yang akhirnya berimbas kepada tidak bergantinya wajah-wajah lama di pucuk kepemimpinan politik nasional di Indonesia.

Problem konkrit yang dihadapi oleh calon anggota legislatif perempuan (pemula) di internal partai politik masing-masing misalnya komitmen kosong pimpinan partai politik dan kewajiban petahana maju kembali di setiap pemilu. Di tingkat lapangan, calon legislatif perempuan berhadapan dengan masyarakat pemilih yang mulai terbiasa dengan politik uang (calo-calo suara), pesaing dari partai-partai lain,

aparatus pemerintahan setempat yang terlibat dalam pemilu (KPUD, aparat militer, dll.), keragaman tingkat pendidikan pemilih serta konteks budaya, etnis, agama yang beraneka. Di tingkat lapangan¹², semua kesiapan calon anggota legislatif perempuan tidak berbanding lurus dengan perolehan hasil suaranya. Semua teori, pembekalan, konsultasi, dan lainnya yang didapatkan, akhirnya harus pasrah terhadap keputusan masyarakat pemilih dan pihak-pihak yang mungkin tidak mendukung kemenangan perempuan. Inilah ironi di arena real politik.

Kalangan perempuan akan bernafas lega apabila elite pimpinan partai politik mereka berkesadaran penuh mendukung dengan komitmen yang tinggi melalui praktik-praktik yang jelas seperti membuat AD/ART yang memuat kebijakan afirmasi 30 persen keterwakilan perempuan di dalam pencalonan anggota legislatif dan di kepengurusan partai politik. Mereka dapat membentuk tim seleksi yang terdiri atas pimpinan perempuan partai yang senior yang paham mengenai perjuangan hak-hak perempuan di Indonesia. Mereka dapat menentukan daerah pemilihan yang strategis untuk kandidat perempuannya, memberikan dukungan logistik, dan mengerahkan mesin-mesin partai agar bekerja optimal untuk memenangkan suara serta solidaritas yang tinggi di antara sesama calon anggota legislatif perempuan dalam memenangkan pemilu (*sisterhood*).

Partai-partai politik harus mempersiapkan kader-kader perempuannya melalui pembekalan, pelatihan, dan pendidikan politik untuk menjadi legislator yang handal. Pemahaman yang baik mengenai demokrasi secara umum, politik, budaya, ekonomi, sosial, isu-isu perempuan, dan

12 Kalyanamitra, *ibid*.

sebagainya, harus dimiliki calon legislator. Selain itu, mereka harus dipersiapkan dengan kemampuan praktis untuk berargumentasi, menulis, membuat UU, menganalisa anggaran, berkomunikasi, berdialog, bernegosiasi, lobi, dan lainnya. Kemampuan-kemampuan standar itu mesti mereka kuasai dengan baik, sehingga melapangkan jalan mereka dalam kerja-kerja politiknya. Partai-partai politik pun dapat menyediakan konsultan-konsultan yang mumpuni untuk menyurvei tingkat elektabilitas calon anggota legislatif perempuan untuk mempermudah langkah-langkah antisipasi dan strategi pemenangannya.

BAGIAN KEDUA
CALON ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN
YANG TERPILIH

PROFIL ANGGOTA DPR RI



ERMALENA MUSLIM HASBULLAH

ERMALENA MUSLIM HASBULLAH lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, 22 Juli 1957. Saat ini, dia menjadi anggota DPR RI untuk periode 2014-2019 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pendidikan terakhir yang diraihinya adalah Sarjana Farmasi dari Universitas Pancasila Jakarta. Ermalena pernah menjadi Staf Khusus Suryadharma Ali, ketika menjabat sebagai Menteri Koperasi dan UKM (2004-2009) dan Menteri Agama (2009-2014).

Pengalaman Berorganisasi

Sebelum terjun ke dunia politik, sejak kuliah Ermalena aktif berorganisasi dan pernah bergabung di beberapa organisasi kepemudaan. Dia pernah menjadi anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Fatayat NU, dan Muslimat NU (sayap perempuan Nahdlatul Ulama). Dia terlibat di Fatayat NU sejak 1970-an.

Pengalaman Berpolitik

Ermalena terlibat di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) karena diajak temannya. Dia memulai karirnya di partai ini sejak tahun 1995 dan pertama kali menjadi terpilih menjadi anggota legislatif pada 1997 dari daerah pemilihan Lampung. Dia juga beberapa kali menduduki jabatan di kepengurusan pusat sebagai Wakil Sekjen dan Ketua Bidang rekrutmen, pelatihan, dan kaderisasi di DPP PPP. Saat ini, dia menjadi salah satu dari tiga Wakil Ketua Umum di DPP PPP.

Menurutnya, rekrutmen di PPP dilakukan oleh anggota partai yang sudah lama dengan mengajak calon anggota yang baru. Tidak ada pemungutan uang bagi calon anggota partai yang baru ketika masuk ke PPP. Manakala calon anggota dewan berhasil menjadi anggota dewan, maka dia dapat berkontribusi uang demi keberlangsungan hidup partainya.

Menurut Ermalena, mekanisme rekrutmen PPP adalah mengajak perempuan yang menjadi anggota NU atau Fatayat NU masuk menjadi anggota partai, selain melalui organisasi kemasyarakatan dan kemahasiswaan. Tidak ada diskriminasi terhadap perempuan di dalam PPP, karena mereka dapat menjadi pengurus partai dan mencalonkan diri menjadi anggota dewan. PPP mendukung agar perempuan di lingkungan partai maju dan berkembang dengan afirmasi 30 persen keterwakilan perempuan yang telah tercantum di AD/ART. PPP memerintahkan agar di tiap tingkatan kepemimpinan harus diperhatikan kesetaraan dan keadilan gender berdasarkan kualitas sumber daya manusia. Dalam ketentuan komposisi Pengurus Harian di berbagai tingkatan, terdapat perintah afirmatif agar minimal 30 persen terdiri atas perempuan. Selain Pengurus Harian DPP berjumlah sekurang-kurangnya 40 orang dan sebanyak-banyaknya 55 orang, dengan minimal 30 persen dari jumlah keseluruhan itu terdiri atas perempuan.

Ketentuan minimal 30 persen anggota perempuan harus ada dalam pengaturan komposisi Pengurus Harian DPW, DPC, PAC, dan PR. Dalam komposisi Mahkamah Partai yang memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara perselisihan di internal partai yang bersifat final dan mengikat, terdapat perintah afirmatif agar 2 dari 9 anggota Mahkamah Partai terdiri atas perempuan. Sekarang telah terbentuk susunan pengurus yang baru di Dewan Pengurus Pusat PPP masa bakti 2011-2015. Kuota 30 persen perempuan dalam jajaran kepengurusan partai telah dipenuhi oleh PPP. Dari 55 orang jumlah pengurus di DPP, terdapat 17 orang perempuan. Ermalena dalam periode DPP tersebut menjadi salah satu ketuanya. Pemilu 2014, dari 77 dapil yang ada, maka PPP menempatkan calon anggota legislatif perempuan bernomor urut 1 di 22 dapilnya.

Pengalaman Pemilu 2014

Ermalena berpendapat bahwa demokrasi di Indonesia sudah berlangsung cukup baik. Motivasi Ermalena mencalonkan diri menjadi anggota dewan adalah ingin berkontribusi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Ketika menjadi calon anggota legislatif, dia sudah memahami tentang fungsi anggota DPR yaitu membuat UU, anggaran dan pengawasan. Dia juga cukup paham mengenai daerah pemilihan dan arti nomor urut dalam pemilu.

Tentang perjuangan hak-hak perempuan, dia memahami bahwa banyak hak-hak perempuan yang belum setara dengan laki-laki, seperti hak kesehatan, politik, pendidikan dan lainnya. Modal sosial yang dimilikinya adalah dukungan keluarganya, anggota Fatayat NU, tokoh agama, dan tokoh masyarakat di daerah pemilihannya. Dia tidak mengalami hambatan budaya dan agama dari masyarakat pemilihnya. Terkait dengan dana pemilu, dia mengakui tidak memiliki banyak uang. Dia tidak mau menyebutkan berapa jumlah dana yang dikeluarkan dari kantong pribadinya untuk kampanye yang lalu yang memerlukan dana yang cukup besar jumlahnya. Dia mempergunakan uang pribadi yang dimilikinya untuk berkampanye dan tak meminjam dari pihak lain ataupun menjual aset yang dimilikinya.

Ermalena melakukan proses pencalonan, seperti pendaftaran, penentuan daerah pemilihan, kampanye, dan penghitungan suara. Menurutnya, peran partainya sangat penting dalam mendukung dirinya menjadi anggota DPR RI periode 2014-2019. Partai menempatkan dirinya di nomor urut 1 di daerah pemilihannya, yaitu *Nusa Tenggara Barat* (Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Dompu, Bima, Sumbawa Barat, Lombok Utara, Kota Matram, Kota Bima).

Ermalena tidak memiliki tim sukses atau kemenangan, relawan ataupun posko kemenangan, karena keterbatasan dana yang dihadapinya. Dia hanya mengandalkan saksi dari partainya untuk memantau proses penghitungan suara di daerah pemilihannya. Dia menang menjadi anggota DPR RI periode 2014-2019 dengan perolehan suara sebesar 49.314. Dia satu-satunya wakil perempuan dari daerah pemilihan NTB. Dia menjadi Wakil Ketua Komisi IX pada periode 2014-2019, yang membidangi kesehatan, tenaga kerja, dan kependudukan.

Semasa pemilu, Ermalena turun langsung ke daerah pemilihannya di NTB untuk berkenalan dengan masyarakat, tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat melalui forum-forum pengajian Fatayat NU. Dia tidak memiliki visi-misi khusus karena tergantung kepada kebutuhan masyarakat yang dikunjunginya. Alat kampanye yang dipergunakannya ialah poster, teve lokal, dan media sosial. Dia tidak membagikan uang kepada masyarakat di daerah pemilihannya. Kendala yang dihadapinya ialah kekurangan dana untuk berkampanye. Dia hanya mengandalkan massa Fatayat NU guna berkampanye untuk dirinya. Untuk menjaga kepercayaan konstituennya, maka hingga kini dia rajin turun ke dapilnya dua minggu sekali.

Dia tidak memiliki cara khusus untuk memastikan bahwa suaranya tidak dicuri, karena tidak mampu membayar relawan ataupun saksi guna memantaunya. Dia hanya mengandalkan saksi dari PPP yang ditugaskan mengawasi proses penghitungan suara di tiap daerah pemilihan.

Ermalena menyadari bahwa dasar hukum pemilu adalah UU Pemilu. KPU membuat aturan pelaksanaan kampanye untuk partai-partai politik. Peran KPU dan KPUD hanya sebatas menerima pendaftaran partai-partai politik sebagai peserta

pemilu dan membuat aturan-aturan main pemilu. Apabila ada partai politik yang tidak memenuhi kuota 30 persen calon anggota legislatif perempuan, maka KPU dan KPUD tak akan meloloskan partai yang bersangkutan. Hal ini adalah bentuk sanksi yang diterapkan oleh KPU dan KPUD.

Menurut Ermalena, tidak ada peran yang berarti dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KPPA) yang lalu dalam mendorong kemenangan calon anggota legislatif perempuan pada Pemilu 2014 lalu serta kurang berkoordinasi dengan anggota dewan perempuan.



ERMA SURYANI RANIK

ERMA SURYANI RANIK lahir di Ketapang, Pontianak, Kalimantan Barat, 14 Mei 1976. Saat ini, dia menjadi anggota DPR RI untuk periode 2014-2019 dari Partai Demokrat (PD). Pendidikan terakhir yang diraihinya adalah Sarjana Hukum dari Universitas Tanjung Pura Pontianak. Dia pernah menjabat sebagai anggota DPD RI periode 2009-2014.

Pengalaman Berorganisasi

Erma Suryani Ranik atau yang akrab dipanggil Erma Ranik mengatakan bahwa ketika mahasiswa dia tak pernah berorganisasi. Usai kuliah, dia bekerja menjadi wartawan. Dia terlibat dalam Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI). Saat itu, AJI adalah organisasi yang baru berdiri. Tak satu pun organisasi yang dia ikuti secara serius. Dia pernah membantu Aliansi Masyarakat Adat (AMAN), namun hal itu dilakukannya secara sukarela. Dia memiliki teman di AMAN Kalimantan Barat dan tidak memiliki orang yang mengurus medianya. Akhirnya, dia membantu organisasi tersebut. AMAN Kalimantan Barat kala itu baru beroperasi. Dia menjabat Kepala Divisi dan Propaganda di AMAN, karena temannya itu membaca buku tentang dahsyatnya divisi dan propaganda Nazi. Itu saja organisasi yang dia ikuti. Setelah itu, dia menjadi wartawan sekitar empat tahun tiga bulan di *Majalah Kalimantan Review*. Maret 2003, Erma kemudian berhenti dan menjadi pekerja *freelance*. Selama 3 bulan, ia sempat menjadi peneliti Konflik antara Dayak Tionghoa di Kalimantan Barat pada periode 1967-1969 untuk Perkumpulan Bantuan Hukum dan HAM Kalimantan Barat.

Dalam masa itu pula, pada Mei-Juli 2003, dia berhasil lolos ke Inggris. Ketika itu, Kementerian Pembangunan Internasional Inggris (DFID) membuka kesempatan magang dan dia lolos untuk magang di Inggris selama tiga bulan. Beberapa kali dia mengikuti konferensi di *National University of Singapore*.

Dia memperoleh kerja secara tetap pada Januari 2004 di *Common Ground* sebagai *Field Officer* program pemilu.

Pengalaman Berpolitik

Awal tahun 2000, Yayasan Pancur Kasih sedang tinggitingginya menaruh perhatian terhadap politik. Beberapa Petinggi Yayasan ini memilih bergabung dengan Partai Demokrasi Kasih Bangsa (PDKB). Erma Ranik diminta bergabung dengan partai tersebut. Dia dibujuk oleh seorang petinggi PDKB, meskipun Erma tak bersedia. ketua Yayasan Pancur Kasih A.R. Mecer tetap memintanya terlibat dalam politik. Bahkan ketua Yayasan menunggunya datang ke kantor untuk membujuk Erma. Sebagai editor, biasanya dia datang jam 11.00 wib. Masa itu dia masih muda, suka memakai sendal dan kaos. Petinggi partai yang datang membujuknya untuk masuk ke PDKB, namun Erma menolak. Petinggi Yayasan menjamin Erma tetap menerima gaji meskipun menjadi anggota partai politik, namun dia tetap menolaknya. Menurutnya, saat itu ia merasa tak berbakat di partai politik. Dia lebih suka menjadi wartawan.

Ketika tahun 2009 dia menjadi anggota DPD RI, hal itu hanyalah kecelakaan sejarah, menurutnya. Kala itu ia bekerja sebagai Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat untuk EC-Indonesia FLEGT *Support Project*. Suatu hari ia bertemu dengan masyarakat di wilayah perbatasan di Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat. Masyarakat mengeluhkan soal pembangunan di wilayah perbatasan. Saat itu, Erma menyatakan bahwa masyarakat harusnya menyampaikan keluhannya kepada wakil-wakil mereka baik di parlemen lokal maupun nasional. “Bu Erma, kita ada empat orang anggota DPD RI dari Kalimantan Barat, apa kerjanya mereka itu ?” tanya Pak Unja, tokoh masyarakat dari kampung Ukit-ukit. Erma saat itu tertegun dan tak bisa

menjawab. Sejak itu, ia bertekad mencari tahu tentang DPD RI. Setelah mencari tahu tentang DPD RI, ia berpikir bahwa mungkin ada bagusnya, ia mencalonkan diri sebagai anggota DPD RI. Ketika ia berdiskusi dengan orang dekatnya, maka adiknya yang pertama kali menyatakan ketidak-setujuannya. Karena, menurut adiknya, Erma tidak berbakat menjadi politisi. “Terlalu terus terang. Yang ada di kepalanya, itu yang diungkapkannya. Kalau yakin sesuatu susah bergeser dari pendapatnya. Ndak cocok di politik,” kata Rencana Suryadi Ranik, adiknya.

Bukan hanya adiknya, temannya juga mengkhawatirkan langkahnya ke politik. Salah satu kelemahannya, menurut temannya, adalah suka mencari penyakit. Sebagai tenaga ahli EC-Indonesia FLEGT *Support Project*, dia bekerja dengan gaji belasan juta rupiah. Baginya yang hidup di Pontianak, gaji sebesar itu tentu cukup besar. Belum lagi ditambah dengan uang lapangan. Tidak perlu pusing dengan banyak hal. Cukuplah hal itu bagi dirinya. Teman Erma bertanya, “Apa sebenarnya yang kau cari dengan ikut pemilu? Ngabiskan duit kau jak!” Erma menjawab, “Aku tidak mencari apa-apa”. Dia hanya ingin menguji dirinya.

Namun semua sahabatnya membantu saat Erma mencalonkan diri sebagai anggota DPD RI. “Saya dibantu mengumpulkan KTP sebagai prasyarat mencalonkan diri. Kami berhasil mengumpulkan 3333 KTP, lebih banyak dari persyaratan minimal yakni 2000 KTP,” kenangnya. Erma juga mengingat, bahwa dia dibuatkan video gratis untuk kampanye. Teman-temannya bahkan membantu memperbanyak sendiri dan menyebarkannya di kampung-kampung di wilayah kerja mereka. Mengetahui minimnya pengetahuannya akan politik, Erma mengikuti seminar yang diselenggarakan oleh Majalah Tempo mengenai bagaimana memenangkan Pemilu, pada Desember 2008. Pembicara pada seminar tersebut antara

lain Denny J.A., Ipang Wahid, dan Mardiyah Chamim. Semua teori mereka kelihatan bagus, namun begitu Erma praktikkan di Kalimantan Barat, hal itu tidak berjalan. Karena itu, dalam berpolitik dia hanya belajar dengan melakukannya (*learning by doing*).

Pada pemilu 2014, Erma Ranik mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI bergabung dengan Partai Demokrat, karena dibujuk oleh Ketua DPD Partai Demokrat Kalimantan Barat, Suryadman Gidot. Baru pada Januari 2013, dia mantap menjadi calon anggota legislatif, setelah empat bulan lamanya dia dibujuk. Salah satu latar belakang mengapa Erma “pindah” ke DPR adalah karena dia merasa bosan menjadi anggota DPD RI, karena ‘kekuasan’-nya terbatas sementara dalam setiap kunjungannya ke kampung, masyarakat selalu menyampaikan aspirasi atau kebutuhannya. Dia mungkin dapat memberikan sumbangan ke gereja, tetapi jumlahnya tidak besar dan bukan itu kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat ialah infrastruktur, sementara DPD RI tidak memiliki kewenangan terkait hal itu. DPD RI hanya berwenang memberikan pertimbangan kepada DPR RI.

Ketika masuk ke Partai Demokrat, Erma mengaku tidak dipungut bayaran, termasuk saat menjadi calon anggota legislatif. Bahkan Partai Demokrat memberikan pelatihan gratis kepada para calon anggota legislatif di Hotel Sahid Jakarta, selama tiga hari. Pelatihan itu memuat materi mengenai perilaku, cara memenangkan pemilu, dan sebagainya. Kurang lebih 560 orang calon anggota legislatif menerima pelatihan tersebut.

Dengan kesadarannya sendiri, Erma melihat bahwa partai butuh atribut, maka dia membeli atribut untuk dibagikan ke DPC-DPC. Atribut tersebut saja yang dia sumbangkan ke partainya. Dia mengaku bahwa sebagai anggota DPR RI saat

ini gajinya dipotong setiap bulan dalam rangka pendanaan partainya. Dana tersebut diperlukan untuk membeayai semua karyawan di DPP partai. Menurutnya, hal itu dapat diterima akal sehat karena tidak mungkin dia menjadi anggota DPR RI bila tidak melalui partainya. “Parpol adalah instrumen penting dalam demokrasi, parpol tugasnya untuk mencetak calon-calon pemimpin. Karenanya kader harus memiliki kesadaran untuk membeayai parpol di mana ia menjadi anggota, sebagai bagian dari kontribusi yang jelas,” tegasnya.

Pengalaman Pemilu 2014

Erma saat ini duduk di Komisi III DPR RI yang membidangi hukum, sebagai Sekretaris Poksi. Harapannya dengan posisinya sekarang, dia dapat membantu pembangunan infrastruktur di Kalimantan Barat. Partai Demokrat yang telah menempatkan dirinya berada di Komisi III. Motivasi Erma menjadi anggota DPR RI ialah ingin membangun infrastruktur di Kalimantan Barat. Kampung orang tuanya berada di atas gunung di daerah Kabupaten Landak dan selama puluhan tahun tidak memiliki jalan. Dia mendorong agar jalan di bangun di kampung tersebut. Selain itu, puluhan tahun daerah tersebut tidak dialiri listrik. Pada 2007, melalui program PNPM, daerah tersebut akhirnya dialiri listrik pembangkit tenaga air (*micro hydro*).

Faktor kemenangan Erma Ranik pada Pemilu 2014 ialah karena dia cukup dikenal oleh masyarakat yang diwakilinya ketika menjadi anggota DPD RI. Bukan hanya dikenal namanya, namun kerja nyatanya dan sering turun ke kampung-kampung. Hampir semua daerah yang sekarang menjadi daerah pemilihannya pernah ia datangi.

Erma Ranik merupakan orang lapangan yang kaya pengalaman. Dia mengaku lebih suka berkampanye di kampung-kampung. Selama menjadi aktivis sosial, dia sering

ke kampung-kampung sehingga orang masih mengingat dan mengenalnya. Dia tidak merasa nyaman dengan cara-cara berkampanye yang harus berdiri di depan mimbar. Cobalah cek di tiap kampung, maka mereka akan mengenal Erma. Paling tidak dia memiliki jadwal untuk ke kampung tersebut. Sejak terpilih sebagai anggota DPD RI hingga menjadi anggota DPR RI, dia selalu memanfaatkan secara maksimal masa reses anggota dewan untuk mengunjungi konstituen. Dia selalu datang ke kampung-kampung dan tidur di rumah warga. Tak jarang kutu-kutu busuk menggigit tubuhnya. Baginya, ke kampung-kampung menjadi sejenis liburan. Dia dapat bertemu langsung dengan konstituennya dan menyerap aspirasi serta merasakan langsung apa yang dialami oleh warga di daerah pemilihannya, sehingga leluasa menyuarakannya di DPR RI.

Erma menjelaskan bahwa dia mengajak orang-orang untuk memilihnya dengan alasan yang logis, bukan semata-mata karena partainya. Menurutnya, saat ini pemilih melihat bobot partai sekitar 20 persen, dan 80 persen pemilihan terkait dengan kandidatnya (calon anggota legislatif). Karena bagaimanapun, orang memilih 'nama'-nya, bukan 'partai'-nya. Apalagi sistem pemilu yang mensyaratkan bahwa calon anggota legislatif dengan suara terbanyak berhak menduduki kursi parlemen, apabila partai berhasil meraih kursi di satu daerah pemilihan.

Pada Pemilu 2014 lalu, dia menghabiskan dana kurang lebih Rp 700-800 juta. Dia menjadi calon anggota legislatif di daerah pemilihan Kalimantan Barat yang terdiri atas 14 kabupaten serta berada di nomor urut 3. Di Kalimantan Barat hanya ada satu daerah pemilihan dengan 10 kursi yang tersedia.

Erma menyatakan bahwa dia memiliki tim pemenangan, tetapi jumlahnya tidak banyak. Misalnya di Sintang

Melawi, hanya satu orang. Di Bengkayang, juga ada. Jumlah semuanya tidak lebih dari 50 orang, termasuk tenaga ahli yang ada di Jakarta. Padahal medan kerjanya sangat berat. Jarak antara satu daerah dengan lainnya cukup jauh. Tim pemenangan Erma Ranik tidak memiliki pekerjaan yang jelas dan terstruktur. Mereka kebanyakan adalah mahasiswa. Pekerjaan utama mereka mengantarkan surat yang berisi buku tentang profil Erma, dan sebagai imbalannya, mereka diberi uang bensin. Pada pencalonannya sebagai anggota DPR RI, Erma bersama Tim memutuskan tidak membuat lagi VCD kampanye. Ia memilih memasang beberapa kali iklan di sebuah televisi lokal.

Di Kalimantan Barat, Erma hanya membuat beberapa baliho, karena dananya kurang. Selain itu, untuk menghemat, Erma berkampanye bersama dengan calon anggota legislatif lainnya di kabupaten-kabupaten dan di tingkat provinsi. Dia dan calon anggota legislatif lainnya dari kabupaten-kabupaten dan provinsi membuat pertemuan bersama di sebuah kampung, misalnya. Mereka saling berbagi dana, meskipun dia dikenakan jumlah yang sedikit lebih besar, karena menjadi calon anggota legislatif DPR RI.

Cara dia berkampanye sangat sederhana. Bila turun ke kampung-kampung untuk bertemu dengan orang-orang, dia memberikan Rp 200 ribu di pertemuan terkait untuk membeli kopi dan gula. “Tidak mungkin kita datang ke rumah orang, sedangkan gula dan kopi tidak kita sediakan. Itu kurang ajar”, ujarnya. Kemudian dia diperkenalkan oleh tuan rumahnya ke warga kampung, “Ini Erma mau menjadi calon DPR RI!”

Ketika ia menjelaskan tata cara milih, maka mereka mulai bertanya. Banyak yang bertanya demikian, “Bu, apa yang mau disumbangkan?” Dia menjawab, “Tidak ada!”. Waktu

itu, orang berkampanye sembari memberikan pulsa dan sebagainya. Dia tidak memberikan apa-apa. “Jadi, ibu mau memberikan apa?” tanya mereka lagi. “Belum menjadi anggota DPR RI saja sudah pelit, apalagi menjadi anggota DPR RI?”

Lalu dia menjawab, “Saya tidak berjanji. Namun kalau saya terpilih, saya akan balik ke kampung! Semua kampung yang pernah saya datangi ketika berkampanye, akan saya datangi lagi. Saya akan memberikan sumbangan walaupun tidak besar. Saya menjaga agar tidak banyak berjanji”. Banyak orang terkejut mengenai keberhasilannya. Ia mendengar temannya di daerah pemilihan yang sama menghabiskan dana sampai milyaran rupiah. Padahal dia hanya menghabiskan dana Rp 700-800 juta. Jumlah tersebut terhitung mulai Oktober 2013- April 2014.

Banyak yang bertanya mengapa Erma hanya sedikit mengeluarkan beaya? Dia menjawab, “Jangan melihat itu saja. Harus dilihat kampanye lima tahun saat saya menjadi DPD RI. Saya memaksimalkan kewajiban reses, kewajiban bertemu konstituen dengan segala keterbatasan DPD RI saya. Jadi, orang kenal, orang ingat”. Orang mengetahui bahwa dia berasal dari Partai Demokrat. Dia dihajar habis-habisan di Kalimantan Barat. Sentimen negatif terhadap partai Demokrat sedang tinggi, karena banyaknya oknum kader yang tersangkut kasus Korupsi.

Instrumen penting dalam kampanye Erma sesungguhnya adalah buku kecil yang berjudul “Mereka Bicara Erma”. Buku tersebut dikirimnya ke tiap rumah pemilih. Dia menyortir alamat dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ada. Buku tersebut memuat pengenalan mengenai dirinya dan kesaksian orang-orang yang pernah bekerja atau berhubungan dengannya. Buku itu berisi satu surat dan

satu kartu namanya di dalamnya. Reaksi penerima buku itu bermacam-macam. Dan yang paling umum ialah, bahwa orang-orang merasa kesal, karena Erma hanya mengirimkan buku, bukannya uang. “Buku tidak berguna,” kata mereka.

Erma merasa habis-habisan pada Pemilu 2014 yang lalu. Apabila calon anggota legislatif lainnya memakai ‘politik uang’ hingga ratusan ribu rupiah, maka dia sama sekali tidak melakukannya. Dia tidak percaya dengan cara menggunakan ‘benda’ itu. Ia hanya berjuang sungguh-sungguh menurut jalan yang ia anggap benar. Menurutny, terserah kepada orang lain yang berjuang dengan cara mereka sendiri-sendiri. Ia menganggap dirinya bukan ‘*ayam sayur*’, namun pejuang. Dia tidak pulang-pulang ke rumah karena harus bertemu konstituennya. Dia berkampanye bersama penduduk, dari rumah ke rumah, di lapangan, di kebun karet, dan berbagai tempat. Dalam sehari, dia dapat melakukan lima kali pertemuan pada pagi, siang dan malam.

Dia percaya bahwa dalam hidup kita harus bekerja keras. Dia merasa jengkel kalau orang hanya berdoa, atau bekerja keras saja, kemudian menjadi gila karena hasilnya tidak sesuai harapan. Hal itu dia sampaikan kepada timnya. Dia telah melakukan kerja, maka tinggal melihat hasilnya. “Bila kita sudah bekerja keras, maka ikhlaskan pada Tuhan untuk menerima apapun hasilnya. Kalau tidak demikian, maka kita bisa menjadi gila,” ujarnya.

Pada Pemilu 2014, Erma berhasil meraih 34.420 suara. Usai pemilu 9 April 2014, maka tanggal 10 April 2014, dia meminta timnya berkumpul. Tanggal 12 April semua data dari simpatisan dan saksi telah masuk di tim informasi dan data internal Tim. Kala itu, dia meminta agar suara tersebut dikawal sampai 22 April 2014, karena khawatir ada perubahan di penghitungan resmi KPU.

Erma menyadari bahwa kandidat lain adalah orang-orang yang memiliki sumber daya logistik cukup besar. Mereka dapat membuat baliho yang besar-besar di tiap kabupaten, sementara dirinya hanya membuat baliho yang kecil-kecil dan bendera kecil yang jumlahnya kira-kira 500 buah. Sarana kampanye yang dia pakai selama Pemilu 2014 antara lain:

- a) Baliho
- b) Forum-forum (arisan)
- c) Billboard
- d) Teve lokal
- e) Radio
- f) Bagi buku

Erma Ranik menyatakan bahwa salah satu faktor kemenangannya karena mukjizat Tuhan. Dia mengaku bahwa dia lemah dalam hal penguasaan isu-isu perempuan. Namun dalam hal isu lingkungan dan masyarakat adat, dia adalah jagonya. Semasa di DPD RI dulu, dia menyerahkan isu perempuan kepada temannya yang dianggapnya lebih kompeten dan peduli terhadap bidang tersebut. Dia tidak terlalu mengikuti banyak perkembangan mengenai isu tersebut. Dia mengetahuinya hanya melalui buku-buku dan tidak mendalaminya.



IRMA SURYANI

IRMA SURYANI lahir di Metro, Lampung, 6 November 1965. Saat ini, dia menjadi anggota DPR RI untuk periode 2014-2019 dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Pendidikan terakhir yang diraihinya adalah Sarjana Ekonomi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta. Sejak 2012 hingga kini, dia menjabat sebagai Komisaris PT. Minanjau Putra Persada, di Jakarta Timur.

Pengalaman Berorganisasi

Usai kuliah di Yogyakarta, Irma Suryani bekerja di PT. Pelindo II di terminal peti kemas. Sekarang perusahaan tersebut berubah nama menjadi PT. Jakarta International Container Terminal (PT. JICT). Di perusahaan ini, dia membentuk serikat pekerja dan menjadi salah satu sekretaris forum komunikasi serikat pekerja. Sebelumnya, PT. JICT tak memiliki serikat pekerja. Kemudian perusahaan ini diswastakan oleh pemerintahan saat itu. Ketika perusahaan ini diprivatisasi oleh pemerintah, Irma Suryani mulai menjadi aktivis. Dia dan sembilan temannya menutup pelabuhan. Karena PT. JICT hendak dijual ke investor asing dalam kondisi bahwa privatisasinya tidak jelas, maka karyawannya bagaimana? Apakah mereka tetap menjadi karyawan BUMN atau menjadi karyawan asing? Harusnya, menurutnya, posisi itu diperjelas ketika akan diprivatisasi.

Masalahnya ialah karena tidak transparan dan harganya diobral, sehingga Irma Suryani dan teman-temannya merasa terpenggil untuk melawan kebijakan tersebut. Di pelabuhan itu, dari 2000-an karyawan, yang perempuannya hanya 80 orang. Dia menutup pelabuhan tersebut sehari penuh sehingga tidak dapat beroperasi. Hal itu membuat pelabuhan menjadi kacau. Bukan hanya di pelabuhan terkait yang lumpuh, namun dampaknya sampai ke seluruh Indonesia, karena tak bisa melakukan bongkar muat barang.

Kapal-kapal asing semuanya bersandar di pelabuhan tersebut. Mereka berteriak sehingga memaksa Presiden Abdurrahman Wahid (Gusdur) saat itu turun tangan. Irma Suryani dan teman-temannya akhirnya dipecat, karena melakukan pemogokan di pelabuhan itu. Surat pemecatan dikirim ke rumah mereka masing-masing dengan menggunakan amplop dan diletakkan di bawah pintu rumah mereka. Mereka tak pernah dipanggil secara resmi oleh pihak perusahaan dalam kasus itu. Ketika hendak berdemonstrasi, mereka dijanjikan akan diberikan jabatan dan uang, namun akhirnya dipecat. Mereka menolak semua 'iming-iming' pihak perusahaan sehingga tetap melancarkan pemogokan.

Pemecatan itu berupa pemindahan mereka untuk bekerja di luar daerah. Irma Suryani dipindah-tugaskan ke daerah Panjang. Sembilan temannya yang lain dipindahkan ke Lampung, Panjang, dan Palembang. Oleh karena kekompakan mereka, maka saat dipecat, mereka menutup lagi pelabuhan tersebut. Pelabuhan tidak beroperasi selama dua hari. Pemerintahan Gusdur marah kepada manajemen pelabuhan. Gusdur memanggil manajemen pelabuhan. Irma Suryani dan teman-temannya dikembalikan ke posisi mereka semula sebagai karyawan, dan tidak jadi dipindahkan keluar daerah. Akhirnya, terjadi negosiasi dan mereka duduk bersama membicarakan masalah kepegawaian. Waktu itu, mereka tak menuntut macam-macam hanya kejelasan posisi, yaitu apakah akan menjadi karyawan swasta atau karyawan asing? Bila menjadi karyawan swasta, maka semua hak mereka harus dibayarkan, dan mekanisme serta prosedurnya harus dilalui.

Irma Suryani diminta oleh INFID, JARI, dan LSM lainnya untuk menjadi narasumber mengenai isu privatisasi perusahaan. Dia dan teman-temannya mulai terjun menjadi aktivis sosial. Ketika PT. Indosat dijual, dia dan teman-temannya melakukan demonstrasi. Saat Merpati bermasalah, dia dan teman-

temannya turun ke jalan. Manakala Koalisi Serikat Nasional (KSN) terbentuk, dia ditunjuk sebagai ketua kampanyenya. Saat itu, privatisasi perusahaan betul-betul menjadi momok bagi kalangan buruh. Mereka bersatu dan seluruh serikat pekerja juga. Dia bergabung dengan teman-temannya di LBH. Menurutny, sebenarnya ia enggan untuk menjadi aktivis sosial. Namun karena melihat kondisi yang tak beres itu, dia terpenggil untuk tampil. Baginya, kalau bukan dirinya, siapa lagi yang turun ke jalan untuk melawan? Dia pun bergabung dengan Koalisi Serikat Pekerja Akademisi Asia.

Pengalaman Berpolitik

Tahun 2002, Irma Suryani diminta oleh Eros Djarot untuk bergabung mendirikan Partai Nasional Benteng Kerakyatan (PNBK). Di partai ini, dia duduk sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Ketua Bidang pembinaan serta pengembangan wilayah. Fungsinya bertanggung jawab untuk membentuk semua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) di daerah-daerah. Dia mendapat tugas di Sumatera dan sebagian wilayah Timur Indonesia. Dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, dia bertanggung jawab menangani 12 provinsi.

Tahun 2004, dia mencalonkan diri menjadi anggota DPR RI, tetapi tidak berhasil. Karena baru pertama kali mengikuti pemilu, maka dia belum mengetahui mekanismenya seperti apa. Namun hal itu cukup baik, karena dari sembilan kursi, dia berada di posisi tujuh belas. Tahun 2009, dia mencalonkan kembali karena diminta oleh Eros Jarot. Sebagai DPP, dia harus maju. Walaupun dia tahu bahwa dengan posisi 1,08 persen, maka tidak mungkin dia lolos pemilu. Lagi pula angka kelolosan partainya di parlemen kurang dari 3 persen, tetapi karena fungsinya sebagai DPP, maka dia mencoba lagi mencalonkan diri.

Kemudian Surya Dharma Paloh membentuk ormas bernama Nasdem. Surya Dharma Paloh ternyata berkawan dengan Zulfan Lindan (Sekjen PNBK). Zulfan mengajak Irma Suryani masuk ke ormas Nasdem. Saat itu, posisi Zulfan adalah Ketua Bidang dan Wakil Sekjen di ormas tersebut. Sebagai salah satu pendiri, Irma Suryani tak hadir ketika mendeklarasikan ormas Nasdem, karena sedang berada di China. Nama dan jabatannya ada di ormas itu meskipun dia tidak menghadiri deklarasinya. Selanjutnya dia menghadap Surya Dharma Paloh dan menceritakan bahwa dirinya adalah 'ibu'-nya serikat buruh di pelabuhan. Dia pun berada di Serikat Buruh Maritim Nelayan Indonesia (SBMNI), dan sempat menjadi Ketua Umum dan Sekjennya. Sekarang, dia menjadi pembina Serikat Buruh Pelabuhan Indonesia (SBPI).

Lalu para Wakil Sekjen (9 orang) berunding untuk mengubah ormas Nasdem menjadi partai politik, meskipun komitmen awalnya tak boleh menjadi partai politik. Karena kondisi perpolitikan yang amburadul, mereka memutuskan membuat ormas tersebut menjadi partai, tetapi partai yang menjadi contoh (*role model*). Awalnya Surya Dharma Paloh tidak setuju, karena komitmennya memang bukan membentuk partai politik. Tetapi setelah diutarakan berbagai argumen dan keseriusan mereka, akhirnya diputuskan untuk menjadi partai politik. Di partai itu, dia menjadi Ketua Bidang kesehatan perempuan dan anak. Dia ditunjuk sebagai Ketua Umum Garnita Malahayati (Garda Wanita Nasdem). Dia ditugasi membentuk Garnita di Sumatera Selatan dan Lampung. Kemudian dia mendirikan sayap buruh partai Nasdem, yaitu Gemuruh Nasdem. Ketika sudah terbentuk, dia diminta menentukan ketuanya, namun Surya Dharma Paloh meminta dirinya menjadi ketuanya. Akhirnya, dia menerima posisi itu.

Karena terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2014-2019, maka dia meminta menarik diri dari Garnita. Saat

ini, posisinya hanya di Gemuruh. Gemuruh belum dapat dia tinggalkan begitu saja.

Rekrutmen di partai Nasdem yaitu dengan cara membuka pendaftaran sampai ke daerah-daerah dan diumumkan melalui situs partai (*website*). Situs tersebut namanya 'Indonesia Memanggil'. Fungsinya untuk merekrut calon pengurus partai dan calon anggota legislatif. Menurut Irma Suryani, di partai Nasdem tidak ada pemungutan uang untuk menjadi anggota partai, bahkan setelah menjadi anggota dewan pun, dirinya tak dipungut serupiah pun.

Pendanaan partai ditopang sendiri oleh Surya Dharma Paloh dan teman-temannya yang memiliki cukup sumber dana. Mereka memiliki komitmen agar Indonesia berubah menjadi lebih baik. Para calon anggota legislatif, apabila turun ke daerah pemilihan masing-masing menggunakan uang mereka sendiri, namun DPP Nasdem masih memberikan dukungan walaupun tidak banyak, misalnya bendera, media, baju, saksi, dan lainnya. Ketika para calon anggota legislatif menang, mereka diminta memiliki komitmen untuk tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang oleh partai, seperti tidak berbisnis di DPR RI (main proyek) dan tidak ke luar negeri jika tak terkait dengan keperluan kerja DPR.

Mekanisme partai dalam merekrut anggota perempuan, menurut Irma Suryani, tidak mempersoalkan isu gender. Di partai Nasdem, masalah ketimpangan gender sudah selesai, karena siapa pun yang mampu dipersilahkan untuk maju. Perempuan di partai Nasdem dituntut untuk memiliki kapasitas yang handal. Semboyan Garnita Malahayati ialah 'tangguh, peduli, dan penuh kasih'. Perempuan harus cerdas, peduli, dan penuh kasih serta mempunyai elektabilitas dan kapasitas yang mumpuni. Menurutnya, perempuan dan

laki-laki itu tak dapat disamakan secara fisik, namun setara intelektualitasnya.

Pengembangan kapasitas anggota partai dilakukan melalui diskusi-diskusi kelompok, seminar, dan pelatihan terutama *public speaking*, karena hal ini dianggap penting. Banyak perempuan intelektualitasnya bagus, namun susah berbicara di hadapan khalayak. Oleh karena, menyampaikan informasi secara baik di hadapan khalayak memang tidak mudah. Hal ini perlu diperbaiki oleh kalangan perempuan. Perempuan janganlah saling menjatuhkan sesama perempuan. Perempuan jangan 'nyinyir' terhadap perempuan. Perempuan harus saling mendukung.

Dalam pandangan Irma Suryani, partai Nasdem taat terhadap aturan perundang-undangan yang ada, namun undang-undang itu harus berpihak kepada rakyat. Apabila tidak berpihak kepada rakyat, maka undang-undang terkait harus diganti. Menurutnya, demokrasi di Indonesia sudah lebih bagus daripada negara lainnya. Masalahnya, masyarakat belum siap untuk berdemokrasi, karena pendidikan mereka belum memadai. Masih banyak yang menabrak rambu demokrasi, misalnya masalah otonomi daerah. Contohnya, Metro Lampung hendak menjadi kota kemudian kecamatan yang di bawahnya naik menjadi kabupaten. Oleh karena ketidaktahuan mereka, maka semua aset yang ada di Metro Lampung dipindahkan. Akibatnya, kedua wilayah pemekaran bersengketa.

Pengalaman Pemilu 2014

Irma Suryani membentuk Tim 9 untuk pencalonan dirinya. Tim inilah yang memverifikasi pencalonan tersebut. Dia menjadi salah satu anggota tim ini. Dia juga memverifikasi calon anggota legislatif lainnya, seperti latar belakang calon, elektabilitas, dan lainnya. Fungsi dirinya di Garnita dan

Gemuruh ialah memperjuangkan aspirasi kedua organisasi tersebut. Namun ini tidak mudah, karena berbenturan dengan banyak kepentingan. Padahal partai Nasdem adalah partai yang betul-betul melakukan gerakan perubahan. Masih ada beberapa orang yang tidak sadar tentang isu perempuan dan buruh. Untuk memasukkan satu nama, misalnya, perjuangannya berat. Padahal Surya Dharma Paloh sudah memiliki kesadaran tentang itu.

Irma Suryani menyiapkan dana tabungan untuk pencalonan dirinya. Dia tidak ingin dana untuk pemilu itu lebih dari yang sudah dialokasikannya. Masyarakat memang terbiasa dengan uang, maka ketika turun ke lapangan, banyak yang bertanya kepadanya, "Ibu membawa apa?" Biasanya dia membawa barang-barang dan tidak memberikan uang. Kelebihan di partai Nasdem ialah dukungan medianya yang kuat. Apa yang menjadi 'ikon' dirinya ketika berkampanye ialah partai Nasdem lebih mengedepankan penyediaan lapangan kerja bagi rakyat. Karena hanya dengan lapangan pekerjaan yang cukuplah, maka rakyat akan sejahtera.

Bantuan-bantuan uang tunai, menurut Irma Suryani, bukanlah solusi. Pemerintah saat ini perlu membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi rakyat. Menurutnya, yang harus dilakukan oleh calon anggota legislatif perempuan ialah turun ke bawah setiap saat dan jangan ketika kampanye saja. Setahun sebelum mencalonkan diri, orang harus memperkenalkan dirinya di masyarakat. Masyarakat peduli dengan agama dan budaya, karena itu dia juga mempelajarinya, termasuk bahasa daerah, karena hal itu penting.

Apa yang menjadi motivasi utama Irma Suryani dalam mencalonkan dirinya menjadi anggota DPR RI? Menurutnya, karena hal itu menjadi perintah partai dan situasi perpolitikan

saat ini yang tidak beres. Dia berpikir bahwa dirinya harus menjadi wakil rakyat meskipun hal itu tidak mudah. Dia paham mengenai fungsi anggota dewan untuk legislasi (membuat undang-undang). Dalam pandangannya, orang yang duduk di badan legislasi adalah orang yang memiliki kapasitas untuk itu, mempunyai kepedulian, dan komitmen. Apabila tidak, maka UU yang dibuat akan langsung masuk ke MK untuk di-*judicial review* oleh masyarakat. Mengapa? Karena pemahaman umum mengenai UU saja tidak mencukupi, bila tidak memiliki keahlian tentang perundang-undangan.

Bagaimana partai Nasdem memberikan nomor urut dalam pencalonannya, menurutnya, adat yang menentukan nomor tersebut. Pengaturannya memang tidak ada dalam AD/ART partai Nasdem, namun dibuatkan aturan bersamanya. Bagi calon anggota legislatif harus ada komitmen, elektabilitas, akuntabilitas, finansial, dan sebagainya. Pengurutan nomor berdasarkan kapabilitas, akuntabilitas, dan elektabilitas. Yang diperlukan ialah mereka yang berkualitas dan bisa menang.

Dalam proses pencalonan dirinya, Irma Suryani memperoleh dukungan kuat dari keluarganya, terutama anaknya, karena semua itu dia akukan untuk keluarganya. Setidaknya, dia menjadi kebanggaan keluarganya.

Dia melakukan pendekatan ke tokoh agama, masyarakat, dan lainnya. Sebagai seorang muslim, dia cukup tahu ayat-ayat Al-Qur'an. Sebagai orang Padang, sejak kecil dia diajari mengaji. Ketika berkampanye, dia harus menyesuaikan diri. Terkadang ia mengutip beberapa ayat Al-Qur'an untuk mendukung kampanyenya.

Mengenai isu-isu perempuan di daerah pilihannya, Irma Suryani berpendapat bahwa hal itu tidak menjadi utama

guna meningkatkan perolehan suara dalam pencalonannya. Perempuan di daerah, menurutnya, masih dibebani oleh masalah uang, sehingga belum sepenuhnya soal kapasitas. Para calon anggota legislatif perempuan pun mengalami masalah dana.

Irma Suryani menjelaskan bahwa dia meminta supaya ditempatkan di nomor satu serta menentukan daerah pemilihannya sendiri. Dia membentuk tim kemenangan dan menggaji tiga orang untuk itu, yakni seorang manajer dan dua orang supervisi. Dia menggaji mereka selama enam bulan guna mempersiapkan semua kebutuhan kampanye (termasuk alat-alat kampanye). Dia menyewa tiga paviliun: satu untuk tempat tinggal, dan dua lagi untuk menyimpan semua alat kelengkapan pemilu. Dia bekerjasama dengan struktur partai Nasdem dan semua calon anggota legislatif nomor urut satu. Mereka bercokol di daerah pemilihannya dan berbagi dana. Mereka membagi wilayah secara proporsional: 50 persen DPRD kabupaten/kota, 30 persen DPRD provinsi, dan 20 persen DPR RI.

Selama persiapan menjadi calon anggota legislatif, Irma Suryani selalu turun langsung ke daerah pemilihannya untuk memahami berbagai isu, aspirasi, dokumentasi dan segala hal yang terkait dengan kemenangannya. Dia memasang papan reklame (*billboard*), *banner*, baliho, dan koran. Selama enam bulan dia memasang iklan di koran di tiap kabupaten. Dia tidak menyebutkan berapa angka pengeluaran dana selama kampanye tersebut. Kendalanya justru muncul dari teman calon anggota legislatif yang separtai, karena berbuat curang mencuri suara dan saling menjelek-jelekkan. Antisipasinya terhadap kendala ini, ketika pemilihan berlangsung, yakni dia tinggal lama di daerah pemilihannya. Dia menugaskan tim kemenangannya untuk datang ke tiap kabupaten. Usai pemungutan suara, mereka langsung mengambil datanya.

Kemudian merekap langsung data C1-nya. Karena dia ingin menang, maka dia harus turun langsung ke daerah pemilihan.

Irma Suryani menjelaskan bahwa peran KPU dalam proses pemilu, menurutnya, sebatas kewajiban konstitusional. Demikian pula peran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak sangat memprihatinkan. Oleh karena KPPA bersifat kementerian non departemen, maka keluaran-keluarannya hanya sosialisasi wacana dan kebijakan. Hal ini membuat KPPA tidak memberdayakan perempuan, karena perannya sangat terbatas.



LEDIA HANIFA AMALIA

LEDIA HANIFA AMALIA lahir di Jakarta, 30 April 1969. Amanahnya saat ini adalah menjadi anggota DPR RI untuk periode 2014-2019 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Pendidikan terakhir yang diraihinya adalah Magister Psikologi dari Universitas Indonesia.

Pengalaman Berorganisasi

Pengalaman Ledia dalam berorganisasi dimulai sejak menjadi siswa atau pelajar. Memulai sebagai aktifis di OSIS dan pramuka, semasa mahasiswa, Ledia terlibat di organisasi kemahasiswaan. Dilanjutkan aktif di beberapa LSM seperti menjadi ketua dewan pengurus di Yayasan Uswah Ummahat, menjadi anggota di Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat serta yang terbaru menjadi ketua dewan pakar di Wanita PUI periode 2015-2020.

Pengalaman Berpolitik

Keterlibatan Ledia dalam politik dimulai sejak 1998. Saat itu, sedang ramai pembentukan partai baru dan dia diajak teman semasa SMA-nya untuk bergabung dengan Partai Keadilan (PK), karena mengetahui dirinya aktif berorganisasi sejak masa sekolah.

Ledia masuk di kepengurusan PK wilayah DKI Jakarta di Deputy Kewanitaan. Saat temannya keluar negeri, dia menggantikan temannya menjadi ketua Deputy Kewanitaan Partai Keadilan DKI selama setahun.

Karena tak memenuhi *electoral treshold* Partai Keadilan diubah menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada 2002, agar dapat ikut pada pemilu berikutnya. Terjadi pula perubahan pengurus. Karena tinggal di wilayah Jawa Barat, Ledia kemudian ditarik menjadi ketua Deputy Pemberdayaan Wanita DPW PKS Jawa Barat, hingga 2005. Usai mengemban amanah di DPW, barulah Ledia berkhidmat menjadi Ketua

DPP Partai Keadilan Sejahtera Bidang Kewanitaan (2005-2010).

Sejak mengemban amanah sebagai Ketua Deputy Pemberdayaan Wanita DPW Jawa Barat hingga Ketua Bidang Kewanitaan di DPP PKS, fokus kegiatan yang dicanangkan Ledia adalah menggerakkan program berbasis *community development* bertajuk Pos Wanita Keadilan (Pos WK)

Program ini kemudian disempurnakan dan dijadikan program unggulan DPP PKS dengan menekankan pada peningkatan kapasitas kader perempuan dengan berbagai pelatihan dan menjadikan pos Wanita Keadilan sebagai wahana *community development* berbasis keluarga.

Pada periode kepengurusannya hingga 2010 sudah terbentuk 4.900 lebih Pos Wanita Keadilan. Setiap Pos WK terdiri atas 10-50 orang perempuan yang berkegiatan rutin seperti melakukan pelatihan keterampilan dan sifatnya terbuka bagi semua perempuan. Karena itu bila ada yang beranggapan aktivis perempuan di PKS lebih sedikit, menurut Ledia sebetulnya tidak, bahkan jumlahnya boleh dikatakan sebanding (50:50).

Ledia juga menyatakan bahwa partainya terbuka bagi afirmasi 30 persen perempuan untuk menjadi calon anggota legislatif dan pengurus partai. Di PKS, dari tingkatan paling rendah sampai ke atas, ada perempuan yang aktif di berbagai bidang. Ada yang di bidang kaderisasi, bidang perempuan, kepanduan, ekonomi, ke tingkatan paling tinggi, yaitu Majelis Syuro (18-20 persen perempuan).

Menurut Ledia, di PKS ada *platform* dan falsafah dasar yang jelas dan menjadi acuan kader termasuk soal perempuan. Di antaranya disebutkan bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan bersifat kemitraan. Meskipun masing-masing

memiliki tugas dan fungsi kemanusiaan yang berbeda, namun hubungan tersebut tidak lepas sendiri-sendiri dan harus saling tolong-menolong. Hal ini ditegaskan dengan menjadikan dalil Al-Qur'an yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan itu harus saling tolong-menolong, sebagai pegangan.

Dalam hal pendanaan partai, menurut Ledia, dilakukan secara mandiri karena setiap anggota PKS secara rutin membayar iuran setiap bulan dan terbuka atas sumbangan anggota secara insidental.

Begitu pula dalam hal pengembangan sumber daya manusia, di PKS ada mekanisme rutin pembinaan dan program-program khusus dari tiap bidang untuk melakukan pengembangan, pembinaan dan pemberdayaan kader.

Pengalaman Pemilu 2014

Mengamati proses berjalannya demokrasi di Indonesia menurut Ledia masih terasa ada kegamangan. Di satu sisi banyak pihak yang menganggap demokrasi itu adalah segala-galanya dimana semua orang boleh menyampaikan pendapat, gagasan, dan pandangannya secara bebas. Namun di sisi lain, kebebasan yang diusung itu nyatanya kerap melupakan bahwa ada pihak lain yang memiliki hak yang sama pula.

Karena itu, Ledia menyebut bahwa demokrasi di Indonesia belum sampai pada titik kedewasaan dan yang terasa paling kurang adalah soal kemampuan untuk berdialog secara bijaksana. Satu lagi menurutnya, pendidikan kita masih belum mengarahkan kita untuk siap bertanggungjawab atas pendapat-pendapat kita.

Apa motivasi Ledia menjadi anggota dewan perwakilan rakyat? Menurutnya, awalnya dia tidak pernah mencalonkan

diri. Bila mengikuti kemauannya sendiri, maka menjadi anggota dewan perwakilan rakyat itu justru dirasanya tidaklah nyaman.

Namun, pertimbangan untuk ikut berkontribusi dan memberi manfaat luas pada masyarakat membuatnya menerima tawaran untuk ikut maju dalam bursa pencalegan. Itu pun dengan banyak pertimbangan dan hal yang harus dikorbankan untuk menerima amanah tersebut.

Sejauh ini, dia bersyukur karena selalu berkomunikasi lancar dengan struktur partainya dan dibantu oleh tim. Ledia juga mengetahui mana yang menjadi bagiannya dalam kepengurusan partai dan dalam menjalani peran sebagai anggota dewan sehingga mampu memaksimalkan semua kerja di tiap posisi.

Kaitannya dengan nomor urut calon, selama dua periode pemilu, baginya hal itu ternyata tidak berpengaruh. Pada 2009, nomor urut calon menunjukkan seberapa besar partai menginginkan seorang calon legislatif. Saat itu Ledia bernomor urut 2 dan terpilih menjadi aleg DPR RI. Kemudian aturan itu dicabut, sehingga calon yang ditaruh di nomor bawah pun tetap bersemangat. Pada pemilu 2014, Ledia ditempatkan pada nomor urut 3. Bersama tim-nya Ledia bergerak dan kembali terpilih sebagai anggota DPR RI.

Apa modal sosialnya ketika mencalonkan diri? Sejak 2009-2014, Ledia sudah menghitung bahwa di Bandung ada sekitar 1500 rukun warga (RW). Dia sudah mendatangi sekitar 800 RW selama lima tahun tersebut. Untuk mengelola semuanya itu memang tidaklah mudah, karena ada yang merupakan basis PKS dan ada yang tidak. Karena itu, dia menerapkan pendekatan yang berbeda-beda. Strateginya adalah mendekati keluarga-keluarga dan dia mengaku sangat tertolong dengan struktur partai yang ada. Selain itu, Ledia juga melakukan

pendekatan budaya melalui wayang, dengan memiliki tim kesenian wayang sendiri.

Ledia mempunyai tim pemenangan pada pemilu yang lalu. Dia juga yang memilih sendiri simpatisan yang akan menjadi tim dan berkoordinasi langsung kepada dirinya. Susunan koordinasi tim pemenangannya adalah sebagai berikut: dari Ledia ke koordinator tim; koordinator tim ke koordinator daerah pemilihan; koordinator daerah pemilihan ke koordinator kecamatan; koordinator kecamatan ke para relawan.

Sebagai petahana, Ledia terus memelihara jaringan yang sudah ada, membuka jaringan baru, dan terus berkomunikasi dengan konstituennya. Dia tidak membuka posko pemenangan, namun hanya berkumpul di rumahnya, dan itupun hanya para koordinator yang dibantu oleh para relawan yang berjumlah total sekitar 150 orang.

Selama berkampanye, Ledia tidak membuat spanduk, tetapi lebih memilih membuat banner berukuran kecil yang disebar pada hari-hari terakhir. Dia juga mempergunakan media sms, profil, dan leaflet. Dan khusus pada 2014 lalu, dia juga memanfaatkan *twitter*.

Memang, pada setiap periode pemilu, Ledia memanfaatkan metode berkampanye yang berbeda-beda. Pada 2009, karena merupakan calon anggota legislatif yang baru, Ledia mengaku banyak dibantu oleh calon lainnya. Sementara peran KPU/KPU dalam pemilu menurutnya hanya terkait dengan teknis pelaksanaan.

Sebagai anggota dewan terpilih, Ledia kemudian membuka kantor komunikasi dan informasi, dengan biaya atas koceknya sendiri. Tak hanya digunakan sebagai rumah aspirasi dan perwakilan bagi kegiatan terkait dapil dan konstituennya

namun juga terbuka bagi warga dan organisasi di sekitar kantor yang mau berkegiatan dan membutuhkan tempat.

Begitupula dalam setiap masa reses Ledia juga turun ke daerah pemilihan dan melakukan beragam kegiatan seperti kunjungan ke pemda berikut dinas terkait, kunjungan tokoh, kunjungan organisasi hingga masyarakat umum, melakukan dialog, menyelenggarakan senam sehat hingga sidak pasar.

Periode 2009-2014, Ledia yang berkiprah di Komisi IX mengawal pembentukan undang-undang BPJS dengan diantaranya melakukan dialog, sosialisasi dan serap aspirasi ke tengahmasyarakat, dinas-dinas serta rumah sakit. Pada 2012 dia berpindah ke Komisi VIII dan menjadi wakil ketua Komisi VIII sejak 2013.

Di komisi VIII ini dia mengawal beberapa RUU menjadi Undang-undang seperti Revisi UU Perlindungan Anak dan UU Badan Pengelola Keuangan Haji, dan menjadi ketua panja UU Jaminan Produk Halal.

Dalam rangka transparansi publik, Ledia memakai *newsletter* yang dibagikan pada konstituennya untuk melaporkan apa yang sudah dikerjakannya di dewan, dan apa yang diperjuangkannya. Meski ia juga menyebutkan bahwa sebagian masyarakat masih ada yang belum paham tentang kerja kedewanan ini apalagi saat disampaikan laporan tentang kerja pengawalan masalah anggaran.

Terkait kekayaan, secara pribadi Ledia melaporkan harta kekayaannya ke KPK setiap lima tahun. Dia juga menjelaskan bahwa kontribusi setiap aleg ke partai pun cukup besar, di mana untuk dirinya sendiri kisaran besarnya bisa mencapai sekitar 50 persen dari pendapatannya sebagai anggota dewan perwakilan rakyat. Namun tak hanya berhenti pada soal kewajiban kontribusi, sistem di PKS juga membuat

ketentuan bahwa kontribusi terkait harus diteruskan ke struktur partai di bawah dan memiliki pelaporan.

Dalam rangka pengembangan kapasitas anggota dewan PKS, maka disediakan tenaga ahli khusus yang dibina fraksi selain yang disediakan negara. Selain itu fraksi juga kerap melakukan diskusi rutin, kajian semisal FGD, dibentuknya grup *whatsapp*, serta saling berbagi sesama anggota fraksi.

Karena itu bagi Ledia kemenangannya menjadi anggota dewan tak lain adalah karena campur tangan Allah. Dimana pemilu itu adalah perjalanan upaya yang menggerakkan hati manusia, sementara yang mampu menggerakkan hati hanya Allah.

Prinsip Ledia, meski orang mengeluarkan dana milyaran rupiah, namun kalau tidak takdirnya, tentu dia tak akan menang. Karenanya seseorang memang harus mencari cara bagaimana menggerakkan hati konstituennya, namun setelah itu serahkan semua urusan pada Allah, karena pada akhirnya takdir itu memang hanyalah urusan Allah



MERCY CHRISTY BARENDs

MERCY CHRISTY BARENDS lahir di Maluku, 25 Desember 1972. Saat ini, dia menjadi anggota DPR RI untuk periode 2014-2019 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Pendidikan terakhir yang diraihny adalah Sarjana Teknik Mesin Kapan dari Universitas Pattimura, Maluku. Dia pernah menjadi anggota DPRD Maluku Tenggara tahun 2009. Sebelumnya dia pernah menjabat sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Partisipasi Pembangunan Masyarakat, Maluku.

Pengalaman Berorganisasi

Mercy mengaku bahwa sejak SMP sampai SMA, dia tak terlalu cemerlang dalam berorganisasi. Dia memang masuk ke sekolah unggulan, di mana banyak orang pintar di sekelilingnya. Dia tidak terlalu ‘melirik’ organisasi, karena orientasinya hanya untuk belajar. Di sekolahnya, Organisasi Intra Sekolah (OSIS) diserahkan ke murid-murid jurusan IPS.

Dia mengamini bahwa keaktifannya dalam berorganisasi meskipun kecil, namun berkontribusi dalam mematangkan dirinya. Pada gilirannya, dia aktif berorganisasi saat masuk ke perguruan tinggi. Dia lebih banyak terlibat di organisasi gereja dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI). Di GMKI, dia menjabat sebagai wakil ketua. Di sana, dia banyak belajar bagaimana mengemukakan pendapat secara tajam.

Saat kuliah, dia makin berkembang dengan banyak berorganisasi, mulai dari organisasi sosial, budaya, hingga keagamaan. Dia berteman dengan banyak laki-laki yang pergaulan dan jaringannya luas dan kuat. Mercy pun masuk Senat Fakultas Teknik, sebagai Ketua Bidang Penalaran. Di sini, dia belajar mengasah kepemimpinan, mengorganisir, dan mengasah manajerial.

Dalam angkatan kuliahnya Mercy, ada lima perempuan yang masuk di fakultas tersebut. Kemudian dua temannya itu

keluar, maka tersisa tiga orang. Akibat jumlah mahasiswa perempuan yang terbatas, mereka selalu dilibatkan dalam semua aktivitas di Senat Fakultas, Senat Universitas, Mapala Teknik, Koperasi Kampus, GMKI, dan gereja. Selain itu, dia masuk ke organisasi sosial, seperti Jaringan Perempuan. Setelah pulang dari praktik kerja lapangan (PKL) di Jakarta, dia diajak oleh seniorinya dari GMKI, yang aktif di LSM Internasional, untuk mengembangkan metodologi survei yang sangat teknis. Akhirnya, dia bergabung dan ‘terjebak’ sangat lama di LSM tersebut.

Mercy juga seorang pendiri Rumah Aman Yayasan Gasira dan aktif di Lembaga Partisipasi Pembangunan Masyarakat Maluku. Di lembaga ini, dia pernah menjabat mulai dari staf hingga Direktur Eksekutif. Lembaga tersebut adalah salah satu dari lima LSM papan atas yang ada di Maluku. Di lembaga itu, dia belajar bersama dengan tenaga yang berasal dari luar negeri. Dia menerima banyak pengalaman belajar di lembaga itu, misalnya membuat desain grafis, membuat alat ukur keberhasilan program, dll. Ia juga belajar soal kepemimpinan, manajerial, termasuk mengelola bantuan asing yang jumlahnya sampai miliaran rupiah. Pengalaman ini sangat memperkaya dan menajamkan wawasan dan kemampuan Mercy. Pengalaman ini juga terbawa tatkala ia menjadi anggota DPRD, hingga mejadi anggota DPR RI. Pengalamannya yang sangat kaya dan terbukti dalam bidang yang digeluti sebelumnya, membuat ia tidak kewalahan bekerja sebagai anggota dewan.

Pengalaman Berpolitik

Mercy mulai terlibat dalam politik saat Presiden Soeharto akan lengser. Dia dan teman-temannya mengkoordinir adik-adik kelasnya di kampusnya untuk melakukan aksi demo, yang sebagian aksi di Jakarta dan sisanya di Ambon.

Beberapa adik kelasnya terkena tembakan saat melakukan aksi demo tersebut.

Aksi demo di Ambon berlangsung cukup lama hingga mendapatkan sorotan dari pengurus partai PDI (belum PDI Perjuangan). Di LPPM, pimpinannya adalah orang PDI. Tahun 1999, awalnya PDI memasukkan beberapa nama perempuan, termasuk dirinya di daftar calon anggota legislatif. Padahal dia sama sekali tidak mengenal PDI. Dia merasa 'dijebak' kala itu. Mulai saat itu, dia mengenal PDI, berdiskusi dengan para senior dan sesepuh PDI. Dia baru berusia 20-an kala itu.

Tahun 1999, yang menjadi walikota Ambon adalah Ketua DPC PDI Ambon. Beliau dan Mercy tinggal di satu kompleks perumahan. Saat beliau berkampanye untuk menjadi walikota, Mercy diajak ikut berkeliling untuk kampanye. Dari ikut membantu kampanye tersebut, Mercy menyerap banyak ilmu mengenai kampanye.

Tahun 2001, setelah Kongres PDI di Semarang yang mengganti nama PDI menjadi PDI Perjuangan, maka di Indonesia harus dilaksanakan Konferensi Daerah dan Cabang PDIP yang pertama kali, baik tingkatan DPC maupun DPD. Mercy pun masuk ke struktur DPC PDIP Kota Ambon. Waktu itu, posisinya LPPM adalah Direktur Program.

Tahun 2005, Mercy ditarik ke DPD Ambon. Waktu itu, dia masih menjadi aktivis. Tahun tersebut, Kabupaten Aru memekarkan diri dari Kabupaten Maluku Tenggara. Di struktur DPD tersebut, tak ada orang Aru ataupun tokoh Aru di Kota Ambon yang populer atau kuat. Dia dipanggil oleh Ketua DPD Ambon dan bertepatan dengan masa Rapimnas di Bali. Dia dipaksa maju menjadi calon Bupati Kepulauan Aru. Dia tidak memiliki dana untuk itu.

Walikota yang pernah mengajak Mercy ikut berkampanye, pada gilirannya menjadi ketua pemenangan Mercy. Beliau menasehati Mercy agar pengalamannya menjadi calon Bupati Aru menjadi investasi politik. Dia juga dinasihati agar pulang ke Aru mengurus kampung halamannya. Namun dia menolak nasihat tersebut, hingga kemudian dipanggil oleh ketua dan sekretaris DPD PDIP. Tak ada pilihan lain baginya karena menyangkut eksistensi partainya. Hal itu terjadi ketika dia berumur 28 tahun.

Akhirnya, Mercy mempersiapkan diri menjadi calon bupati Aru. Ketika ke Aru, dia melihat betapa miskinnya masyarakat di Aru. Waktu itu, dia mengecat rambutnya berwarna merah. Ketika berdiri di ujung jembatan, masyarakat yang melihatnya berlarian menabrak pepohonan karena ketakutan melihat dirinya. Tidak pernah ada tamu asing yang datang ke Aru. Di Aru, dia melihat kemiskinan itu nyata.

Dua kali Mercy menjadi Calon Bupati Bupat, namun ia tidak berhasil. Karena dia kalah bersaing berhadapan dengan lawan yang begitu kuat, yang didukung oleh pengusaha-pengusaha Aru. Dia juga mengikuti pemilihan anggota legislatif, namun kalah karena masih berlaku sistem proporsional tertutup. Suaranya banyak, namun semua itu diberikan ke nomor urut 1. Tak sampai enam bulan, calon anggota legislatif nomor urut 1 tersebut meninggal dunia, sehingga dia menggantikannya selama dua periode di DPRD provinsi.

Kemudian Mercy diangkat menjadi Wakil Ketua DPRD provinsi, dan sebelumnya dia menjadi Ketua di Komisi D. Pada gilirannya dia menjadi ketua DPRD provinsi. Dia belajar bahwa menjadi pemimpin perempuan, apalagi di dunia politik, tidak mempunyai banyak pilihan. Itu sebabnya intelektualitas harus benar-benar diasah. Di lingkungan

yang patriarkhal, perempuan dipandang menonjol ketika dia cerdas, dan memerlukan konsistensi dalam bersikap.

Keputusan Mercy untuk menjadi Wakil Ketua DPRD adalah pertarungan yang berat. Namanya kala itu tak masuk dalam bursa calon wakil ketua, karena hanya ada dua calon. Detik-detik terakhir DPD mengirimkan tiga calon wakil ketua DPRD, dan namanya masuk karena harus ada kuota untuk perempuan. Dia diberitahukan bahwa saat rapat DPP semua anggota secara aklamasi memilihnya sebagai Wakil Ketua DPRD.

Megawati menyatakan sikap memilih Mercy karena melihat rekam jejaknya. Surat penunjukan ia terpilih menjadi ketua DPRD, ditandatangani oleh Megawati, yang saat itu jarang terjadi.

Prestasi yang pernah diraih Mercy selama di PDIP yaitu berhasil mendorong perempuan mencapai kuota 33,3 persen di DPRD Ambon. Dia memasukkan anggaran untuk Konferensi Perempuan Maluku yang pertama tahun 2009. Dia orang pertama di Maluku yang menyelenggarakan Konferensi tersebut.

Pengalaman Pemilu 2014

Meskipun awalnya Mercy menganggap bahwa pengalaman berpolitik selama dua periode di DPRD Ambon menurutnya sudah cukup, namun oleh PDIP dia didaftarkan untuk ikut Pemilu 2014. Dia merasa dijebak, tetapi dia mengambil segi positifnya dan menjadikan keberadaannya di DPR RI sebagai sarana guna membangun masyarakat di Ambon.

Tentang perjuangan hak-hak perempuan, Mercy orang yang sangat peduli bahkan terlibat aktif dalam pergerakan. Dia bersama Lies Marantika Mailoa untuk pertama kali membuat Konferensi Perempuan di Ambon. Acara besar ini dihadiri

2000 orang. Perempuan-perempuan dibekali dengan topik-topik yang membangun dan mengembangkan mereka. Namanya tak asing di Komnas Perempuan dan kalangan aktivis perempuan.

Karena Mercy merasa dijabat untuk mengikut Pemilu 2014 yang lalu, maka persiapannya sangat berat. Dia tidak memiliki dana yang cukup untuk itu, karena setahun terakhir, dia mempersiapkan diri untuk melanjutkan studinya. Jadi, tidak lagi aktif di ranah politik. Walaupun tersedia dana, tetapi jumlahnya hanya sedikit.

Mulanya Mercy menolak untuk mencalonkan diri lagi pada pemilu yang lalu. Dia memutuskan berhenti dari dunia politik dan memilih melanjutkan pendidikannya keluar negeri. Di luar sepengetahuannya, PDIP mendaftarkan dirinya sebagai calon anggota legislatif. Dia mengetahui dirinya didaftarkan sebagai calon pada hari terakhir tes kepatutan dan kelayakan serta psikotes oleh partainya.

Teman-temannya memberikan nasihat kepadanya: “Mercy, orang-orang memasang badan, siap bertarung habis-habisan demi masuk daftar calon di DPR RI. Kamu dikejar-kejar. Itu jalan tol. Kalau ditolak, itu keterlaluhan. Tidak semua perempuan Maluku mempunyai kesempatan itu. Apalagi partai sekelas PDIP yang merekrut. Maju, Mercy!”

Setelah melalui pendaftaran yang di luar sepengetahuannya tersebut, mau tidak mau, dia mengikuti semua rangkaian tes yang ada. Meskipun terlambat mengikuti tes karena baru mengetahui bahwa dia didaftarkan sebagai calon pada hari terakhir tes, tetapi dia melakukannya dengan baik, walau sangat melelahkan. Dia menyelesaikan tes itu pada jam 11.00 malam.

Keterlibatan Mercy sebagai calon anggota legislatif 2014 bersifat mendadak, maka dia berusaha memenangkannya.

Hasil usahanya itu juga tidaklah optimal, karena waktunya yang sangat singkat. Akhirnya, dia berada di titik di mana dia merasa ditegur. Dia diberi kesempatan emas, namun tidak bersungguh-sungguh memperjuangkannya. Kemudian dia pun bangkit dan berjuang.

Mercy harus bergumul mengenai dana pemilu, karena dia tidak memiliki banyak uang. Dia tak memiliki uang untuk berkampanye. Dia mengatakan bahwa semua orang mengetahui dirinya sebagai Ketua DPRD termiskin di Kota Ambon. Dia keluar dari DPRD hanya dengan buku dan pakaian. Dua mobil mewahnya ditinggalkannya. Inventaris dalam rumah dinas dibagikan habis kepada semua pendukung, relawan, satpol PP, *office boy*, supir, dan lainnya. Otomatis usai menyelesaikan jabatannya sebagai Ketua DPRD Ambon, dia tidak mempunyai banyak uang. Satu-satunya yang dimilikinya ialah uang Jamsostek senilai Rp 18 juta, setelah 15 tahun mengabdikan.

Keajaiban demi keajaiban terjadi pada Mercy. Meskipun tidak memiliki banyak uang, akhirnya dia berhasil mengumpulkan dana milyaran rupiah, tanpa menghutang sedikit pun di bank. Banyak orang yang membantunya. Banyak kontraktor yang dulu bekerjasama dengannya menyumbang kepadanya. Banyak truk yang datang mengantarkan beratus-ratus almanak dan media lainnya untuk sarana kampanyenya. Dia menganggap para kontraktor membantunya karena mereka bekerja jujur dan direkomendasi olehnya untuk proyek yang ada. Dia tak pernah meminta imbalan untuk itu. Pada gilirannya mereka membalas kebbaikannya dengan mengirimkan truk-truk yang berisi kalender dan lain-lain.

Ada yang memasang *billboard* untuk Mercy yang bernilai Rp 30 juta rupiah. Hingga saat ini, Mercy tak tahu siapa yang memasang itu. Seminggu menjelang pencoblosan, seluruh

saksi harus disediakan. Hal ini butuh dana ratusan juta rupiah, sementara dia tidak memiliki dana. Teman-teman suaminya telah menawarkan pinjaman untuknya, namun dia menolaknya. Bahkan bank internasional menelepon dirinya untuk menawarkan hutang, namun dia menolak hal itu.

Pada saat yang ditentukan, uang sejumlah Rp 300 juta terkumpul. Ini fakta sejarah yang tak pernah dia lupakan sampai mati. Ini membuktikan bahwa dia bisa berjuang dalam politik dengan jalan yang lurus. Dari Rp 300 juta tersebut, dia memperoleh dana Rp 50 juta dari seorang ibu pensiunan. Uang tersebut adalah tabungan ibu tersebut yang diberikan secara ikhlas.

Seorang teman lama Mercy juga tiba-tiba menghubunginya. Mereka memberikan dana secara cuma-cuma. Ada yang memberikan dana Rp 25 juta, dan lain-lain. Sekretaris Dewan DPRD Ambon merasa heran karena Mercy tak pernah menggunakan fasilitas sebagai anggota dewan. Akhirnya, Sekretaris Dewan memanggil sekretaris Mercy dan menyerahkan puluhan juta rupiah kepada Mercy.

Dia meyakini bahwa terpilihnya dirinya menjadi anggota DPR RI, karena campur tangan Tuhan dalam hidupnya. Tanpa kehendak Tuhan, dia menganggap mustahil dirinya duduk di DPR RI. Selain itu, karena dia tidak menggantungkan dirinya kepada siapa pun. Dia berteman dan berjaring baik dengan semua pihak.



NENI MOERNIAENI

NENI MOERNIAENI lahir di Jakarta, 30 Juli 1960. Saat ini, dia menjadi anggota DPR RI untuk periode 2014-2019 dari Partai Golkar. Pendidikan terakhir yang diraihinya adalah Magister Kedokteran (Obsgyn) dari Universitas Hasanuddin, Makassar. Dia pernah menjabat sebagai tenaga dokter spesialis di Rumah Sakit Wahab Syahrini, Samarinda, Kalimantan.

Pengalaman Berorganisasi

Neni mengakui bahwa dia senang berorganisasi. Ia mulai berorganisasi sejak duduk di bangku kuliah, tepatnya ketika menjadi Senat Mahasiswa dan mengambil ekstra kurikuler dalam bidang pers. Dia terlibat di majalah mahasiswa, membuat bulletin, dan sebagainya. Dia membuat beberapa tulisan tentang organisasi. Ketika menjadi dokter di rumah sakit, dia memimpin ruangan bagian kandungan walaupun bukan dokter kandungan. Tugasnya ialah mengelola para bidan, perawat, dan lainnya.

Sebagai isteri Walikota, maka dia diberi amanah untuk menjadi Ketua PKK. Mau tidak mau, dia harus mengorganisir dan melihat secara langsung kegiatan PKK. Apalagi waktu itu, ibu-ibu dan anak-anak membutuhkan perhatiannya hingga membuatnya tersentuh dan terjun ke masyarakat.

Saat menjadi ketua PKK, Neni dekat dengan masyarakat. Dia senang mengorganisir orang-orang yang berkebutuhan khusus dan perempuan-perempuan yang rentan secara sosial. Dia banyak bergaul dengan mereka kalangan akar rumput dan kelas menengah ke bawah. Dia menilai bahwa mereka lebih banyak terbebani masalah yang perlu dia bantu.

Kala menjadi ketua PKK, dia membina ibu-ibu yang rentan secara sosial. Mereka dibina dengan melakukan aktivitas yang mereka sukai atau sesuai dengan minat mereka. Ibu-ibu yang

suka menyalon, menjahit, dan lainnya, semuanya dibantu secara gratis. Yang suka menjahit, diberikan pendidikan gratis menjahit, bahkan menggunakan uang pribadinya. Neni hanya menggaji gurunya, sehingga tak terlalu besar beayanya. Akhirnya, dia menjadi dekat dengan masyarakat, termasuk waria-waria. Pokoknya, yang namanya kelompok rentan secara sosial, mereka terbuka padanya sehingga ketika dia tidak ada, mereka merasa kehilangan.

Neni pun menjadi pembina di LARAS, sebuah lembaga rehabilitasi sosial yang donornya dari Belanda. Hingga kini, lembaga tersebut memiliki cabang di beberapa tempat. Bukan Neni yang mendirikan, namun dia yang menjadi pencetus ide dan pembinanya. Di LARAS, terdapat ODHA (orang dengan HIV/Aids) yang dirawat dengan obat-obatan gratis. Lembaga ini sangat dia syukuri, karena dapat memberi makna bagi dirinya.

Pengalaman Berpolitik

Neni masuk Partai Golkar sejak 1989. Kala menjadi dokter, dia telah aktif di bakti sosial yang diadakan oleh Golkar. Selama di Golkar, dia pernah menjabat Ketua Seksi Sosial dan Kesehatan di Badan Kordinasi Organisasi Wanita di Provinsi Kalimantan Timur. Sejak tamat pendidikan dokter, Neni selalu menemani suaminya (waktu itu Ketua Fraksi DPRD Partai Golkar Provinsi Kalimantan Timur). Tahun 2004-2009, Neni menjadi anggota DPRD, meskipun pada pencalegan di nomor urut 9, namun suaranya terbanyak. Saat itu, dia menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD. Tahun 2009-2014, dia menjadi Ketua DPRD Bontang. Tahun 2014-2019, Neni menjadi anggota DPR RI.

Awalnya, Neni menolak untuk menjadi calon anggota DPR RI, tetapi ibu-ibu mendorongnya untuk terus maju. Kata mereka, "Tolong Bu, kalau ibu punya kuasa di sana, maka ibu bisa

memperhatikan kami. Apakah itu berupa peraturan daerah. Kami akan mendukung Ibu”. Mereka juga mengatakan, “Kalau ibu hanya dokter kandungan, hanya ibu-ibu yang hamil yang bisa ibu perhatikan. Tapi kalau ibu menjadi wakil rakyat, maka ibu bisa memperhatikan kami secara keseluruhan”.

Neni mengamini dorongan ibu-ibu tersebut. Dia berpandangan bahwa ruang aktualisasi dirinya dalam pengabdian dan berkarya akan lebih luas ketika memiliki kuasa dan kekuatan dalam kebijakan. Kebijakan tersebut ada di dewan, maka melalui karya di bidang legislasi, dia dapat memanfaatkan perannya untuk penganggaran dana pendidikan yang diamanahkan oleh UU sebesar 20 persen dari total APBN setiap tahunnya.

Neni terlibat dalam politik karena masyarakat yang mengantarkan dirinya. “Ibu harus duduk di DPR, tapi ibu harus kembali ke Bontang”, kata mereka. Kalau keinginannya sendiri ialah sebagai dokter kandungan, maka dia merasa asyik dengan praktiknya. Ternyata undang-undang tidak memperbolehkan anggota dewan merangkap jabatan atau profesi, misalnya pengacara, dokter, dan lainnya, maka karirnya sebagai dokter kandungan dia korbankan. Dia memilih mengikuti kehendak masyarakat. Masyarakatlah, terutama kalangan perempuan, yang berperan besar dalam mendorongnya terjun ke politik.

Dia sebetulnya lebih senang menjadi anggota dewan di provinsi. Namun partai menugaskannya untuk duduk di DPR RI, karena suaranya banyak. Akhirnya, partainya memperoleh dua kursi di DPR RI. Di DPR RI, dia pernah ditempatkan di Komisi VII. Banyak masalah sumber daya alam di Indonesia yang perlu diperhatikan, misalnya kekayaan sumber daya alam yang ada di Kalimantan Timur. Kemudian dia dipindahkan ke Komisi XI.

Aktivitas yang pernah dilaksanakannya selama menjadi anggota partai Golkar:

- a. Membuat perayaan *Inclusion International*
- b. Membuat Forum Pemberdayaan Penyandang Cacat (FPPC) yang pusatnya di Bontang, namun cabangnya sudah tersebar di mana-mana. Inilah pencetus pertama tentang sekolah inklusi. Ketika pemerintah Pusat belum berbicara mengenai sekolah inklusi, Bontang sudah membuat sekolah inklusi, di mana orang normal dapat bergabung dengan ‘anak berkebutuhan khusus yang tak terlalu berat’, misalnya autisme dan mongolisme ringan. Dia tidak ingin melihat anak-anak berkebutuhan khusus dianggap sebagai barang aneh, ditertawakan, dan sebagainya. Sekarang, Bontang dikenal sebagai kota ‘inklusi’. Neni mengambil studi di New Zealand tentang sekolah inklusi.
- c. Penghargaan Bina Keluarga Balita

Dia pun aktif membina para waria. Banyak orang yang mempertanyakan sikap Neni dalam membina para waria. Bahkan, dia menerima ‘sms’ keras mengenai sikapnya tersebut. Namun dia memiliki keprihatinan yang tinggi terhadap mereka, dan tetap berpegang teguh untuk menolong mereka, misalnya dengan memberikan pendidikan menyalon. Beberapa di antaranya akhirnya berhasil keluar dari mucikari dan hidup bahagia.

Dia melibatkan para waria untuk bekerja sama dalam mengecat ‘hitam putih’ di jalan-jalan. Dia mengajak masyarakat untuk menyumbangkan pohon dan menanamnya hingga Bontang kerap mendapat penghargaan Adipura dari pemerintah. Saat ini, dinas-dinas pemerintahan masih melanjutkan program-program tersebut, dan terbiasa dengan kerja sama tersebut.

Neni mewariskan sesuatu yang berharga kepada masyarakat Bontang, yaitu partisipasi warganya untuk membangun wilayahnya meskipun dalam bidang yang terlihat sederhana dan kecil. Sewaktu dia menyapu jalan-jalan dalam program 'Jumat Bersih', banyak masyarakat yang diam dan menonton saja. Lama-lama, warga pun ikut bekerja dengannya dalam program tersebut.

Prestasinya selama menjadi anggota DPR RI dalam enam bulan, dia berhasil mendorong Revisi UU No. 33 Tahun 2004 tentang Keuangan Pusat dan Daerah untuk masuk menjadi salah satu prioritas undang-undang dalam pembahasan prolegnas tahun 2015 di Paripurna DPR RI. Sebelumnya, Neni telah berjuang 10 tahun kala menjadi anggota DPRD. Namun hal itu baru berhasil, setelah dia berada di DPR RI.

Pengalaman Pemilu 2014

Motivasi Neni mencalonkan dirinya menjadi anggota dewan karena ingin berkarya secara lebih luas. Dia berpendapat bahwa ruang aktualisasi dirinya untuk pengabdian dan berkarya akan lebih terbuka kalau mempunyai kuasa atau kekuatan atas kebijakan. Kebijakan itu ada di legislatif. Selain itu, dorongan masyarakat yang sangat tinggi membuat dirinya ingin berkarir di jalur regulasi.

Menurutnya, ada tiga fungsi anggota dewan. Salah satu fungsinya ialah penganggaran (*budgeting*) karena anggota dewan perwakilan rakyat berperan dalam membuat anggaran, misalnya anggaran untuk pendidikan.

Pada pemilu 2014, dia berada di nomor urut 5, dengan dapil Kalimantan Timur-Kalimantan Utara. Awalnya, dia tidak ingin dicalonkan sebagai anggota DPR RI. Dia merasa bahwa pengalamannya sebagai anggota DPRD di Bontang sudah cukup lama. Namun partai yang menugaskannya

untuk ikut Pemilu 2014, karena melihat elektabilitas dirinya yang cukup tinggi. Hal ini terbukti dengan kemenangannya di Pemilu 2014.

Syarat untuk menjadi calon anggota dewan di partai Golkar ialah pernah mengikuti pelatihan kepemimpinan nasional yang dilakukan oleh partai. Kalau yang diselenggarakan oleh daerah, maka hal itu tidak berlaku. Bila pelatihan tersebut tidak diikuti, maka tidak bisa menjadi calon anggota legislatif. Kebetulan, dia pernah mengikuti kegiatan tersebut sebanyak dua kali.

Masyarakat yang berperan besar dalam kemenangan Neni di Pemilu 2014 yang lalu. Karena demikian inginnnya masyarakat agar Neni menjadi perwakilan mereka di DPR RI, maka mereka berkata kepadanya, "Ibu, kami akan buktikan kalau ibu bisa duduk di pusat". Ternyata betul, karena 65 persen masyarakat Bontang memilihnya. Ada TPS yang memborong habis suara untuk dirinya, dan tidak tersisa bagi calon lainnya. Ada satu TPS yang terdiri atas 400 pemilih, dan seluruhnya memilihnya.

Kuncinya, kata Neni, apabila kita sayang dan dekat dengan masyarakat, maka mereka juga akan sayang dan dekat dengan kita. Mereka akan ikhlas mendukung kita. Dia menambahkan bahwa sebagai politisi tidak boleh sombong. Sebab jika sombong, maka akan dijauhi oleh masyarakat. SMS perlu dibalas, telpon perlu diangkat, dan nomor Hp jangan berubah. Kedekatannya dengan masyarakat turut menghantarkannya pada kemenangannya meraih kursi di Senayan.

Hingga sekarang, masih banyak perempuan di Bontang yang mendukung Neni, termasuk menjagokannya untuk menjadi walikota. Menurut survei, dia berada di posisi paling tinggi. Pemenangan Neni dalam Pemilu 2014 yang lalu sebenarnya

dilakukan secara sederhana:

- a. Membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat. Hal itu sudah lama dia lakukan. Tanpa komunikasi yang baik, akan berat dikenal dan mengenal masyarakat. Itulah yang terutama. Kalau kita sudah berkarya, maka masyarakat akan melihat dan percaya kepada kita. Jangan membiasakan diri menjadi pragmatis.
- b. Jangan pernah lelah dan harus tetap optimis.
- c. Harus dilihat oleh masyarakat sebagai orang yang mampu sebagai wakilnya. Selain sebagai dokter kandungan, dia pernah menjabat sebagai anggota DPRD sebelumnya. Yang menarik, dia adalah dokter kandungan perempuan pertama di Kota Bontang.
- d. Membuktikan rekam jejak atau bukti nyata keberhasilan, bahwa dia tidak sekadar berbicara, namun bekerja. Selama dia menjabat di DPRD Bontang, indeks pembangunan manusia Bontang meningkat. Pendidikan meningkat dari peringkat 7 di Kalimantan Timur, melesat ke peringkat 2. Karya lainnya ialah insentif untuk guru swasta naik. Insentif untuk perawat swasta yang tadinya tidak ada, menjadi ada. Tentu semua itu dengan aturan-aturan yang ada (tidak diberikan begitu saja).

Alat kampanye yang dipergunakan oleh Neni pada Pemilu 2014 yang lalu sangat minim. Boleh dikatakan seadanya saja. Apalagi untuk 14 kabupaten kota, baginya cukup berat pertarungannya. Dia hanya berkonsentrasi di Bontang. Ternyata, suaranya menyebar kemana-mana. Mungkin karena riwayat kegiatannya yang pernah menjadi dokter, sehingga ada dukungan dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Ia pernah menjadi dosen di universitas dan Akademi Perawat, dan

orang-orang mengenal suaminya sebagai seorang aktivis.

Ada seorang pasien Neni dari Samarinda berkata, “Ibu terlalu baik bagi saya. Di RT saya, ibu pasti menang. Ibu tidak usah mengeluarkan apa-apa. Cukup memberikan kepada kami jilbab yang harganya Rp 9 ribuan untuk 100 orang”.

Neni melakukan cara kampanye antara lain:

- Kalender
- Forum pengajian
- Koran
- Blusukan

Meskipun cara kampanye Neni sangat minimalis, namun berhasil memenangkan dirinya. Dia tidak berkunjung ke Paser, Kubar, Nunukan, dan Bulungan. Dia hanya fokus di Bontang, Samarinda sekitarnya, serta sedikit di Balikpapan.

Total dana yang dikeluarkannya pada Pemilu 2014 yang lalu sebesar Rp 600 juta. Dia dibantu oleh keluarganya. Masa berkampanye dilakukannya dengan biasa saja. Dia hanya menunggu hasil suaranya di KPU. Pembantunya hanya ajudannya yang dia ajak ke mana-mana. Kalau ke pengajian, dia mengajak seorang teman untuk pengajian. Itu pun dilakukan setelah pulang kantor.

Tak ada perencanaan yang sistematis untuk kemenangannya pada pemilu yang lalu. Semua itu dia lakukan secara tradisional. Akan tetapi, dia telah membangun investasi sosialnya sejak menjadi dokter, dosen, dan seterusnya. Di satu sisi, dia yakin akan menang mengingat hasil surveinya yang sangat tinggi. Di sisi lain, dia tetap was-was karena sikap masyarakat yang masih bersifat pragmatis. Dia tidak melibatkan uang dalam pengumpulan suaranya pada Pemilu 2014 yang lalu.

Tak ada tim yang diutus oleh Neni untuk mengawasi suaranya di TPS-TPS. Dia hanya menunggu pengumuman terakhir hasil suaranya di KPU. Faktor 'x' yang menentukan kemenangannya ialah kehendak Allah. Biar pun berusaha maksimal, bila belum dikehendakiNya, maka tidak akan berhasil. Itulah keyakinan dirinya.

Menurut pendapat Neni, apa yang telah dilakukan oleh KPU sejauh ini sudah cukup baik. Yang perlu lebih pro-aktif adalah pihak Bawaslu. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak juga harus lebih aktif dalam mendorong kemenangan calon anggota legislatif perempuan. Apalagi dengan tingkat kekerasan terhadap perempuan yang cenderung naik dan perceraian yang tinggi, maka perlu pemahaman mengenai hal itu ditingkatkan di kalangan calon anggota dewan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan perlu memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya. Perempuan hendaknya maju dalam politik bukan karena belas kasihan, melainkan oleh kemampuannya dan dorongan masyarakat.



NIHAYATUL WAFIROH

NIHAYATUL WAFIROH lahir di Banyuwangi, Jawa Timur, 15 Desember 1979. Saat ini, dia menjadi anggota DPR RI untuk periode 2014-2019 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Pendidikan terakhir yang diraihinya adalah *Master of Art* (MA) dari Universitas Hawai at Manoa, Amerika Serikat. Sejak 2011 hingga kini, dia menjabat sebagai Sekretaris Presidium di Indonesian Social Justice Network, wilayah Jawa.

Pengalaman Berorganisasi

Tak banyak teruraikan informasi mengenai pengalaman berorganisasi Nihayatul Wafiroh. Beberapa kegiatan pernah dia tekuni sebelumnya, seperti menjadi pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Banyuwangi; sekretaris Puan Amal Hayati wilayah Banyuwangi-Situbondo-Bondowoso-Jember; penasihat Fatayat NU anak cabang Tegalsari, Banyuwangi; Pendiri dan Penasihat perpustakaan Komunitas Banyuwangi; sekretaris persatuan mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat cabang Hawai; koordinator bidang kesehatan dan lingkungan hidup Fatayat NU provinsi DIY; pengurus Organisasi Handicap Nusantara Yogyakarta, dan sekretaris presidium Indonesian Social Justice Network wilayah Jawa.

Pengalaman Berpolitik

Dia menjelaskan bahwa dirinya sebelumnya tak memiliki pengalaman politik. Tahun 2004, dia diminta masuk ke partai politik namun menolaknya dengan alasan belum tahu apa-apa. Tahun 2008 saat masih kuliah di Amerika Serikat, ada tiga partai politik yang langsung menelponnya memintanya untuk menjadi calon anggota legislatif di tingkat kabupaten. Lagi-lagi dia menolaknya, karena tidak ingin orang berpikir bahwa dia nepotisme akibat latar belakangnya sebagai keluarga pesantren. Menurutnya, orang harus memiliki kualitas dan kemampuan diri. Tahun 2009, dia pulang dari Amerika Serikat dan berkuliah di Yogyakarta, karena ingin

menghindari politik. Banyak temannya dari partai politik mendatangnya. Ketika itu, dia menjadi konsultan di beberapa LSM untuk melakukan penelitian dan pendampingan masyarakat.

Suatu waktu, dia dikirim formulir dan diminta menyerahkan kembali formulir itu sehari sebelum tenggat waktunya. Alasannya, sudah waktunya dia terjun ke dunia politik. Selama ini, dia berkoar-koar di luar, tetapi pemegang kebijakannya tiada yang mumpuni. Dia pernah bertemu dengan anggota dewan perwakilan rakyat di daerah yang tidak bisa apa-apa, tetapi masuk partai politik, karena bapaknya pengurus cabang partai.

Kelemahan perempuan untuk masuk ke partai politik ada pada perempuan itu sendiri dan masalah dana. Beberapa perempuan memiliki modal sosial yang baik, namun dananya tidak ada. Dia berpendapat bahwa politik kita seperti *sandwich*, yang bawah harus diperkuat demikian pula yang di atasnya. Dia lebih sering memperkuat yang di bawahnya, yaitu pemberdayaan masyarakat. Akan tetapi, bila yang di atasnya tidak diperkuat, maka bukan *sandwich* namanya. Yang namanya *sandwich* harus *bottom-up* rotinya, dan lapisannya di tengah-tengah. Inilah yang membuat dia mengatakan 'ya' untuk terjun ke dunia politik.

Itu bukanlah suatu keputusan yang singkat, karena dia memerlukan waktu yang panjang untuk dapat mengatakan 'ya'. Saat itu, dia masih ragu-ragu dan berpikir bahwa dia tidak memiliki dana. Apa yang harus dilakukan dan bagaimana dengan idealismenya? Banyak hal harus dipertimbangkan dirinya. Itulah yang membuat dirinya selalu berada di posisi nol. Dia merasa di posisi nol kalau terpilih, dan kalau tidak, dia masih mempunyai kegiatan lainnya. Politik hanya salah satu jalan untuk berkembang, mengeksplorasi diri dan

sebagainya. Ketika dia berkampanye banyak pertanyaan seperti ini, “Apa yang kamu lakukan ketika menang?” Ini hanya pertanyaan umum. Masalahnya begini, “Kalau kamu tidak terpilih, kamu mau apa?”

Sebenarnya masyarakat ingin memastikan bahwa kalau dia tidak terpilih dia masih dapat beraktivitas dalam pemberdayaan masyarakat. Dia mengatakan kepada masyarakat di daerah pilihannya bahwa dia mahasiswa dan bekerja di LSM. Dia menjelaskan kepada mereka berapa gajinya per hari sebagai konsultan. Artinya, dia ingin menunjukkan bahwa dia masih dapat hidup meskipun tidak di politik. Untuk ikut di politik, dia harus menunda berbagai kegiatannya, seperti mengelola perpustakaan komunitas, menjadi pembicara, dan sebagainya.

Pandangan Nihayatul terhadap partai politik cukup kritis, misalkan tentang rekrutmen dengan menyebarkan nama-nama calon anggota legislatif karena kebingungan menerapkan kebijakan afirmasi 30 persen. Hal ini menunjukkan bahwa partai-partai politik di Indonesia kesulitan dalam meregenerasi kader partai yang perempuan. Mekanisme partai, menurutnya, tidak terbuka untuk umum. Artinya, hanya kader partai terkait yang berhak untuk menjadi calon. Dia secara kultural adalah NU, dan dekat dengan PKB. Namun secara organisatoris, dia tidak pernah terlibat dengan partai tersebut. Selama ini, dia kritis terhadap partai, namun akhirnya diminta partai untuk terlibat. Mungkin karena modal sosialnya selama ini yang dimilikinya cukup kuat. Dia berharap agar kebijakan afirmasi tersebut di kepengurusan partai politik berjalan konsisten dan konsekuen. Di PKB menurutnya, kebijakan itu telah berjalan. Di partai Nasdem dan di Hanura berjalan, namun yang lainnya tidak. Ada partai politik yang meminta isteri-isteri kader mereka masuk ke parpol guna mengisi kebijakan afirmasi terkait.

Pengalaman Pemilu 2014

Ketika masuk ke PKB untuk menjadi calon anggota legislatif dari partai ini, Nihayatul harus tawar-menawar banyak hal dengan partai. Dia merasa bahwa dia mempunyai massa pendukung. Kebetulan keluarganya berasal dari pesantren yang terbilang besar di kabupatennya. Setidaknya, dia memiliki modal sosial yang cukup. Membandingkan keterampilan akademis dan pemberdayaan dengan calon lainnya, menurutnya, dia mampu bersaing. Oleh karena modal itu, dia berani tawar-menawar dengan partai. Dia mengatakan ke partai, “Saya ingin nomor urutnya satu atau dua, kalau nomor tiga, saya tidak mau. Saya akan berpikir apakah saya mau terus atau tidak!” Ketika itu, dia diberi nomor satu, namun dia menginginkan agar diberi nomor dua, karena partainya (PKB) bernomor dua. Dia lalu diberi nomor urut dua. Dan nomor ini juga mudah diingat oleh orang.

Dia mengatakan ke partai, bahwa dia tidak memiliki uang. Kalaupun ada, uang itu hanya cukup untuk membayar uang kuliahnya. Kalau partai ingin membantu calonnya agar terpilih, maka bantulah. Partai memang membantunya membuatkan spanduk. Sebetulnya untuk nomor urut dua, dia tidak ‘ngotot’, karena hal itu bersifat terbuka. Tetapi dia harus realistis, karena masyarakat belum 100 persen terdidik. Mereka pasti lebih senang memilih nomor satu. Hal itu yang membuatnya berpikir untuk memperjuangkan nomornya agar terpilih. Dan yang lebih menarik, yang banyak menyerang dirinya selama pencalonan, justru berasal dari sesama calon anggota legislatif perempuan.

Tentang tim pemenangan dalam proses pencalonannya, Nihayatul menjelaskan bahwa di AD/ART memang ada tim khusus agar para calon dari partai dapat terpilih. Di PKB,

menurutnya, ada tim pemenangan pemilu. Terkait dengan nomor urut, maka nomor urut 1-3 biasanya diisi oleh para petahana. Dan jelas petahana nomor urut 3 marah kepadanya, ketika dia mendapatkan nomor urut dua. Namun itu terjadi, karena dia melakukan tawar-menawar dengan partai. Di tingkat massa pendukung, banyak yang mendorongnya agar dia maju menjadi calon legislatif. Hingga daftar caleg tetap (DCT) dikeluarkan oleh KPU, waktu itu dia masih berada di Boston, Amerika Serikat. Dan kala itu dia ditanya, mengapa tidak kembali?

Sebelum kembali ke Indonesia, dia sudah menggerakkan mesin-mesin dan relawannya di daerah pemilihannya, karena sudah memiliki target untuk terpilih. Sebelumnya, dia tak dikenal orang di daerah pemilihannya. Hanya 0,2 persen yang mengenalnya melalui surat kabar, karena sering menulis di Radar Banyuwangi. Setidaknya, dia menulis sebulan sekali untuk mempertahankan namanya tetap dikenal orang melalui surat kabar itu. Bulan Agustus-September, targetnya agar orang akrab dengan namanya. Bulan Januari, dia langsung turun ke daerah pemilihan meskipun banyak orang menyarankan untuk menggunakan para alumni pesantren. Keluarganya turut serta membantunya di daerah pemilihan tersebut. Yang menarik menurutnya, penerimaan masyarakat dapat dilihat dari jabatan tangan erat mereka. Maka tipsnya, pertama, berjabat tanganlah dengan mereka. Kemudian, pakailah bahasa daerah pemilihan. Dia selalu menggunakan bahasa Jawa bila berkomunikasi dengan masyarakat di daerah pemilihannya. Dia dikritisi oleh para politisi laki-laki karena terlalu banyak bercerita. Mengapa dia banyak bercerita soal perempuan di Banyuwangi? Karena baginya, di daerah pemilihan itu banyak persoalan perempuan yang perlu dibicarakan, misalnya masalah tenaga kerja, pendidikan, kesehatan reproduksi, kematian ibu-anak, dan lainnya. Yang

tahu tentang pengalaman itu, menurutnya, adalah kalangan perempuan.

Persoalan itu dia sampaikan ke masyarakat di daerah pemilihannya dan selalu mengatakan, “Jangan pernah berharap saya memberikan uang ke anda, karena sekali anda meminta uang dari saya, maka anda menumbuhkan bibit korupsi di saya!” Nihayatul hanya memberikan uang transpor ke timnya, karena sudah membantunya di lapangan. Politik uang (*money politics*) baginya berbeda dengan bea politik (*political costs*). Dia tidak menunjukkan kekayaan atau harta yang dimilikinya. Dan orang Madura atau Jawa Timur berpandangan, bahwa keluarga Kyai itu tak dapat disentuh. Namun ketika melihat dirinya, mereka heran karena sebagai Nyai (anak Kyai) mau bertemu dan bersinggungan dengan rakyat.

Nihayatul melihat banyak calon anggota legislatif perempuan tak siap bersaing. Dia tak pernah berpikir bahwa sesama calon perempuan adalah lawan bersaing. Dia memiliki tim konsultan yang secara rutin mengirimkan laporan-laporan kepadanya tentang posisinya seperti apa di masyarakat di daerah pemilihan. Sebetulnya, dia tahu posisinya di mana setiap saat. Lawan bersaingnya malah menyebutkan bahwa dia bukan orang Banyuwangi asli, bukan NU, karena kuliah di Amerika. Padahal, dia pernah menjadi ketua Keluarga Nahdlatul Ulama (KNU) di Canada. Di Canada kerap diadakan tahlilan *on-line* melalui *skype*. Bahkan ada pesaingnya yang mengatakan, “Sudah jangan memilih orang pesantren, karena uangnya dialirkan ke pesantrennya sendiri!”

Banyak perempuan melupakan organisasi perempuan. Dia selalu memegang organisasi perempuan, karena sebetulnya perempuan itu sangat taat dan setia pada suaranya. Pada malam menjelang pencoblosan, tim Nihayatul berkeliling

membawa contoh surat suara. Dia mencetak 20-30 ribu contoh surat suara. Timnya memberi contoh kepada masyarakat bagaimana memilih dan mencoblos surat suara. Hal ini sering dilupakan calon-calon anggota legislatif, yaitu ketidatahuan pemilih dalam proses memilih. Hal lain yang menyebabkan mereka gagal terpilih, karena mereka terlalu percaya diri.

Nihayatul membentuk tim pemenang di tiap kecamatan sebanyak dua orang, yaitu laki-laki dan perempuan. Kalau kecamatannya luas, maka jumlahnya bisa mencapai 3-4 orang. Di satu desa, paling tidak ada satu orang relawan. Mereka diberi uang Rp 100 ribu selama dua bulan kerja. Yang lebih banyak adalah relawan, dengan mengedepankan para alumni. Dia juga yang menentukan koordinator kecamatan. Koordinator kecamatan memberikan usulan untuk satu desa. Desa berkoordinasi dengan kecamatan, dan kecamatan berkoordinasi langsung kepadanya. Dia pun berbagi tugas dengan timnya. Kalau urusannya dengan alat peraga, baliho, spanduk, kalender, kartu nama, maka berhubungan dengan bapak Nihayatul. Bila urusannya dengan mengundang pengajian atau ke sana ke mari, maka berhubungan dengan ibunya.

Biasanya Nihayatul berkumpul setiap malam dan berkoordinasi mengenai kemajuannya. Ibunya biasanya memberitahukan ke mana dan di mana ada undangan pengajian. Bapaknya memberitahukan soal konflik di tim, dan adiknya mendistribusikan alat-alat kampanye, sedangkan adiknya yang satunya bertugas mengumpulkan tim-tim pemenang. Fungsi tim pemenang, menurutnya, banyak. Konsep kampanyenya yaitu bahwa di tiap kecamatan harus ada spanduk, dan di tiap desa harus ada satu spanduk. Dia mengatakan kepada tim-timnya, "Kalian bukan hanya mengantarkan saya ke Senayan, tetapi kalian

harus mengawal saya ketika saya sudah di Senayan!" Maka dia kerap mengumpulkan tim kecamatannya, karena mereka yang paling tahu aspirasi-aspirasi masyarakat di bawah. Biasanya kalau ada yang meminta apa-apa di masyarakat, maka tim kecamatan akan memverifikasi kebenarannya. Dan permintaan itupun belum tentu langsung disetujui, karena akan diverifikasi oleh Muslimat dan Fatayat. Organisasi perempuan inilah yang paling banyak membantu dirinya, namun merekalah yang paling tidak mampu membuat proposal dan sebagainya, sehingga mereka kerap ditinggalkan. Mereka akan tahu dia menurunkan dana di mana.

Pasca penghitungan suara, Nihayatul menempatkan sejumlah saksi di beberapa daerah pemilihan, karena keterbatasan dana. Dia berfokus di Banyuwangi, karena menurutnya, dari daerah itu dapat memenangkan dirinya. Daerah pemilihan Situbondo dan Bondowoso dia jadikan satu, karena di Bondowoso permainan politiknya sangat curang. Dia menyebarkan banyak selebaran, brosur, dan poster berkali-kali di daerah pemilihannya. Sebulan sekali semua alat kampanye dia ganti dengan yang baru, karena ada yang hilang juga. Dia melihat ada timnya yang nakal juga, sehingga spanduknya tidak dipasang, namun disimpan di rumah mereka. Dia tidak ingat berapa jumlah semua alat kampanye tersebut. Dia melakukan *sms* ke tim-timnya dan melaksanakan kampanye melalui media sosial, seperti *Fanspage, website, twitter, facebook*. Semua itu, menurutnya, berjalan baik. Dia pun melakukan *talkshow* di radio-radio di daerah pemilihannya. Setelah menjadi anggota dewan pun, dia masih mendatangi radio-radio di mana dia dulu *talkshow*.

Selama pencalonan, dia tidak pernah mendapat sosialisasi dari KPU. Partainya hanya membicarakan strategi kemenangan pemilu untuk PKB. Menurutnya, dia lebih banyak belajar sendiri. Dapat dibayangkan menurutnya,

apabila para calon anggota legislatif tidak proaktif mencari pengetahuan dan pengalaman sendiri. Dalam aturan KPU terdapat aturan tentang alat peraga, namun selama ini calon anggota legislatif membuat banyak alat peraga di desa-desa dan kelengkapan lainnya. Hal itu terjadi menurutnya, karena KPU tidak pernah menyosialisasi aturan-aturan yang ada terkait dengan pemilu.

Pada pencalonan yang lalu, Nihayatul hanya menyetorkan data diri kemudian partai mengurusnya. Partai, menurutnya, begitu mendukungnya. Dia mengetahui bahwa PKB banyak mendukung para calon yang memiliki kemampuan, namun tak mempunyai dana seperti dirinya. Ada yang mendapat dukung 25, 50, 75 persen dari PKB, bahkan ada yang 100 persen. Dukungan partai tersebut berbentuk logistik, seperti spanduk dan sebagainya. Untuk meningkatkan kualitas calon anggota legislatif, maka di internal partai diadakan pendidikan-pendidikan. Dia terlibat dalam penyiapan peningkatan kapasitas calon di internal PKB. Mereka melakukan diskusi sebulan sekali. Untuk internal partai, ada pelatihan untuk memahami anggaran, membuat RUU, dan lainnya.

Bagaimana keterkaitan calon anggota legislatif perempuan dengan peran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak? Menurut Nihayatul, kementerian perempuan tidak melakukan sosialisasi mengenai hal tersebut. Dia hanya pernah bertemu dengan kementerian kesehatan untuk membicarakan masalah kesehatan reproduksi perempuan. Dengan para aktivis perempuan di Jakarta misalnya, dia menyarankan agar secara nyata membantu calon anggota legislatif perempuan, jadi tidak hanya berkoar-koar.

Sebelum berkampanye, Nihayatul dibantu oleh beberapa LSM untuk melakukan kajian pintas mengenai apa yang

akan dia lakukan di daerah pilihannya. Dia menemukan tiga isu yang menjadi fokus kampanyenya ketika itu, yakni pendidikan, kesehatan reproduksi, dan kewirausahaan. Semua isu tersebut saling terkait satu sama lain untuk aspirasi perempuan. Di kampung halamannya sendiri, isu perkawinan anak (*child married*) sangat tinggi, dan hal itu berkaitan dengan budaya, pendidikan, dan ekonomi. Ada yang ekonominya tinggi, namun budaya dan pendidikan masih rendah, maka perkawinan anak tetap terjadi. Ujung-ujungnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga, angka kematian ibu yang tinggi, dan angka kematian bayi juga tinggi. Secara fisik mungkin mereka telah siap hamil, namun secara psikis tidak.

Menurut Nihayatul, pandangan perempuan di daerah pilihannya mengenai perempuan yang terjun ke politik, tentu mendapat tentangan. Karena itu, ketika berkampanye dia selalu mengatakan mengapa harus perempuan. Baginya, ketika berkampanye masalahnya bukanlah tentang idealisme. Dia belum pernah mendengar secara langsung, kecuali dari orang dekatnya, tentang mengapa perempuan berpolitik. Mungkin mereka melihat ibunya Nihayatul yang bertahun-tahun bergabung di Muslimat NU dan lainnya.

Pendapat Nihayatul mengenai pandangan laki-laki di partainya tentang kesetaraan gender, menurutnya, hanya PDIP yang pemimpinnya perempuan. Namun dalam pemilu yang lalu, banyak partai yang mendukung calon perempuan. Baginya setiap kali reses, dia selalu membawa tema tertentu untuk disampaikan, misalnya manajemen komunikasi.



SUSI MARLENY BACHSIN

SUSI MARLENY BACHSIN lahir di Jakarta, 19 November 1960. Saat ini, dia menjadi anggota DPR RI untuk periode 2014-2019 dari Partai Gerindra. Pendidikan terakhir yang diraihny adalah Magister Manajemen dari Sekolah Tinggi Manajemen (STIMA) IMMI, Jakarta. Dia pernah menjabat sebagai Asisten Manajer di PT Purna Karim Jakarta.

Pengalaman Berorganisasi

Sebelum terlibat dalam politik, Susi adalah ibu rumah tangga. Dia memang tak terlalu aktif dalam berorganisasi. Menurutnya, hal itu dapat dipelajari asalkan ada kemauan. Dia menaruh perhatian yang besar terhadap persoalan-persoalan sosial. Sekitar 20 tahun lalu, dia pernah terlibat dalam kegiatan sosial di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta. Dia membantu mencari pasien cacat jantung yang akan diberi bea gratis untuk operasi. Dia mengaku menikmati kegiatan itu, bahkan setelah setahun menikah, dia berniat ke Ethiopia Afrika untuk melayani orang-orang miskin di sana.

Pengalaman Berpolitik

Susi mulai berkecimpung di Partai Gerindra tahun 2009. Ia mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Dengan waktu sekitar 5 bulan untuk persiapan yang seadanya, bahkan pendaftaran mau tutup, maka ia harus menerima kegagalannya. Selanjutnya, dia diangkat menjadi ketua DPD Bengkulu. Kala itu, dia satu-satunya ketua DPD perempuan dari Partai Gerindra. Dialah ketua perempuan yang memimpin rapat yang anggotanya didominasi oleh laki-laki.

Menurutnya, tidak ada pungutan uang satu sen pun ketika masuk ke partai Gerindra. Sebaliknya, partai pun tidak memberi uang kepada calonnya. Dari empat orang anggota DPR RI yang berasal dari Bengkulu, hanya dia yang

mendirikan rumah aspirasi. Namun dia berpesan kepada warga masyarakat agar menyampaikan aspirasinya yang bersifat mendesak (*urgent*) dan berskala nasional (mewakili bukan hanya satu daerah). Partai Gerindra menerapkan kebijakan afirmasi 30 persen untuk anggota perempuan, dan hal itu tercapai. Partai Gerindra tidak mempersoalkan laki-laki atau perempuan, sejauh memiliki kompetensi.

Di partai Gerindra, sebelum pemilihan (pasca mendaftar), calon anggota legislatif dipanggil untuk pengaderan. Tempatnya di Bogor, selama sembilan hari mereka dikarantina. Mereka diberi pengarahan. Bagi Susi, acara ini menumbuhkan kekompakan di antara sesama calon.

Pengalaman Pemilu 2014

Awalnya, Susi tidak berkeinginan menjadi anggota dewan. Rekan-rekannya banyak yang sudah bergabung ke partai dan mengajaknya ikut serta. Namun waktu itu, dia merasa belum ada kesempatan. Tahun 2009, pendaftaran dilakukan ketika waktunya sudah akan tutup dan ia mengalami kegagalan. Dari kegagalan itu, dia mengevaluasi bahwa pemetaannya belum tepat, karena benar-benar harus diketahui apa yang menjadi kekuatan di daerah pilihannya, dan lainnya.

Dia kerap berkunjung ke daerah dan melihat realitas kehidupan masyarakat dengan mata kepalanya sendiri. Dia heran ketika melihat daerah yang tidak mengalami perbaikan apa-apa, sementara daerah tersebut memiliki wakilnya di DPR. Ia menerima banyak aspirasi dari masyarakat. Dia ingin memperjuangkan aspirasi tersebut. Akhirnya, hal itu menjadi panggilan baginya untuk berkecimpung dalam politik. Inilah yang menjadi motivasinya dalam mencalonkan diri pada Pemilu 2014 yang lalu.

Untuk mencairkan pemikiran dan pengetahuannya, dia bergaul dan berkomunikasi dengan banyak orang yang lebih senior dan berpengalaman di partainya. Akhirnya, dia maju dengan kemampuan dan persiapan yang sudah dimilikinya.

Bengkulu adalah wilayah yang menjadi daerah pemilihan Susi. Kursi di DPR RI untuk Bengkulu sebesar 4,75 persen dan yang lolos pemilu adalah perempuan serta satu laki-laki. Jadi, pertarungannya sangat sengit. Baginya, kemenangannya di Pemilu 2014 lalu belum selesai. Hal itu merupakan awal, karena dia harus bertanggung jawab kepada pemilihnya. Setiap reses, dia selalu ke konstituen membawa programnya.

Pemilu 2014 lalu, Susi berada di nomor urut 1. Namun dari sisi suara, ia memperoleh peringkat ketiga dari empat kursi. Walaupun perempuan, namun hal itu tak menjadi halangan baginya untuk terjun ke politik. Selama enam tahun, Susi pulang pergi Jakarta-Bengkulu. Hal ini tentu melelahkan, namun tetap dikerjakannya.

Salah satu yang memenangkan Susi menjadi anggota dewan ialah faktor hubungan sosial. Dia memiliki banyak keluarga di Bengkulu. Dia asli dari selatan Bengkulu. Dia mengunjungi keluarga dan meminta restu serta bantuan mereka.

Dalam proses kemenangan di daerah pemilihan, dia tidak melakukan politik uang (*money politics*). Memang dia mempergunakan dana untuk timnya, karena mereka membutuhkan uang transpor, konsumsi, dan lainnya. Termasuk kalau Susi melakukan kunjungan ke wilayah yang medannya sangat sulit, dan sering harus menginap di sana. Kisaran dana yang dihabiskan dalam Pemilu 2014 lalu sebesar Rp 3 milyar. Dana ini paling banyak terserap dalam bea logistik untuk mendatangi warga di Bengkulu, yang medannya berat dan penuh tantangan.

Susi mengikuti pendaftaran calon anggota legislatif sesuai dengan prosedur yang ada. Dia memasukkan berkas pendaftaran, dan meskipun ketua DPD Gerindra Bengkulu, namun dia tidak meminta nomor urut. Partainya yang menentukan nomor urutnya.

Pengalaman Susi selama berkampanye adalah unik. Ia mendatangi warga ke Pedalaman Kepahiang, Rejang Lebong, dan Lebong. Daerah-daerah tersebut berada di pegunungan. Saat memperkenalkan dirinya ke masyarakat, dia harus menginap di rumah-rumah warga. Yang menarik ialah saat dia diangkat sebagai anak di daerah tersebut.

Cerita lainnya ialah ketika dia menginap di rumah seorang warga yang usianya 100 tahun. Kayu rumahnya sangat licin dan enak untuk ditiduri. Malam hari Susi disuguhi makanan dengan sambal, yang menyebabkan dirinya sakit perut. Karena toilet tidak memadai, dia kesulitan menggunakan kamar mandi di rumah tersebut. Akhirnya, terbersit ide di kepalanya untuk membuat kamar mandi.

Pengalaman menarik lainnya saat mengunjungi daerah pemilihan, dia harus tidur di mobil di jalanan. Ketika sedang menuju ke suatu daerah, tak jarang jembatannya putus, sedangkan jalanan gelap, dan di sekitarnya hanya pohon kelapa sawit.

Susi tidak banyak menyampaikan visi dan misinya selama berkampanye. Dia hanya menyatakan niatnya berusaha memenuhi permintaan warga, jika terpilih menjadi wakil rakyat. Dia tidak memiliki tim pemenang pada pemilu yang lalu. Tidak ada tim khusus untuk mengampanyekan kegiatannya. Dia sendiri yang turun tangan dibantu oleh keluarganya. Tim pemenangannya adalah keluarganya sendiri dan dibantu oleh kader-kader partai Gerindra. Ada juga relawan-relawan yang membantunya.

Susi memperkenalkan dirinya kepada warga masyarakat tiga tahun sebelum masa kampanye Pemilu 2014 berlangsung. Dia tidak secara resmi mendeklarasikan dirinya, namun tetap mengunjungi dan bersilaturahmi dengan masyarakat. Waktunya sangat singkat, sehingga tiga tahun itu tidak terasa baginya.

Sarana berkampanye, yang dia lakukan antara lain:

- a) Blusukan (temu muka). Saat blusukan, Susi selalu memakai bahasa sehari-hari yang mudah dimengerti oleh warga masyarakat di daerah pemilihan, dan bukan bahasa resmi atau 'bahasa tinggi' yang terdengar sulit di kalangan akar rumput.
- b) Forum pengajian
- c) Program teve yang difasilitasi oleh partai Gerindra
- d) Radio
- e) *Facebook*
- f) Media cetak
- g) Bendera
- h) Baliho
- i) Kaos

Susi aktif di kalangan kelompok disabilitas. Hari ulang tahun kelompok disabilitas yang pertama kali di Bengkulu diselenggarakan olehnya. Orang-orang disabilitas mampu membatik, dan itu berkat dana dukungannya sendiri. Dia mengundang 450 orang disabilitas, namun yang datang malah 600 orang. Mereka datang dari berbagai daerah. Selama dua hari acara tersebut dilakukan dengan tujuan membuka pemahaman ibu-ibu agar tidak malu dengan kondisi anaknya yang difable, sehingga tak perlu mengurung mereka di rumah. Kendala yang dihadapi selama berkampanye yaitu menghadapi orang yang lanjut usia yang buta huruf, sehingga

sulit menyosialisasikan pemilu kepada mereka. Tidak ada foto dirinya sebagai calon legislatif, sementara kalau harus menjelaskan nama dan nomor urutnya, tentu sulit karena mereka buta huruf.

Menurut Susi, dibandingkan Pemilu 2009, maka aturan pada Pemilu 2014 yang lalu jauh lebih ketat. Namun, dia lebih menyetujui aturan Pemilu 2014. Dia juga menyetujui peraturan yang melarang penggunaan baliho, karena akhirnya menimbulkan sampah serta memicu perselisihan antar calon.

Menurutnya, KPU perlu mengakomodir kebutuhan pemberi suara yang buta huruf dengan menyediakan foto di lembar surat suara yang tersedia. Karena bila hanya nama dan nomor urut calon yang tercantum, maka menyulitkan bagi mereka, termasuk mengakomodir kebutuhan orang lanjut usia yang sulit mengingat nama dan nomor urut calon. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, menurutnya, peranannya harus lebih jelas dan benar-benar merealisasikan programnya. Belum ada komunikasi atau koordinasi yang intensif antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak dengan anggota legislatif perempuan.



NANY RAHAYU BASUKI

NANY RAHAYU BASUKI, atau lebih dikenal sebagai Yayuk Basuki, lahir di Yogyakarta, 30 November 1970. Saat ini, dia menjadi anggota DPR RI untuk periode 2014-2019 dari Partai Amanat Nasional (PAN). Pendidikan terakhir yang diraihinya adalah SMA (SMA Ragunan Jakarta). Yayuk memang lahir di Yogyakarta, namun saat kecil dia sering bertanding tennis di Semarang dan sekitarnya.

Pengalaman Berorganisasi

Menurut Yayuk Basuki, sebelum terjun ke politik praktis, dia terlibat dalam organisasi olah raga. Dia menjadi representasi WTA profesional, sebagai anggota komisi peradilan Federasi Tennis Internasional, tim pengawasan Kemenpora, dan ketua umum PBPLT. Pernah menjadi Tim Monitoring Kementerian Pemuda dan Olahraga dan dan pembina bibit-bibit atlet tennis di Yayuk Basuki Tennis Academy. Dia juga menjadi Wakil Ketua Umum PP Pelti.

Pengalaman Berpolitik

Yayuk Basuki kali pertama terlibat dalam politik saat direkrut oleh Partai Amanat Nasional tahun 2013. Di partai ini, dia menjadi wakil sekjen. Menurutnya, PAN mampu memenuhi kuota 30 persen calon anggota legislatif perempuan, bahkan yang bukan kader pun bila memiliki kemampuan, maka partai akan merekrutnya. Tentang pendanaan partai, dia mengatakan bahwa ada dukungan dukungan dari anggota PAN agar partai terus hidup.

Pandangan Yayuk Basuki mengenai kehidupan demokrasi ialah, bahwa demokrasi kini menuju perubahan yang jauh lebih baik atau positif. Saat ini, orang bebas mengemukakan pendapatnya, meskipun dalam proses hukum masih terjadi tebang pilih. Dalam pandangannya, demokrasi yang dilaksanakan oleh Susilo Bambang Yudhoyono yang lalu, patut untuk kita apresiasi. Dia menjelaskan bahwa motivasi

utamanya untuk menjadi anggota dewan ialah memperbaiki olah raga nasional. Dia terus berjuang agar ada regulasi yang mengatur jaminan hari tua atlet. Dia juga *concern* terhadap anggaran untuk olahraga, khususnya olahraga prestasi.

Yang melatar belakangi Yayuk Basuki terjun ke dunia politik karena ia miris melihat atlet dan olahraga nasional minim prestasi. Dia optimis mengapa terjun ke dalam sistem agar dapat langsung merumuskan regulasi dan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah.

Dia memahami fungsi dewan adalah penganggaran (*budgeting*), pengawasan, dan legislasi. Anggota dewan perwakilan rakyat tak hanya memproses anggaran, namun juga mengawasinya. Menurutnya, tugas pengawasan ini sangat berat untuk diterapkan. Dia berpandangan bahwa citra DPR akhir-akhir ini cukup negatif. Untuk mengembalikan citra itu agar menjadi positif memang tidak mudah. Masyarakat selalu menilai dewan secara negatif, karena isu-isu yang berkembang belakangan ini. Dia sendiri berada di Komisi X yang memusatkan diri pada bidang pendidikan, misalnya bagaimana kesiapan untuk ujian nasional. Saat ini, ujian nasional telah mulai terkomputerisasi. Namun demikian, banyak temuan selama ujian nasional yang harus dievaluasi bersama dengan kemendikbud. Demikian pula persoalan dalam bidang olah raga. Dia berharap bahwa APBN digunakan tepat sasaran dalam rangka pengembangan olah raga.

Pengalaman Pemilu 2014

Daerah pemilihan Yayuk Basuki adalah Jawa Tengah 1. Daerah pemilihan Jawa Tengah 1 yang meliputi Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Kendal. Menurutnya, penentuan daerah tersebut diserahkan kepadanya ketika dia direkrut oleh PAN. Dia

memutuskan untuk memilih Jawa Tengah 1, karena dia lahir di Yogyakarta dan orangtuanya juga di Yogyakarta. Selain itu, bagaimana secara bersama-sama membesarkan PAN. Di daerah pemilihan tersebut ada massanya Amien Rais.

Menurut Yayuk Basuki, ketika pemetaan dia sadari bahwa dia tidak memiliki banyak pengalaman dalam berpolitik. Alvin Lie adalah mentornya dan membantu apa yang yang dia butuhkan dan mencari siapa yang dapat dipercaya. Akhirnya, dia membentuk banyak relawan. Relawan ini baru ada akhir Pemilu 2014 yang lalu, dan banyak dari kalangan mahasiswa. Dia memilih relawan untuk perubahan dan perbaikan. Dia mengartikan perubahan secara luas, yaitu dari berbagai sisi dan lini. Karena itu, dia memandang perbaikan itu perlu. Di samping itu, dia mempergunakan juga mesin partainya, namun bea politiknya akan lebih tinggi. Apabila memakai kalangan mahasiswa, karena mereka penuh dengan idealisme yang tinggi, maka visi dan misinya lebih mengena.

Dalam pemilu legislatif yang lalu, Yayuk memang mempergunakan para relawan untuk mensosialisasikan visi-misinya menjadi anggota dewan. Relawan tersebut banyak diisi oleh pemuda dari kalangan mahasiswa maupun komunitas dan pegiat soial. Para relawan tersebut juga mengelola rumah aspirasinya, yaitu Yayuk Basuki Center. Dia sadari bahwa *cost* politik yang dikeluarkan saat kampanye kemarin tidak terlalu besar, karena relawan yang mendukung Yayuk memiliki idealisme yang kuat. Alasan *cost* politik pulalah yang menyebabkan Yayuk tidak menggunakan mesin partai di dapilnya dalam pemilu yang lalu.

Dari hasil survei tim, Yayuk menjelaskan bahwa calon pemilih di daerah pemilihan Jateng 1 itu ada 70 persen bersikap pragmatis dan 30 persen bersikap idealis dan apatis. Dengan tekad penuh dan ikhtiar kepada Allah, Yayuk mencoba

merangkul yang 30 persen tersebut. Karena ia meyakini, bahwa masih banyak konstituennya yang menginginkan negara ini maju serta diwakilkan hak konstitusinya oleh orang-orang yang baik.

Empat Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh empat koordinator. Empat orang ini membawahi koordinator Kecamatan di masing-masing wilayahnya. Pada Pemilu 2014 yang lalu, dia juga memperhatikan kasus-kasus perempuan di daerah pemilihannya terutama di Kota dan Kabupaten Semarang yang cukup tinggi angka kekerasan terhadap perempuan.

Saat ditanya, apakah Yayuk Basuki memperjuangkan hak-hak perempuan? Yayuk ikut serta dalam Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI). Dia merasa bahwa dia berjuang tidak hanya untuk perempuan, tetapi untuk laki-laki juga. Oleh karena dia pelaku olah raga, maka eksistensi olah raga di negara ini penting. Untuk perjuangan kepentingan perempuan, karena dia sendiri perempuan, maka dia ingin agar dalam pemberian hadiah kepada atlet olah raga tidak terjadi diskriminasi. Dia dulu melihat ada perbedaan dalam pemberian hadiah antara atlet perempuan dengan atlet laki-laki. Dari situlah perjuangan kesetaraan gender dibangun. Mungkin saja kompetisi olah raga tertentu berat bagi laki-laki, namun atlet perempuan juga merasakan beban yang sama. Dengan demikian, tahun 1994 hadiah yang diberikan kepada para atlet mulai disetarakan antara atlet perempuan dan laki-laki, namun itu baru berlaku di luar negeri. Kalau di dalam negeri, masih terjadi perbedaan pemberian hadiah antara atlet laki-laki dengan perempuan, karena dianggap kualitas perempuan dan laki-laki berbeda?

Bagaimana Yayuk Basuki memanfaatkan modal sosial dalam pencalonannya? Dia mengatakan bahwa peran media,

komunitas olah raga dan masyarakat umumnya, cukup membantunya. Oleh karena masa kampanye pemilu tidaklah panjang, maka dia mengoptimalkan peran media. Modal ekonomi yang dia sediakan selama pemilu sebesar Rp 1,5 milyar. Daerah pemilihannya luas, maka dia membuat tim kemenangan. Dia menyediakan dana bulanan untuk timnya tersebut. Hal itu merupakan bea politik dan operasional. Apakah ke pelosok-pelosok tidak memakai dana? Di masing-masing daerah, dia menempatkan 10 orang relawan dan jumlah keseluruhannya kurang lebih 35 orang. Dia memiliki posko kemenangan dengan 150 orang koordinator yang mengordinasi relawan-relawan.

Setelah ada dalam Daftar Calon Tetap (DCT), baru dia memulai sosialisasi ke daerah pemilihannya. Dia melakukan tatap muka, berdialog, mendatangi pengajian-pengajian ibu-ibu, rapat-rapat RW/RT, dan membagikan leaflet-leaflet ke rumah-rumah untuk berpolitik bersih. Selama pemungutan suara, dia menempatkan relawan-relawan di TPS-TPS. Merekalah yang mengawasi jalannya pemungutan suara dan perolehan suaranya. Menurutnya, para relawan tersebut mampu melakukan tugasnya. Dia hanya menerima laporan-laporan dari lapangan atau daerah pemilihan saja.

Dalam kaitan peran KPU selama pemilu, dia menjelaskan bahwa KPU sangat kurang sosialisasinya. Dia menyadari, bahwa aturannya hanya begini dan begitu. Dia hanya membaca aturannya seperti apa, apa yang harus dilakukan, dan apa yang tidak boleh dilanggar. Namun ada calon anggota legislatif yang melanggarnya. Dan bila terjadi kecurangan-kecurangan oleh para calon dalam pemilu, menurutnya, karena KPU kurang berperan.

Bagaimana peran KPPA? Menurutnya, dia cukup mengenal Linda Amalia Sari Gumelar sebagai menteri PPA, dan

kementerian tersebut memiliki program pembekalan bagi calon anggota legislatif perempuan. Mereka membuka diri bila ada partai-partai politik yang mengirimkan calon anggota legislatif untuk diadakan penataran dan pengembangan diri. Mereka juga menyadari adanya perempuan yang terjun ke politik, apalagi saat ini memang ada afirmasi 30 persen untuk keterwakilan perempuan. Pada Pemilu 2014 yang lalu, dia tidak berpikir mengenai kasus-kasus perempuan di daerah pemilihannya. Dia hanya berpikir apa yang harus dia kerjakan. Kalau mengenai kekerasan terhadap perempuan, hal itu ada lembaga yang menanganinya, termasuk komisi di DPR RI. Baginya yang penting terjun dahulu, tahu apa tanggungjawabnya, dan kalau berbicara mengenai perjuangan kepentingan perempuan, maka dia tidak mau kalah dengan laki-laki.

**CALON ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN
YANG TERPILIH**

PROFIL ANGGOTA DPRD I



AGUSTIN POLIANA

AGUSTIN POLIANA lahir di Surabaya, 18 Agustus 1971. Saat ini, dia menjadi anggota DPRD kota Surabaya untuk periode 2014-2019 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Pendidikan terakhir yang diraihinya adalah Magister Komunikasi dari Universitas DR. Sutomo. Selama ini, dia aktif sebagai wakil bendahara DPC PDIP Surabaya. Dia telah menjadi anggota DPRD kota Surabaya selama empat periode berturut-turut, sejak 1999. Dia menjadi Wakil Ketua DPC PDIP kota Surabaya bidang buruh, nelayan, dan kesejahteraan sosial.

Pengalaman Berorganisasi

Sejak 1996, Agustin Poliana terlibat di gerakan sosial yang ada di Surabaya yaitu Promeg (pro Megawati). Dia turut dalam proses reformasi tahun 1998. Sebagai aktivis, dia banyak melakukan kegiatan di masyarakat dan advokasi dalam bentuk demonstrasi. Selain itu, dia merupakan kader PDIP di tingkat kecamatan.

Pengalaman Berpolitik

Agustin telah empat kali menjadi anggota DPRD I provinsi kota Surabaya, yakni periode 1999-2004, 2004-2009, 2009-2014 dan 2014-2019. Keaktifannya dalam dunia politik praktis ketika tahun 1999 dia diminta oleh teman-temannya di Promeg untuk mencalonkan diri menjadi anggota DPRD kota Surabaya melalui PDIP. Dengan dorongan dan dukungan teman-temannya, dia mencalonkan diri menjadi anggota dewan perwakilan rakyat.

Usai penetapan peroleh suara diumumkan dan Agustin lolos sebagai anggota dewan, justru dia didemo oleh teman-teman separtainya untuk diminta turun. Alasannya karena dia perempuan, maka tak layak menjadi anggota DPRD. Dia menanggapi tuntutan ini dengan tidak mau mundur, justru

persoalan ini menjadi kekuatannya untuk menghadapinya. Dengan bantuan seorang tokoh partai di PDIP, dia meneruskan proses anggota legislatifnya hingga sekarang.

Awalnya, Agustin mencalonkan diri menjadi anggota DPRD kota Surabaya dengan banyak tantangan yang hadapinya, antara lain dari sesama kader PDIP yang saling berebut nomor urut dan daerah pemilihan. Saat ini, dia menjabat Ketua Komisi D, yang membidangi ketenagakerjaan.

Pengalaman Pemilu 2014

Pencalonan diri Agustin pada Pemilu 2014 yang lalu tidaklah sulit karena kampanye yang dilakukannya sejak 1999. Modal sosial telah dimilikinya, yaitu kepercayaan dan dukungan masyarakat di daerah pemilihan kepadanya. Dia berdialog langsung dengan konstituennya. Berbicara tentang masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan hal-hal lain yang terjadi yang membutuhkan dukungan Negara, baik oleh eksekutif maupun legislatif.

Agustin membentuk tim relawan untuk melakukan pengawalan suaranya di TPS-TPS di mana akan dilakukan penghitungan hasil suara yang diperolehnya. Dia sadar bahwa pencalonan dirinya tidak begitu didukung oleh beberapa pihak. Upaya penghalangan atau penghilangan suaranya dapat saja terjadi. Oleh karena itu, penghitungan suaranya harus dia kawal.

Dalam menjaga hubungannya dengan konstituen, Agustin selalu memberikan informasi program-program DPRD atau partainya kepada masyarakat dan membantu mengaksesnya. Komunikasi yang dibangun dengan konstituen sejak awal selalu dilakukan hingga sekarang.



ENCOP SOFIA

ENCOP SOFIA lahir di Serang, Banten, 3 April 1971. Saat ini, dia menjadi anggota DPRD Banten untuk periode 2014-2019 dari Partai Gerindra. Pendidikan terakhir yang diraihinya adalah Magister Politik dari Universitas Hawai. Dia pernah sebagai Ketua Pengurus Besar LDMI (Lembaga dakwah Mahasiswa Islam) dan Badan kordinasi Nasional LDMI.

Pengalaman Berorganisasi

Karir berorganisasinya dimulai sebagai Pengurus Besar HMI. Dia juga aktif sebagai Ketua Perempuan Islam provinsi Banten dan Presidium KAHMI di kota Serang. Dia memiliki kelompok studi 'Cut Nyak Dien' yang fokusnya gender dan Islam. Dia pernah bermitra dengan Solidaritas Perempuan dan Kalyanamitra. Dia bergabung dengan Yayasan Banten Girang dan Yayasan Kordova. Saat ini, dia membentuk kaukus parlemen di tingkat provinsi. Dia menjadi salah satu presidium KAHMI di kota Serang.

Pengalaman Berpolitik

Encop Sofia terlibat di Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sejak tujuh tahun lalu. Posisi awal di partai tersebut ialah bendahara DPD di provinsi Banten. Pemilu 2009 sebelumnya, dia terpilih di DPRD Serang dan mendapat amanah sebagai Ketua DPC Gerindra kota Serang. Pemilu 2014 yang lalu, dia terpilih menjadi anggota DPRD Serang dan tetap menjadi Ketua DPC Gerindra kota Serang. Dia pernah menjadi peserta terbaik angkatan ke-8 ketika diadakan kaderisasi se-Indonesia oleh partai Gerindra di Hambalang, Jawa Barat.

Rekrutmen di partai tersebut melalui kaderisasi, pelatihan, dan penguatan. Tahapannya berbeda-beda, bila pimpinan daerah ditarik ke tingkat nasional. Di Gerindra, menurutnya, tidak ada pemungutan uang untuk menjadi kader ataupun

anggota partai. Apabila sudah menjadi anggota dewan perwakilan rakyat, maka mereka dikenakan iuran untuk kelangsungan hidup partai. Dia berpendapat bahwa kebijakan afirmasi 30 persen untuk keterwakilan perempuan yang tertuang dalam UU politik sangat efektif guna meningkatkan peran perempuan dalam dunia politik sebagai pengurus partai dan calon anggota legislatif perempuan. Dia berharap bahwa ke depannya tak semata-mata untuk ketersediaan calon anggota legislatif perempuan, namun benar-benar 30 persen keterwakilan anggota legislatif perempuan di DPR (seperti di India).

Platform partai Gerindra, menurut Encop, memuat unsur kesetaraan gender. Refleksinya sebagai pengurus partai dan aktivis perempuan, bahwa penting pengurus partai berjenis kelamin perempuan itu memiliki perspektif perempuan. Oleh karena kebijakannya akan ditafsirkan oleh pimpinannya. Apabila pimpinannya bias gender, maka memungkinkan hal itu tersendat dan yang akan terjadi kemudian bahwa afirmasi tersebut hanya menjadi formalitas.

Struktur partai Gerindra terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara. Wakil ketua dibagi lagi menjadi per bidang. Di DPC dikembangkan menjadi ketua-ketua PAC dengan struktur yang sama tersebut. Partai sendiri didanai dari iuran para anggota dewan, dana hasil suara (dari APBN), sumbangan relawan ataupun donatur. Partai, menurut Encop, melakukan kaderisasi dan pelatihan untuk mengembangkan sumber daya manusianya. Ada pengembangan untuk pengurus partai, pengembangan kader, serta penguatan kapasitas pengurus dan anggota dewan. Dia melihat bahwa partainya taat kepada aturan atau UU yang ada, misalnya kebijakan afirmasi 30 persen untuk keterwakilan perempuan.

Pengalaman Pemilu 2014

Encop melihat bahwa demokrasi di Indonesia hampir dikebiri oleh demokrasi bermodal besar, sehingga substansinya belum tercapai secara optimal. Mengapa dia mengatakan demikian, karena baik pendidikan, pemahaman demokrasi secara substansial oleh pemerintah ataupun yang dilakukan oleh partai politik, semuanya tak maksimal. Dengan demikian, otokritik terhadap partai politik ialah saat pencalonan banyak orang baru yang bukan dikader sejak awal, sehingga perspektifnya dalam memahami *platform* partai dan sebagainya akan lemah. Mengapa demikian, karena kadang-kadang mereka memiliki modal besar namun perspektif tidak mereka miliki. Hal itu harus menjadi renungan sistemik baik oleh negara maupun oleh partai politik di Indonesia agar gagasan demokrasi tercapai secara substantif. Inilah pendidikan politik kepada masyarakat. Inilah kewajiban negara, yaitu bagaimana masyarakat mempunyai kepekaan politik dan tidak ditukar oleh hal-hal yang sangat praktis. Dan hal itu menjadi proses yang sangat panjang.

Encop menyebutkan dirinya sebagai aktivis, yaitu aktivis perempuan. Dia bekerja sama dengan masyarakat, berorganisasi, berdiskusi dengan banyak orang, mendorong kebijakan agar memiliki perspektif keadilan gender. Hal itu membuatnya lelah dan merasa lebih efektif harus mengambil atau masuk kedalam sistem, entah menjadi eksekutif atau legislatif. Dia memahami ada fungsi-fungsi anggota dewan perwakilan rakyat yang harus dijalankan seperti:

- a. Memiliki hak atau fungsi anggaran (*budgeting*), yakni bagaimana agar anggaran negara memiliki nuansa partisipasi masyarakat. Fungsi ini melakukan penyeimbangan antara program yang dilakukan oleh

pemerintah dengan suara rakyat yang kita wakili.

- b. Memiliki fungsi perundang-undangan (legislasi), yakni membuat peraturan daerah. Peraturan daerah sebetulnya ada dalam undang-undang, peraturan daerah ini dapat mengimplementasikan peraturan yang urgen di daerah atau mengimplementasikan undang-undang di atasnya, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang menonjolkan kebijakan lokal. Atau membuat peraturan daerah yang tidak ada di pusat, tetapi penting untuk masyarakat daerah. Ketika disodorkan peraturan yang dibuat oleh pemerintah, perspektif anggota dewan harus pro rakyat. Kalau peraturan tidak memiliki kepekaan terhadap rakyat, maka anggota dewan yang harus mengusulkannya.
- c. Fungsi pengawasan (monitor), yakni pengawasan kerja pemerintahan untuk melihat keterkaitan antara program pemerintah dengan anggarannya.

Encop mewakili daerah pemilihan kota *Serang*. Dia tidak sekadar memahami daerah pemilihannya dari wawasan daerah, seperti berapa kecamatan, kelurahan, RT, RW, dan sebagainya. Dia memiliki satu prioritas, yaitu dia akan mewakili masyarakat yang mana? Atau, dia diutus oleh masyarakat yang mana? Dengan demikian, suara masyarakat itu yang harus dia perjuangkan. Misalkan, cita-citanya ingin mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan pemberdayaan perempuan. Hal itu menjadi perspektifnya dalam membaca peraturan, undang-undang, dan hubungan dia dengan pemerintah serta dengan jaringannya.

Menurut Encop, nomor urut bagi calon anggota legislatif dianggap agak dilematis. Perempuan dapat diuntungkan oleh nomor urut, karena berkaca dari pengalaman dirinya. Dia adalah pengurus partai, sekolahnya tinggi (jurusan politik dan

lulusan Amerika) dan hidup di masyarakat setempat cukup lama. Namun bagi perempuan yang tidak menjadi pengurus partai, tidak memiliki pendidikan yang memadai, maka dia kurang tahu bagaimana, karena nomor urut terkesan adil dan kurang menuai kritikan. Tetapi menjadi tidak adil, jika itu dipersamakan antara laki-laki dengan perempuan. Maka dia mengusulkan harus ada jaminan bahwa 30 persen untuk keterwakilan perempuan menjadi anggota dewan. Dalam partainya, ada tim penjangkaran yang menentukan nomor urut calon anggota legislatif, meskipun tak ada standar yang baku mengenai hal itu.

Terkait dengan isu-isu perempuan yang harus dipahami oleh seorang anggota dewan perwakilan rakyat, Encop menjelaskan bahwa ada banyak hal. Misalnya, bagaimana nuansa politik selama ini dimengerti jauh berbeda. Orang beranggapan bahwa politik harus keras, maskulin, dan lainnya. Menurutnya, tak boleh gerak-gerik politik itu harus kelaki-lakian, maka harus ada pengalaman perempuan di dalamnya. Pengalaman perempuan itu banyak hal, dan yang paling mudah dipahami ialah soal reproduksi perempuan. Misalnya melahirkan, hamil, haid, dan hal itu harus terimplementasikan menjadi kekayaan kebijakan yang harus dimiliki dalam pembangunan sehingga produk-produk pembangunan mempunyai kepekaan terhadap kaum perempuan.

Modal sosial Encop selama ini ialah sebagai Ketua DPC Gerindra kota Serang. Dia mempunyai PAC-PAC yang diharapkan dengan kerja-kerjanya selama ini, mereka bersimpati kepadanya. Sebagai orang Serang, dia memiliki banyak keluarga di Serang dan keturunan mereka banyak di sana. Dia memiliki teman-teman yang satu visi dan misi, yang menganggap bahwa dirinya bagian dari mereka, atau sebagai simbol mereka. Dan dia tidak peduli di partai apa.

Banyak orang yang fanatik terhadap Gerindra, dan itu membantunya. Suara-suara calon anggota legislatif di bawah kepemimpinannya ikut menyuarakan Gerindra.

Di Serang, karena mayoritas warganya muslim, maka tidak heran calon legislatifnya muslim pula. Pandangan mayoritas terhadap calon perempuan biasanya dianggap 'sebelah mata'. Pertama dalam hal dana, perempuan tidak mempunyai uang sendiri. Apabila ditanya di KPU mengenai kepemilikan barang, maka tidak banyak yang atas nama perempuan. Ada pandangan, bahwa menjadi anggota dewan itu sibuk dan meninggalkan keluarga. Itu dianggap dunianya laki-laki. Oleh karenanya, diperlukan keluarga yang penuh pengertian dan mampu memahami perempuan yang menggeluti dunia politik.

Encop lebih banyak mempergunakan modal sosial (jaringan) daripada modal ekonomi. Jaringan tersebut misalnya keluarga yang memiliki visi-misi yang sama, yang berbasis yayasan ataupun partai, atau ekstra jaringan yang dia ciptakan selama ini. Ekstra jaringan ini yang melakukan pengawasan terhadap suara-suaranya. Beberapa temannya menyumbangkan *sticker*, kalender, dan konsumsi. Dana pribadi yang dia keluarkan selama pemilu yang lalu sekitar Rp 400-500 juta.

Pencalonan Encop diawali dengan pendaftaran ke partai selanjutnya partai mengurus segala hal yang terkait di KPU. Dia hanya terima bersih. Encop memiliki tim pemenang pemilu sendiri. Dia mempunyai banyak relawan yang membantunya, namun tidak tersistematisir. Relawan yang tersistematisir ada di partai Gerindra. Para relawan tersebut datang sendiri ke Encop. Dia juga memiliki posko pemenang. Posko tersebut ada di rumahnya. Ada posko bersama calon anggota legislatif DPR RI, DPRD Provinsi

dan Kabupaten oleh Gerindra. Jumlah mereka minimal satu orang per TPS. Metode pertemuan yang dia pergunakan umpamanya tatap muka dan pendidikan politik ke masyarakat. Proses tersebut selama setahun dia lakukan. Dia mencetak contoh kertas surat suara dan *banner*. Selain itu, dia memperkenalkan *platform* partai, visi dan misi, dan pendidikan politik ke masyarakat sipil. Dia menyampaikan ke masyarakat tentang pentingnya calon anggota legislatif perempuan dalam pengambilan kebijakan. Dana yang dia keluarkan selama pemilu lebih banyak untuk konsumsi daripada untuk lainnya.

Dalam pemungutan suara, Encop memastikan agar teman-temannya turut memantau perolehan suara-suaranya di TPS-TPS dan melaporkan perkembangannya. Saksinya berasal dari para relawan dan dari partainya juga. Selama penghitungan suara, mereka akan menelepon perkembangannya.

Menurut Encop, KPUD dan Panwaslu sudah memiliki program yang lengkap, namun negara tidak serius karena programnya ada namun anggarannya tidak ada. Misalnya, sosialisasi cara mencontreng, itu tidak ada dananya. Kebijakan afirmasi 30 persen untuk calon anggota legislatif perempuan di partainya telah berjalan cukup baik. Namun, dia tidak mengetahui apakah di partai lainnya kebijakan tersebut berjalan atau tidak. Dan apakah dikenakan sanksi atau tidak, bila tidak melaksanakan kebijakan tersebut. Belum ada kesaksiannya.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak selama ini sibuk dengan programnya di dinas-dinas terkait. Kementerian ini tidak aplikatif menerapkan afirmasi 30 persen untuk keterwakilan perempuan, pengorganisasian, penguatan kapasitas, dan solidaritas. Mungkin kementerian bersifat begitu, dia sendiri tidak mengetahuinya. Bagaimana

perempuan akan memilih perempuan? Bagaimana calon anggota legislatif perempuan memiliki perspektif perempuan dan memahami tugas dan fungsinya? Hal itu tidak pernah disentuh oleh KPPA. KPPA banyak menumpang kegiatan bila ada organisasi yang membuat acara, misalnya menjadi pembicara.

Encop melihat bahwa persoalan perempuan di kota Serang, misalnya kekerasan terhadap perempuan dan anak, cukup besar. Citra perempuan, menurutnya, selalu dikaitkan dengan garis keturunan keluarga. Perlindungan terhadap tenaga kerja perempuan juga belum maksimal di Serang. Dia bermimpi bagaimana tenaga kerja perempuan di kota Serang diperlakukan secara baik oleh konsulat Indonesia yang berada di luar negeri. Perlu ada koordinasi dalam perlindungan terhadap mereka mulai di tingkat RT/RW, kelurahan, kecamatan, dan provinsi. Apapun yang terjadi dengan mereka, hal itu harus menjadi tanggungjawab bersama.



GANIWATI

GANIWATI lahir di Solo, 12 September 1963. Saat ini, dia menjadi anggota DPRD Jawa Barat untuk periode 2014-2019 dari Partai Golkar. Pendidikan terakhir yang diraihinya adalah Magister dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pasundan (STIEP). Dia menjadi Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar provinsi Jawa Barat. Selain itu, dia pernah di Gerakan Karya Justicia Indonesia (GKJI) dan Wakil Ketua DEPIDAR SOKSI provinsi Jawa Barat.

Menurut Ganiwati demokrasi sekarang tidak jelas arahnya kemana? Karena dikatakan demokrasi Pancasila, tapi dalam pelaksanaan demokrasi sila ke empat tidak digunakan, karena semua kepada, dewan dan presiden dipilih langsung oleh rakyat, seharusnya demokrasi ini menjadi kesempatan bagi kaum perempuan untuk menawarkan kinerja, komitmennya ke rakyat, tapi kekecewaan yang didapat karena banyaknya praktek *money politic* atau politik uang, ini yang merusak seluruh tatanan yang ada yang harusnya dengan demokrasi diharapkan akan terpilih orang-orang yang mumpuni tapi justru sebaliknya, sering menjadi kritikan masyarakat karena kinerja yang tidak maksimal atau kurang sensitivitasnya wakil rakyat terhadap kebutuhan rakyatnya.

Pengalaman Berorganisasi

Ganiwati pernah mengikuti kegiatan keorganisasian di Kreasi Remaja Salman ITB, LBH Gerakan Karya Justicia Indonesia Aceh, Wanita Swadiri Aceh, Wanita Swadiri Jawa Barat, Kesatuan Perempuan Partai Golkar (2002), Soksi Jawa Barat, dan PERADI (Persatuan Advokat Indonesia).

Pengalaman Berpolitik

Sejak di GKJI, yang merupakan lembaga konsentrasi Soksi (salah satu organisasi yang melahirkan Golkar), dia sudah terlibat dalam politik. Ada aturan yang menyatakan bahwa

ormas tidak boleh berafiliasi dengan partai politik. Maka itu, anggota GKJI pindah ke partai politik lainnya, sementara dia tetap di Golkar. Di Partai Golkar, dia menjadi anggota divisi hukum DPD Golkar Jawa Barat tahun 2004. Dia pernah membantu menangani perkara di partainya. Ketika direkrut, dia tidak dipungut bea apapun. Yang ada ialah sumbangan untuk partai, saat menjadi anggota DPR. Partai Golkar di pusat telah memberlakukan kebijakan afirmasi 30 persen untuk perempuan, sedangkan di tingkat provinsi belum berlaku. Golkar di pusat merekomendasikan agar yang di daerah-daerah memperhatikan para perempuan terkait dengan kebijakan tersebut. Pendanaan partai berasal dari iuran para anggota dewan. Menurutnya, Golkar paling baik dalam mempersiapkan sumber daya manusianya. Partai Golkar taat kepada aturan hukum atau undang-undang yang berlaku.

Menurut Ganiwati demokrasi sekarang tidak jelas arahnya kemana? Karena dikatakan demokrasi Pancasila, tetapi dalam pelaksanaan demokrasi, sila ke empat tidak dipergunakan. Oleh karena dewan dan presiden dipilih langsung oleh rakyat. Seharusnya, demokrasi ini menjadi kesempatan bagi kaum perempuan untuk menawarkan kinerja, komitmennya ke rakyat, namun kekecewaan yang didapat karena banyaknya praktik politik uang. Ini yang merusak seluruh tatanan yang ada yang harusnya melalui demokrasi diharapkan akan terpilih orang-orang yang mumpuni, justru sebaliknya, sering menjadi kritikan masyarakat karena kinerja yang tidak maksimal atau kurang sensitivitasnya wakil rakyat terhadap kebutuhan rakyatnya.

Partainya memberikan kebebasan dalam menentukan daerah pilihan, namun Ganiwati, daerah pilihannya ditentukan oleh partai, yaitu Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, dengan modal sosial yang dimiliki yaitu menyelesaikan persoalan yang menimpa sebuah keraton di

Cirebon tahun 2005, maka terpilih menjadi anggota DPRD provinsi Jawa Barat masa bakti 2009-2014. Dengan modal kinerja sebagai anggota DPRD satu periode itulah, maka Ganiwati terpilih untuk yang kedua kali (2014-2019).

Pengalaman Pemilu 2014

Dalam proses pemilu yang lalu, Ganiwati melakukan sosialisasi ke masyarakat di daerah pemilihannya. Dengan modal sosial yang sudah dibangunnya sejak 2009, maka hal itu mempermudah dirinya dalam kemenangannya. Proses pencalonannya dimulai dengan penyelesaian administrasi formulir yang diserahkan ke partai Golkar dan verifikasinya. Dia memiliki tim pemenang namun tidak begitu intensif dalam pengelolaannya. Menurutnya, tim pemenang sangat bergantung pada kepribadian mereka. Juga ada relawan yang mendukungnya, ketika bersosialisasi di masyarakat di daerah pemilihannya.

Ganiwati menjelaskan bahwa tugas tim pemenangannya saat Pemilu 2014 lalu ialah memetakan dan memfasilitasi pertemuan dengan masyarakat. Ada empat orang di dalam tim tersebut. Dalam pertemuan dengan masyarakat, mereka diberikan uang transpor dan disediakan konsumsinya. Pertemuan yang ada dimanfaatkan untuk memberikan pendidikan-pendidikan politik dan sebagainya. Perkenalan dirinya dengan masyarakat dilakukan sebelum pencalonan dirinya. Alat kampanye yang dia sediakan misalnya kartu nama, iklan radio, iklan televisi, media massa, dan poster. Dia tidak menyampaikan visi, misi dan programnya saat berkampanye. Dia hanya melakukan pendidikan politik ke masyarakat di daerah pemilihannya dengan materi yang berbeda-beda.

Ketika pemilihan berlangsung, Ganiwati mengatakan bahwa dia hanya mengandalkan saksi yang disediakan oleh

partainya, karena keterbatasan dana yang dia miliki. Dia berpendapat bahwa sosialisasi pemilu dengan segala macam aturannya kurang dilakukan oleh KPUD. Sosialisasi hanya dilakukan di tingkat partai. Mungkin KPUD tidak memiliki cukup anggaran untuk menyosialisasi pemilu.

Di DPRD saat ini, Ganiwati berada di Komisi A yang mencakup bidang pemerintahan. Ketika reses dia mengomunikasikan program-programnya, menyerap aspirasi masyarakat, dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program-program yang dikerjakan oleh Pemda, apakah berjalan baik atau tidak. Dia mengalami pemotongan gaji setiap bulannya sebagai iuran ke partainya. Peningkatan diri sebagai anggota dewan dilakukannya melalui kaukus perempuan parlemen. Menurutnya, peran Kementerian Pemberdayaan Perempuan kurang intensif. Sebagai wakil dari daerah Indramayu, Ganiwati melihat banyak persoalan perdagangan perempuan di wilayah tersebut karena banyak perempuan Indramayu yang bekerja di luar negeri. Para pekerja tersebut tidak memiliki kualitas dan konsep yang jelas mengenai alasan mereka bekerja di luar negeri.



NENENG HASANAH

NENENG HASANAH lahir di Jakarta, 28 April 1968. Saat ini, dia menjadi anggota DPRD DKI Jakarta untuk periode 2014-2019 dari Partai Demokrat. Pendidikan terakhir yang diraihinya adalah Diploma Akuntansi STIE Rawamangun Jakarta dan Sarjana Ekonomi dari Universitas Taman Siswa. Dia pernah menjadi anggota DPRD DKI Jakarta untuk masa bakti 2009-2014. Sebelumnya dia juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPP Forkabi periode 2010-2015, Jakarta. Sekarang dia menjadi Wakil Ketua 3 MPC Pemuda Pancasila Jakarta Utara.

Pengalaman Berorganisasi

Beberapa organisasi pernah Neneng ikuti seperti ketua PAC Partai Demokrat Cilincing (2009), Dewan Penasehat Pemuda Pancasila Cilincing (2012-sekarang), Wakil Ketua Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi) (2012-sekarang), dan Pembina Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU). Biasanya hanya laki-laki yang menjabat pembina di IPNU, namun dia dipercayakan menjabat posisi itu. IPNU yang meminta dirinya menjadi Pembina (tahun 2015). Padahal mereka adalah anak-anak muda yang pendidikannya lebih tinggi daripada dirinya, misalnya magister. Selain itu, dia aktif di jamaah pengajian. Organisasi politik yang dia ikuti ialah Partai Demokrat.

Pengalaman Berpolitik

Neneng bergabung dengan Partai Demokrat selama 12 tahun, sejak partai ini terbentuk tahun 2003. Dia menjadi Penasihat Ranting di kelurahannya sendiri. Pada pemilihan Musyawarah Anak Cabang, dia terpilih menjadi Ketua di Cilincing. Pada Musyawarah Dewan Pimpinan Cabang, dia ditugaskan partai di Kepulauan Seribu. Dengan restu partai, akhirnya dia menjadi Ketua DPC Kepulauan Seribu hingga sekarang.

Di Partai Demokrat, ada pendidikan kepemimpinan untuk kader perempuan. Pada pelatihan tersebut, dia mendapatkan piagam penghargaan sebagai peserta terfokus dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat. Dia terkejut ketika memperoleh penghargaan tersebut, karena tak menyangka akan menerimanya.

Neneng sendiri yang mencari informasi untuk dapat masuk ke Partai Demokrat. Dia yang mendaftarkan dirinya menjadi anggota partai. Dia masuk dalam struktur kepengurusan ranting tingkat kelurahan. Sambil berjalan, dia berada di organisasi sayap Partai Demokrat, yaitu Barisan Muda Demokrat. Dia menjadi bendaharanya di sana. Dia bergabung dengan Partai Demokrat tanpa pemungutan uang. Kalau partai menyelenggarakan sesuatu, memang ada biaya yang dikeluarkan, namun untuk masuk ke partai hal itu tak ada sama sekali, termasuk untuk mendaftarkan dirinya sebagai calon anggota legislatif.

Menurutnya, tidak ada diskriminasi dari partainya terhadap perempuan. Partainya menerapkan kebijakan afirmasi 30 persen untuk perempuan. Pada 2009-2014, kebijakan itu telah diterapkan, demikian halnya pada 2014-2019. Namun karena pertarungan pada 2014 lebih sengit, maka jumlah perempuan yang awalnya berjumlah 12 orang pada 2009-2014, kemudian tinggal dua orang. Dalam proses pendaftaran calon anggota legislatif, kebijakan itu telah diterapkan. Dan hasil pemilihannya yang lalu, itu ditentukan oleh masyarakat sendiri. Kebetulan pada 2014 partainya banyak mendapat sorotan publik secara negatif.

Partainya berpegang teguh kepada AD/ART, menurut Neneng. Ada peraturan yang diletakkan di atas meja anggota dewan dan aturan dari pimpinan pusat yang disebarkan ke seluruh anggota untuk menjadi panduan. Misalnya,

peraturan mendahulukan kepentingan masyarakat di atas kepentingan lainnya. Tidak ada diskriminasi gender di partainya. Di DPR RI, ketua fraksinya adalah perempuan, yakni Nurhayati Ali Assegaf. Perempuan diberi hak yang sama dengan laki-laki. Mereka ditempatkan di Badan Anggaran, Badan Legislatif, dan lainnya. Struktur partai Demokrat adalah berikut: DPP, DPD, DPC, DPAC (kecamatan), DPRT/tingkat ranting (kelurahan), Anak ranting (RW). Apabila ada kegiatan-kegiatan, dia memberikan sumbangan sukarela. Kalau DPD mempunyai kegiatan konsolidasi partai, maka dia memberikan sumbangan. Tidak ditentukan jumlah atau besaran nilai yang harus diserahkannya. Untuk partai, ada dana dari Kesbangpol provinsi (Kebangsaan dan Partai Politik) dan dana hibah dari Provinsi yang besarnya bergantung pada jumlah suara yang diraih oleh partainya. Yang tahu jumlah hal itu, hanyalah DPD.

Untuk pengembangan sumber daya manusia, program dari partainya berupa pendidikan kader. Pendidikan kader Partai Demokrat oleh tiap kotamadya dilaksanakan setiap minggu yang diikuti oleh sekitar 50 orang. Mereka dibina dan dididik tentang kepemimpinan. Inilah program dari DPP dan DPD partainya. DPP melakukan pendidikan kader sekali dalam setahun. Ada pula program pengembangan oleh DPD untuk penguatan partai, pengaderan, dan sebagainya. Partai Demokrat sangat menjunjung tinggi hukum, maka hal ini tertuang di dalam AD/ART-nya.

Pengalaman Pemilu 2014

Neneng berpendapat bahwa secara umum demokrasi Indonesia telah berjalan baik, meskipun belum 100 persen. Menurutnya demokrasi kita masih berproses, karena baru dimulai tahun 1998. Baginya, kita tidak perlu belajar kepada siapa-siapa, tetapi belajar dari lingkungan sendiri,

misalnya dalam keluarga kita, apakah telah demokratis? Untuk itu harus tersedia pendidikan mengenai arti berdemokrasi. Ketika ingin bergabung dengan partai, dia harus mengumpulkan anggota keluarganya untuk menanyakan pendapat mereka. Inilah pembelajaran demokrasi di tingkat rumah tangga. Dia mencalonkan diri menjadi anggota DPRD karena hendak menyalurkan aspirasi masyarakat. Sejak kecil, dia suka berorganisasi. Kemudian, ketika Partai Demokrat terbentuk, dia tertarik bergabung dan masuk ke Demokrat.

Guna memperjuangkan aspirasi publik, dia menjadi Ketua Cabang Partai Demokrat tingkat Kecamatan. Dia menerima banyak keluhan dari masyarakat. Disangkanya selama ini dia bisa menjembatani hal itu. Ada keluhan masyarakat mengenai jalan kampung dan sebagainya. Akhirnya, dia berpikir apabila harus melaporkan hal itu ke partai maka sangat jauh. Saat itu, dia masih menjadi Ketua PAC Kecamatan.

Akhirnya, dia mendaftarkan diri menjadi calon anggota legislatif. Dan tahun 2009, dia terpilih menjadi anggota dewan perwakilan rakyat. Jalan di sekitar rumahnya sudah diperjuangkan dan menjadi bagus, yang bekerja sama dengan pemerintah daerah. Intinya bagaimana memperjuangkan aspirasi rakyat melalui jalur legislasi.

Menurut Neneng, ada tiga fungsi anggota DPRD yaitu penganggaran (*budgeting*), perundang-undangan (*legislasi*), dan pengawasan terhadap implementasi pemerintah. Fungsi anggaran yaitu anggota dewan perwakilan rakyat memiliki hak untuk memberikan koreksi anggaran terhadap pemerintah DKI Jakarta. Pemda DKI Jakarta adalah pelaksana anggaran. Dalam hal anggaran, menurutnya, harus melihat kebutuhan masyarakat. Masyarakat membutuhkan apa? Misalnya, masyarakat membutuhkan perbaikan jalan dan

mengatasi banjir. Pemerintah berfungsi menjalankannya. Anggaran itu perlu aturan, maka DPRD membuat APBD bersama pemerintah. Di situ muncul proses legislasinya.

Kemudian fungsi pengawasan adalah hak kontrol anggota DPR. Ini hak ketiga sebagai anggota dewan perwakilan rakyat. Hak mengawasi apakah anggaran yang sudah direncanakan dijalankan atau belum. Kemudian dicek apakah sudah dilaksanakan kebutuhan yang dianggarkan itu? Mana yang sudah dikerjakan? Pengawasan anggota dewan perwakilan rakyat tidak bisa berjalan sendiri. Mereka harus bekerjasama dengan masyarakat. Dengan bantuan pengaduan masyarakat, anggota dewan perwakilan rakyat bisa mengawasi penggunaan anggaran. Jadi, masyarakat dapat melapor kepada anggota dewan perwakilan rakyat bila ada hal-hal yang perlu. Misalnya, “Bu, saluran air rusak!” atau “Bu, jalan rusak!”. Silakan melaporkan aspirasinya, karena ada komisi-komisinya.

Selama ini banyak yang melaporkan kepada dirinya, baik di kantor atau di rumah, menanyakan kepada anggota keluarganya, apakah dia sudah tiba di rumah atau belum. Dia pernah berada di Komisi E dan memperjuangkan sekolah di wilayah Sukapura. Dulunya di sana tidak ada sekolah negeri. Sekolah sudah dua tahun dibangun, tetapi tidak dapat ditempati karena akses jalannya sulit. Masyarakat mengadu kepadanya karena dia di Komisi E yang tupoksinya bidang pendidikan. Mengapa gedungnya tidak dapat dipakai?

Dia mengecek mengapa gedungnya tidak dapat dipakai? Akhirnya, sekarang ada SMP negeri di sana, ada jalan, dan perlu pengaspalan. Itulah bakti dirinya kepada masyarakat sekitarnya. Sekarang sekolah tersebut dikenal sebagai ‘sekolah Haji Neneng’, karena dia dan masyarakat yang memperjuangkan hal itu ke Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Namun dia mengatakan kepada masyarakat, bahwa hal itu terjadi berkat kerja sama masyarakat, dan bukan usaha dirinya sendiri.

Kita tidak dapat bekerja sendiri. Kalau tidak ada masyarakat, maka anggota dewan perwakilan rakyat tidak dapat berbuat apa-apa. Harus ada andil dan dukungan dari masyarakat, seperti kasus sekolah tadi, masyarakat datang ke rumahnya setiap hari. Bahkan, jam 6 pagi rumahnya sudah ditunggu oleh masyarakat. Setelah shalat subuh, rumahnya sudah ramai didatangi oleh masyarakat. Sekolah tersebut dia awasi terus hingga sekarang dan sudah berprestasi walaupun baru dua tahun tahun berjalan. Prestasinya ialah menjadi juara 2 cerdas cermat. Baginya, anggota dewan perwakilan rakyat tidak perlu dikenal, tetapi bekerja dalam diam. Dia tidak perlu banyak berbicara A, B, ke media ini-itu, namun terus bekerja saja. Dan dia terpilih lagi, karena masyarakat melihat kerjanya.

Daerah pemilihan Neneng pada Pemilu 2014 lalu meliputi Cilincing (7 kelurahan), Kelapa Gading (3 kelurahan), Koja (6 kelurahan), dan Kepulauan Seribu (6 kelurahan). Kalau periode 2009, Jakarta Utara tidak dipecah, maka ada enam Kecamatan dan ditambah dengan Kepulauan Seribu. Untuk periode 2014, Jakarta Utara dipecah menjadi dua daerah pemilihan, dan daerah pemilihan 3 yang meliputi Pademangan, Penjaringan, dan Tanjung Priok.

Dalam pemilu yang lalu, dia memperoleh nomor urut 2. Di Partai Demokrat, untuk tiga nomor urut teratas harus diisi oleh seorang perempuan. Di daerah pemilihan 2, dia memperoleh suara terbanyak di Partai Demokrat. Dia harus berjuang meskipun kesetaraan hak sudah hampir sama. Menurutnya, perempuan dapat berada di mana-mana. Perlu berjuang dan memotivasi perempuan yang lain dalam

karir apapun. Perempuan harus mengembangkan dirinya, terutama di politik. Tunjukkan bahwa perempuan juga bisa! Perempuan memang lebih diam, tetapi dalam situasi itu, dia juga belajar. Sekali-kali menunjukkan diri ke publik tidak apa-apa.

Neneng mengaku bahwa dirinya didukung oleh Kyai, yang kebetulan adalah abangnya. Abangnya itu termasuk tokoh masyarakat. Selain itu, di wilayah tempat tinggalnya khususnya di Kecamatan Cilincing, kedekatan unsur Betawi masih kuat. Walaupun orang tua saya bukan tokoh politik, namun mereka mengetahui mereka anak siapa. Kebetulan orang tuanya dekat dengan ke-betawi-an.

Neneng berpandangan bahwa tidak terjadi diskriminasi dalam proses pemilihannya saat itu. Perempuan dan laki-laki sama-sama memilihnya, karena mereka melihat figurinya. Sebelum menjadi anggota DPRD, dia suka berkumpul dengan orang lain. Kegiatan di masyarakat, baik kematian atau apa saja, dia pasti datang. Terlepas dari pencalonannya atau tidak, dia memang suka berkumpul. Hal itu sudah tertanam dalam keluarganya. Sudah terbiasa mengumpulkan orang di rumahnya, atau dia yang datang ke tempat tertentu untuk berkumpul.

Yang memilihnya ada yang Islam, tetapi ada juga yang non-Muslim, karena mereka tahu siapa dirinya. Dia lahir dan besar di wilayah tersebut. Mereka mengenalnya dalam kesehariannya. Di Partai Demokrat, dia memang memerlukan logistik, seperti kaos dan sebagainya. Hal itu tidak terlalu mahal. Dia juga dibantu oleh DPP dan DPD untuk kaos-kaos dari partainya. Bendera diberikan oleh partainya juga. Paling untuk kebutuhan itu diperlukan gambar dirinya. Kalau ditanya jumlah dana yang dikeluarkan tergantung pada jumlah kaos yang dibuatnya. Kalau ditotal jumlahnya sekitar

Rp 300-400 juta. Hal itu dana sendiri untuk kaos dan stiker kampanye.

Dia harus mendaftarkan diri ke DPD Partai Demokrat DKI Jakarta meskipun seorang petahana. Dia mengumpulkan kelengkapan administrasinya, seperti ijazah, surat berkelakuan baik, surat keterangan kesehatan, dan lainnya. Selain penunjukan oleh partai, dia pun mendaftarkan diri. Dia harus mengikuti proses dari awal lagi. Kemudian dijadwalkan untuk mengikuti tes. Ada wawancara, tes tertulis, dan lainnya. Hasil tes dari partai, dia ditempatkan di nomor urut 2. Partai melihat dia dikenal di wilayah mana.

Untuk tim pemenangan, dia mengerakkan keluarga besarnya, dan ditambah dengan kader serta tokoh masyarakat. Jumlah tim inti pemenangannya 30 orang, yang terdiri atas keluarga besarnya, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan kader partai. Peran tim inti adalah berkampanye kepada masyarakat. Mereka turun ke bawah untuk memperkenalkan dirinya.

Kegiatan yang mereka lakukan yaitu mendatangi masyarakat dan mendengarkan aspirasi mereka. Mereka dikumpulkan di rumah RT atau RW kemudian Neneng memperkenalkan dirinya. Karena seorang petahana, dia mempunyai pendukung sendiri. Dia yang turun langsung mengkoordinir tim pemenangan. Hal itu tidak mudah dilakukan karena harus memimpin 30 orang dengan pemikiran mereka yang berbeda-beda.

Dia tidak pernah menjanjikan apapun kepada masyarakat. Dia hanya mengatakan yang dapat dikerjakan dan yang akan dikerjakan. Dia selalu ada di posko pemenangan di dekat rumahnya. Dan yang tinggal di posko dan mengurus kegiatan tersebut berjumlah empat orang. Peran mereka adalah menerima keluhan, pengaduan, dan aspirasi masyarakat. Kegiatan posko ialah mendaftar area mana yang

sudah dikunjungi dan mana yang belum. Dia menangani langsung poskonya. Dia memiliki banyak relawan. Relawan tersebut tidak perlu diperintah untuk berkegiatan. Mereka tidak terdaftar di tim pemenangannya. Mereka berbincang-bincang dan mempromosikan diri Neneng kepada yang lainnya; dari mulut ke mulut.

Dia langsung datang ke daerah pemilihannya. Bila ke wilayah yang belum menjadi basisnya, dia akan memperkenalkan dirinya secara langsung. Dia dan tim pemenangannya datang ke sana untuk berkoordinasi dengan masyarakat guna mengumpulkan massa. Dia selalu datang dan turun ke basis massa. Tak hanya saat berkampanye, saat reses pun dia mendatangi mereka untuk sekadar minum kopi.

Alat berkampanye yang dia pergunakan adalah poster, *sticker*, temu muka dengan masyarakat, dialog, pengajian, *banner* kecil, dan arisan. Dia juga 'blusukan' dan 'nongkrong' dengan mereka. Yang dia sampaikan kepada masyarakat yaitu program yang pro-rakyat. Hal itu sesuai dengan kebijakan partainya, tetapi dia tidak menjanjikan apa-apa. Dia tidak mempergunakan politik uang.

Kendala yang dihadapi Neneng dalam menjalankan tugasnya adalah kalau pulang malam. Pulang malam sudah biasa, yang penting harus menjaga diri. Kendala bertemu dengan masyarakat dan mengumpulkan massa, sejauh ini tidak ada. Dia menjaga suaranya di tiap TPS-TPS. Dia mempunyai saksi dari partainya dan timnya mengawasi perolehan suaranya. Selain itu, timnya turun ke Kelurahan, Kecamatan, dan Kotamadya.

Menurut Neneng, KPUD memang mengirimkan langsung aturan pelaksanaan pemilu ke partainya. Kemudian partai menyerahkan hal itu kepada para calon legislatif. Ada UU pemilu yang dibagikan kepada para calon legislatif.

Berdasarkan UU tersebut, dia mengetahui apa yang boleh dan tidak untuk dilakukan. Yang tidak boleh misalnya, politik uang, dan lainnya. Sanksi-sanksi juga ada. Kalau melakukan politik uang, maka diberi surat teguran oleh partai. Kalau tertangkap, maka akan dipidana. Kebijakan tersebut sudah mengakomodir kepentingan perempuan.

Selain reses untuk bertemu dengan masyarakat dan konstituen, maka setiap kesempatan dia mengunjungi mereka. Terkadang pertemuan tersebut lebih santai. Kalau pertemuan kader, pasti acaranya lebih resmi.

Staf ahli Neneng memasukkan aktivitasnya di *Facebook* tentang apa yang dikerjakan. Waktu turun ke masyarakat, hal itu diinformasikan ke masyarakat. Dia melaporkan apa dia kerjakan. Kalau anggota DPRD, maka pajak penghasilan mereka langsung dipotong.

Dia tidak memiliki kontrak politik dengan partainya. Memang kewajibannya untuk menggerakkan partai di DKI Jakarta, walaupun tidak terlalu besar. Jumlahnya Rp 4.000.000 per bulan ke partai, dan Rp1.000.000 per bulan ke fraksi. Tiap anggota dewan partainya memberikan kontribusi yang sama ke partai. Mereka juga mempunyai uang kas fraksi yang dapat dipergunakan kalau ada kegiatan-kegiatan, misalnya sumbangan atau proposal tertentu atau membeli kelengkapan fraksi.

Neneng suka belajar. Dia belajar membaca aspirasi masyarakat, membaca buku-buku, termasuk buku politik dan masalah kesejahteraan masyarakat. Sambil di jalan, dia membaca buku-buku. Kalau sudah selesai membaca, dia akan mengganti buku yang dibacanya. Memang harus seperti itu, menurutnya. Setidaknya, dia ingat tentang politik dan menambah wawasan.

Kebijakan yang dibuatnya harus lebih digaungkan. Dia sedang mendorong agar di tiap kantor, seperti Kantor Pemda, DPRD, dan lainnya, tersedia ruangan untuk ibu menyusui. Ini yang sedang dia dorong, termasuk agar ada toilet perempuan di *busway*, di halte-halte, dan lainnya. Sebaiknya, buatlah aturan untuk perempuan, misalnya tempat penyebaran untuk perempuan cacat dan perhatian terhadap perempuan penyandang cacat di sekolah.



SEREIDA TAMBUNAN

SEREIDA TAMBUNAN lahir di Serbelawan, 2 Juni 1972. Saat ini, dia menjadi anggota DPRD DKI Jakarta untuk periode 2014-2019 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Pendidikan terakhir yang diraihinya adalah Sarjana Politik dari Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta. Saat ini Sere (panggilan akrabnya) masuk dalam jajaran struktur DPP PDI Perjuangan sebagai Anggota Departemen Kerakyatan periode 2015-2020.

Pengalaman Berorganisasi

Sereida dibesarkan dalam aktivitas gereja, seperti kumpulan remaja di gerejanya. Mereka dilatih dengan kegiatan rutin paduan suara, aktivitas sosial, dan lainnya. Ketika remaja, dia menjadi Ketua Remaja Gereja dan membuat program menanam pohon dilingkungan gereja, karena gereja mereka tak jauh dari sungai. Jadi, ide untuk menanam pohon di belakang gereja bertujuan mengurangi pengikisan tanah.

Kemudian dia masuk ke pengurusan gereja tingkat distrik (terdiri atas beberapa Kabupaten) dan menjadi pengurus di sana. Tahun 1990, ketika masih kelas 2 SMA, dia mengikuti konferensi pemuda gereja di Sipirok. Ukuran pemuda saat itu adalah dewasa. Dia senang beraktivitas di gereja. Dia masih mengingat hingga kini janji pemudanya ialah tidak membuang sampah di sembarangan tempat dan menanam pohon. Inilah janji yang sangat sederhana, tetapi dia lakukan secara konsisten.

Mulai SD sampai SMA, dia senang mengikuti pramuka atau organisasi kepanduan. Di situ, benih-benih berorganisasinya muncul. Dasar kepemimpinannya muncul dari kegiatan kepanduan itu.

Pengalaman Berpolitik

Sereida memulai karir politiknya di PDI Perjuangan

sejak 2004 dan sebagai anggota Departemen Kesejahteraan Rakyat DPP PDI Perjuangan periode 2005-2010 yang diketua oleh Bapak Adang Ruchiatna.

Dia juga aktif melakukan diskusi-diskusi mengenai isu kesehatan. Pada tahun 2010-2015, Sere juga masuk sebagai Ketua Departemen Kesehatan DPP PDI Perjuangan dan sebagai Ketua bidangnya adalah dr. Ribka Tjiptaning. Dia juga aktif membantu masyarakat dalam pembuatan akte kelahiran. Dia pun terlibat dalam mengadvokasi kasus orang sakit terutama berkaitan dalam hal administrasi atau persyaratan untuk mendapat pelayanan Kesehatan yang layak dan diundang oleh RS Fatmawati untuk berdiskusi mengenai kendala pasien dilapangan.

Partai tidak memungut dana apapun dari Sereida. Dia mencoba berkontribusi dan bergotong royong untuk uang saksi, itu pun secara sukarela. Partainya menerapkan mekanisme afirmasi 30 persen untuk calon anggota legislatif perempuan. Menurutnya, di DKI Jakarta kuota itu dipenuhi karena di daerah pemilihan ada dua calon anggota legislatif perempuan yang masuk. Partainya secara konsisten memberlakukan AD/ART, misalnya tentang sanksi bagi yang melakukan kesalahan dan ada tahapannya. Contohnya, peringatan pertama, kedua, dan seterusnya. Hal itu tetap dilakukan oleh partai. Mengenai kesetaraan gender, menurutnya, partainya tak pernah membedakan antara laki-laki dengan perempuan. Semuanya bergantung kepada kinerja orang bersangkutan. Mekanisme partai dalam merekrut dimulai dari tingkat anak ranting (RW), Ranting (Kelurahan), PAC (Kecamatan) dan DPC (kabupaten/Kota). Juga dilakukan *fit and proper test* dan psikotes terhadap anggota ataupun calon anggota legislatif bahkan calon Pengurus mulai tingkat Kecamatan sampai Pimpinan pusat.

Pengalaman Pemilu 2014

Sepanjang menjadi aktivis, Sereida merasakan ruang geraknya terbatas. Dia tidak dapat melakukan banyak hal. Bahkan dia harus 'meminjam tangan orang lain' untuk menentukan suatu keputusan penting yang berkenaan dengan orang banyak. Dengan menjadi anggota legislatif, dia memiliki 'kuasa' untuk menentukan, memutuskan atau melakukan sesuatu untuk kepentingan orang banyak. Misalnya, dia mendampingi seorang pasien yang tidak mampu mengakses layanan kesehatan dan memiliki hutang Rp 80 juta hingga menggadaikan hartanya demi biaya tersebut. Menurutnya, fungsi anggota dewan perwakilan rakyat adalah mengawasi jalannya pemerintahan, penganggaran, dan legislasi.

Sereida bertarung di daerah pemilihan 8 DKI Jakarta yang terdiri atas 31 kelurahan dan lima kecamatan. Sereida hanya memfokuskan perhatian dan usahanya di Kelurahan Tegal Parang, Mampang; Kelurahan Jagakarsa dan Kelurahan Lenteng; Kelurahan Kebagusan, Kelurahan Bukit Duri; Kelurahan Srengseng Sawah, dan lainnya menjelang Pemilu 2014. Karena sesuatu hal, dia mengurangi perhatiannya di Tebet.

Tentang nomor urut calon, dia menjelaskan hal itu ditentukan oleh partainya. Dia tidak tahu secara persis apa kriteria untuk mendapatkan nomor tersebut, namun dia menduga salah satu faktornya ialah rekam jejak calon bersangkutan. Dia melihat banyak perempuan mengalami banyak permasalahan atau kasus, namun tak memiliki akses tempat mengadu. Contohnya, akses pengaduan kekerasan dalam rumah tangga. Dia mengusulkan adanya layanan pengaduan bagi perempuan di instansi-instansi pemerintahan yang ada. Dia menyebutkan semacam konseling. Hal ini dialami banyak teman-temannya termasuk dirinya sendiri.

Kesadaran bahwa anak harus di bawah hak asuh sang ibu. Banyak perempuan yang bercerai yang tidak mampu memperjuangkan hak asuh anak. Menurutnya, kodrat ibu adalah mengasuh anaknya. Yang diperlukan adalah bagaimana memampukan perempuan untuk mengasuh anaknya. Karena itu, belum ada akses yang memadai bagi perempuan yang mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga.

Sereida menekankan gaya atau pendekatan dalam bermasyarakatlah yang dapat menimbulkan ikatan emosional. Banyak orang yang didampingi dan diadvokasi olehnya yang menjadi pendukungnya dalam Pemilu 2014 lalu. Contohnya, tokoh masyarakat yang tidak mendapatkan kamar saat pengobatan di rumah sakit. Setelah diadvokasi dan didampingi olehnya, semua keluarganya menjadi pendukung dirinya.

Dulu, Sereida adalah aktivis gereja sehingga banyak mendapatkan dukungan dari gereja. Dia pun mendapat dukungan komunitas orang Batak, khususnya yang memiliki kesamaan marga dengannya, seperti marga Tambunan, Silahisabungan dan Manurung.

Sereida menyediakan dana pribadi sebesar Rp 35 juta yang diserahkan ke KPUD sebagai bukti pertanggungjawabannya. Di luar itu, teman-temannya yang mencetak *sticker*, kartu nama, spanduk, dan kalender. Total dana yang dia keluarkan, termasuk sumbangan, sebesar Rp 160 juta an.

Sebelum pemilu, Sereida dan teman-temannya diminta untuk mendaftarkan diri ke partai. Ada pilihan apakah ingin di DPRD atau DPR RI, mau di daerah mana, dan sebagainya. Selanjutnya, dia mengisi berkas dan mengantarkannya ke DPD PDIP DKI. Dia mengikuti tes yang diselenggarakan oleh PDIP, seperti tes tertulis, psikotes, dan

sebagainya. Apabila lulus tes di partai, maka dia mengikuti tes yang diselenggarakan oleh KPU/KPUD.

Partainya yang menentukan nomor urut Sereida. Daerah pemilihannya merupakan permintaan dirinya sendiri. Pada pemilu yang lalu dia menempati nomor urut 3.

Sereida memiliki tim inti pemenang berjumlah lima orang. Peran mereka adalah mendiskusikan strategi yang akan dilakukan, termasuk turun ke lapangan untuk menyosialisasikan dirinya. Dia memiliki satu orang manajer kampanye. Tim inti yang berjumlah lima orang tersebut menentukan apa yang sebaiknya dilakukan olehnya, termasuk menyiapkan alat kampanye yang akan dipergunakannya.

Sereida terlibat penuh dalam pemenangannya. Tak jarang, dia turun tangan langsung dalam mempersiapkan alat-alat kampanye yang akan dipergunakannya. Koordinasinya langsung di bawah pimpinannya. Koordinasinya cukup hidup, tidak terlalu kaku. Yang penting, menurut Sereida, adalah membagi peran dan tugas.

Biasanya Sereida melakukan hitung-hitungan bersama timnya. Mereka mengevaluasi daerah yang menjadi basis pendukungnya. Sejauh mana sosialisasi yang dilakukan dan kira-kira berapa target suara yang akan diraihinya. Selain itu, mereka melihat di titik mana suaranya belum kuat. Dengan demikian, hasil evaluasinya ialah memperluas basis dan menentukan tim yang akan aktif di sana. Di detik terakhir, dia memusatkan perhatiannya ke Srengseng Sawah, karena di sana terdapat 16 rukun warga (RW). Hampir setiap hari lokasi-lokasi tersebut dikunjungi.

Sereida dan timnya akan melihat bila suatu lokasi sudah didatangi oleh calon anggota legislatif lainnya,

maka mereka tidak masuk ke sana. Mereka akan menghabiskan waktu dan konsentrasi di lokasi lainnya. Contohnya di Pancoran, dia nyaris tidak memiliki titik konsentrasi di sana. Dia memiliki posko pemenangan yang berada di beberapa titik. Posko-poskonya terletak di Tegal Parang, Lenteng, Joe, Srengseng, dan Kebagusan. Tugas mereka ialah menyosialisasikan pembuatan akte kelahiran.

Di klinik PDIP sebelum proses pencalonannya, Sereida aktif dalam penyuluhan kesehatan hingga sekarang. Posko-posko tersebut berfungsi membuat akte kelahiran dan mengadvokasi masyarakat yang sakit.

Dia mengontrak rumah kecil untuk beberapa bulan dengan harga Rp 250.000-400.000 per bulan sebagai poskonya. Menurutnya, banyak relawan yang mendukungnya. Banyak dari mereka yang sudah ditolongnya untuk membuat akte kelahiran. Sebagai bentuk terima kasih, mereka meminta kartu namanya untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat lainnya.

Sereida mengakui bahwa dia tidak dapat bergerak sendiri, apalagi dengan keterbatasan anggaran. Adanya relawan-relawan tersebut sangat menolong dirinya. Terkadang relawan bergerak sendiri. Ada yang datang ke rumah untuk menawarkan bantuannya. Bahkan, Forkabi membantu memenangkan dirinya dalam Pemilu 2014 lalu.

Yang menarik ialah ketika relawan-relawan tersebut melakukan acara 'dangdutan' dan memancing bersama. Untuk acara tersebut, dia hanya meminjamkan *sound system* kecil. Ada sekitar 60 relawan yang sering Sereida catat dan temui. Namun di luar itu, dia memiliki banyak relawan.

Sereida biasanya selalu memperkenalkan dirinya melalui apa yang dia lakukan. Dia menunjukkan bahwa dia siap membantu membuat akte kelahiran misalnya, termasuk kartu Jakarta sehat (KJS). Dia melakukan pengenalan diri ke basis massa setelah lebaran 2014, namun secara intensif dilakukan sejak Januari 2014. Semua itu dilakukan sekitar 8 bulan, namun pada Desember 2014, dia tidak fokus karena perhatiannya beralih kepada acara hari Natal.

Sebagai ketua Departemen Kesehatan PDIP, Sereida banyak melakukan kegiatan dan bertemu dengan masyarakat. Di klinik PDIP, ada yang buka Senin hingga Sabtu. Setiap Senin, dia melakukan penyuluhan tentang BPJS, KJS, termasuk prosedur mengakses kesehatan. Di sana, dia juga menerima pengaduan masyarakat.

Ketika dia memperkenalkan diri menjadi calon legislatif, banyak masyarakat yang mengenalnya. Sarana kampanye yang dipergunakannya antara lain:

- a) Poster
- b) Profil (dicetak dua kali sebanyak 20.000 eksemplar)
- c) Pamflet
- d) Selebaran
- e) Blusukan
- f) Diskusi
- g) Pengajian
- h) Arisan
- i) Facebook
- j) SMS
- k) Kalender

Sereida tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada masyarakat, tetapi menjelaskan bahwa tugas DPRD adalah mengawasi jalannya pemerintahan, legislasi, dan membuat

anggaran. Dia berkata bahwa apa yang dilakukannya selama ini akan diperkuat setelah menjadi anggota dewan perwakilan rakyat. Dia sendiri tidak terlalu setuju dengan istilah visi-misi. Dia lebih menekankan melihat rekam jejak seseorang dan menjadi bukti untuk tugas yang akan dilakukannya kelak.

Sereida mencetak formulir C1 yang langsung di-*upload*, sedangkan formulir yang tidak dapat di-*upload* sudah ada di DPD PDIP atau melalui saksi. Dia mengandalkan saksi dari partai, namun ada inisiatif relawan untuk mengawasi suaranya di lapangan dan memberikan informasi perkembangan perolehan suaranya di lapangan kepadanya. Yang pasti, menurut Sereida, semua berperan dalam memenangkannya. Termasuk orang tuanya yang menganggapnya berdarah politik serta yakin kalau dirinya akan menang.

Ada aturan yang dikeluarkan oleh KPU/KPUK, namun menurut Sereida, tidak dijalankan dengan baik. Misalnyalarangan penggunaan spanduk, tetapi yang melanggarnya tidak ditindak atau diberi sanksi hukum yang tegas. Kemudian sosialisasi kepada masyarakat tidak dilakukan secara massif. Maka perlu peningkatan peran KPU untuk sosialisasi, hingga ke tingkat bawah.

Menurut Sereida agar instansi-instansi yang berkaitan memperjuangkan afirmasi 30 persen untuk calon anggota legislatif perempuan. Mereka tidak dilepas begitu saja, karena di tingkat lapangan banyak terjadi benturan. Dari hasil asamen, dia melihat mana perempuan yang memiliki potensi. Kementerian Pemberdayaan Perempuan harus memiliki target siapa yang akan dimenangkan? Berapa orang? Tidak sekadar memberikan afirmasi 30 persen. Kalau memperjuangkan afirmasi, tetapi dilepas begitu saja,

maka belum tentu kuota tercapai. Dia pernah mengikuti pelatihan dari KPPA, namun tidak mengetahui apa manfaatnya. Dia tak melihat pertautan pelatihan tersebut dengan masalah real perempuan di lapangan. Sampai saat ini, belum ada kerjasama antara KPPA dengan para anggota dewan yang perempuan. Menteri Pemberdayaan Perempuan harus memperjuangkan bagaimana memenangkan perempuan yang berkualitas untuk menjadi anggota dewan perwakilan rakyat, bahkan Bupati dan Gubernur. Jadi, perempuan tidak berjuang sendirian, tetapi dengan catatan, bahwa perempuan yang dimenangkan yaitu mereka dengan potensi yang jelas.

Sarannya kepada KPU/KPUD agar yang di-*upload* bukan formulir C1, tetapi hasil planonya. Karena dari pagi orang yang bertugas di TPS-TPS pasti lelah, sehingga kecurangan mungkin terjadi. Selain itu, agar penghitungan ulang tidak merepotkan, maka semua orang dapat mengakses plano.

**CALON ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN
YANG TERPILIH**

Profil Anggota DPRD II



AIDA CAKRAWATI

AIDA CAKRAWATI KONDA lahir di Bandung, 2 Juli 1964. Saat ini, dia menjadi anggota DPRD Kota Cimahi untuk periode yang kedua kalinya dari Partai Demokrat. Pendidikan terakhir yang diraihinya adalah Sarjana Sastra Prancis dari IKIP Negeri Bandung. Dia pernah menjabat sebagai Pelaksana Tugas Ketua DPC Partai Demokrat kota Cimahi dan Ketua FKPPi di kota yang sama. Selain itu, dia pernah pula menjadi Sekretaris Dirut PT. BCP.

Pengalaman Berorganisasi

Aida sejak di SMP dan SMA telah bergabung dalam organisasi intra sekolah (OSIS) dan di berbagai organisasi lainnya, di antaranya Persatuan Remaja Cimahi. Ketika kuliah, dia masuk di senat dan organisasi kemasyarakatan, salah satunya adalah Forum Komunikasi Putera Puteri Purnawirawan TNI. Dan dari situ ia merambah ke berbagai organisasi lain. Ia menyelesaikan kuliah pada tahun 1990 dan pada tahun 1991 awal, dia menikah dan memiliki anak. Karena memprioritaskan kepentingan keluarga dan kesibukan pekerjaan, ia lalu berhenti sementara dari semua organisasi. Ketika anak-anaknya mulai besar dan merasa tidak memerlukannya lagi secara fisik, ia mulai berkiprah lagi di organisasi di lingkungan sekitar rumah, yaitu di tingkat desa dan kecamatan.

Dari sana ia mulai aktif lagi di organisasi, salah satunya di Forum Pembauran Kebangsaan yang merupakan gabungan dari berbagai etnis, agama, dan juga suku bangsa yang ada di Indonesia, karena Cimahi merupakan miniatur Indonesia sehingga berbagai suku bangsa ada. Bergabung di forum ini menambah wawasannya dan mengasah kemampuannya dalam menyikapi berbagai karakter dari berbagai suku bangsa yang ada. Karena memang, fokus forum ini ialah pembauran agar tidak terjadi gesekan antar etnis. Aida

juga terlibat di Kaukus Politik Perempuan Indonesia. Di organisasi ini ia sering mendapat undangan untuk mengikuti kajian-kajian persoalan perempuan. Dari sana, ia mulai merasa bahwa banyak masalah perempuan yang masih perlu diperhatikan. Dengan alasan tersebut, membuatnya bertekad untuk menempati posisi pengambil kebijakan. Menurutnya, masuk ke tingkat eksekutif rasanya tidak mungkin, sehingga ia berpikir bahwa ia harus berada di legislatif.

Tahun 2007, Partai Demokrat melakukan musyawarah, sehingga saat itu ia masuk ke Partai Demokrat di Kota Cimahi di dalam kepengurusan Partai Demokrat sebagai Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan. Itu karena sejak 2004 telah menjadi simpatisan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sehingga membuatnya tertarik masuk ke Partai Demokrat. Dia mendampingi SBY ketika berkampanye dan tergabung dalam Relawan SBY. Di Jawa Barat dia bergabung di partai mendapatkan berbagai pendidikan dari partai dan ada peluang untuk menjadi anggota DPRD di Pemilu 2009. Berbagai perjuangan ia tempuh layaknya seorang calon anggota legislatif dan didukung dengan tingginya simpatisan masyarakat terhadap Partai Demokrat, sehingga ia tidak mendapatkan masalah di lapangan ketika mensosialisasikan dirinya di masyarakat. Masyarakat sangat antusias dan dengan mudah ia pun mendapat dukungan dan akhirnya lolos sebagai anggota DPRD Kota Cimahi. Tahun 2014, dia mencalonkan kembali dan lolos, sehingga dua periode berada di DPRD. Sementara ini, dia tak lagi mengikuti organisasi lainnya, meskipun banyak yang mengajaknya, karena waktunya sudah tersita di DPRD. Di FKPP, dia adalah ketua dan tahun 2013 sebagai Plt Ketua DPC Partai Demokrat Cimahi, hingga sekarang.

Pengalaman Berpolitik

Aida menjelaskan mengapa dia mengikuti kajian-kajian dan berorganisasi karena kebutuhannya untuk memperkaya wawasan dan memperbanyak teman. Mungkin itulah yang membuat DPP memercayainya untuk mengelola partai. Rekrutmen di Partai Demokrat bersifat terbuka. Siapa saja yang ingin menjadi anggota partai silakan membawa persyaratannya. Pada momen musyawarah cabang, dia masuk kedalam kepengurusan partai. Dia mengajak temannya yang hendak bergabung di partainya. Bila terdapat posisi lowong di kepengurusan, maka dapat diisi dan menjadi calon legislatif. Dari kepengurusan pusat Partai Demokrat sering melakukan pendidikan, tetapi untuk kepengurusan di Cimahi tidak ada pembekalan. Hanya di DPD yang ada pembekalannya, apalagi bila menjadi calon anggota legislatif terpilih, maka akan diberikan wawasan tentang DPR.

Ketika masuk ke Partai Demokrat, tidak ada pungutan apapun dia alami. Hanya setelah menjadi anggota dewan perwakilan rakyat, maka dia dikenakan kewajiban membayar iuran. Menurutnya, mencari anggota partai yang perempuan sangat sulit apalagi yang aktif dan berdedikasi tinggi. Jangankan untuk kepentingan partai politik, untuk organisasi kemasyarakatan saja sulit. Namun untuk memenuhi kewajiban afirmasi 30 persen, maka partai mencari sebanyak-banyaknya perempuan, dan dipasang di posisi-posisi yang harus ada perempuannya.

Partai politik kini mendapat dana dari pemerintah dan iuran dari anggotanya. Ada iuran reguler bagi pengurus partai di tingkat DPP. Untuk Cimahi belum dapat dijelaskan, karena belum melakukan musyawarah cabang sehingga masih mengikuti AD/ART yang lama. Menurutnya, di Cimahi masih

mempergunakan struktur yang lama, seperti ketua, wakil ketua (tujuh orang), sekretaris, wakil sekretaris (5 orang), bendahara, wakil bendahara (5 orang). Partainya mematuhi aturan perundang-undangan atau hukum yang ada. Misalnya, ketentuan untuk menyertakan 30 persen calon anggota legislatif perempuan pada Pemilu 2014 lalu, karena kalau tidak akan didiskualifikasi dari proses tersebut. Pada 2009 karena belum ada ketentuannya, maka sanksinya belum ada. Untuk penentuan nomor urut, prosesnya ditentukan oleh tim di dalam partai. Tim seleksi di partailah yang menentukan nomor urut calon legislative. Calon pun harus mengikuti *fit and proper test* dan *psikotes*.

Demokrasi di Indonesia, menurutnya, sudah menjadi tuntutan dunia. Hanya dalam aplikasinya, dia melihat selama ini banyak masalah akibat demokrasi. Meskipun hal itu adalah proses, namun prosesnya jangan berkepanjangan. Dalam hal ini, edukasi kepada masyarakat luas harus lebih gencar dan jangan karena uang. Pemilih harus cerdas. Konstituen harus diajak cerdas dan diberikan pendidikan atau wawasan politik. Kalau ke daerah pemilihan, ketika memperkenalkan diri, maka dia melaporkan hasil kerja yang sebelumnya. Dia berharap simpati dari mereka, dan bebas untuk memilih siapa saja. Tetapi ada satu daerah pemilihan yang aspirasinya disampaikan, namun suaranya ternyata turun drastis, karena politik uang dari calon anggota legislatif lainnya (*money politic*). Artinya, masyarakat masih belum cerdas karena pemilihnya diintimidasi. Masih memerlukan pendidikan yang panjang bagi masyarakat untuk berdemokrasi. Nama partai dan figur yang membawanya akan sangat mempengaruhi masyarakat.

Pengalaman Pemilu 2014

Motivasi Aida secara pribadi terjun ke politik adalah agar bermanfaat bagi masyarakat banyak. Dari keluarga, dia mendapat dukungan sepenuhnya, alias tidak ada hambatan. Dia mendapatkan daerah pemilihan 1 kota Cimahi yang terdiri atas tiga kecamatan dan satu kecamatan dijadikan dua daerah pemilihan. Daerah pemilihan 1 terdiri atas tiga kelurahan, yaitu kelurahan Leuwigajah, Utama dan Cibebat. Menurutnya, perempuan sebetulnya memiliki kesempatan yang luas sekarang, hanya apakah perempuan siap untuk melobi keluarganya agar dapat terjun ke politik, karena perempuan memiliki peran ganda: satu sisi harus mengerjakan tatanan rumah tangga, di segi lain berkiprah di ranah publik? Untuk tatanan di rumah tangga, hal itu harusnya dapat dikerjakan bersama-sama oleh segenap anggota keluarga. Karena adat di masyarakat kita masih melihat bahwa laki-laki harus dilayani, maka peran perempuan menjadi timpang. Semua itu berpulang kepada perempuan sendiri yaitu bagaimana berkomunikasi dengan suami atau anaknya. Selain harus mampu mengelola waktunya sendiri, tentu masalah budaya patriarkhal yang masih kuat di masyarakat menjadi persoalan tersendiri bagi perempuan yang hendak terjun ke dunia politik.

Bagaimana tokoh masyarakat, tokoh agama dan jaringan dapat mendukungnya, maka hal itu bergantung pada kemampuan berkomunikasi dan meyakinkan, sehingga mau terlibat. Dia memperoleh dukungan dari FKPPI, tetapi tidak sepenuhnya karena calon lain dari partai lain juga ada yang menjadi anggota FKPPI. Tetapi, hubungan emosional yang baik harus ada dan itu kuat mendorong dirinya.

Mengenai dana, Aida menjelaskan bahwa saat itu hanya memiliki uang satu juta rupiah untuk membuat *leaflet*. Ketika

ada uang lebih, dia mengadakan pertemuan dan uangnya hanya untuk konsumsi. Tahun 2009, dia mengeluarkan dana kampanye sebesar Rp 50 juta untuk modal kampanye. Di tahun 2014, dia memiliki dana kampanye sampai Rp 100 juta karena seorang petahana.

Dia dicalonkan oleh partai, namun harus mengisi formulir dan data-datanya. Dia mendapat bantuan atribut dari partai, tetapi lebih banyak atribut partai, jadi bukan atribut pribadi. Pemilu 2014 lalu, dia memiliki tim pemenangan yang berdedikasi. Karena dia seorang petahana, maka dirinya tidak leluasa seperti awal dia mencalonkan diri pada 2009. Timnya bekerja untuk memetakan di mana dia dapat meraih suara banyak. Mereka pula yang membaca suara-suara tim lainnya dan lokasi pemilih yang ada di data KPUD. Dia sendiri yang mencari anggota tim pemenangannya, walaupun beberapa datang menawarkan diri mereka.

Selain tim pemenangan, dia memiliki beberapa relawan, namun mereka tidak bergerak secara serius. Mereka berkomunikasi dengan keluarganya dan jaringannya. Hasil kerja tim di daerah pemilihan dapat dilihat dari perolehan suaranya di TPS-TPS yang ada. Untuk ke konstituen atau daerah pemilihan, tim pemenangannya yang membuka jalan ke sana. Tim pemenangannya yang mencari kontak ke daerah pemilihan dan mereka yang menjadwalkan kapan bertemu dengan masyarakat, sedangkan dirinya menyediakan konsumsi. Biasanya hanya berbincang-bincang, berkenalan, dan menyampaikan visi-misi serta bercerita tentang keluarga dan niatnya menjadi anggota dewan perwakilan rakyat dan tugas-tugas di DPRD.

Alat kampanye yang dia pergunakan adalah pertemuan atau tatap muka, kartu nama, banner, dan lain-lain. Menurutny, tatap muka cukup efektif karena dari hati ke

hati. Hal semacam ini dia lakukan dari pemilu ke pemilu. Tim pemenangannya ada yang lama dan ada yang baru, karena daerah pemilihannya juga baru. Kendalanya menurut Aida, Cimahi itu unik karena ada 3 kecamatan namun jumlah penduduknya banyak, hampir 600 ribu lebih. Kursi di DPRD ini ada 45, dan kalau 45 dibagi dengan 3 daerah pemilihan, maka tiap daerah mendapat 15 kursi. Sementara di dalam UU pemilu, satu daerah pemilihan tidak boleh lebih dari 10 kursi. Memang jadinya agak berebut massa pemilih.

Aida menjelaskan bahwa dia tidak memiliki saksi-saksi, hanya saksi dari partai dan kerjanya untuk partai. Ada tim penyisir yang datang dari TPS ke TPS dan memeriksa saksi masing-masing calon. Dia melakukan tabulasi sendiri di rumahnya. Setiap ada laporan, dia langsung memasukkan datanya. Jadi, terpantau terus-menerus perolehan suaranya; di mana dan berapa jumlahnya. Penghitungannya hingga malam hari, sehingga tidak tuntas. Dia bekerjasama dengan calon lain di daerah itu yang tidak terjangkau olehnya, sehingga dua hari setelah pencoblosan, dia meyakini bahwa dirinya akan menang karena suaranya tertinggi. Dia menyimpan sendiri saksi dari TPS-TPS, maka ketika terjadi penggelembungan suara, dia dibantu kalangan LSM untuk mengadu ke Panwas.

Pandangannya terhadap peran KPUD, dalam tahapannya sudah sesuai dengan UU, namun pengawasannya masih kurang. Namun, politik uang masih kelihatan ada selama proses pemilu berjalan. Sebagian terjadi kekeliruan oleh KPUD, namun sebagian lagi adalah transaksi di tingkatan bawah atau masyarakat. Dia menyampaikan program yang sesuai dengan aspirasi masyarakat, misalkan perbaikan jalan. Sebelumnya, dia menduduki ketua Komisi 1 yaitu bidang pemerintahan. Sekarang, dia ada di Komisi 4 sebagai wakil ketua di bidang kesejahteraan masyarakat.

Dia kerap memanfaatkan waktu reses untuk turun ke masyarakat agar tetap berkomunikasi dengan konstituen, selain memanfaatkan momen seperti maulid nabi, dan sebagainya. Saat reses, dia mendengarkan apa yang masyarakat inginkan. Laporrannya ke masyarakat tidak tertulis bentuknya, lebih berkomunikasi secara lisan, karena masyarakat sudah tahu apa yang dia kerjakan.



KATARINA DIAN NEFININGTYAS

KATARINA DIAN NEFININGTYAS lahir di Malang, 19 Juni 1965. Saat ini, dia menjadi anggota DPRD Batu, Malang untuk periode 2014-2019 dari Partai Gerindra. Pendidikan terakhir yang diraihinya adalah Magister dari Universitas Wijaya Putera. Sebelum menjadi anggota DPRD Batu, Malang, dia adalah pegawai negeri sipil di BKKBN di kota Batu. Selain itu, dia juga memiliki usaha tambak udang dan merias pengantin.

Pengalaman Berorganisasi

Katarina sebelumnya adalah pegawai negeri sipil di BKKBN Kota Batu dan PLKB di desanya. Dia berasal dari Desa Sumberejo Kota Batu, Malang, dan suaminya adalah Kepala Desa Sumberejo, sebelum 2014. Di samping sebagai pegawai negeri sipil, dia mempunyai usaha lain seperti tambak udang dan merias pengantin. Hal ini dilakukannya dengan tujuan untuk mendapatkan sumber penghasilan lain, selain sebagai PNS. Sebagai isteri Kepala Desa, dia aktif berkomunikasi dengan masyarakatnya, misalnya terlibat dalam berbagai kegiatan.

Salah satu keahliannya adalah menari, karenanya dia merintis sanggar tari di desanya yang kemudian berkembang di Kota Batu dengan nama 'Komunitas Tari Sanduk'. Komunitas ini sekarang beranggotakan 5000 orang. Tarian yang dikembangkannya pada gilirannya dilestarikan menjadi tarian desa Sumberejo yang terus mengalami perkembangan. Dia senantiasa menciptakan gaya baru dalam tariannya. Melalui sanggar itu pula, dia mengajak masyarakat belajar melalui kejar paket. Apa yang dilakukannya mendapatkan sambutan dan dukungan positif dari masyarakat setempat. Sanggar ini kemudian berkiprah di luar Desa Sumberejo.

Pengalaman Berpolitik

Tahun 2009, Katarina bergabung dengan PNI Marhaenisme. Dia bergabung dengan PNI Marhaen karena kebetulan bapaknya adalah kader PNI Marhaenisme. Saat ditawarkan menjadi salah satu calon anggota legislatif perempuan dari PNI Marhaenisme, maka dia langsung bersedia. Pemilu 2009, itulah pertama kali dia menjadi anggota DPRD Kota Batu. Beberapa bulan setelah dilantik menjadi anggota DPRD Kota Batu, dia diangkat sebagai Ketua Fraksi PNI Marhaen di DPRD Kota Batu periode 2009-2014 dan anggota Komisi C.

Pemilu 2014, Katarina kembali mencalonkan dirinya namun melalui partai yang berbeda, yaitu partai Gerindra. Alasan yang dikemukakan mengapa dia pindah partai, karena PNI Marhaen tak lagi menjadi partai peserta pemilu. Maka dia mencari partai lain yang tak kental dengan isu agama, yakni partai yang lebih nasionalis. Akhirnya, dia memilih Gerindra. Pada kesempatan yang sama, suaminya juga mencalonkan dirinya menjadi anggota legislatif melalui partai Gerindra. Keduanya lolos menjadi anggota DPRD Kota Batu periode 2014-2019. Saat ini, dia menjabat sebagai anggota Komisi B, Ketua Badan Legislatif DPRD Kota Batu, anggota Badan Musyawarah DPRD Kota Batu serta Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Kota Batu.

Pengalaman Pemilu 2014

Kampanye dilakukannya saat mencalonkan diri pada Pemilu 2009. Keberuntungannya, dia sudah memiliki investasi sosial jauh sebelum berpikir menjadi anggota DPRD, yaitu keaktifannya dalam sanggar tari sanduknya dan pekerjaannya sebagai PLKB serta tukang rias pengantin. Alhasil, dia banyak dikenal orang dan masyarakat setempat.

Namun dia tidak mengandalkan itu, karena kampanye tetap dilakukannya ketika Pemilu 2014 dengan cara:

- a. Aktif berkunjung langsung ke rumah-rumah penduduk sembari membagi-bagikan selebaran dan memberikan informasi tentang pencalonan dirinya. Pertemuan dengan penduduk ini digunakannya sebagai ajang komunikasi dengan tujuan mencalonkan dirinya menjadi anggota dewan perwakilan rakyat. Dia meminta bantuan masyarakat untuk mendukungnya.
- b. Melalui kegiatan menari di sanggarnya dan di luar sanggarnya, dia selalu menyisipkan kampanye tentang pencalonan dirinya. Dia selalu berusaha menciptakan kreasi tari baru sanduk yang kemudian diajarkannya kepada masyarakat secara gratis.
- c. Pintu rumahnya selalu terbuka untuk masyarakat yang ingin datang dan berbicara dengan dirinya. Biasanya masyarakat datang untuk belajar menari, bahkan sekadar untuk berbincang-bincang. Dia berusaha memberikan sajian makanan dan minuman ala kadarnya. Terkadang dia menjadi tempat mengadu masyarakat setempat.

Dalam prinsipnya, dia mengatakan bahwa merebut atau memukau hati masyarakat itu adalah yang paling penting dalam kampanye. Saat ini, dia aktif bekerja sama dan berkoordinasi dengan organisasi masyarakat sipil yang khusus memperjuangkan hak asasi perempuan, yaitu Suara Perempuan Pedesaan.

Selama menjadi anggota DPRD kota Batu sejak 2009, Katarina memiliki agenda pertemuan dengan konstituennya meskipun ada yang rutin dan tidak, seperti:

- a. Pertemuan di sanggar tari sanduk setiap tanggal 10 setiap bulan.

- b. Pertemuan di kelompok-kelompok keterampilan (setiap ada kesempatan selalu hadir).
- c. Jika ada undangan-undangan selalu diupayakan untuk hadir.

Keaktifannya adalah bentuk rasa terima kasih dan tetap menjalin komunikasi dengan konstituennya. Di samping itu, dalam pertemuan-pertemuan tersebut, Katarina selalu menginformasikan program-program DPRD atau pemerintah yang bisa diakses oleh masyarakat. Kantornya di DPRD selalu terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat yang ingin bertemu atau berdiskusi dengannya.

Hubungan dengan pemerintah daerah lebih banyak dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana (BPMPKB), ketika harus melakukan koordinasi dalam pembahasan rancangan undang-undangan.



LILIS NURLIA

LILIS NURLIA lahir di Garut, 11 Oktober 1963. Saat ini, dia menjadi anggota DPRD II Bekasi untuk periode 2014-2019 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Pendidikan terakhir yang diraihinya adalah Magister Pendidikan. Dia merupakan pembina dibeberapa Majelis Taklim di Bekasi dan sekitarnya. Selain itu, dia aktif dalam kegiatan sosial. Sebelumnya Dia pernah menjadi pegawai Bank Niaga, dan saat ini Dia menjadi Direktur PT. Luwis Kreasindo Utama dan Pengurus BMT Syariah Rial.

Pengalaman Berorganisasi

Banyak kegiatan yang dilakukan dibidang sosial dan kegiatan keagamaan, seperti ceramah-ceramah, membina majelis Taklim dan terjun dalam kegiatan kemasyarakatan baik di lingkungan kelurahan maupun Kecamatan Medan Satria dan Bekasi Barat. Selain kegiatan sosial dan keagamaan juga, dia mendirikan sebuah yayasan yang diberi nama Yayasan Adilah Hakimah yang bergerak dibidang pendidikan. Yayasan pendidikan ini menampung siswa-siswi yang tidak mampu dengan mencari pendanaan di antaranya mengusahakan pendekatan kepada pihak-pihak yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan, khususnya bagi orang yang tidak mampu.

Pengalaman Berpolitik

Sebelum menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ibu Lilis Nurlia sudah aktif di Parta Keadilan (PK) sehingga sampai saat ini beliau sudah lebih dari 10 tahun menghabiskan waktunya berkecimpung turut serta membesarkan PKS. Sehingga beliau diamannahi untuk memegang jabatan sebagai ketua Bidang Perempuan.

Kader-kader PKS pada intinya mempunyai semangat dan dedikasi yang tinggi karena didasari oleh semangat dakwah

baik yang memiliki posisi dalam kepengurusan maupun hanya sebagai pendukung. Dalam tahap pencalonan sebagai anggota Legislatif kader PKS pada intinya menerima apa yang menjadi keputusan partai sehingga tidak ada yang mencalonkan secara pribadi. Begitu juga halnya dengan Ibu Lilis, beliau dicalonkan sebagai anggota Legislatif tidak ada alternative lain kecuali menerima dan menjalankan dengan sungguh-sungguh.

Sistem kaderisasi perempuan di PKS dilakukan secara sistematis dan struktural. Di DPP, DPW (Wilayah), DPC (Kecamatan) dan DPRa (Kelurahan) PKS terdapat bidang perempuannya. Semua aktivitas perempuan diwadahi dalam bidang ini. Melalui bidang ini, seorang kader perempuan dilatih dan ditempa kemampuannya melalui serangkaian aktivitas pemberdayaan perempuan, kegiatan sosial dan pendidikan. Dibawah bidang tersebut, ada biro (1) Ketahanan Keluarga. Biro ini diperuntukkan khusus bagi kalangan keluarga kader. Prinsipnya jika keluarga kader solid dan harmonis, akan lebih mudah mengembangkan potensi dan massa pendukung. Selanjutnya, hal itu diperkuat dengan adanya agenda sarasehan, pengajian atau kegiatan ibu-ibu lainnya. Kegiatan-kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan hubungan baik di masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan secara politis bagi warga yang tinggal di sekitar keluarga kader; (2) Biro Rumah Perempuan. Biro ini bertujuan mencari kader-kader perempuan PKS di eksternal melalui kegiatan pemberdayaan perempuan terutama kaum ibu yang tinggal di area titik tertentu atau pada daerah binaan, khususnya yang sudah memiliki relasi dengan partai. Salah satu bentuk kegiatannya adalah pos wanita keadilan (pos WK) dan pos Ekonomi Keluarga (Pos EK) yang meliputi pembinaan usaha ekonomi mandiri, pendampingan terhadap usaha-usaha mereka

serta memberikan akses dan jaringan pemasaran. Ibu-ibu yang telah mengikuti kegiatan-kegiatan ini kemudian diajak untuk mengikuti pengajian PKS; (3) Peningkatan kapasitas kader perempuan. Biro ini bertujuan melatih kader-kader perempuan PKS, misalnya pelatihan *public speaking*; (4) Jaringan Lembaga Wanita; dan lain sebagainya.

PKS mendukung akses kader perempuan menjadi anggota legislatif didasarkan atas pertimbangan kapasitas keilmuan dan keagamaan. Namun, mereka harus mengikuti serangkaian pelatihan kader dengan sistem berjenjang. Semakin tinggi jenjang yang telah mereka raih, makin besar peluang baginya untuk dicalonkan sebagai anggota dewan perwakilan rakyat. PKS lebih mengutamakan calon perempuan dari kader internal dengan kriteria tertentu, misalnya tidak bermasalah dengan keluarganya dan memiliki pengalaman yang cukup lama menjadi kader di PKS serta masuk dalam struktur kepengurusan di PKS.

Pengalaman Pemilu 2014

Dengan banyaknya aktifitas sosial kemasyarakatan yang dilakukan oleh Lilis Nurli dan posisi ketua bidang perempuan di PKS yang diembannya, maka untuk masuk dalam ranah politik bukan suatu hal yang asing bagi Lilis, karena kegiatan politik tersebut pada intinya adalah kegiatan dakwah.

Jauh sebelum dicalonkan menjadi anggota legislatif oleh partai PKS, Lilis sudah melakukan kegiatan-kegiatan seperti pengajian dan pembinaan kepada beberapa majelis Taklim baik dilingkungan RT/RW maupun keluaran bahkan di kecamatan. Bakti sosial juga menjadi suatu kegiatan yang rutin dilakukan bersama dengan kader-kadernya di PKS, sehingga ketika diamanahkan untuk menjadi anggota legislatif, Lilis mendapat dukungan besar dari masyarakat lingkungan Medan Satria.

Lilis memahami proses pencalonannya melalui pembekalan yang diperolehnya dari PKS. Dalam menentukan daerah pemilihan, PKS menempatkan calon anggota legislatif berdasarkan domisili atau asal daerah mereka. Dia ditempatkan di nomor urut 6 di daerah pemilihan Medan Satria-Bekasi Barat, Bekasi. Di daerah ini ada 9 kelurahan.

Dengan serangkaian aktivitas yang dilakukannya serta proses perencanaan dan manajemen yang baik, Lilis memperoleh suara di atas 10.000 dan hal tersebut merupakan prolehan hasil suara tertinggi dari seluruh calon anggota legislatif di Kota Bekasi. Dengan demikian, Lilis terpilih duduk menjadi anggota DPRD priode 2014-2019, terkait dengan bidang keilmuan dan pengalaman yang dimilikinya, maka dia ditempatkan menjadi anggota Komisi C bidang Ekonomi dan Keuangan serta anggota Badan Legislasi.

Kegiatan saat ini ketika dia diamanahkan menjadi anggota dewan, maka hubungan dengan masyarakat tetap terjalin bahkan lebih dekat lagi, terutama dengan majelis Taklim-majelis Taklim karena dia merupakan anggota legislatif yang diberikan dukungan penuh oleh mereka dan menjadi kebanggaan mereka. Dalam perhatiannya terhadap lingkungan dan daerah pilihannya, dia berusaha semaksimal mungkin mengadvokasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat, baik sarana infrastruktur maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Menurut Lilis, UU Pemilu sudah cukup baik karena ada kuota yang diberikan kepada perempuan dan ini menjadi jembatan perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam bidang politik dan mewakili suara perempuan.



ADE MUNAWAROH

ADE MUNAWAROH lahir di Bogor, 29 Mei 1968. Saat ini, dia menjadi anggota DPRD Bogor untuk periode 2014-2019 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pendidikan terakhir yang diraihinya adalah Magister Hukum dari Universitas Juanda Bogor. Dia banyak terlibat dalam pengembangan dan pemberdayaan kaum perempuan muslim melalui majelis taklim dan sayap partai, yaitu Wanita Persatuan Pembangunan (WPP). Selain itu, dia aktif sebagai advokat dan konsultan hukum. Sebelumnya, dia sudah menjabat Ketua Komisi A di DPRD Bogor tahun 2009-2014.

Pengalaman Berorganisasi

Pengalaman berorganisasi Ade dimulai sejak di bangku kuliah. Ketika itu, dia berada di dalam organisasi pemuda (KNPI). Di KNPI, dia pernah menjadi pengurus selama tiga periode. Sebelum di KNPI, dia terlibat di Fatayat NU. Oleh karena di Bogor kader perempuannya sedikit yang ingin terjun total di organisasi, maka akhirnya dia bergabung di mana-mana antara lain: Gabungan Organisasi Wanita, Ketua Cabang Olahraga, MUI, dan Muslimat NU. Kalau dilihat, maka dia memang suka berorganisasi.

Di KNPI, Ade pernah menjadi wakil ketua kemudian di beberapa cabang olahraga pernah menjadi Ketua Cabang Olahraga. Sekarang di MUI, dia menjadi Wakil Ketua Bidang Hukum dan Advokasi. Di PPP, dia menjadi Ketua di DPD Bogor. Pada Musyawarah Wilayah tingkat Jawa Barat, dia terpilih menjadi Ketua DPW Jawa Barat secara aklamasi. Sekarang, dia menjadi pimpinan tertinggi di Jawa Barat membawahi 27 Kota/Kabupaten.

Pengalaman Berpolitik

Setelah dari organisasi kepemudaan dan ormas, Ade sempat vakum karena harus fokus kepada pekerjaannya. Sebelas

tahun di advokat, otomatis dia berhenti dari kegiatan-kegiatan tersebut. Mengapa akhirnya dia terjun lagi ke politik? Karena waktu itu, ada tuntutan untuk berpolitik. Tahun 2009, saat itu kakaknya mencalonkan diri menjadi Bupati dan dia di PPP sudah menjadi Wakil Ketua Majelis Pakar, namun tidak terlalu aktif.

Saat diminta mengawal kontestasi Pilkada tersebut, dia menjadi Tim Advokasi pasangan Rahmat Yasin dan Karyawan Faturrahman. Dia menjadi tim advokasi hingga ada gugatan di pengadilan dari dua putaran Pilkada yang pertama. Setelah sukses, mereka menjadi bupati kemudian kembali aktif di partai, tahun 2009.

Saat rekrutmen, dia mengikuti pencalonan tahun 2009. Dia terpilih menjadi anggota dewan perwakilan rakyat untuk daerah pemilihan 1 Bogor. Setelah menjadi anggota dewan perwakilan rakyat, dia menjadi Ketua DPC PPP Bogor. Pemilu 2014, dia terpilih lagi dengan peningkatan suara 300 persen dari pemilu sebelumnya. Dia mendapat suara terbanyak di daerah pemilihan 1. Hampir setahun menjadi anggota dewan perwakilan rakyat, dan pada Musyawarah Wilayah tingkat Jawa Barat, dia terpilih menjadi ketua PPP Jawa Barat.

Rekrutmen di partainya sesuai dengan undang-undang bahwa harus ada 30 persen untuk calon anggota legislatif perempuan. Dia memang mencalonkan diri untuk memenuhi ketentuan itu. Baginya, manakala terjun dalam satu hal yang baru, maka tidak ada kata 'main-main'. Maka dia mengubah haluannya dari advokat ke politik, yaitu menjadi anggota dewan perwakilan rakyat, dan harus benar-benar terjun dan diseriusi. Alhamdulillah dia terpilih karena melakukannya dengan sungguh-sungguh. Artinya, dia turun ke masyarakat, mencari suara *door to door*, karena ingin terpilih. Dia seorang profesional yang menjadi politikus.

Rekrutmen calon anggota legislatif di partainya, menurutnya, sama dengan partai lainnya. Sekarang tidak ada kekhususan, artinya tidak harus loyalis di partai, kader ataupun dari pengurus. Rekrutmen di partainya harus memenuhi persyaratan: *pertama*, dia harus berkualitas; *kedua*, dia memiliki basis massa yang jelas; *ketiga*, tentu mempunyai modal cukup untuk menjangkau suara di masyarakat. Melihat banyaknya calon yang melamar, kalau memiliki potensi apalagi tokoh masyarakat yang mempunyai basis massa, maka PPP tidak menutup kemungkinan untuk melamar mereka. PPP membuka diri bagi warga Bogor yang mau mencalonkan diri asalkan memenuhi ketentuan yang ada. Hal itu ada di AD/ART PPP serta aturan internal partai.

Walaupun harus memenuhi kewajiban afirmasi 30 persen untuk calon anggota legislatif perempuan, tentu tidak asal direkrut. Artinya, yang benar-benar berpotensi meraup suara sebanyak-banyaknya. Tak hanya persyaratan formal, namun perempuannya harus mau bekerja untuk partai. Mereka harus memiliki modal massa yang kuat, karena di partai biaya politik untuk membuat baliho, gambar, dan alat kontak, menjadi suatu kewajiban. Calon anggota legislatif harus mempunyai pendanaan sendiri.

Jangan ada calon yang untuk dirinya sulit, lalu bagaimana memikirkan orang lain? Bukan berarti hal itu materialistik, namun politik memang butuh biaya. Artinya, minimal dapat membeli alat kontak untuk turun ke masyarakat dan bersilaturahmi juga butuh ongkos. Kalau untuk keluarga saja tidak mampu, maka tak mungkin orang seperti itu masuk kriteria. Tidak mungkin, dia bisa memenuhi kewajibannya sebagai calon anggota dewan perwakilan rakyat.

Menurut Ade, selain iuran anggota partai maka potongan gaji anggota dewan yang berasal dari PPP sebesar 20 persen

dipergunakan oleh partai. Beberapa calon anggota legislatif partai memiliki pekerjaan atau apalah, maka mereka menyumbangkan sebagian rezekinya untuk partai.

Ade menjelaskan bahwa di PPP dilakukan pelatihan-pelatihan atau pendidikan politik bagi kadernya. Tidak hanya untuk perempuan, tetapi untuk laki-laki. Di PPP diperlakukan sama antara laki-laki dan perempuan. Jadi, tidak ada perbedaan. Artinya, kalau sudah berpolitik akan diperlakukan sama. Baginya, perempuan dapat menjadi pemimpin. Mengapa kader-kader partai yang perempuan diperlakukan sama dan tidak diberi keistimewaan agar tidak membuat mereka manja. Dia tidak meyakini keberhasilan dengan perlakuan yang khusus. Jadi dalam berpolitik, perempuan dan laki-laki sama saja.

Pengalaman Pemilu 2014

Saat terpilih menjadi anggota dewan perwakilan rakyat, dia tidak ingin melupakan konstituen ataupun kader partainya, termasuk tim suksesnya. Dia wajib memelihara mereka. Pemilu 2009, dia mempunyai tim sukses. Tim sukses ini memiliki basis massanya masing-masing, dan tidak boleh dilepaskan. Mereka adalah investasi masa depannya. Tak hanya pengusaha yang berinvestasi, kita pun berinvestasi, tetapi di masyarakat.

Tim sukses adalah kepanjangan tangan kita, kata Ade. Manakala ada sesuatu seperti hajatan di masyarakat ataupun yang menikah, meninggal dunia, terkena musibah, dan lainnya, dia wajib datang. Artinya, ada yang memberitahukan hal itu kepadanya. Tim suksesnya berada di situ memberitahukan dirinya. Dia diingatkan oleh tim suksesnya untuk datang ke sana dan mereka yang didatangi akan senang. Minimal kalau dia berhalangan datang, ada

karangan bunga ataupun utusannya ke sana. Begitu pula ketika ada yang meninggal dunia, hal itu menjadi kewajiban baginya untuk takziah. Yang penting, ada komunikasi antara dirinya dengan mereka. Ada jalinan silaturahmi yang tidak pernah putus dengan mereka.

Begitu dia datang ke suatu kampung, maka hal itu akan terdengarnya ke mana-mana. “Wah tadi ada ibu anu ke sini!” Ada kebanggaan masyarakat bahwa orang yang mereka pilih ternyata masih peduli kepada mereka, padahal dia sudah hidup enak duduk di kursi dewan. Itulah yang membuat masyarakat akhirnya berkata, “Oh si anu memang benar, dia tidak pernah melupakan kita yang pernah menjadi pemilihnya.”

Ade waktu terpilih pada periode pertama, dia menjadi Ketua Komisi A. Suara partainya dulu di urutan ke-5 di Bogor. Setelah dia menjadi ketua di PPP, sekarang menjadi urutan ke-2. Sekarang PPP mendapat posisi Wakil Ketua di DPRD. Ada kenaikan drastis dan itu lumayan tinggi, hampir 156 persen. Bila sudah menjadi Wakil Ketua tidak boleh merangkap jabatan yang lain. Karena sudah menjadi pimpinan, maka otomatis ada di badan anggaran. Di badan anggaran, ada empat posisi yang terdiri atas pimpinan, ketua dan para wakil ketua.

Mengapa masyarakat percaya lagi kepadanya, menurut Ade, karena janji-janjinya sudah terbukti. Hal itu yang terpenting. Manakala membuat janji, otomatis kita harus ingat terhadap janji itu. Toh itu bukan dana pribadinya. Misalnya, masyarakat membutuhkan jalan yang hancur untuk diperbaiki. Dia harus berpikir bahwa jalan tersebut milik Bogor, dan pasti dialokasikan dari APBD Bogor. Dia mengatakan bahwa, “Kalau saya terpilih, saya akan usulkan kepada pemerintah daerah.” Manakala sudah di dewan,

waktu menjadi ketua komisi, dia memasukan program-program itu. Alhamdulillah, saat mencalonkan lagi, janji itu sudah terealisasi. Apa yang kita janjikan sudah direalisasikan oleh Pemda Bogor. Misalkan ada orang yang meminta, “Bu Ade majelis taklim kami butuh bantuan.” Ini tidak mungkin diminta di APBD, berarti dia yang harus memberikannya. Dia harus merealisasikan janji pribadi maupun janji yang memakai anggaran pemerintah daerah.

Media kampanyenya yaitu silaturahmi dan hadir langsung di masyarakat. Bila melalui koran, hanya lapisan menengah ke atas yang membacanya, yang menengah ke bawah jarang. Artinya, lebih baik datang langsung. Misalnya ada acara Isra’ Mi’raj, dia datang pagi-pagi ke acara ini. Dia datang karena di acara itu yang datang pasti lebih dari satu rukun tetangga. Kalau hari-hari besar agama pasti banyak yang datang. Dia datang di sana dan mereka hafal: “Oh itu Ibu Ade yang kemarin datang ke sini.” Dia tidak mempergunakan radio dan media sosial. Media sosial untuk hobinya saja. Pendekatan ke masyarakat lebih baik secara langsung.

Menurut Ade, partainya mendapatkan dana dari donatur. Banyak simpatisan partainya yang berasal dari pengusaha, bahkan kadernya ada yang menjadi pengusaha, bekerja di suatu badan, BUMD, atau apapun. Mereka diminta untuk menyumbangkan sedikit hartanya untuk kebesaran partai. Karena bila tidak dibangun bersama-sama, maka partai susah untuk menjadi besar.

Ade menjelaskan bahwa dirinya memiliki tim sukses, minimal per kelurahan atau per desa. Mereka juga memiliki jaringan sendiri. Dan yang memiliki akses langsung ke dirinya setidaknya setingkat kelurahan atau desa. Karena di Cibinong semuanya kelurahan, namun di Citeureup adalah desa. Paling tidak di desa, kita harus mempunyai tim sukses inti. Tim

sukses tingkat desa atau kelurahan ini memiliki orang-orang untuk membawahi tingkat rukun tetangga atau rukun warga. Beberapa orang ditempatkan di beberapa rukun tetangga untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat. Di tiap desa minimal ada kegiatan sosial, apakah bakti sosial atau gotong royong. Ade hanya menyediakan alat-alat kebersihan atau kegiatan berobat gratis yang bekerjasama dengan dinas kesehatan setempat, tetapi dia yang menyelenggarakannya. Atau sunatan massal, hari-hari besar agama Islam, Maulid misalkan. Masyarakat Bogor senang dengan Maulidan, maka tim suksesnya membuat acara besar dan mereka yang mengundangnya.

Untuk berkoordinasi, maka tim sukses langsung ke Ade. Kalau berkoordinasi dengan DPC, biasanya terkait agenda partai. Partainya juga memiliki pengurus dari tingkat kecamatan sampai desa atau ranting, bahkan ada anak ranting yang di tingkat rukun warga. Dia menugaskan mereka untuk membantu calon anggota legislatif lainnya dengan menjadi jembatan ke masyarakat. Artinya, mereka yang memperkenalkan atau membawa calon-calon anggota legislatif ke masyarakat. Pengurus ranting ada di bawah di tiap desa. Misalnya di sana ada titik atau tokoh masyarakat yang memang didengar, maka oleh ranting, calon anggota legislatif terkait akan dibawa dan diperkenalkan. Calon dibawa silaturahmi oleh ranting. Namun untuk menjaga kekompakan sesama calon, dia memerintahkan agar tidak terjadi kasus ini: ada calon yang sudah dibawa ke RT 01, lalu calon lain dari PPP tidak boleh dibawa ke RT 01 lagi, karena telah pernah dikunjungi. Mereka dapat dibawa ke rukun tetangga yang lain. Tidak boleh ada bentrokan, berebut suara di satu tempat, karena tidak efektif apalagi satu partai. Mereka dapat membagi-bagi suara. Garapannya harus berbeda-beda, tidak dalam satu kolam, karena tak akan

dapat ikan satu pun. Lebih baik di kolam masing-masing yang digarap oleh masing-masing calon legislatif.

Ade menerapkan mekanisme evaluasi atas kampanyenya. Dia memiliki Lajnah Pemenangan Pemilu (LPP). Di lembaga ini diberi batasan-batasan atau hal-hal yang boleh dan tidak boleh bagi calon legislatif. Dan lembaga itu pula yang mengemas beberapa kampanye terbuka bagi DPC dan calon legislatif. Misalnya, DPC saat pemilu berkampanye di Cibinong, maka semua calon di Cibinong harus berkumpul di sana dan berkampanye bersama-sama. Inilah tugasnya LPP. Setelah melakukan kampanye, tentu ada evaluasi-evaluasi yang terus berjalan. Tiap kegiatan dievaluasi agar ke depannya menjadi lebih bagus lagi. Program berjalan terus, namun sambil dievaluasi untuk peningkatannya.

Sebagai seorang petahana, Ade mempergunakan posko kemenangan. Posko-posko kemenangan ada di tiap kecamatan, dan itu berarti ada 40 posko kemenangan di 40 kecamatan pada pemilu lalu. Artinya, apa yang membuat mereka kemarin kalah dan suaranya sedikit? Ini terus mereka evaluasi sambil membuat program-program yang langsung terasa oleh masyarakat.

Ade membuat program pembuatan akte kelahiran gratis. Pembuatan akte ini tidak dipungut biaya dan masyarakat diperingan bebannya. Mereka tidak harus datang ke Dinas Kependudukan, tetapi dia menjembatani mereka untuk mengurus akte-akte tersebut oleh pengurus-pengurus partai yang ada di tingkat kecamatan. Mereka mengorganisir semua warga dari rantingnya. Siapa yang memerlukan akte kelahiran lalu dibuatkan aktenya. Dia dan kawan-kawannya hanya bermodalkan meterai. Akte diserahkan kepada mereka yang memerlukan sekaligus mendapatkan kartu tanda anggota PPP. Kita membuatkan kartu anggota PPP seperti

bentuk kartu ATM. Otomatis yang sudah mendapatkan kartu akan menjadi anggota PPP. Di kampung, jarang orang yang mempunyai akte kelahiran, maka ketika akan naik haji baru mereka kebingungan. Dana yang dikeluarkan untuk membuat kartu anggota sebesar Rp 3000 dikalikan lebih dari 28.000 orang waktu itu. Mungkin itu agak besar, tetapi banyak pula sumbangan dari kader-kader yang sudah berhasil.

Ade menjelaskan bahwa daerah pemilihannya meliputi Cibinong, Citeureup, Babakan Madang, Sukaraja, dan Kelapa Nunggal. Jadi, ada lima kecamatan. Selain memiliki tim sukses, dia mempunyai relawan-relawan. Tim suksesnya termasuk relawan juga, tetapi relawan biasanya mereka yang berada di luar partai yang membantunya mencari suara.

Awalnya Ade kesulitan untuk memperkenalkan dirinya, tetapi dia dibantu oleh beberapa pengurus PAC dan ranting. Waktu pertama kali terjun ke masyarakat, maka dia gamang dan sulit. Dan suaranya pun tidak begitu signifikan. Dia mendapatkan sisa kursi karena hanya memperoleh 5.500 suara waktu itu. Tetapi pada Pemilu 2014, dia memperoleh 20.500 suara, karena sudah berpengalaman.

Menurut Ade, persiapan pengenalan diri apabila hendak menjadi calon setidaknya dua tahun sebelum pemilu terkait berlangsung. Mereka harus sudah terjun ke masyarakat secara serius. Dari kasusnya, dia mempersiapkan dirinya hanya enam bulan pada pemilu yang pertama, namun setiap hari ke masyarakat. Sehari terkadang lima tempat, atau lima-enam titik dia hadiri.

Alat kampanye yang paling efektif, menurutnya, adalah *sticker* karena mudah ditempel di mana-mana. Selain itu, kalender paling mudah untuk masyarakat. Kalender harganya agak mahal, yang murah meriah itu adalah *sticker* dan spanduk-spanduk.

Dia lebih banyak membuat program yang dimengerti oleh masyarakat, seperti keagamaan, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Itulah program yang menarik bagi mereka. Kalau program pendidikan, maka cobalah dicari solusinya yang seperti apa. Kesehatan misalnya, dahulu kita mempunyai Jamkesmas, mereka mengatakan, “Kita punya Jamkesmas, tetapi susah di rumah sakit”. Kita memberikan solusi seperti apa. Tentang infrastruktur, kalau jalannya jelek di sana-sini, maka hal itu pasti menjadi perhatian mereka.

Karena Bogor itu luas dan calon jarang bertabrakan pertemuannya dengan masyarakat. Kalau di kotanya memang sempit, ke mana saja bertemu sesama calon anggota legislatif lainnya. Kendala di Bogor ialah kondisi cuaca. Kadang-kadang sudah direncanakan kegiatan ke lapangan, tiba-tiba hujan deras, maka kacaulah rencana tersebut.

Ade berpandangan bahwa pembelajaran politik masih kurang bagi masyarakat. Banyak masyarakat yang masih mengandalkan atau memakai cara-cara yang harusnya sudah ditinggalkan, misalnya politik uang. Banyak calon anggota legislatif saat terakhir kampanye melakukan ‘nyawer’. Masyarakat mau menerimanya. Itu sebetulnya harus dihilangkan, bahkan di Bogor ada istilah ‘*cilok di kecapan*’. Artinya, mau nyolok asal ada *gocapan*. Dalam berdemokrasi, kita harus memilih sesuai dengan hati nurani. Tetapi kadang-kadang hati nurani tertutup dengan selebar uang Rp 50 ribuan. Harus kita sampaikan ke masyarakat, bahwa cara-cara membeli membuat orang yang dipilih tidak bertanggungjawab kepada masyarakat. Karena merasa sudah terpilih, sudah membayar, mengapa harus kembali ke masyarakat? Mengapa harus melihara hubungan dengan masyarakat? Dalam pendidikan politik sangat penting, terutama di tingkat desa, agar pemahaman

masyarakat berubah. Dan peraturan harus lebih diperketat, karena masih ada yang lolos. Itulah masalah demokrasi kita. Artinya, sering terjadi politik uang (*money politics*).

Motivasi yang mendorong Ade mencalonkan dirinya menjadi anggota dewan karena hendak berperan aktif dan menjadi penyambung lidah masyarakat agar apa yang diinginkan oleh mereka sampai ke pemerintah. Kita menjadi penghubung antara masyarakat dengan pemerintah daerah. Masyarakat tidak dapat langsung mengakses pemerintah daerah, namun melalui tangan anggota dewan. Melalui anggota dewan, masyarakat menyatakan, "Tolong sampaikan!" Kita menyampaikan aspirasi itu melalui badan anggaran, jadi bermanfaat sekali. Dia tidak setuju kalau ada orang yang mengatakan bahwa anggota dewan hanya duduk-duduk. Mereka membuat undang-undang atau perda-perda. Mereka mengawasi hal itu. Kalau ada aspirasi masyarakat yang hendak disampaikan ke pemerintah, jika anggota dewan yang menyampaikannya, maka akan didengar oleh pemerintah. Masyarakat membutuhkan mediator antara dirinya dengan pemerintah daerah.

Menurut Ade, persoalan di tiap daerah pemilihan sama yaitu masalah kebutuhan masyarakat yang paling dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan layanan pemerintah terhadap mereka. Dia tidak menjanjikan sesuatu yang tidak mungkin yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Sumber dana kampanye Ade berasal dari tabungannya, dari sumbangan keluarga, dan beberapa asetnya. Perbedaan jumlah dana pada pemilu pertama dan kedua, menurut Ade, cukup besar karena terjadi perbedaan jumlah suara yang diraihinya. Selain itu, kader partai yang terlibat lebih banyak untuk menyukkseskan dirinya. Semua itu tak pernah dihitung berapa jumlahnya dan selama bermanfaat baginya.

Bagi Ade, dengan sistem suara terbanyak maka nomor urut calon anggota legislatif tidak berpengaruh lagi. Siapapun boleh bersaing asalkan suaranya terbanyak. Periode 2009 sudah berlaku sistem suara terbanyak, namun pada periode 2004 masih berdasarkan nomor urut calon anggota legislatif.

Ade mengandalkan saksi-saksinya di tiap TPS. Mereka ditugaskan oleh partai, setidaknya dua orang saksi per TPS. Artinya, mereka yang mengawal perolehan suaranya. Siapapun calonnya yang penting dari PPP, maka tidak boleh ada yang hilang suaranya. Mereka mengawal suara mulai dari TPS desa, kecamatan, sampai ke KPUD. Calon anggota legislatif pun harus turun ke lapangan dan keliling ke TPS untuk mengawal suaranya sendiri.

Ade menjelaskan bahwa aturan-aturan disosialisasikan sebelum timnya terjun ke masyarakat, misalnya tidak boleh melakukan politik uang. Aturan-aturan yang administratif sifatnya telah menjadi tugas KPUD. Partainya berusaha memenuhi aturan yang ada atau sesuai dengan UU yang ada. Kalau ada calon anggota legislatif PPP yang melakukan politik uang selama berkampanye, maka mereka dikenakan sanksi pidana.

Terkait dengan afirmasi 30 persen untuk calon anggota legislatif perempuan, Ade melihat bahwa hal itu ada di dalam UU Pemilu walaupun tidak ada sanksi yang dikenakan bagi partai politik yang tidak memenuhinya. Artinya, KPUD tidak akan menerima ajuan dari partai kalau tidak memenuhi 30 persen. Menurutnya, hal itu cukup mengakomodir kepentingan perempuan sehingga perempuan tidak dihalang-halangi untuk terjun ke dunia politik. Hak dan kewajiban mereka sama dengan calon laki-laki. Dengan kesempatan itu, sebaiknya dimanfaatkan oleh perempuan apalagi dengan sistem suara terbanyak. Manakala dia

memperoleh suara banyak, maka hak perempuan untuk menjadi anggota dewan. Mari bertarung dengan sportif, *fair* dan jangan takut untuk bersaing.

KPUD di Bogor sudah cukup *fair*. Dia memang pernah memperjuangkan kasus caleg dari PPP di KPUD Bogor. Dia memperjuangkan kasusnya sampai ke Bawaslu pusat dan dimenangkan oleh Bawaslu.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak harus aktif bekerjasama dengan partai politik, karena partailah yang mempunyai konsituen. Partai politik mengetahui masyarakat itu seperti apa. Di partai politik banyak perempuannya. Jangan hanya dengan pemerintah daerah, karena pemerintah daerah bukan organisasi politik. Selain itu, anggaran kementerian tersebut pun tak ada. Mereka tidak memiliki anggaran yang memadai, maka bagaimana dapat mem-*breakdown* program-programnya?



SAHAT FARIDA BERLIAN

SAHAT FARIDA BERLIAN lahir di Jakarta, 4 September 1983. Saat ini, dia menjadi anggota DPRD II Depok untuk periode 2014-2019 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Pendidikan terakhir yang diraihinya adalah Sarjana Pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta. Dia dikenal aktif sejak di bangku mahasiswa hingga menekuni berbagai kegiatan, seperti menjadi wartawan di majalah Otonomi Daerah, tenaga lepas litbang Kompas, mengajar bahasa Indonesia di SMP dan SMA di Lapas Anak Tangerang, asisten koordinator Divisi Monitoring Komnas Perempuan, manajer kampanye dan advokasi WALHI Sumut. Dia juga tergabung di Relawan Perjuangan Demokrasi, ormas sayap PDI Perjuangan. Diawal bergabung menjabat sebagai wakil sekjen Dewan Pimpinan Nasional bidang internal 2011-2016, namun ia diminta untuk kembali di wilayahnya, yakni Jawa Barat, sebagai wakil ketua bidang kebudayaan DPD Repdem Jawa Barat.

Pengalaman Berorganisasi

Sahat terlibat dalam organisasi sejak duduk di Sekolah Dasar. Dia mengikuti Pramuka dari SD hingga SMP. Saat di Pramuka, dia memiliki bintang-bintang (baret) kepramukaan. Di sekolah, dia aktif dalam kegiatan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS). Selain itu, dia memprakarsai terbentuknya majalah dinding (mading) di sekolahnya, yaitu di SMU Bhayangkari I.

Dia melanjutkan pendidikan dengan berkuliah di Universitas Negeri Jakarta dan terlibat di Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Didaktika, pernah menjabat sebagai pimpinan redaksi. Di luar kampus, dia aktif di Front Perjuangan Pemuda Indonesia. Kalau pramuka adalah organisasi kepanduan. Menurutnya, kepanduan harus terus ada di sekolah karena pengembangan anak dimulai ketika mereka

bergaul dengan yang lain. Kalau di Lembaga Pers Mahasiswa (LPM), kajiannya adalah Pers Mahasiswa. Secara historis, semangatnya adalah pers pergerakan, sebelum era internet atau media sosial *booming* dan massif. LPM sebagai media alternatif, itulah semangat yang diusung oleh LPM.

Front Perjuangan Pemuda Indonesia adalah organisasi pemuda yang dia ikuti karena diajak oleh kakak kelasnya. Kalau dibaca dalam buku Anders Uhlin yang berjudul *Oposisi Berserak*, dia menuliskan sejarah kelompok-kelompok yang melawan Orde Baru di era 1990-an. Front Perjuangan Pemuda Indonesia hadir di fase itu. Sahat banyak mengikuti organisasi yang beragam jenisnya, namun intinya adalah pergerakan dan perubahan. Sebelum 2009 di Front Perjuangan Pemuda Indonesia, dia berada di jajaran pimpinan nasional bagian riset dan data.

Pengalaman Berpolitik

Sahat bergabung dengan dan tercatat sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akhir 2011. Tahun 2012 terjadi gelombang pendudukan *Wall Street* di Amerika, Eropa, dan Indonesia (di Bali, Medan, Makassar, dll). Hingga akhir 2011, terjadi konflik di PT. Freeport Papua yang mana para buruhnya melakukan mogok kerja besar-besaran menuntut peningkatan kesejahteraan.

Ketika itu datanglah Masinton Pasaribu (PDIP), Ketua Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem). Dia berkampanye mengenai Indonesia sebagai proses yang menjadi. Pilihannya ialah suka atau tidak adalah jalur parlemen. Kala itu, dia merapat ke PDIP. Kemudian dia terdaftar sebagai anggota kader. Dia mengikuti proses pendidikan anggota sampai tingkatan guru pendidik di partai. Proses ini terbilang cepat karena bekal berorganisasinya sudah ada. Di Repdem,

dia aktif di Dewan Pimpinan Nasional dengan mengelola *Repdemnews.com* karena sedikit banyak dia mampu menulis. Itulah yang dapat dia kelola. Kemudian dia mengikuti serangkaian tes untuk menjadi kader partai. Dia tidak dipungut bayaran ketika masuk ke partai tersebut.

Menurut Sahat, dia diuntungkan oleh afirmasi 30 persen karena bila tidak, maka dia tidak dapat melaju seperti sekarang. PDIP bukanlah partai yang paling hebat dalam hal afirmasi tersebut, walaupun Ketua Umumnya seorang perempuan. Tetapi iklim partai hari ini masih sangat *macho*, karena perempuan kurang diberi ruang untuk berekspresi. Dia menjelaskan bahwa ruang bagi perempuan untuk berekspresi dalam politik tak hanya diberikan, namun harus direbut.

Menurutnya di PDIP tidak ada diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. PDIP merupakan partai yang paling aman melenggang ketika afirmasi 30 persen untuk perempuan ditetapkan, karena pada Pemilu 2014 yang lalu beberapa partai menolak hal tersebut.

Dalam pandangannya, PDIP konsisten dengan AD/ART-nya karena dianggap sebagai konstitusi partai. Semua itu tentu mengikat partai. Sanksi yang tegas dikenakan kepada tiap anggota partai yang melanggar aturan partai melalui pemecatan, penarikan kartu anggota, proses pengadilan, dan lainnya. Semua itu pernah terjadi di PDIP di bawah kepemimpinan Megawati.

Tahun 2012, PDIP mencanangkan program menekan angka kematian ibu dan anak di seluruh Indonesia. Program ini dibebankan kepada pimpinan daerah yang berasal dari PDIP untuk melaksanakannya. Pada 2018, program ini akan diadakan evaluasi terhadap pimpinan daerah mana yang berhasil melaksanakan program tersebut. Menurut

Sahat, program itu adalah bentuk kepedulian PDIP terhadap masalah perempuan dan anak.

Di PDIP terdapat forum tertinggi, seperti kongres. Kongres akan membuat rekomendasi ke Ketua Umum partai. Kemudian ada pimpinan-pimpinan daerah, cabang, dan sebagainya. Ada musyawarah partai, walaupun hasil akhirnya berada di tangan Ketua Umum. Ketua Umum memperoleh rekomendasi hasil akhir musyawarah. Mengenai pendanaan partai, ada kontrak politik untuk berkontribusi kepada partai guna menghidupi partai, maka dia pun melakukannya. Di dalam AD/ART juga diatur bahwa apabila menjadi calon legislatif, maka harus selesai dengan soal ekonomi sehingga tidak berpeluang mencari uang di partai. Dia tidak menjelaskan besaran kontribusinya ke partai.

Menurutnya, di PDIP ada jenjang pendidikan yang harus dilalui oleh tiap kader partai, baik tentang ideologi partai maupun manajemen organisasi. Pendidikan ini ada tingkatannya. Tiap peserta yang mengikutinya harus melalui seleksi dahulu. Selain itu, ada Megawati Institut yang menyelenggarakan sekolah pemikiran pendiri bangsa. Tidak ada pemungutan bagi kader yang lulus seleksi. Di tingkatan internasional, PDIP pernah mengirimkan kader-kadernya ke China untuk bertukar pengetahuan. Semua itu adalah bentuk pengembangan sumber daya manusia. Sejauh ini, PDIP taat pada aturan hukum ataupun undang-undang yang berlaku. Dasar konstitusi PDIP ialah Pancasila 1 Juni 1945 yang dicetuskan oleh Bung Karno.

Pengalaman Pemilu 2014

Sahat berpendapat bahwa pemilu langsung membuat masyarakat mengenal siapa yang mereka pilih. Dia bersyukur dan berterimakasih dengan diselenggarakannya pemilu langsung. Dalam pemilu langsung, mereka harus mengenal

calonnya. Mereka harus mengetahui siapa calonnya dan si calon mengenal konstituennya. Mereka harus mengenal calonnya, dan si calon mengenal mereka walaupun kerugiannya adalah politik uang.

Uang sebagai panglima. Hal itu perlu dikoreksi karena mau tidak mau, suka tidak suka, hanya orang yang memiliki banyak uang yang dapat maju ke pemilihan. Segi positifnya, calon anggota legislatif yang tidak mempunyai uang, namun mengenal 3000 pemilih yang mencoblosnya, akan ada kemungkinan terpilih. Itulah keuntungan dari pemilihan langsung.

Program kampanye pertama Sahat yaitu terkait dengan Perda Perlindungan Perempuan dan Anak yang sekarang dalam proses pembuatan serta akan menjadi usulan Raperda pada Juni 2015. Artinya, dia memiliki pemikiran tersendiri tentang perempuan dan anak-anak dari sisi ekonomi, sosial, budaya, agama dan politik. Ketika maju menjadi calon anggota legislatif, dia berkonsultasi dengan teman-temannya yang memiliki keresahan yang sama. Tidak semua temannya mengambil peran dan ruang yang sama seperti yang dilakukannya.

Dia menyampaikan hal itu kepada konstituennya. Dia menjadi anggota dewan perwakilan rakyat tidak untuk setahun atau dua tahun apalagi untuk kaya mendadak. Sekarang situasinya bahwa partai politik menjadi persoalan tersendiri. Terserah kepada masing-masing anggota DPR, apakah hendak mencari kekayaan dari jabatannya, akan tetapi dia tidak ingin melakukannya.

Bagi Sahat, dia hendak berperan bagi kaum rentan yaitu perempuan dan anak-anak. Hal itu menjadi programnya, karena tidak banyak calon anggota legislatif berkampanye untuk program tersebut. Dia menjelaskan ada tiga fungsi

anggota dewan perwakilan rakyat: fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi. Dalam kapasitas sebagai anggota DPR, dalam membuat aturan atau kebijakan, dia mendorong masalah perlindungan perempuan dan anak karena isu ini tidaklah menarik. Menurutnya, angka perkosaan sangat tinggi di Depok. Kecenderungan berpoligami juga meningkat. Apakah yang berpoligami mau mengawini janda-janda tua? Di luar negeri, jika laki-laki akan menceraikan perempuan secara sembarangan, maka dapat dikenakan sanksi hukum yang berat. Hal itu tidak berlaku di Indonesia. Dalam pemilu yang lalu, daerah pemilihannya meliputi tiga kecamatan: Beji, Cinere, dan Limo. Ketiga Kecamatan itu terdiri atas 14 Kelurahan. Dari daerah itu ada sembilan kursi yang disediakan di DPRD Depok. Dari perhitungan secara manual, dia memperoleh 3015 suara di daerah pemilihannya. Ini bukan suara yang terlalu banyak, namun dengan upaya dan modal yang ada, hal itu cukup baik diperolehnya. Apalagi di daerah pemilihannya, dia mendapatkan kursi pertama. PDIP di daerah Beji, Cinere, dan Limo mendapatkan dua kursi (dia menempati kursi pertama).

Sahat pada Pemilu 2014 yang lalu memperoleh nomor urut 3. Baginya, nomor urut tidak berpengaruh besar karena sebelumnya dia berada di nomor urut 9. Untuk memperoleh nomor urut tersebut ada rekomendasi dari partai, kemudian ada serangkaian tes untuk penempatan nomor urut. Dalam Daftar Calon Sementara, dia berada di nomor urut 9. Sebenarnya nomor 9 akan memudahkan kampanye ke ibu-ibu yang tidak dapat membaca. Dia dapat mengatakan, "Ibu-ibu, jangan lupa ya nomor yang paling bawah, nomor 9". Dalam Daftar Calon Tetap, dia memperoleh nomor urut 3. Komposisinya, bila ada 9 kursi, maka ada 3 perempuan. Berarti, nomor urut pertama perempuan. Dia memperoleh 3000 suara secara langsung.

Sekarang dia berada di Komisi D yang programnya menyoar ke PKK. Selama ini, PKK hanya berisikan pengajian, maka bagaimana mau maju? Bagaimana PKK dapat merangkul perempuan yang berbeda agama? Dalam RKPD, dia meminta masukan teman-temannya, seperti Koperasi Perempuan Tanah Baru. Landasannya agar perempuan saling berbagi dan menguatkan. Virus ini harus ditularkan.

Modal sosial Sahat selama ini ialah dukungan keluarganya, terutama keluarga intinya. Di Depok, banyak temannya yang keresahannya sama dengan dirinya. Mereka mendukung dirinya ketika pencalonannya. Mereka menitipkan harapan bahkan suara dan uang. Semua itu, modal sosial yang dia miliki. Pada kampanye lalu, dia tidak memiliki *billboard*, tidak membagi-bagikan mukena, sembako, dan lainnya.

Dalam pencalonannya, ada dukungan kalangan agama juga. Dia didukung oleh kalangan pemeluk Katolik di Depok, karena berhasil melewati *fit and proper test* dari keuskupan Bogor. Mereka melacak daftar nama calon anggota legislatif walaupun awalnya mereka melacak daftar nama calon yang hanya beragama Katolik, sementara dirinya tercatat sebagai muslim. Dia diperkenalkan kepada jemaat, dan hasilnya, gereja Katolik Depok memberikan suara yang signifikan kepadanya. Selama Pemilu 2014, dana yang dia keluarkan kurang dari Rp 100 juta. Dana ini berasal dari teman-temannya mulai dari besaran Rp 10 ribu hingga Rp 1 juta.

Dalam proses pencalonannya, PDIP sendiri memiliki struktur mulai tingkatan RW, kelurahan, kecamatan, dan sampai kabupaten. Untuk pengisian daftar calon legislatif, hal itu menjadi tanggungjawab kecamatan, yang biasa disebut PAC. Dia diminta PAC untuk mendaftarkan diri meskipun berada di Repdem. Dia diminta oleh PAC untuk mendaftarkan dirinya. Kemudian dia meminta daerah pemilihan di Depok,

karena tinggal di Depok. Partai mendukungnya secara moral agar dia dapat menang.

Sahat menjelaskan bahwa dia memiliki tim pemenangan sendiri. Tim intinya terdiri atas 10 orang, yang salah satunya ibunya dan bapaknya sendiri. Termasuk pula teman-temannya. Sosialisasi dilakukan oleh teman-temannya, dari mulut ke mulut. Kegiatan 10 orang tersebut ialah bekerja untuk memotong-motong bambu, memasang bendera, dan menyebarkan pamflet. Termasuk mengorganisir membawa orang ke kampanye.

Apa yang dia lakukan pada masa kampanye ialah duduk-duduk setiap malam. Dia mengamen, membawa sepeda, dan gitar. Dia berkeliling mengamen, dan teman-temannya menyumbang. Dia berkeliling sambil membagi-bagikan selebaran. Hal itu dia lakukan dari rumah ke rumah, dan di tempat ramai. Misalnya di mal Cinere pada minggu pagi ketika ramai pengunjung, dia membagi-bagikan selebaran. Dia masuk ke kompleks perumahan juga untuk membagi-bagikan selebaran.

Dia mengkoordinasi langsung tim pemenangannya. Timnya terdiri atas anak-anak muda kampung yang awalnya ragu kepadanya. "Serius mau nyaleg? Emang punya duit?", kata mereka. Dia hanya meyakinkan mereka, "Kita orang miskin, tapi mengapa membunuh mimpi kita untuk bisa lebih maju?" Timnya terdiri atas tukang gali kubur, penjual burung, buruh bangunan, dan tukang parkir. Dia menyemangati mereka dengan berkata, "Kalau kamu saja tidak percaya dengan saya yang anak seorang supir dan miskin ini bisa maju, lantas bagaimana dengan mimpi anak-anakmu?" Itu yang dia katakan kepada mereka.

Dia bersikap 'keras' kepada tim pemenangannya. Teman-temannya yang aktivis tentu memiliki kesibukan sendiri-

sendiri, maka tidak mungkin mereka memasang bendera-bendera miliknya, namun mereka dapat membantunya di ruang yang lain. Dia memerlukan tim yang dapat langsung dikendalikannya dari A sampai Z. Dia memanfaatkan media sosial yang ada. Temannya membuat video untuk dirinya mengenai bio data singkat dan menyebarkannya di *youtube* dan *whatsapp*. Dia tidak melakukan evaluasi kerja tim secara formal, namun secara informal mengontrol orang-orang di dalam tim agar tidak emosional ketika spanduknya dicabut.

Posko pemenangannya ada di rumahnya sendiri. Menjelang dua bulan pemilu, dia mengontrak tempat yang lebih kecil di kampung yang agak jauh dari rumahnya. Kegiatan di posko adalah membagi-bagikan selebaran dan pemetaan di kompleks mana dan siapa yang bertugas di sana, dan lainnya.

Kegiatannya ialah membagi-bagikan selebaran. Mereka melakukan pemetaan di kompleks mana, siapa yang bertugas di sana, dan seterusnya. Dia ikut berkeliling bersama timnya karena tak mau pergi tanpa dirinya. Dia memang terlibat langsung.

Dia pun memiliki relawan yang banyak. Ada orang yang tidak dia kenal, namun memberikan dukungannya, misalnya *tweet* di *Twitter*. Relawannya banyak di media sosial, tidak terorganisir, tetapi tahu-tahu sudah mendukungnya. Ada relawan dari Jawa Tengah yang mempromosikannya yang mempunyai *follower* di Depok. Dia datang dengan atribut mengamen. Dia menciptakan lagunya sendiri dan membagi-bagikan selebarannya. Bila datang ke kampung-kampung, maka anak-anak tahu lagu yang biasanya dia nyanyikan. Orang memanggil dirinya 'Ibu Bangkit Mandiri' sesuai dengan lirik lagunya.

Pengenalan dirinya pada masyarakat dengan cara mengamen dan membagi-bagikan selebaran. Kegiatan

ini berjalan selama tiga bulan. Dia pun memperkenalkan diri ke tokoh masyarakat meminta dukungan, tetapi kalau mereka meminta lebih, maka dia tidak meresponnya. Dia mempergunakan alat kampanye berikut:

- a) Poster
- b) *Sticker*
- c) Selebaran
- d) *Website* (www.sahattarida.com) sahat.id
- e) Media sosial
- f) Blusukan
- g) Temu muka
- h) Forum diskusi
- i) Radio 68H

Program yang dia ditawarkan seperti Perda Perlindungan Perempuan dan Anak, transparansi anggaran dan akuntabilitasnya. Selama pemilu, tentu dia mengeluarkan biaya politik, misalnya membuat cetakan dan segala macamnya, namun tidak menggunakan ‘politik uang’.

Saat hari pemilihan, Sahat menurunkan orang untuk mengawasi perolehan suara-suaranya. Dia memanggil relawan-relawannya. Seorang relawan bertanggungjawab terhadap 5 TPS untuk menjaga suaranya. Dalam arti, menjaga suara, mengecek perhitungan suara secara langsung, mencatat kemudian memotretnya. Seorang relawan dia berikan Rp 20 ribu untuk uang bensin. Ada sekitar 50 relawan yang terjun dalam kegiatan tersebut. Hal itu dilakukan hanya di kelurahan Cinere dan Gandul, karena dananya tidak mencukupi.

Relawan yang ada memantau di TPS-TPS. Setelah dari TPS-TPS, suaranya dikirimkan ke kelurahan. Itu pun harus diikuti terus hingga penghitungan suara di tingkat kota oleh KPUD.

Dia pun menghitung sendiri hingga subuh. Ada formulir C1 untuk partai dan C1 untuk kelurahan. Dia memantau formulir C1 yang ada di partainya, selain yang ada di kelurahan. PDIP juga memiliki tabulasi berdasarkan formulir C1. Ada petugas partai yang berjaga-jaga di komputer untuk penghitungan suara.

Sahat percaya bahwa dia beruntung dapat menang. Selain tentunya doa dari kedua orang tuanya. “Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan dimenangkan”, ujarnya. Kalau mengikuti alur yang umum hanya orang yang banyak uang akan menang. Tentu semua itu di luar imajinasinya.

Dalam pandangannya, peran KPUD adalah panitia pelaksana. KPUD perlu dikoreksi karena pengelolaan dan *update* daftar pemilih yang dilakukan belumlah maksimal. Dalam pemilu langsung diperlukan mekanisme dan regulasi di tingkat lokal yang jelas agar tidak terjadi konflik di antara calon anggota legislatif baik di internal partai politik maupun dengan calon dari partai politik lainnya.

Aturan berkampanye menjelaskan bahwa tidak boleh menempelkan atribut-atribut di pohon. Kalau di rumah warga harus meminta izin, dan tidak boleh memanfaatkan angkot atau tiang listrik. Sanksi terhadap pelanggaran tindakan tersebut tidak diproses, hanya bersifat tertulis. Ada politik uang, tetapi tidak ditindak. Untuk kebijakan afirmasi 30 persen untuk perempuan harus diperjuangkan, kalau mungkin sampai 50 persen. Dalam penghitungan suara, KPUD harus profesional karena ada teknologi informasi, maka harusnya bisa *online*.

Sahat berpendapat bahwa peran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak selama Pemilu 2014 yang lalu tentu menjadi pertanyaan. Menurutnya, KPPA memiliki kebijakan, namun tidak ada karya mereka yang signifikan. Padahal

masalah ibu dan anak penting, namun tidak dianggap penting. Bila kita berbicara mengenai perdagangan manusia, kekerasan seksual, dan sebagainya, maka persoalan perempuan luar biasa pelik.

BAGIAN KETIGA
PROFIL CALON ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN
YANG TIDAK TERPILIH



ANITA ARIYANI

ANITA ARIYANI lahir di Semarang, Jawa Tengah, pada 3 Agustus 1965. Dia menyelesaikan pendidikan terakhirnya di IAIN Walisongo, Semarang. Kini, dia bekerja sebagai Tenaga Ahli di DPR RI. Dia mengaku bahwa dia suka berorganisasi. Sejak di Sekolah Dasar hingga sekarang, dia terus terlibat dengan organisasi. Ketika di kelas 4 Sekolah Dasar, dia menjadi ketua kelas hingga naik kelas. Saat menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama, dia aktif di organisasi dengan menjadi koordinator dan utusan kelas dalam hubungan lintas kelas, termasuk berkali-kali menjadi koordinator berbagai bidang.

Anita mengakui bahwa hal itu terjadi dengan sendirinya karena senang bergaul dan berorganisasi, termasuk mengkoordinasikan sesuatu. Ketika menjadi mahasiswa di IAIN Walisongo, Semarang, dia masuk di organisasi intra kampus. Dia menjadi anggota Senat Mahasiswa selama dua periode. Meskipun tidak menjadi ketua senat, namun dia sempat dicalonkan. Menolak untuk dicalonkan menjadi ketua senat, karena saat yang bersamaan, dia ikut di organisasi ekstra kampus. Dengan demikian di kepengurusan kampus, dia dipandang senior dan menjadi Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan.

Di organisasi ekstra kampus, Anita giat di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mulai dari pengurus Komisariat, Korkom, Cabang, Regional, hingga di tingkat Nasional. Dia bersyukur karena dengan rasa suka dapat mengikuti secara lengkap kaderisasi dan kepengurusan di HMI. Ketika suatu hari diajak berbicara tentang kaderisasi dan kepengurusan ditingkat komisariat, dia mengetahui persoalan tersebut, walau kini statusnya sudah sangat senior di kalangan aktivis HMI.

Riwayat berorganisasi yang selama ini Anita jalani:

- a. Senat Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo, 1985-1986
- b. Ketua Umum KOHATI HMI Cabang Semarang, 1988-1989
- c. Ketua Koordinator Regional (KOREG) KOHATI-BADKO HMI Jawa Bagian Tengah, (1989-1990)
- d. Sekretaris Umum KOHATI PB HMI, 1990-1992
- e. Sekretaris Umum Wisma Sakinah-ICMI Pusat, 1995
- f. Wakil Sekretaris Komite Aksi Pemenangan Pemilu (KAPPU) Partai Bulan Bintang (2003)
- g. Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan DPP Partai Gerindra, (2008-hingga sekarang)
- h. Wasekjen DPN HKTI (2010-2015)

Berbeda dengan aktivitasnya waktu menjadi mahasiswa, di tahun 97-an dia mengenal aktivitas partai politik, ketika itu dia diminta untuk turut membantu secara administrasi pendirian Partai Bulan Bintang (PBB) dan saat itulah walau dengan sedikit ragu dia mulai mengenal lebih dekat aktifitas di organisasi politik.

Semboyan Yakin Usaha Sampai (YAKUSA) yang tertanam dalam dirinya ketika masih menjadi aktivis HMI selalu menjadi dasar bagi ANITA untuk bekerja serius dan bertanggung jawab dalam menerima setiap amanah. Hal tersebut dia lakukan ketika menerima mandat untuk menjadi Wakil Sekretaris Komite Aksi Pemenangan Pemilu (KAPPU), mulai dari menyusun administrasi pencalonan Anggota Legislatif, jadwal kampanye, hingga keterpilihan. Sempat juga Anita diminta untuk menjadi Caleg untuk memenuhi keterwakilan perempuan untuk Dapil Banten.

Menjelang Mukhtamar I Partai Bulan Bintang, terjadi ketidak harmonisan diantara pengurus hingga berlanjut pada mundurnya sekelompok tokoh partai tersebut. Hal itu menjadi sumber pembelajaran berharga baginya untuk mengetahui sedikit banyak tentang perpartaian. Sekitar tahun 2004, oleh teman-temannya dia diminta kembali membantu persiapan pendirian Partai Islam Indonesia, namun partai tersebut tidak lolos verifikasi faktual di KPU (hanya lolos verifikasi administrasi).

Dalam perjalanan selanjutnya Anita lebih menekuni bisnis property yang telah dirintisnya pada tahun 2006. Namun oleh teman-temannya kembali dia dimasukkan menjadi anggota departemen DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Ketika asyik menekuni bisnis property yang mulai berkembang, Ibu dari 2 putri dan 2 putra ini, tiba-tiba diminta oleh temannya terlibat untuk mendirikan suatu partai.

Tepatnya awal 2008, Dia diminta untuk membantu mendirikan partai Gerindra dengan mandat membentuk partai Gerindra di Jawa Tengah dan beberapa wilayah lainnya juga merekrut beberapa aktivis perempuan untuk bergabung ke partai Gerindra.

Pada saat itu mendirikan partai baru bukanlah hal yang mudah, karena telah berdiri banyak partai dominan. Apalagi ketatnya waktu yang ditargetkan kurang lebih hanya 2 bulan (syarat lolos partai mengikuti Pemilu 2009). Dengan tekad YAKUSA dan banyak dibantu oleh teman-temannya, rasa lelah, khawatir, tertekan semua dapat dilalui dengan mudah, Alhamdulillah Partai Gerindra berdiri 6 Pebruari 2008 dan dinyatakan sebagai Partai Peserta Pemilu.

Sejak awal kepengurusan hingga sekarang di partai Gerindra, Anita menjabat sebagai Ketua Bidang Pemberdayaan dan

Perlindungan Perempuan.

Bila bicara tentang Perempuan, terlihat Anita sangat antusias walau kadang raut sedih juga muncul dalam setiap tutur katanya yang dengan usaha keras mencoba dia sembunyikan.

Menanggapi kebijakan afirmasi 30 persen keterwakilan perempuan Anita menuturkan bahwa di dalam Gerindra, afirmasi 30 persen keterwakilan perempuan tersebut telah dicantumkan dalam AD/ART bahkan Manifesto Partai Gerindra dan selanjutnya terimplementasikan dalam susunan pengurus ditingkat Pusat hingga Daerah juga terimplementasi dalam pencalonan Anggota Legislatif pada pemilu 2008 dan 2014.

Hasil perolehan kursi legislatif 2009 sebanyak 26 orang dan 5 diantaranya adalah perempuan demikian juga di tahun 2014 perolehan kursi Gerindra sebanyak 73 kursi dan 11 kursi adalah perempuan. Hal tersebut belum memenuhi 30 persen keterwakilan perempuan. Untuk itu sebagai Ketua Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan merasa berkewajiban untuk terus mendidik kader-kader perempuan yang mandiri dan memahami kebijakan Partai serta isu-isu yang sensitif gender.

Tahun 2009 merupakan awal partainya mengikuti pemilu tentunya dengan kesiapan yang belum maksimal bila dibandingkan dengan Partai yang telah mengikuti pemilu legislatif di tahun-tahun sebelumnya. Gerindra belum mempunyai infrastruktur yang mapan dan penjangkaran calon yang belum maksimal, tapi bagi Anita sebagai kader partai ketika diminta mencalonkan diri menjadi calon anggota DPR RI tentu harus siap.

Ditempatkan sebagai calon no 1 dari 5 caleg di daerah pemilihan Jawa Tengah 10 merupakan perjuangan yang

tidak ringan. Karena Dapil tersebut bukan tempat dia dibesarkan oleh keluarga dan kerabatnya. Namun dengan bekal semangat dan bantuan teman-teman organisasi semasa kuliahnya, Anita dapat leluasa menyapa masyarakat, ringan bekerja dan dapat dukungan dari berbagai pihak.

Usaha maksimal telah dilakukan baik support Partai dengan atribut dan bekal biaya Kampanye telah dilakukan, tinggal di dapil dengan meninggalkan putra-putri tercintanya pun telah dilakoninya. Alhasil pada pemilu legislatif tersebut, Anita gagal meraih kursi di dapilnya.

Rasa sedih, marah terhadap diri sendiri dan menyesal seketika itu bercampur dan nyaris menyurutkan semangat Anita untuk lebih lama berkiprah di partai politik. Semangat dari suami dan keluarga juga teman-temannya yang pelan-pelan berangsur menenangkan pikirannya dan nasehat dari orang tuanya yang selalu Anita ingat *“bahwa manusia hanya berusaha dan Allahlah yang menentukan, pasti semua ada hikmahnya. Dan pasti Allah punya rahasia yang lebih indah dikemudian hari”*. Pelan-pelan Anita dapat menyadari kekurangannya dan kembali beraktifitas sebagaimana mestinya.

Hari-hari selanjutnya Anita diminta menjadi Tenaga Ahli Anggota di DPR RI, dan dijalaninya secara professional sambil belajar hal-hal baru terkait dengan Legislasi, Anggaran dan Pengawasan yang menjadi tugas pokok anggota dewan. Selama 5 tahun selain menjadi Tenaga Ahli, Anita juga mengkoordinir Tenaga Ahli Anggota lintas Fraksi untuk belajar dan berkoordinasi bersama terkait dengan pengayaan informasi beberapa undang-undang yang sedang dibahas. Hingga kini, forum *Focus Group Discusion* (FGD) tersebut aktif berjalan.

Setiap aktifitas yang dilakukan, kita harus dapat memberi manfaat untuk lingkungan, itulah salah satu semangat dirinya

dalam bekerja. Maka dengan ringan dan penuh harapan setiap hari aktifitas rutin dia jalankan, mendampingi suami dalam bekerja, merawat putra-putri dalam asuhannya dan bekerja untuk memberi manfaat lingkungannya.

Pemilihan anggota legislatif 2014 kembali terjadi, berbekal pengalaman kegagalannya pada pemilu 2009 dan menjadi tenaga ahli di DPR, Anita mengetahui apa kekurangan dan strategi apa yang harus dijalankannya, misalnya dengan berkoordinasi dengan aktivis pergerakan perempuan, berkoordinasi dengan perempuan politik lintas partai, mengenal anggota KPU/Bawaslu agar suara dijaga di KPU atau tidak dicurangi, dan lain-lain.

Tetap diterjunkan di daerah pemilihan yang sama dengan tahun 2009 yaitu Jawa Tengah 10 yang meliputi: Pekalongan, Pemalang, Batang, dan Kota Pekalongan. Kalau Pemilu 2009, dia berada di nomor urut 1 dengan perolehan suara pribadi 12.000, di tahun 2014 Anita ditempatkan di nomor urut 2. Dengan dukungan partai yang minimal (tidak seperti di tahun 2009 dan penempatan nomor pada urutan ke 2) tidak mengendurkan semangatnya untuk bekerja maksimal sehingga menjadi Partai pemenang di dapilnya.

Kembali kegagalan menyimpannya, untuk kedua kalinya Anita tidak terpilih menjadi anggota legislatif dan suara yang diperolehnya tidak jauh dari perolehan suara tahun 2009 yakni 12.749.

Pengalaman dalam dua kali pemilu, membuatnya semakin banyak belajar dalam berbagai hal dari mulai pemilihan dapil, nomor urut, ketersediaan atribut, dukungan partai, pemilihan tim sukses, dan sebagainya.

Dalam proses pemenangannya pada pemilu yang lalu, hal pertama yang dilakukan Anita ialah:

1. Melakukan pemetaan daerah pemilihan baik secara geografi juga territorial, ada wilayah tertentu yang menjadi fokus dan itu digarapnya secara serius
2. Konsolidasi dengan aparat internal partai (struktur partai dan caleg Provinsi/Kabupaten/Kota)
3. Koordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat
4. Membuat Tim sukses dan saksi yang handal
5. Membuat rencana program aksi bersama
6. Memastikan ketersediaan atribut

Karena terbatasnya dana dan fasilitas partai, maka Anita terlibat langsung memimpin tim suksesnya. Dia tidak menyerahkannya kepada orang lain karena ingin benar-benar tahu perkembangan dan dapat mengevaluasi secara langsung kualitas kerjanya. Dia menyadari bahwa apabila turun langsung atas nama pribadi untuk mensosialisasi diri di masyarakat harus mengeluarkan dana yang besar, maka dia bersama timnya menawarkan kerjasama dengan beberapa lembaga untuk mensosialisasikan produk-produk dan program-program yang dapat mencerdaskan masyarakat.

Sebagai bekal siapapun apabila akan mencalonkan diri catatan pengalaman kampanye yang dia lakukan adalah berikut:

1. Metode klasik yakni tatap muka dengan konstituen, menghadiri pengajian dan kegiatan kemasyarakatan lainnya
2. Bakti Sosial (pengobatan gratis, penjualan sembako murah, dll.)
3. Penyebaran dan sosialisasi melalui pemasangan baliho, pembagian kartu nama, *leaflet*, kaos, dan bendera,
4. Metode modern yakni dengan memanfaatkan radio,

media sosial (*Face Book*), SMS, *pinepage*, dll.

Beberapa catatan evaluasi tentang kegagalannya adalah berikut:

1. Masa efektif pengenalan dirinya di konstituen sangat sempit hanya sekitar 3 bulan.
2. Kurangnya relawan sebagai tim sukses
3. Tidak memiliki saksi di lapangan.
4. hanya mengandalkan saksi dari partainya namun tidak dapat mengakses langsung dengan saksi sekalipun dia adalah Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
5. Tidak menentukan Dapil sendiri sesuai wilayah yang menjadi binaan
6. Dukungan dana yang kurang memadai.

Selain itu, Anita berharap agar dukungan untuk perempuan lebih konkrit :

1. Memberikan bantuan atau fasilitas bagi calon anggota legislatif perempuan yang diprioritaskan oleh partainya, misalnya berupa anggaran, sosialisasi di media, dan lainnya.
2. Afirmasi kebijakan 30 persen keterpilihan untuk perempuan diwajibkan dalam total kursi yang diperoleh masing-masing partai

Ketika menceritakan motivasinya menjadi calon legeslatif, Anita bertutur yaitu hendak membantu menyalurkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya sehingga mereka “sejahtera”.



EUIS FETY FATAYATI

EUIS FETY lahir di Cirebon, Jawa Barat, pada 7 Februari 1966. Dia menyelesaikan pendidikannya di IKIP Negeri Jakarta, jurusan kimia, kemudian melanjutkan pendidikan S2 jurusan Ilmu Lingkungan di Universitas Indonesia, Jakarta. Sekarang, dia menjadi tenaga ahli ketua MPR Indonesia.

Euis menempuh pendidikan SD-SMA di Cirebon. Neneknya seorang aktivis Aisyiah dan suka mengajaknya ke pengajian dan acara-acara Aisyiah lainnya. Boleh dikatakan, bahwa neneknya yang pertama kali memperkenalkan dirinya kepada organisasi. Sejak SMP hingga SMA, dia aktif di OSIS. Ketika menempuh kuliah di IKIP Negeri Jakarta, dia sempat menjabat Wakil Senat Mahasiswa FMIPA, tahun 1986. Kemudian dia masuk HMI Cabang Jakarta. Dia pun beberapa kali mengikuti pelatihan kader dakwah yang diadakah oleh Aisyiah.

Setelah menikah, Euis meninggalkan semua aktivitasnya tersebut dan memutuskan berfokus mengurus anak dan keluarganya. Setelah anaknya beranjak dewasa, dia kembali beraktivitas sebagai guru. Tahun 2004, pertama kali dia menjadi calon legislatif. Dia berkecimpung di partai politik sudah 17 tahun. Pengalaman politiknya dimulai sejak reformasi tahun 1998. Sebagai orang Muhammadiyah, tentu keluarganya mendukung Amin Rais. Ketika Amien Rais mendirikan partai, teman-teman Muhammadiyah datang ke rumah Euis di Jakarta Utara, mengajaknya mendirikan partai di daerah Jakarta Utara. Sejak itu, dia berkeliling menyebarkan formulir dari kampung ke kampung di Jakarta Utara, karena mau mendirikan DPD PAN.

Bila ditanyakan kapan masuk partai politik, maka dia bergabung sejak 1998 ketika pembentukan PAN di Jakarta Utara. Di tempat tersebut dibentuklah Komite Pembentukan Daerah PAN yang beranggotakan 20 orang dan dirinya menjadi satu-satunya perempuan. “Kalau bukan dilandasi

rasa senang berorganisasi, pasti malas mengikuti kegiatan itu. Tidak ada gajinya. Tidak ada yang memberikan uang”, ujarnya. Kemudian berdirilah DPD PAN Jakarta Utara. Dia menjadi pengurus bidang perempuan di daerah tersebut. Karir politik di PAN dimulai di daerah Jakarta Utara. Periode berikutnya, setelah Kongres PAN di Jogjakarta pada 2000, dia masuk di jajaran DPP dengan menjadi anggota Badan Perempuan. Semua itu dia lakukan sembari menjalankan profesinya sebagai guru.

Jabatan di DPP PAN yang pernah dia pegang:

- a. Ketua Departemen Perempuan DPP PAN Jakarta Utara (1998-2000).
- b. Anggota anggaran
- c. Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan DPP PAN (2000-2005).
- d. Wasekjen DPP PAN, bidang Advokasi dan Kesra (2005-2010).
- e. Ketua DPP PAN, BAPILU Banten (2010-2015).
- f. Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan DPP PAN (2015-2020).

Selain jabatan struktural tersebut, Euis dipercaya pula oleh PAN sebagai komite pelaksana HUT PAN ke-9 yang berjalan sukses. Dia juga menjadi Sekretaris Kongres PAN 2010 dan Sekretaris Kongres PAN 2015. Prestasi yang membanggakan dirinya ialah menjadi Ketua Panitia HUT PAN 2007 di Senayan. Acara tersebut berlangsung dengan sukses. Ada kegiatan gerak jalan dengan *doorprize* berumroh dan haji, sehingga banyak peserta yang mengikutinya.

Dia pernah menjadi staf khusus menteri Patrialis Akbar. Sekarang, dia menjadi tenaga ahli Zulkifli Hasan, ketua MPR RI. Posisi yang tidak mudah itu ia dapatkan karena dia dipercaya. Dia pun menjadi ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu),

yang menurutnya, biasanya dijabat oleh laki-laki. Pertama kali dalam sejarah PAN, bahwa perempuan menjadi Ketua Bapilu, karena saat itu Ketua Bapilu-nya dibagi per wilayah.

Tak ada pungutan uang ketika dia masuk ke PAN, demikian pula saat menjadi calon anggota legislatif. PAN hanya memperhatikan apakah memiliki Kartu Tanda Anggota, lama di partai, tingkat keaktifan, dan lainnya. PAN menerapkan kebijakan afirmasi 30 persen untuk calon anggota legislatif perempuan. Namun ini hanya langkah awal, selanjutnya partai perlu mendukung perempuan waktu bertarung di pemilu apalagi dalam menghadapi calon anggota legislatif laki-laki. Pembinaan kader di PAN berjalan baik meskipun di lapangan akhirnya berbeda dengan teorinya.

Pemilu 2004, Euis menjadi calon anggota legislatif di daerah pemilihan Jakarta Utara. Dia merasa cukup mengenal wilayah tersebut karena sehari-hari beraktivitas di sana. Pemilu 2009, dia menjadi calon anggota legislatif kembali di daerah Cirebon. Dia mengetahui daerah tersebut merupakan kampung kelahirannya. Dia memahami orang-orangnya walaupun bagi PAN sangat berat karena Pemilu 1999 dan 2004, PAN tak pernah mendapat kursi di daerah itu. Meskipun demikian, dia memberanikan diri menjadi calon anggota legislatif di daerah Cirebon.

Pemilu 2009, Euis berada di nomor urut 1. Kala itu dia masuk di tim 9 yang menyusun penilaian calon anggota legislatif (pen-skor-an) mulai dari pengumpulan KTA, lama di PAN, tingkat keaktifan, dan seterusnya. Hasil skoring dirinya cukup tinggi apalagi dia dipandang sebagai orang yang terlibat sejak awal. Dan, perempuan yang terlibat di dalam partai cukup jarang.

Pemilu 2009, Euis mendapatkan suara terbanyak, namun tidak mendapatkan kursi karena PAN 'kering' di

Cirebon, dalam dua kali pemilu sebelumnya. Menurutny, kekalahannya dalam Pemilu 2009, karena pertama, dia betul-betul kekurangan logistik. Dari segi pemetaan wilayah dan kemampuan bersosialisasi, dia cukup mampu melakukannya. Oleh karena Cirebon sangat luas, dia merasa kedodoran dengan persoalan logistik. Logistik bukan masalah politik uang, tetapi biaya politik. Dari kegagalan tersebut, disadari bahwa tak dapat mengandalkan sosialisasi dan pengalaman berorganisasi saja, namun harus realistis agar ongkos politik dipersiapkan sejak awal.

Untuk memenangkan Pemilu 2009, dia melakukan beberapa hal berikut:

- a. Dia mendaftar semua potensi yang dimilikinya, seperti teman, keluarga, dan lainnya yang ditemuinya di tiap desa serta dijadikan tim suksesnya. Hal ini meringankan beban beayanya. Tim sukses itu pada Pemilu ada di tiap kecamatan. Dia mengaku tak mudah membuat tim sukses dengan dana yang terbatas. Oleh karena itu, dia memokuskan basis massanya di 7 kecamatan di Cirebon. Secara biaya hal itu lebih memungkinkan, karena Cirebon adalah kampungnya. Peran tim sukses ialah menyosialisasikan dirinya karena tak semua orang yang mengenalnya.
- b. Mengaktifkan infrastruktur partai, karena Euis termasuk calon yang diunggulkan partainya. Saat itu, dana yang dikeluarkan di bawah Rp 500 juta. Dia tidak memiliki pekerjaan waktu itu, sehingga harus mengeluarkan dana pribadi dan mengandalkan dukungan partai seperti atribut kampanye.

Pesaingnya kala itu adalah Mahfud Sidiq (PKS), Enggarto (Golkar), dan Sudarto (PDIP). Dia merasa pertarungannya tidak seimbang. Pemilu 2009, dia merasa yakin akan

berhasil karena mengenal medan pertarungannya. Berbeda dengan calon anggota legislatif lainnya yang mayoritas laki-laki serta berasal dari luar Cirebon, termasuk Mahfud Sidiq (DKI). Namun dana politik yang dimilikinya sangat kecil, bahkan atribut seperti spanduk dapat dihitung dengan jari.

Dia mencalonkan diri kembali pada Pemilu 2014 di daerah pemilihan yang sama, yaitu Cirebon, tetapi dengan dana politik yang lebih besar. Ketika selesai Kongres PAN di Batam tahun 2010, Pak Hatta terpilih dan ditunjuk sebagai Ketua Bapilu DPP provinsi Banten. Sejak penunjukan Hatta, Euis mulai aktif di Banten selama lima tahun. Dengan kondisi tersebut, bagaimana mungkin Pemilu 2014 kembali mencalonkan diri di Cirebon? "Saya tidak enak dengan orang Cirebonnya. Kamu tidak pernah membina daerah kami, hendak mencalonkan di sini lagi?" ujarnya.

Di Banten, hampir 5 tahun ia berkiprah di sana serta berinteraksi dengan masyarakatnya. Dia menjadi akrab dengan masyarakat Banten. Pemilu 2014 lalu, dia mendapat nomor urut 1 dan suaranya terbanyak, tetapi tidak memperoleh kursi karena tiga pemilu sebelumnya, PAN tak pernah memperoleh kursi di daerah tersebut. Daerah pemilihannya kering, yaitu Banten 1 yang meliputi: Pandeglang dan Lebak.

Awalnya dia memilih Banten 3 di mana PAN agak 'gemuk' suaranya. Daerah Banten 3 terdiri atas Tangerang dan Tangerang Selatan. Masalahnya di sana calon anggota legislatif laki-laki yang diunggulkan oleh PAN. Disarankan oleh PAN agar jangan dua orang calon bertarung di tempat yang sama. Kemudian dia memilih untuk mengalah padahal teman-temannya mendukungnya untuk 'melawan' dan bertahan di daerah tersebut. Dia mundur dengan alasan daripada menghabiskan energi bertarung dengan teman

separtai, maka lebih baik bertarung dengan calon lain dari partai lain di dapil yang lain.

Pada gilirannya dia percaya diri untuk bertarung di Banten 1. Alasannya karena dia telah lima tahun aktif dan membina masyarakat di Banten 1. Secara logistik, dia sudah lebih siap karena telah memiliki pekerjaan yang cukup baik. Dana yang dihabiskannya lebih dari Rp 1 milyar. Dengan menghabiskan dana Rp 500 juta di Cirebon, dia mendapatkan 11 ribu suara. Di Banten 1, dengan dana sekitar Rp 1 milyar, dia mendapatkan 11 ribuan suara. Dari hasil survei berkali-kali, dia masuk kedalam urutan kelima, akan tetapi tidak terpilih. Dia merasa heran mengapa isu korupsi di daerah tersebut tidak berpengaruh terhadap masyarakatnya walaupun Atut telah dipenjara, namun anak Atut semuanya memperoleh kursi.

Motivasi Euis mencalonkan diri kembali pada Pemilu 2014 ialah hendak memperjuangkan aspirasi, senang berorganisasi, dan menyemangati perempuan-perempuan lainnya. Apabila dia menyerah, maka bagaimana dengan perempuan lainnya? Dia berharap bahwa kegagalannya tersebut dapat menjadi inspirasi bagi perempuan lainnya. Apa yang membuatnya bersemangat ikut Pemilu 2014 ialah ingin memperbaiki apa yang kurang ketika mencalonkan diri pada Pemilu 2004 dan 2009.

Euis tinggal di daerah pemilihan tersebut setelah 3 bulan terakhir. Sebelumnya, dia hanya melakukan kunjungan rutin seminggu sekali ke daerah terkait. Ini dia lakukan agar benar-benar dapat berkonsentrasi memantapkan kerja-kerja tim suksesnya. Dia membentuk tim sukses yang terstruktur yaitu mulai dari koordinator daerah yang membawahi koordinator cabang; koordinator cabang membawahi koordinator desa, dan koordinator desa membawahi koordinator TPS. Dana politiknya habis untuk mendukung tim suksesnya itu. Jumlah

anggota tim suksesnya sekitar 300 orang.

Dia tidak main-main dengan tim sukses yang dibentuknya karena harus melatih mereka. Dia menggaji koordinator tim suksesnya sebesar Rp5 juta per bulan yang bertanggung jawab untuk mengurus satu kabupaten. Setiap hari mereka bertugas mengawasi koordinator cabang. Dia mengoordinir langsung tim sukses tingkat kabupaten tersebut. Sehari-hari dia berkoordinasi dengan tim inti tersebut. Dia memiliki posko pemenangan di tiap kabupaten. Di Lebak, *billboard*-nya cukup besar dan berada di tengah kota.

Untuk memenangkan pertarungan Pemilu 2014, Euis telah melakukan hal yang maksimal. Dia membina Banten 1 sejak 2010 ketika ditunjuk menjadi Ketua Bapil PAN. Selama 5 tahun dia memperkenalkan dirinya ke pemilih di dapil tersebut. Dengan kehadirannya, suara PAN di Banten 1 meningkat mencapai 100 persen. Pemilu 2009, suara PAN sekitar 20 ribuan, jadi cukup kecil. Pemilu 2014, suara PAN naik menjadi 40 ribuan.

Modal sosial Euis di Banten 1 sudah sangat baik. Semua masyarakat cukup mengenalnya. Tokoh masyarakatnya pun demikian. Dia rajin mengunjungi masyarakat di Banten 1. Dia kerap mengikuti pengajian di kampung-kampung dan memberikan mukena (dantang). Dia melakukan ceramah dan pertemuan di rumah makan dengan tukang ojek.

Dia mencetak puluhan ribu “Asmaul Husna” dan dibagikan kepada orang-orang yang datang dari kampung dan gunung-gunung di Banten 1. Euis sendiri proaktif mengunjungi warga ke gunung-gunung hingga mobilnya rusak parah. Daerah Pandeglang berada di gunung, sedangkan Lebak berada di pesisir Selatan. Dia mendatangi daerah-daerah yang sulit terjangkau. Ada satu kecamatan di Pandeglang yang menjadi kampung Aisyiah (Muhamadiyah). Kampung ini

menjadi fokusnya sehingga dijaganya benar-benar. Terbukti, dia meraih suara besar dari kampung itu.

Bagi Euis, kegiatan blusukan adalah kewajiban, terlepas dari menang atau tidak. Dengan itu, dia dapat mengenal karakter masyarakat yang menjadi target dan profil wilayah tersebut. Secara budaya, dia tidak mengalami banyak persoalan. Masyarakat di Banten 1 mengetahui dia berasal dari Cirebon. Dia mengetahui bahasa yang mereka gunakan dan tak terkendala dengan hal itu.

Masyarakat Pandeglang adalah Muslim 100 persen, jadi betul-betul kota santri. Sebagai sesama Muslim, pendekatan dan sosialisasi yang dilakukannya cukup mudah. Setiap datang, dia membawa buku “Asmaul Husnah” serta membacanya bersama-sama warga. Menurutnya, dia menysisir tempat yang mungkin tidak akan didatangi calon anggota legislatif lainnya. Tim suksesnya menyarankan agar dia tidak perlu mengunjungi semua wilayah. Namun dia merasa perlu mendatangi wilayah-wilayah yang tersulit sekalipun untuk membina kedekatan. Menurutnya, sangat lain responnya bila calon anggota legislatif yang turun tangan langsung daripada tim sukses yang datang.

Dana yang telah ia keluarkan cukup besar sekitar Rp 1 milyar. Dia memasang *billboard*, siaran radio, membuat pamphlet dan baliho, kemudian menyebarkannya di Banten 1. Hal ini dilakukan karena ia orang baru di Banten 1, maka diperlukan atribut-atribut tertentu supaya lebih dikenal masyarakat. Semua dana yang dikeluarkannya lebih banyak dipergunakan untuk ongkos atribut-atribut tersebut.

Menurutnya, usaha yang dilakukannya itu sudah cukup maksimal. Setiap hasil survei selalu mengunggulkan dirinya yang menang dan mendapatkan kursi meskipun tidak berada di urutan atas. Setidaknya, ia mendapatkan kursi

dari dapil bersangkutan. Itu sebabnya, dia sangat yakin akan menang. Diakuinya bahwa saat-saat akhir menjelang pemilu, dia tidak memberikan apa-apa kepada masyarakat. Dia tidak mempergunakan politik uang sama sekali. Selama tiga kali pemilu, dia tidak melakukan politik uang karena sadar bahwa tindakan itu adalah haram. Dia menyadari bahwa di negeri ini bisa menang pemilu tanpa uang adalah hal yang langka.

Pemilu 2014, Euis membuat kelompok-kelompok pertemuan. Dia melakukan pidato, pengajian, ceramah, dan sosialisasi. Setiap pertemuan itu dihadiri maksimal oleh 50 orang agar lebih efektif dan terbangun kedekatan emosi yang lebih baik. Dia tidak mengumpulkan massa di lapangan-lapangan kecuali saat kampanye partai.

Dari PAN dia memperoleh saksi-saksi, tetapi ada saksi-saksi yang ia kirimkan sendiri ke TPS-TPS untuk memantau penghitungan dan perolehan suaranya. Mereka hanya memantau dari luar. Secara teori harusnya ada saksi-saksi dari Euis di tiap TPS, namun dia tidak mengevaluasi apakah mereka betul-betul ada di lapangan?

Menurut Euis, Pandeglang itu daerah pegunungan, sedangkan Lebak daerah pesisir Selatan. Dia mendatangai daerah-daerah tersulit yang jarang dijangkau orang. Pada pemilu yang lalu, beberapa wilayah dapilnya juga mengalami kendala listrik, entah hal itu disengaja atau tidak. Berdasarkan pengalaman pribadinya, pelaksanaan pemilu dan peran KPUD cukup kacau. Dia pun tidak merasakan peran atau kordinasi antara KPPA dengan para calon anggota legislatif perempuan. KPPA harus secara aktif mengadakan pertemuan dengan ketua-ketua partai politik untuk meminta dukungan dan usulan agar partai-partai menjalankan dan mempertahankan kebijakan afirmasi 30 persen untuk calon anggota legislatif secara konsisten.



SOEMIENTARSI MUNTORO

SOEMIENTARSI MUNTORO, dipanggil Mien, lahir di Mojokerto, Jawa Timur, pada 27 Agustus 1947. Dia menyelesaikan pendidikan magister strategi ketahanan nasional dari Universitas Indonesia. Dia merupakan mantan anggota DPR RI periode 2009-2014.

Orangtua Soemientarsi aktif di organisasi wanita Budi Utomo. Mien tidak menyadari aktivitas ibunya yang setiap hari datang dan pergi berorganisasi. Kehidupan ibunya tersebut telah membentuk kehidupan Mien. Dia diberikan kebebasan berkiprah di sekolah. Kelas 2 SD, dia sudah memimpin murid lainnya untuk bernyanyi pada 17 Agustus-an. Dia aktif dalam bidang olahraga dan mengikuti gerakan Pramuka. Saat di SMP dan SMA, dia selalu menjadi dirigen untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, Satu Nusa Satu Bangsa, dan Padamu Negeri. Tanpa disadari, nasionalisme di dalam dirinya tertanam hingga sekarang. Bila melihat bendera merah putih berkibar, dia merasa berada di dalamnya.

Mien suka berteman dan selalu dikerumuni temannya. Hingga kini, dia masih berhubungan dengan teman-temannya yang 30 tahun lalu sama-sama menjadi aktivis, seperti Yuda Irlang dan lainnya. Sebelum menjadi anggota DPR, dia bekerja di birokrasi pemda DKI Jakarta, di Direktorat Sosial Politik. Dia salah satu kepalanya. Biasanya di Direktorat Sosial Politik/Kesbang tidak pernah dipimpin oleh perempuan, bahkan tentara yang memimpinya. Dia pensiun tahun 2003, namun kegiatannya tetap banyak. Dia aktif di NDI, Golkar, dan KPPG (ketua bidang politik hingga menjadi Sekjen). Pada 2006, dia mengundurkan diri dari KPPG karena diajak Wiranto untuk mendirikan partai Hanura.

Berbicara tentang politik, dalam arti kesadaran berbangsa dan bernegara, maka Mien melakukannya sejak kecil. Politik sudah mengalir di dalam dirinya. Terjun langsung dalam

partai politik dan terlibat. Dia memulainya di ormas Partai Golkar (Gakari) tahun 1978 kemudian masuk Kosgoro, yang dipimpin oleh Agung Laksono. Tahun 2006, oleh Wiranto dia diajak mendirikan partai Hanura untuk memperkuat bidang perempuan. Waktu itu dia masih menjabat sekjen di KPPG. Kemudian mengundurkan diri dari jabatan tersebut. Menjadi calon anggota legislatif pada Pemilu 2004 di DKI Jakarta, namun tak terpilih. Waktu itu dipergunakan sistem nomor urut, dan Agung Laksono yang menang.

“Yang membuat saya heran, sudah tahu tidak akan menang, namun mengapa kita ingin?” ujarnya. Menurutnya, hal itu bagaikan hak dan kewajiban untuk aktif dalam organisasi. Hasil akhir aktivitas politik perempuan ialah menjadi anggota legislatif. Sebelum itu tercapai, perempuan politik tidak memiliki hasil akhir. Periode 2009-2014, dia menjadi anggota DPR RI dari Partai Hanura. Dia ditempatkan di Komisi I DPR RI (2009-2010), Komisi VIII DPR RI (2010-2014), Ketua Fraksi Hanura DPR RI (2009-2010) dan wakil ketua Fraksi Partai Hanura di MPR RI (2012-2014).

Ketika di Komisi I, Mien bekerja dengan baik sesuai dengan bidang studi dan pengalamannya, Mien oleh Partai dipindah ke Komisi VIII yang sepertinya komisi itu kurang diminati oleh anggota fraksi yang lainnya. Akhirnya, dirasakan dan dicermati kaderisasi di partai Hanura kurang berjalan dengan baik apalagi partai yang terbilang masih baru.

Menurut Mien, negeri ini harus dikuasi dan dipimpin oleh negawaran (memahami betul tentang wilayah, rakyat, dan pemerintahan), jadi tidak oleh orang yang ikut-ikutan dan bersenang-senang saja. Inilah alasannya mengapa dia mencalonkan diri menjadi anggota legislatif. Menjadi anggota legislatif tidak karena gajinya, namun pekerjaannya itu sendiri sangat menyenangkan. Melalui hal itu, dia dapat

mengolah rasa, pikiran, menjalin pertemanan dan belajar menjadi stabilisator di dalam komisi untuk menghasilkan keputusan politik yang dibutuhkan oleh rakyat yang menugasinya.

Dia selalu berorientasi kepada NKRI sebagai aktivitas politiknya. Setiap keputusan yang diambil, kebijakan dan penyelesaian masalah, selalu berorientasi menjaga keutuhan NKRI. Pengabdian kepada NKRI inilah yang memotivasinya aktif dalam politik, termasuk saat mencalonkan diri. Selain itu, dia menjalani hidupnya bagaikan air yang mengalir. Adalah tantangan pencapaian, yaitu kemauan untuk terus maju dan memberikan yang terbaik. Ada rasa terusik kalau melihat kehidupan masyarakat bawah pada umumnya, sehingga menimbulkan semangat juang untuk sesama.

Pemilu 2009-2014, Mien ditempatkan di daerah pemilihan Jawa Timur 8 yang meliputi Mojokerto, Jombang, Ngawi dan Madiun dan meraih kursi DPR setelahnya. Dapil ini sudah diincar oleh Sekjen Partai Hanura, namun dia tidak menentangnya. Pemilu 2014-2019, dia dipindahkan oleh partainya ke dapil Jawa Timur 7 yang meliputi Pacitan, Ngawi, Magetan, Trenggalek, dan Ponorogo. Setelah mengetahui kondisi alam dan geografis dapil 7 dan masyarakatnya yang miskin, akhirnya ia berkeputusan bahwa inilah daerah yang diberikan Tuhan baginya.

Perjuangan perempuan, menurut Mien, bersifat multidimensional. Pertama haruslah mampu berpikir luas dan paham tentang ketatanegaraan yang sesungguhnya. Perempuan harus memiliki kualitas agar mampu bersaing. Aturan kebijakan 30 persen perlu, tetapi perempuan tetap harus meningkatkan kualitasnya.

Pemilu 2009, apa yang Mien lakukan untuk memenangkan dirinya ialah membangun simpati agar rakyat mengingatnya.

Dia juga bekerjasama dengan calon yang ada di bawahnya, seperti calon untuk tingkat DPRD provinsi dan kabupaten. Setiap kampanye, dia langsung bertemu dengan masyarakat. Dia memberikan pesan kepada masyarakat agar memilih negarawan, yang akan berjuang untuk masa depan anak-anak dan generasi masa depan. Yang ia lakukan di dalam setiap pertemuannya ialah pendidikan politik. Dia mengajarkan arti Pancasila, moral dan keadilan serta kebenaran. Dia tidak menggunakan politik uang.

Mien melakukan pertemuan warga melalui forum, salawatan dan pengajian. Untuk sasaran orang tua, dia mengajak mereka dengan bercerita tentang pengalaman pergerakan perempuan untuk masa depan anak dan cucu yakni alih generasi penerus kepemimpinan. Dia pernah datang di sebuah kelurahan namun lurahnya mencegahnya, karena wilayah itu sudah 'dikuasai' oleh partai tertentu. Alat kampanye yang dipergunakan adalah poster, profil diri, pengajian, *teve*, radio *streaming* dan SMS.

Pemilu 2014, Mien dipindahkan ke dapil 7 dalam waktu yang singkat, maka waktu pengenalan dirinya hanya 7-8 bulan. Dia berusaha keras melakukan pendekatan terhadap warga, meskipun singkat, secara *nonstop*. Dia mengatur strategi untuk memenangkan pemilu. Dia melakukan pemetaan wilayah karena kantong massa tersebar di dapil yang sangat luas. Daerah yang dianggap kantong suara, dia perhatikan dan dijaga betul. Dia mempergunakan kesempatan berkunjung saat tugas sebagai wakil ketua Fraksi Hanura MPR-RI sekaligus membina konstituen. Dia aktif mensosialisasikan empat pilar sembari turun ke konstituen (untuk memperkenalkan dirinya).

Mendekati pemilu, hampir setiap minggu disela kegiatan di Komisi dan di MPR RI, Mien datang ke dapil meskipun secara

geografis cukup jauh. Surabaya ke Ponogoro berjarak 8 jam perjalanan. Dia terkadang menempuh perjalanan dari Solo ke Ponogoro sekitar lima jam. Pacitan, Trenggalek, Magetan, Ngawi, Ponorogo itu sangat luas dan suasana geografisnya betul-betul sulit dan antar wilayahnya sangat jauh. Meskipun demikian, dia tidak pernah merasa lelah, tidak menyerah dan tidak kecewa. Dia melakukannya dengan senang hati dan tidak bersungut-sungut. Hal itu dilakukannya untuk membangun kedekatan dengan konstituennya, karena menurutnya, sentuhan itu perlu dan keikhlasan ikut merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat disekitar itu yakni rasa sepenanggungan dan masih butuh perjuangan bersama-sama untuk mencapai tujuan.

Mien memiliki tim pemenang dan yang tinggal serumah dengannya ada delapan orang. Di luar rumahnya, ada banyak, namun tim intinya delapan orang itu. Dia mempunyai banyak relawan yang tanpa diminta ikut mensosialisasikan dirinya agar dikenal dan dipilih oleh masyarakat. Ada seorang lurah yang datang memintanya untuk sosialisasi ke kelurahannya. Seorang ibu di Ngawi ikut mensimulasikan pencoblosan kepada warga dengan menggunakan kelambu sebagai bilik sekaligus mendorong mereka untuk memilih Mien. Dia selalu menyampaikan soal kesejahteraan dan keamanan. Republik Indonesia yang sejahtera dan aman, yang dia jabarkan dalam program-program kerjanya.

Menurut Mien, kelemahan dirinya ialah tidak memiliki saksi di TPS-TPS. Partainya menjanjikan akan menyediakan saksi, namun tidak berjalan sebagaimana yang dijanjikan, tidak optimal, dan banyak bolong-bolongnya. Dia mengirimkan saksi ke TPS-TPS yang dianggapnya sebagai kantong suara. Dia bersama tim menemukan kesalahan penghitungan dalam formulir, misalnya dari 60 menjadi 160. Hal itu betul-betul tertera di dalam formulir. Persoalannya, dia tidak

dapat mengumpulkan semua formulir yang keliru itu karena saksinya tidak menyebar di seluruh TPS. Dia termasuk yang melaporkan kecurangan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Proses itu sangat melelahkannya sehingga ingin mengusutnya demi keadilan. Dia ingin mengetahui dimana keadilan itu berjalan. Ternyata dari 900 perkara yang dilaporkan, semuanya kalah di MK. Akhirnya, dia menata hati dan menerima kealahannya sebagai jalan terbaik seraya meyakini ada tugas lain yang dipersiapkan untuknya. Saat ini, dia aktif dalam sebuah yayasan “Daya Insani Antar Nusa” yang didirikannya pada tahun 1997 untuk pemberdayaan masyarakat.

Menurut perhitungan Mien, sebenarnya dia menang pada pemilu tersebut. Namun dia tidak dapat membendung politik uang yang terjadi beberapa hari sebelumnya, termasuk kecurangan yang ada. Dia meyakini akan menang karena terlibat langsung dalam menghitung suaranya sendiri. Tetapi dia heran, karena lama-kelamaan suaranya menurun dan berkurang. Setelah itu dia penasaran, maka ia cek formulir kertas suara dan menemukan banyak kecurangan. Dananya habis untuk membayar saksi penghitungan di kelurahan. Dia tidak memiliki dana kalau harus membayar saksi di ribuan TPS-TPS yang tersebar di wilayah tersebut.

Politik uang tidak mampu dia bendung. Hal itu sudah tersistem tidak karena rakyat yang bertindak demikian, namun para elit politik juga. Bagaimana membuktikannya? Sulit untuk dilakukan, tetapi itu telah menjadi rahasia umum. Dia berpindah dapil dalam waktu yang sangat singkat, sehingga apa yang sudah diperjuangkannya selama lima tahun hilang begitu saja. Perpindahan dapil adalah strategi yang sangat salah. Masukannya bagi perempuan yang akan terjun ke politik:

- a. Perempuan harus cerdas emosi.
- b. Perempuan harus amanah.
- c. Perempuan harus bersatu. Bagaimana mau memperjuangkan keadilan gender jika di antara perempuan saling beradu?
- d. Perempuan harus banyak belajar dan membaca.



TETTY KADI BAWONO

TETTY KADI dikenal sebagai artis era 65-an, lahir di Jakarta 3 April 1952. Ayahnya seorang militer almarhum Kolonel Infantri Kadarusman Kadi yang kelahiran Indramayu, dan ibunya almarhum Siti Sulastri, kelahiran Solo, Jawa Tengah. Tetty Kadi merupakan anak ke-2 dari delapan bersaudara.

Tetty Kadi memiliki pengalaman kerja di legislatif sejak tahun 1997-1999 menjadi anggota DPRD provinsi Jawa Barat (Komisi E, Bidang Sosial, Tenaga Kerja, Perempuan, Seni, Budaya dan Agama). Tahun 1999-2004, dia duduk kembali menjadi anggota DPRD di provinsi yang sama (Komisi B, Bidang Industri, Perdagangan, Pertanian, Kelautan, Pariwisata, Kehutanan, Perkebunan, Ekonomi, Koperasi, dan UKM). Tahun 2004-2009, dia menjadi anggota DPR RI (Komisi 8, Bidang Agama, Sosial, Perempuan, Kebencanaan) selama 2 tahun. Setelah itu, dia ditempatkan di Komisi 4, Bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan). Selama masa jabatannya menjadi anggota DPR RI, ia juga masuk di Badan Legislasi (Baleg) dan Ketua Poksi Golkardi BKSAP dan Sekretaris umum KPPRI (Kaukus Perempuan Parlemen RI).

Ayah Tetty dikenal sebagai figur yang disiplin, cerdas, namun sederhana dan jujur dalam jenjang kariernya, baik dalam kedinasan militer, maupun sebagai pejabat (Sekda) di Lingkungan Pemerintahan provinsi Jawa Barat dan di Kementerian Dalam Negeri (sebagai Direktur Sosial Politik dan Dirjen Bangdes).

Ayahnya pula yang selalu mengingatkan padanya untuk menjadi artis tidak terlalu komersial, terlebih bila mengisi acara untuk mahasiswa, Pemda, Golkar, dan juga acara-acara yang bersifat sosial.

Sebagai artis penyanyi, Tetty Kadi telah menghasilkan puluhan album, yang berarti telah ratusan lagu yang telah diproduksi dan diedarkan untuk dipersembahkan kepada

penikmat musik di Indonesia. Lagu-lagu hitsnya yang sangat dikenal (bahkan sampai saat ini) seperti *Teringat Selalu*, *Pergi ke Bulan*, *Bunga Mawar*, *Mimpi Sedih*, *Sepanjang Jalan Kenangan*, *Mawar Berduri* masih sering diperdengarkan, bahkan dinyanyikan ulang oleh artis-artis muda masa kini seperti Cherry Belle (*Pergi ke Bulan*), Glenn Fredly (*Sepanjang Jalan Kenangan*) dan Rio Febrian (*Mawar Berduri*).

Pada jamannya, bersama artis seangkatan ataupun yang lebih senior seperti Titiek Puspa, Lilies Suryani, Ernie Johan, Benyamin S, Ida Royani, Bing Slamet dan pelawak lainnya, hampir setiap minggu Tetty Kadi melakukan perjalanan keliling Indonesia, untuk tampil dalam acara *indoor* maupun *outdoor*.

Adalah sudah menjadi kebiasaan bagi Tetty Kadi untuk selalu mempersiapkan diri sebelum tampil di setiap daerah. Persiapan dilakukannya dengan melakukan *assessment*, memahami situasi dan kondisi daerah, karakter penonton, termasuk bila memenuhi undangan-undangan dari Pemda atau Kementerian, Tetty Kadi selalu mempersiapkan referensi atau bahan dialog dalam setiap penampilannya.

Tahun 1971, Tetty bersama teman-teman artisnya mulai mengisi panggung-panggung kampanye Golkar.

Tahun 1974 Tetty Kadi menikah dengan Bawono Yudo. Kegiatan keartisan pun mulai dikurangi, tapi hal itu tak dapat bertahan lama, karena memang dunia seni senantiasa menjadi impian dan inspirasi Tetty kadi dalam setiap langkahnya.

Tahun 1983 Tetty Kadi membentuk Padepokan Citra Lokananta bersama sesama orang tua murid teman putra-putrinya. Tetty Kadi berhasil mengajak 200 orang yang merupakan kawan-kawan putra-putrinya yang kebanyakan adalah murid Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar.

Padepokan ini menampilkan beberapa figur yang cukup dikenal karena keahliannya, sebut saja Purwa Tjaraka sebagai guru musik, Vicky Burki sebagai guru tari, Boy Worang sebagai guru teater dan Tetty kadi sebagai guru menyanyi, ditambah dengan penampilan artis-artis terkenal seperti Nicky Astria, Ateng (Pelawak). Padepokan yang didirikan oleh Tetty Kadi kemudian menjadi begitu terkenal sehingga pada tahun Th 1986, Almarhum Edi Sud meminta Tetty Kadi menjadi koordinator Artis Safari Jawa Barat. Padepokan yang dulunya beranggotakan anak-anak kemudian bermetamorfosa menjadi padepokan yang beranggotakan artis-artis muda seperti Alm Nike Ardila, Inka Kristie, Poppy Mercuri, Connie Dio, dkk; hampir sekitar 200-an penyanyi dan 20-an group Band baik Pop, rock, maupun dangdut. Secara rutin selain membuat paket-paket acara hiburan di TVRI, Show rutin baik indoor juga outdoor terutama panggung-panggung kampanye Golkar lengkap menjadi tanggung jawabnya termasuk mengurus panggung, sound system dan lain-lain. Sehingga Tetty Kadi tidak lagi sebagai artis yang tampil 1 atau 2 lagu saja akan tetapi berubah statusnya menjadi kuli panggung atau event organiser. Ia harus mencari sponsor pendanaan dan lain-lain, demi memajukan calon-calon artis Jawa Barat agar lebih dikenal hingga mampu memasuki dapur rekaman.

Tahun 1986 Tetty mulai berkiprah di Golkar Jabar, dan bergabung dengan organisasi perempuan Golkar yaitu Himpunan Wanita Karya dan pada tahun 1987 Tetty Dilantik menjadi anggota Pokja Bidang Seni & Budaya DPD Golkar Jabar. Sang Ayahlah yang memberi gambaran bahwa melalui Golkar, kegiatan kesenian sangat bisa untuk dikembangkan (Ayahanda Tetty Kadi pada saat itu menjadi Sekretaris Badan Pemilihan Umum DPP Partai Golkar)

Bersama Ketua Biro Seni Budaya DPD Golkar Jawa Barat. Tetty membuat 3 paket berdurasi 55 menit, yang rutin ditampilkan tiap bulan selama 3 tahun berturut-turut di TVRI Stasiun Bandung. Ketiga paket tersebut adalah:

1. **Talaraga:** fokus kepada tampilan artis-artis baru binaan Safari Jabar juga yang sudah ternama di tingkat nasional serta memiliki album rekaman
2. **Derap Nada,** lebih spesifik merupakan Derap Pembangunan Jawa Barat. Menampilkan tokoh-tokoh Jawa Barat, sesuai masing 2 sektornya. Setiap Kabupaten se-Jawa Barat (termasuk Banten) saat itu, mendapatkan kesempatan yang sama untuk *expose* keberhasilan ataupun sampaikan aspirasi-aspirasi masyarakatnya. Bak layaknya sorang Anggota Dewan yang sedang reses. Tetty pun mempersiapkan diri dari mulai surat menyurat kepada daerah yang akan dikunjungi, dengan melampirkan sinopsis kegiatan. Rapat dengan Bupati dan aparat Pemda setempat juga dg segenap pengisi acara. Survey lokasi per topik pun ditelusuri bersama team produksi TVRI. Inilah awal karier politiknya dengan memahami persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat yang dituangkan langsung melalui media TV sekaligus merupakan langkah awal memahami bagaimana menarik konstituen melalui pagelaran-pagelaran gratis pada panggung-panggung terbuka, menampilkan artis-artis Jabar dan artis lokal kab/kotanya dengan arahan masing-masing pimpinan dan jajaran Partai Golkar di setiap Kabupaten/Kota.
3. **Wanda Binangkit.** Merupakan tayangan khusus menampilkan kesenian-kesenian tradisi Jawa Barat, khas Kab/kota yang bersangkutan. Dengan bimbingan Alm Kang Nano S. dan beberapa dosen dari ASTI (sekarang STSI) dan Guru SMKI Bandung. Sekitar 5 s/d 7

jenis kesenian tradisi ditampilkan di layar kaca dengan sebelumnya mengadakan kursus kilat, bagaimana seharusnya tampil di layar kaca , ataupun tampil secara kolosal dalam pagelaran-pagelarannya.

Penggalangan calon pemilih Golkar mewarnai setiap langkah Tetty dalam mempersiapkan pagelaran-pagelaran maupun diskusi-diskusi di tiap daerah di Jawa Barat dengan target politiknya. Tetty tidak pernah absen dalam kegiatan kaderisasi Golkar baik di tingkat provinsi maupun tingkat pusat. Dengan *team work* para seniman atau artis yang tergabung dalam Safari Jawa barat, Tetty dipercaya oleh DPD Partai Golkar Jawa Barat dan DPP Partai Golkar sebagai pelaksana panggung-panggung kampanye dalam Pemilu 1987/1992/1997/1999.

Untuk seluruh Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, dengan menggabungkan artis-artis binaan dan artis-artis tingkat Pusat yang sudah bekerja sama saat tampil dalam acara Talaraga, Derap nada maupun Wanda Binangkit sebelumnya. Tetty membuat kemasan-kemasan paket, disesuaikan dg karakter daerah nya yang ternyata didominasi musik dangdut dan rock .

Pengalaman di lapangan membuat Tetty mau tidak mau harus siap untuk mengemas panggung terbuka per hari berkisar antara 6 sampai 18 Kabupaten/Kota, tergantung jadwal kampanye masing-masing daerah. Kerja yang sangat melelahkan dan menguras energi ini dijalani dengan sepenuh hati, bahkan ketika dalam keadaan mengandung.

Tahun 1997-1999 merupakan kesempatan pertama menjadi anggota DPRD Jawa Barat. Duduk di komisi E, Bidang Kesra. Saat itu, Tetty menjadi salah satu anggota dari 58 anggota Fraksi Golkar (dari 100 Anggota DPRD, yang terdiri atas Fraksi Golkar/PDI/ PPP/TNI). Pengalaman

berharga yang sangat menonjol adalah menghadapi masa reformasi, di mana pengalaman menghadapi demonstrasi-demonstrasi buruh yang berteriak teriak dan naik serta menggebrak meja. Pulang ke rumah pun bisa sampai jam 3 dini hari. Suasana yang sangat berbeda antara status artis maupun mengelola panggung artis dengan menjadi wakil rakyat. Atribut keartisan mesti diturunkan dan memperkuat mental sudah menjadi sebuah keharusan dalam melangkah memasuki dunia politik yang sesungguhnya.

Tahun 1999-2004, masa-masa pasca Reformasi 1998, perbedaan yang sangat mencolok adalah penyesuaian terhadap bergabungnya partai/fraksi baru. Pada saat itu partai peserta pemilu berjumlah sangat banyak (48 partai). Bisa dibayangkan beratnya usaha yang harus ditempuh pada saat itu.

Jumlah perempuan dari Fraksi Golkar mulai berkurang karena sudah tidak ada lagi anggota dari jalur birokrasi dan ABRI, walaupun pemilihan masih berdasarkan nomor urut. Tetty duduk di Komisi B, membidangi Ekonomi dengan 8 sektor yang menjadi mitra kerjanya. Pengalaman mengenali topik-topik dan program kerja dinas-dinas se-Jawa Barat dalam Derap dan Nada, merupakan referensi yang cukup kuat, dan dia selalu menjadi utusan Komisi B mengikuti Musrenbang Tingkat Provinsi selama 3 hari berturut-turut, yang kadang teman-teman dari lintas komisi belum tentu bisa bertahan hadir penuh. Tetapi, hikmah yang dialami adalah memahami masalah-masalah lintas sektoralnya khususnya pada bidang anggaran (APBD).

Tahun 2004-2009, Tetty menjadi Wakil Ketua Komisi B. Tetty tinggal seorang diri, satu-satunya perempuan dari 28 anggota fraksi Golkar. Ada pengalaman yang sangat luar biasa *mem-back up* aktifitas nya di DPRD Jawa Barat yaitu menjadi

Ketua Forum DPRD untuk lingkungan hidup. Tetty tidak memiliki latar belakang studi khusus tentang lingkungan hidup, tetapi Forum yang diinisiasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup “memaksa” Tetty untuk belajar, berguru kepada pakar lingkungan hidup. Tetty mendapat bimbingan dari Tjuk Kuswartoyo, pakar lingkungan hidup di ITB, dilengkapi dengan dukungan data tentang lingkungan hidup dari BPLHD Jawa Barat dan lain-lain.

Media sekali lagi menjadi target baik untuk memperkenalkan aktifitas DPRD mengenai lingkungan hidup maupun memperkenalkan para anggota DPRD secara pribadi, melalui media Radio selama 2 jam tiap minggunya. Topik-topik diskusi melibatkan pakar dan LSM (WALHI, Indonesian Parliament Watch, dll.) dipersiapkan sesuai dengan rancangan Perda-Perda khusus lingkungan hidup. Sekitar 8 Perda Lingkungan Hidup diselesaikan pada periode tersebut dan kebetulan Tetty menjadi ketua Pansusnya.

Ada satu lagi bidang non-alat kelengkapan DPRD yang dipegang pada periode tahun 2006-2011, yaitu menjadi Ketua KUKMI Jawa barat (Kerukunan Usahawan Kecil Menengah) Jabar. Dalam setiap tahunnya, Tetty mengadakan pameran dengan variasi *craft/fashion/pangan*. Sekitar 130-an peserta dengan gratis menjadi pesertanya. Tampilan musik kawula muda juga seminar dengan topik-topik menarik menjadi sajian rutinnnya .

Berbekal 12 tahun pengalaman di DPRD Jawa Barat, dan berbagai kegiatan organisasinya selama di daerah itu, memberi sebuah kekuatan tersendiri. Tetty menjadi figur yang sangat mandiri dan percaya diri, dan berbeda dengan sifat manjanya saat menjadi artis dulu.

Satu hal yang dirasakannya adalah perbedaan antara pembuatan Perda dengan proses perancangan Undang-

Undang untuk tingkat pusat di DPR RI. Penyusunan UU baru apalagi yang merupakan inisiatif DPR secara otomatis mengharuskan setiap anggotanya untuk tidak saja mempersiapkan dan menyediakan waktu untuk mempelajari materi-materinya tetapi lebih dari itu, setiap anggota mendasarkan diri pada pemahaman bahwa cakupan wilayahnya adalah se-Indonesia.

Cita-cita Tetty terlaksana untuk duduk di Badan Legislasi, karena berdasarkan pengalaman membuat Perda di Jawa Barat, banyak hal yang kadang tidak tepat atau berbeda penerapan aturannya. Contoh di Jawa Barat, Perhutani yang menguasai kawasan hutan, sementara Pemda terbatas mengelola hutan rakyat. Dan sekali lagi dengan pengalaman mempersiapkan berbagai rancangan UU, maupun harmonisasi UU dari lintas Komisi di BALEG, memberinya pengalaman yang luar biasa.

Sebagai sosok perempuan, Tetty Kadi ditunjuk Fraksinya sebagai Sekum KPPRI (Sekretaris umum Kaukus Perempuan Parlemen RI) beranggotakan 101 Anggota DPR RI dan 35 Anggota DPD RI. Organisasi ini secara rutin mengadakan kegiatan khusus perempuan Parlemen, dengan mengundang aktivis perempuan dan juga Bidang Perempuan Lintas Partai untuk membahas isu-isu strategis khususnya yang berhubungan dengan perempuan dan anak.

Pengalaman lainnya selama di DPR RI yaitu menjadi bendahara IFPPD, sebuah organisasi non-Alat kelengkapan Dewan, yang rutin mendapatkan undangan seminar/konferensi dengan beberapa anggota Parlemen se-ASEAN dengan fokus isu-isu tentang kesehatan dan kependudukan. Dengan frekuensi undangan ke luar negeri yang cukup tinggi, teman-teman perempuan yang memiliki kepedulian terhadap kesehatan reproduksi dan lain-lain pada umumnya

siap berangkat, walaupun hanya dengan uang saku hanya US\$ 25/hari. Hal ini didasarkan akan adanya kesadaran bahwa ilmu yang akan diperoleh adalah sangat berharga untuk penguatan kapasitas mereka khususnya dan perempuan pada umumnya.

Sejak tahun 1986 sampai tahun 2009, Tetty Kadi menjadi pengurus dengan penjenjangan sebagai berikut:

- Anggota Pokja Biro Seni Budaya (5 tahun)
- Ketua Biro Seni Budaya (10 tahun)
- Wakil Ketua Sekretaris (1 tahun)
- Wakil Ketua Bidang Pendidikan, Cendekiawan, dan Litbang (4 tahun)

Kemudian pada 2010-2015, Tetty menjadi Wakil Ketua Umum KPPG (Kesatuan Perempuan Partai Golkar) yang merupakan sayap Partai Golkar khusus Perempuan membidangi Organisasi Dan Politik. Tetty dipercaya oleh Pimpinan untuk merencanakan 211 Perempuan yang terpilih dari sekitar 500-an calon. Menempati dapil 2 pada Pemilu 2014 yang lalu berdasarkan *data base* perempuan yang dimilikinya. Dan saat ini pun sebagai Wakil Ketua Umum KPPG yang belum dilantik, Tetty sudah mempersiapkan 300 perempuan di Partai Golkar/KPPG bersama rekan-rekan sesama perempuan di KPPG merencanakan kegiatan-kegiatannya sebagai persiapan Pemilu 2019 yang akan datang.

Tetty Kadi memberikan catatan mengenai dapil Jawa Barat 8 sebagai berikut:

Daerah pemilihan Jawa Barat 8, dengan jumlah pemilih sekitar 3.500.000 tersebar di 76 Kecamatan dan 824 desa. Dengan bilangan pembagi pemilih sekitar 400.000 per calon anggota DPR RI. Merupakan wilayah dengan 61 persen terdiri dari desa, termasuk desa pesisir pantai. Tetty merasa

tidak akan cukup waktu untuk melakukan kunjungan kepada masyarakat di tiap desa. Tetty sempat memilih komunitas perempuan yang tergabung dalam beberapa organisasi perempuan maupun Majelis Ta'lim, tetapi ternyata perempuan belum tentu memilih perempuan karena sangat tergantung kepada Ketua Organisasinya. Dan pada Pemilu 2009, sesuai dengan Bidang Komisinya yaitu Komisi 4, Tetty berkonsentrasi penuh di komunitas tani nelayan. Banyak sekali akses bantuan sosial dari dana APBN yang bisa di gelontorkan kepada kelompok tani nelayan. Hal serupa juga dilakukan saat 10 tahun duduk di Komisi B DPRD Jawa Barat dengan selalu berpegang pada Peraturan Pemerintah lengkap Juklak Juknis agar tidak menyalahi aturan perundang-undangan. Seminar-seminar ataupun diskusi/dialog bersama masyarakat tani dan nelayan termasuk model pengolahannya, hal tersebut selalu dilaksanakan setiap kali melakukan reses ke daerah.

Tetty Kadi merefleksikan ketidakberhasilannya pada Pemilu 2014 lalu sebagai berikut:

Melihat aktifitas Tetty, baik sebagai anggota Dewan, sebagai anggota masyarakat pada umumnya dengan segudang pengalamannya dan juga sebagai Pengurus Partai, kemungkinan hanya diketahui oleh kelompok-kelompok dan individu-individu yang terlibat dalam kegiatan-kegiatannya dan menjadi penilaian tersendiri baik oleh Fraksi, Pimpinan komisi maupun Partainya. Tetty tidak meng-“expose” dirinya baik melalui media cetak maupun media elektronik, hal ini didasarkan pada pemikirannya yang selalu menganggap hal tersebut sebagai kerja rutin yang merupakan refleksi dari pengabdianya saja.

Di tingkat konstituen di dapil, kehadiran atau tatap muka para anggota dewan merupakan barometer aktifitas maupun

ukuran kedekatan secara langsung kepada masyarakat pemilihnya. Mereka tidak pernah paham bahkan mungkin tidak terinfokan bagaimana kerja sesungguhnya dari wakil rakyat. Yang menjadi patokan lebih kepada harapan mendapat buah tangan. Tetapi bagaimana dengan komitmen pasca pertemuan? Apakah cukup sekali kehadiran membuat masyarakat akan memilihnya 3 atau 4 tahun kemudian saat mengikuti pencoblosan ?

Banyak hal dalam perjalanannya, menurut Tetty Kadi dapat terjadi, antara lain:

1. Beragamnya janji para caleg dari 10 parpol untuk DPR RI/DPRD provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota.
2. Biaya untuk memperkenalkan diri akan sangat tinggi karena masyarakat harus memilih di antara 12 kali 9 caleg untuk DPR RI; 12 kali 10 caleg untuk DPRD provinsi; 18 dapil x 12 x 8 caleg untuk DPRD Kabupaten/Kota. Cabut-mencabut baliho sesama team sukses caleg tidak terhindari.
3. Kepala Daerah yang memang merupakan jabatan politik sudah dapat dipastikan mendukung partai pengusungnya, hal tersebut tentunya akan memberi dukungan kepada calon partai pendukungnya.
4. Hegemoni kekuasaan di daerah pemilihan yang mau tidak mau menjadi sebuah kondisi obyektif yang harus diterima oleh calon anggota legislatif. Kondisi ini menjadi sebuah “tekanan” yang cukup berat bagi Tetty Kadi.
5. Biaya untuk menghonor tim sukses juga sangat besar, dalam wilayah yang sangat luas, belum lagi hitungan kerja bulanannya.
6. Terjadinya politik uang pada serangan fajar. Menjadi kebiasaan masyarakat terutama di tingkat desa, dan

menjadi harapan masyarakat terutama masyarakat karena mampu dan apalagi di dapil Indramayu-Cirebon didahului dengan Pemilihan Kuwu/Kepala Desa dengan “mahar” Rp 300.000/orang untuk mencoblos di TPS. Bisa dihitung berapa milyar yang dibutuhkan untuk memberi uang saku per orang/TPS?

7. Berbeda dengan tahun 2009, saat infrastruktur pileg masih dalam posisi “terkejut” dan masih patuh pada aturan-aturan baru hasil keputusan MK, Tetty menduga di tahun 2014 yang lalu para caleg yang memiliki dana besar apalagi yang memiliki hubungan kekerabatan dengan kepala daerah, bermain sangat tidak fair, termasuk memberikan “mahar” yang cukup besar.

BAGIAN KEEMPAT

STRATEGI PEMENANGAN PEMILU

Motif-motif pribadi perempuan terjun ke dunia politik untuk menjadi anggota legislatif tentu sangat beragam dan kadang sulit dijelaskan. Ada yang hendak mengabdikan hidupnya untuk masyarakat, ingin mengangkat taraf hidup orang lain, memperjuangkan kepentingan masyarakat yang belum sejahtera atau masyarakat kecil, memperjuangkan kepentingan konstituen di daerah pemilihan, dorongan pihak lain, tantangan bagi pengembangan diri pribadi, dan seterusnya.

Dalam iklim demokrasi Indonesia yang telah berubah sejak Pemilu 1999, yaitu dari pemilu tidak langsung ke pemilu langsung, maka calon anggota legislatif perempuan pun menghadapi tantangan yang berat dalam meraih kemenangannya. Perubahan-perubahan yang berlangsung dalam sistem pemilu Indonesia membawa konsekuensi logis tersendiri bagi mereka dalam meraih suara terbanyak. Tidak sedikit dari mereka yang mengalami kegagalan dalam pemilu akibat perubahan-perubahan yang tidak terantisipasi secara optimal, di samping faktor modal politik, sosial, budaya dan ekonomi.

Dengan kondisi pemilu yang demikian, mereka harus beradaptasi secara tepat agar dapat bertahan memenangkan pertarungan. Proses tersebut tidak mudah untuk mereka ikuti apalagi menyesuaikan diri dengannya secara mendadak. Fase persiapan calon anggota legislatif perempuan dalam mengikuti pemilu bertambah panjang dan rumit. Pembekalan yang mereka terima mulai di internal partai masing-masing melalui pelatihan-pelatihan dan pendidikan-pendidikan politik serta kaderisasi yang intensif, sehingga prosesnya

bertambah panjang. Tahapan demi tahapan harus mereka pahami dengan sungguh-sungguh, apalagi bagi mereka yang pemula. Hal itu tentu menjadi beban psikologis tersendiri bagi mereka yang baru memulai karirnya di politik. Semakin paham mereka mengenai sistem pemilu yang berlaku, maka terbantulah mereka untuk mempersiapkan diri secara optimal.

Strategi apa yang mereka lancarkan berhadapan dengan Pemilu 2014 yang lalu?

Sebaiknya kita mulai terlebih dahulu dengan pengertian ‘strategi’ itu sendiri, sebelum membahas lebih jauh aspek-aspek teknisnya. Strategi berasal dari kata ‘strategia’ (Yunani, στρατηγία yang berarti: “seni pemimpin perang, kantor jenderal, komando, hal-hal yang terkait dengan kemiliteran). Strategi adalah rencana tingkat tinggi untuk mencapai sesuatu atau beberapa tujuan umum dalam kondisi ketidakpastian. Dalam arti “seni seorang jenderal”, maka strategi mencakup beberapa keterampilan utama, seperti taktik, pengintaian, logistik, dan sebagainya. Istilah ini dipergunakan pada abad 6 di dalam tradisi Romawi Timur, yang kemudian diterjemahkan ke bahasa Barat pada abad 18-an. Sejak itu hingga abad 20, kata strategi menunjuk kepada pengertian “suatu cara yang komprehensif untuk mencapai hasil-hasil tujuan politik termasuk penggunaan kekuatan atau ancaman di dalam dialektika kehendak”¹.

Strategi menjadi penting karena sumberdaya yang tersedia untuk mencapai suatu tujuan sangatlah terbatas. Strategi meliputi penentuan tujuan atau sasaran, tindakan untuk mencapai tujuan, dan mobilisasi sumberdaya untuk menjalankan tindakan-tindakan. Suatu strategi

1 http://en.wikipedia.org/wiki/Political_strategy diakses pada 2 November 2015 jam 14.00 wib.

menggambarkan bagaimana tujuan-tujuan dicapai melalui sumberdaya atau sarana yang ada. Strategi dapat tampil sebagai pola kegiatan-kegiatan yang diadaptasi oleh suatu organisasi atau orang untuk berhadapan dengan lingkungannya atau pesaingnya. Pola-pola tindakan-tindakan tersebut misalnya perencanaan dan pemikiran strategis. Henry Mintzber merumuskan strategi sebagai “suatu pola dalam suatu arus keputusan” dalam rangka membandingkan strategi sebagai perencanaan. Max McKeown berpendapat bahwa “strategi adalah pembentukan masa depan” dan upaya manusia mencapai “tujuan-tujuan yang diharapkan dengan sarana-sarana yang tersedia”. Vladimir Kvint menjelaskan strategi sebagai “sistem penemuan, perumusan, dan pengembangan suatu doktrin yang menjamin keberhasilan jangka panjang apabila diikuti dengan sungguh-sungguh”².

Dengan rumusan tersebut, maka strategi yang dilakukan calon anggota legislatif perempuan adalah pola-pola tindakan yang komprehensif yang meliputi perencanaan dan pemikiran untuk mencapai tujuan-tujuan politik yang beradaptasi dengan lingkungannya atau menghadapi pesaingnya dalam arus keputusan dengan memobilisasi sumberdaya yang tersedia dalam kondisi yang terbatas. Dengan begitu, strategi kemenangan dalam pemilu adalah panduan penting bagi calon anggota legislatif perempuan ketika mereka hendak berkompetisi meraup ‘suara terbesar’³ di daerah pilihannya masing-masing.

Berdasarkan pengalaman mereka yang menjadi calon anggota legislatif yang pemula maupun petahana pada Pemilu 2014, mereka melancarkan pendekatan yang cocok

2 http://en.wikipedia.org/wiki/Political_strategy diakses pada 2 November 2015 jam 14.00 wib.

3 Hal ini sangat bergantung pada sistem pemilu yang berlaku yang dapat berubah-ubah setiap 5 tahun sekali.

untuk kebutuhan dan konteks di daerah pemilihan masing-masing dan tahapan demi tahapan. Pada dasarnya tak ada suatu strategi pemenangan yang bersifat universal yang berlaku untuk semua calon, namun sangat spesifik individual, karena masing-masing orang membuat dan menggunakan strateginya sesuai dengan kerangka kebutuhan dan kondisi lingkungan sosial, politik, serta budaya yang berkembang.

Calon anggota legislatif perempuan idealnya bersinergi pula dengan strategi pemenangan pemilu partai politik pengusungnya. Dengan demikian, mereka dapat memastikan bahwa partai politik turut bertanggungjawab dalam mempromosikan dan memenangkan para kader perempuannya. Sedikit banyak, hal itu akan mengurangi beban pekerjaan mereka dalam pemilu. Di satu sisi, banyak calon anggota legislatif perempuan menjalankan strateginya tanpa menyinkronkan hal itu dengan kemenangan partainya. Di sisi lain, partai mereka pun kurang peduli terhadap para kader perempuannya. Pada gilirannya, kedua belah pihak baik calon maupun partainya di tingkat lapangan berjalan sendiri-sendiri sehingga hasilnya menjadi kurang optimal bagi keduanya.

Dari rekaman pengalaman calon anggota legislatif yang berhasil lolos⁴ menjadi anggota dewan, dalam menjalankan strategi pemenangan pemilu, maka langkah-langkah berikut harus dipahami dan dipersiapkan jauh-jauh hari sebaik-baiknya untuk meraih kemenangan (suara terbanyak). Langkah-langkah tersebut dibagi menjadi beberapa fase⁵ berikut:

4 Hasil wawancara dengan responden calon anggota legislatif 2014.

5 Bandingkan dengan tulisan oleh Federation of Canadian Municipalities, *A Guide for Women Candidate*, tth.

A. Fase Pra Pemilu

Pada fase pra pemilu sangat penting bagi para calon anggota legislatif perempuan untuk mempersiapkan diri mereka secara fisik dan mental, kesadaran dan pengetahuannya mengenai banyak hal di seputar politik, demokrasi, fungsi legislatif, dan lainnya. Persiapan fisik dan mental terutama menjaga kesehatan fisik selama masa pencalonan, menjaga stabilitas emosional karena akan berhadapan dengan dinamika situasi yang menekan ataupun membebani pikiran, dan ketahanan psikologis lainnya. Sejak dini, mereka harus menyadari motivasi terdalam apa yang memicu mereka mencalonkan diri menjadi anggota dewan? Untuk apa mereka melakukan hal tersebut? Dan bagaimana melakukannya?

Pengetahuan yang mendalam mengenai tugas-tugas dan persyaratan seorang anggota dewan (*jobs description and requirements*) harus dipahami sejak dini khususnya bagi calon yang masih pemula. Kemudian diperlukan pengetahuan yang memadai mengenai program kerja dan kelembagaan dewan (*programs and institutional description*). Motivasi yang jelas akan memberikan kepercayaan diri yang kuat kepada para calon anggota legislatif perempuan untuk memenangkan pemilu.

Biasanya motivasi seseorang bermula dari kehendak diri yang bernama 'visi pribadi' yang akan diperjuangkannya. Visi tersebut dapat berwujud idealisme seseorang ataupun suatu sarana aspirasi kepentingan orang lain. Visi pribadi mengenai perjuangan tertentu harus jelas sebelum hal yang terkait dengan pemilu dikerjakan pada tahap-tahap awal. Dapat saja ilham tersebut bersumber dari visi partai politik pengusungnya atau mungkin visi sosial atau komunitas yang hendak diperjuangkan, bahkan visi bangsa. Sungguh mengkhawatirkan apabila sejak dini mereka tidak memahami

visinya secara jelas, apalagi hanya mengikuti arus yang ada (pragmatisme). Pertanyaan sederhana dapat mereka ajukan kepada dirinya sendiri, misalnya: Mengapa saya ingin menjadi anggota dewan? Apa yang hendak saya perjuangkan? Kepentingan siapa yang hendak saya perjuangkan? Apakah saya sungguh-sungguh memperjuangkan kepentingan perempuan dan publik?

Selain bermula dari kesiapan psikologis tersebut, calon anggota legislatif perempuan pun setidaknya memahami dan menyadari sebaik-baiknya mengenai mekanisme internal partai pengusungnya terkait dengan pemilu agar tidak mengalami kebingungan dan tekanan emosional yang berlebihan akibat ketidaktahuannya. Mereka harus memastikan apakah partai pengusungnya benar-benar memberlakukan kebijakan afirmasi 30 persen bagi keterwakilan perempuan untuk menjadi calon anggota legislatif. Idealnya kebijakan tersebut berlaku di dalam kepengurusan dan kepemimpinan partai pula.

Apabila mereka telah menjadi kader partai politik tertentu dengan jam kerja yang panjang, yang didukung dengan transparansi dan kepemimpinan partai yang baik, maka sedikit banyak akan mudah memahami mekanisme internal partainya. Secara umum, hal itu dapat dilacak di dalam kelengkapan keorganisasian yang ada yang biasanya menjadi landasan kesahan hukum suatu organisasi, seperti AD/ART, juklak, juknis, aturan-aturan dan kebijakan partai lainnya. Kelengkapan itu di dalam suatu partai politik yang profesional pastilah telah dipersiapkan seutuhnya dan dibagikan kepada semua kader partai dalam bentuk profil organisasi agar menjadi acuan kebijakan dan pengambilan keputusan.

Partai politik yang responsif tentu senantiasa berinteraksi secara sinambung dengan lembaga pelaksana pemilu yang

ada, seperti KPU/KPUD, Bawaslu, dan lainnya. Partai politik harus menyosialisasikan UU partai politik dan pemilu yang terbaru. Partai politik harus menyebarluaskan berbagai informasi yang terkait dengan pemilu kepada para kadernya yang hendak maju menjadi anggota dewan. Kesiapan pengetahuan demikian harus mereka peroleh jauh-jauh hari di dalam partainya sendiri sebelum terlibat kontestasi pemilu. Partai politik dapat melakukan rapat-rapat intensif ataupun forum-forum sosialisasi guna menjelaskan berbagai informasi terkait dengan pemilu.

Banyak partai politik yang tidak melakukan kaderisasi untuk calon anggota legislatif perempuan secara baik, bahkan cenderung bersifat pragmatis karena mengambil perempuan-perempuan dari eksternal partai untuk memenuhi kuota 30 persen dalam masa pemilu. Tindakan demikian barang tentu merugikan kader-kader perempuan yang ada di internal partai. Kalangan artis kerap dicomot dijadikan calon anggota legislatif karena dianggap populer dan mampu menarik suara pemilih. Kebiasaan-kebiasaan politik semacam ini sudah menjadi tradisi kepartaian di Indonesia sehingga sistem rekrutmen kader tidak berkembang dengan baik sebagai wahana penemuan dan pembentukan sumberdaya manusia partai yang mumpuni.

Sebagai wujud tanggungjawab partai politik terhadap kader-kadernya, maka membentuk tim atau panitia seleksi calon anggota legislatif perempuan sangat diperlukan. Tim atau panitia seleksi ini harus diisi oleh kader-kader perempuan partai yang berkomitmen terhadap perjuangan hak-hak dan kepemimpinan perempuan. Adanya tim atau panitia seleksi yang demikian harus menjadi kebijakan dan mekanisme yang permanen di dalam suatu partai politik serta dilaksanakan sungguh-sungguh secara berkesinambungan guna memperoleh calon anggota dewan yang bermutu. Tim

tersebut senantiasa bekerja untuk menghasilkan kader-kader perempuan yang mumpuni. Elite pimpinan partai politik yang ada hendaknya betul-betul berkomitmen dalam mewujudkan tim seleksi tersebut secara terbuka, transparan, dan akuntabel.

Dalam rangka menjamin proses seleksi berjalan secara demokratis, maka proses hal itu harus berjalan secara transparan dan akuntabel. Dalam hal itu, partai politik memerlukan data-data para kader yang lengkap dan memadai. Sistem basis data yang baik harus tersedia di dalam partai terkait mulai dari pimpinan pusat hingga cabang dan rantingnya. Tanpa sistem basis data yang baik, maka sulit diperoleh rekam jejak para kader partai ataupun calon anggota legislatif secara baik dan benar. Tentu partai dan publik tidak ingin mendapatkan para anggota dewan yang bermasalah di kemudian hari sebagaimana selama ini terjadi dan berlangsung.

Dalam kenyataannya, sebagian besar partai politik kurang mengembangkan sistem basis data para kader partainya atau anggotanya secara baik, sehingga partai sendiri dan publik umumnya kesulitan melacak rekam jejak para calon anggota legislatifnya. Biasanya setelah menjadi anggota legislatif yang berkasus, baru kemudian publik mengetahui bagaimana profil mereka yang sebenarnya. Partai politik yang professional setidaknya memiliki sistem manajemen informasi yang handal, akurat, dan terbaru setiap saat. Banyak partai politik yang mengabaikan hal itu, bahkan situs partai yang resmi pun tidak tersedia. Andai pun ada, maka situs yang dimiliki tidak terkelola secara baik sehingga tidak terbaru setiap saat. Kader-kader adalah pekerja partai politik yang profesional, loyal, dan berkomitmen, sehingga sejak awal prinsip itulah yang menjadi dasar kesadaran dan tindakannya dalam membangun dan mengembangkan partainya.

Di samping persiapan kemenangan pemilu yang dikerjakan oleh partai politik yang bersangkutan dengan segala sumberdaya yang dimilikinya yang mungkin terbatas, maka kesiapan calon anggota legislatif perempuannya juga sangatlah penting. Parpol terkait memang harus membelakangi para caleg mereka sebaik-baik dari sisi pengetahuan dan keterampilan sebagai anggota legislatif.

Akan lebih memudahkan langkah-langkah dalam proses pemilu yang dihadapi, apabila mereka dalam kurun waktu yang panjang telah membangun modal sosialnya dengan baik, yaitu membentuk interaksi sosial yang intensif di daerah yang akan menjadi wilayah pemilihannya. Survei lokasi dan pemetaan wilayah secara detil perlu dilakukan sejak awal untuk memahami bagaimana titik-masuk dalam membangun interaksi sosial dengan masyarakat setempat, melihat potensi suara, dan sebagainya. Pemetaan tokoh-tokoh masyarakat dan agama, aktor-aktor sosial lainnya, dan kelembagaan yang sekiranya penting dan berpengaruh dalam memuluskan interaksi sosial di daerah pemilihan⁶. Calon anggota legislatif perlu melakukan pemetaan basis massa pendukungnya di daerah pemilihannya sebaik mungkin⁷. Semua itu harus dipastikan telah dikerjakan sedini mungkin sebelum beranjak ke hal-hal lainnya.

Untuk penentuan daerah pemilihan (dapil) dalam fase pra pemilu, maka partai politik dan kadernya harus berdiskusi dan bersepakat sejak awal untuk memberikan wilayah yang

6 Dari temuan wawancara oleh Kalyanamitra, sebagian besar calon anggota legislatif melaksanakan langkah-langkah ini sebagai kesiapan awal mereka apalagi bagi mereka yang bukan berasal dari daerah setempat, atau baru sama sekali, dan pemula sebagai anggota dewan.

7 Temuan studi Puskapol UI terhadap perilaku dan persepsi politik pemilih di Jakarta Selatan menunjukkan bahwa pemilih laki-laki dan perempuan secara potensial memberikan dukungan kepada caleg perempuan, yaitu segmentasi pemilih berusia 17-25 tahun, berpendidikan menengah, dan berpendapatan cenderung tinggi.

strategis yang diharapkan mampu menanggung perolehan suara terbesar. Hal ini sangat bergantung pada negosiasi⁸ calon anggota dewan terhadap partainya. Biasanya partai politik akan mempertimbangkan segi-segi yang pragmatis, ekonomis dan menguntungkan, khususnya untuk peraihan suara (kursi) di wilayah terkait. Informasi yang akurat mengenai ketentuan perolehan kursi di tiap daerah pemilihan harus dikuasai sejak awal oleh calon anggota legislatif bersangkutan. Misalnya, untuk alokasi kursi di daerah pemilihan DKI 1 adalah 6 kursi, yang harus diperebutkan oleh 10 partai politik, maka untuk calon dapat memenangkan 1 kursi harus meraih berapa suara? Hitung-hitungan mengenai hal ini setidaknya telah dipahami oleh calon terkait.

Tak cukup sampai di situ, calon anggota legislatif perempuan harus membangun modal budaya yang kuat dalam fase pra pemilu ini. Kedekatan budaya menjadi penting untuk membentuk interaksi sosial yang lebih baik dengan pemilih di daerah pemilihan. Kedekatan budaya umumnya dicirikan dengan kesamaan bahasa, adat istiadat, etnis, dan perilaku sosial tertentu. Namun kedekatan tidak berarti harus memiliki latar belakang budaya yang sama, karena dalam kenyataannya orang Indonesia memiliki pluralitas etnis, agama, dan lainnya, maka menghormati semua keragaman itu adalah cara terbaik untuk membangun interaksi sosial yang utuh. Tentu budaya tersebut hendaknya pula menghormati dan menjunjung tinggi kesetaraan dan keadilan gender.

Lazimnya calon anggota legislatif perempuan memiliki jadwal yang regular untuk mengunjungi daerah pilihannya

8 Dalam kasus tertentu partai membolehkan calon memilih daerah pemilihan yang dipandang relatif dikuasainya, namun kebanyakan ditentukan oleh partai, apalagi untuk calon pemula. Negosiasinya akan alot dan mengemuka transaksi dengan elite pimpinan partai politik.

dan bertemu dengan pemilihnya agar terbangun kedekatan sosial dan budaya secara baik. Interaksi sosial dan budaya memerlukan frekuensi dan intensitas hubungan yang terjaga dan sinambung. Pengalaman anggota dewan yang berhasil meraih suara terbanyak di daerah pemilihannya memperlihatkan sekurang-kurangnya mereka sudah mengunjungi dan berada, bahkan tinggal (*live in*) di wilayah terkait minimal setahun sebelum pemilu berlangsung. Mereka sudah kasak-kusuk, blusukan, membuat program, silaturahmi, dan sebagainya, yang intinya bagaimana memperkenalkan diri mereka ke masyarakat pemilih di daerah terkait. Akan lebih mudah bagi petahana yang tidak mengalami pemindahan daerah pemilihan, karena mereka sudah memiliki rekam jejak yang nyata sebagai bukti kerja politiknya. Akan lebih baik apabila lebih dari setahun sebelum pemilu berlangsung, dalam rangka membangun popularitas dan keterpilihan di wilayah setempat, mereka telah berinteraksi secara intensif. Hal itu dapat dilakukan tanpa politik uang dan melalui cara-cara yang elegan.

Selain itu, calon anggota legislatif perempuan pun harus mempersiapkan modal ekonominya sebaik-baiknya seketika niat untuk menjadi calon anggota dewan muncul. Jangan sampai terjadi kasus menjual rumah dan tanah ataupun aset lainnya bahkan menghutang ke pihak-pihak tertentu untuk membeayai pencalonan menjadi anggota dewan, yang akan menimbulkan persoalan baru di kemudian hari. Untuk membangun modal sosial dan budaya jelas saja dibutuhkan ongkos politik yang besar, misalnya biaya untuk melakukan rapat-rapat, berkoordinasi, dan sebagainya. Apalagi bila daerah pemilihannya ternyata jauh dari daerah tempat tinggal si calon anggota legislatif dan memerlukan mobilitas transportasi berbeaya tinggi, maka modal yang cukup harus tersedia untuk semua itu.

Biasanya modal ekonomi inilah yang banyak mematahkan semangat dan langkah perempuan untuk terjun menjadi anggota dewan, apalagi bagi pemula, karena mahalnnya ongkos politik di Indonesia akibat 'kanker' politik uang yang melanda belakangan ini. Namun keterbatasan sediaan dana politik dapat disiasati dengan cara-cara yang produktif sejauh tidak melanggar undang-undang atau hukum yang ada, misalnya dengan membuka dukungan dana publik atau dukungan partai politik pengusungnnya.

B. Fase Pemilu

Dalam fase pemilu, maka kematangan segala kesiapan di fase pra pemilu harus sudah terjadi. Oleh karena waktu pemilu yang terbatas dengan berbagai tahapan-tahapannya, maka calon anggota legislatif perempuan harus merancang jadwalnya sedemikian ketat dan pasti agar waktu yang tersedia terkelola dengan baik. Dengan kesiapan yang matang, para calon dapat mendaftarkan dirinya atau didaftarkan untuk mengikuti pemilu melalui partai politiknya. Informasi dan teknis pendaftaran ini setidaknya telah diperoleh di internal partainya masing-masing, selain melalui media massa dan situs KPU/KPUD di masing-masing daerah.

Oleh karena yang mendaftarkan calon anggota legislatif ke KPU/KPUD adalah partai politik pengusungnnya, sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka melalui partailah semua kelengkapan data calon harus dipenuhi dan diisi kedalam formulir-formulir yang sudah disiapkan oleh KPU/KPUD. Partailah yang mengantarkan semua data tersebut untuk didaftarkan dan diverifikasi ke KPU/KPUD setempat. Sebelum pemberkasan, beberapa partai politik ada yang melakukan uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper tests*) termasuk tes psikologis terhadap calon anggota legislatif

agar diperoleh gambaran potensi, kemampuan, keterampilan dan kecakapan politis yang memadai.

Usai pendaftaran dan verifikasi data calon anggota legislatif di KPU/KPUD setempat, dengan jadwal pemilu yang ketat, mereka harus mengelola kegiatan-kegiatan politiknya di daerah pemilihan masing-masing sedemikian rupa agar mencapai target perolehan suara terbanyak. Kerja-kerja politik pra pemilu menjadi sangat menentukan dalam menjaga kesinambungan irama dengan fase pemilu ini. Mereka yang tidak atau kurang mempersiapkan modal sosial, politik, budaya, dan ekonominya pada masa tersebut, maka dapat mengalami ketertinggalan dalam penggalangan suara pemilih. Apa saja yang perlu dipersiapkan oleh calon anggota legislatif perempuan dalam fase pemilu ini? Beberapa langkah berikut dapat dikerjakan untuk mengecek sejauh mana kesiapan yang ada pada fase pemilu:

1. Memastikan bahwa calon anggota legislatif bersangkutan telah memperoleh nomor urut dan daerah pemilihan dari partainya. Biasanya untuk tiba di tahap ini, seorang calon telah melalui tahap seleksi di internal partai masing-masing. Dalam tahap ini sangat diperlukan komitmen elite pimpinan partai bersangkutan untuk mengafirmasi 30 persen kader perempuannya maju menjadi anggota dewan dengan mekanisme yang transparan dan akuntabel. Terkadang terjadi kasus, bahwa elite pimpinan partai di tengah jalan lebih memilih calon dari luar partai yang lebih menguntungkan mereka ataupun kader laki-laki yang bertarung. Mungkin sebelum masuk kedalam Daftar Calon Tetap, parpol bersangkutan memasukkan para caleg kedalam Daftar Calon Sementara (DCS). Dalam fase ini, bisa terjadi perubahan-perubahan mendadak, pergantian,

dan lainnya, yang harus diwaspadai para caleg perempuan.

2. Berkas yang ada harus sudah diisi dan dibawa oleh partainya untuk diverifikasi oleh KPU/KPUD sesuai dengan jadwal yang ditentukan untuk masing-masing parpol. Setelah berkas diverifikasi oleh KPU/KPUD, maka yang bersangkutan akan masuk kedalam Daftar Calon Tetap (DCT). Sebelum memasuki tahap DCT, biasanya baru berbentuk Daftar Calon Sementara (DCS). Dalam tahap ini, perubahan-perubahan dapat juga terjadi, maka calon terkait hendaknya memastikan bahwa namanya tidak diganti dengan nama yang lainnya.
3. Apakah partai pengusung sudah berkomitmen menggerakkan mesin-mesinnya di daerah-daerah pemilihan untuk mendukung anda? Apakah partai sudah mengonsolidasi semua calon legislatifnya mulai dari DPR RI, DPRD provinsi/kabupaten/kota agar saling bekerjasama dan mendukung? Dengan berlakunya sistem suara terbanyak, maka kompetisi yang keras dapat terjadi di kalangan calon di internal partai masing-masing sehingga orang-orang menjadi individualistik dan egoistik. Mungkin akibat biaya politik yang naha besar yang telah mereka keluarkan untuk kepentingan partainya.
4. Apabila anda telah melakukan survei keterpilihan dan popularitas di daerah pemilihan anda (apabila mampu lakukan kegiatan ini untuk memastikan posisi anda di masyarakat pemilih), maka pastikan kembali hasilnya senantiasa terbaru terus-menerus. Survei ini penting untuk memastikan apakah kehadiran anda di daerah pemilihan dikenal atau direspon secara positif

oleh publik atau mendapatkan tantangan. Hal ini bergantung kepada kemampuan dana yang tersedia karena untuk melakukan hal itu diperlukan tim survei yang handal (sebaiknya berasal dari lembaga-lembaga survei yang sudah terbukti hasil surveinya baik).

5. Pastikan pula bahwa anda sudah mendapatkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di daerah pemilihan yang anda targetkan sebelum melangkah lebih jauh. Daftar tersebut sangat penting untuk mendukung kerja-kerja kampanye selama proses pemilu. Daftar tersebut berisikan data-data dasar pemilih, seperti nama, alamat, dan lainnya. Tanpa daftar itu anda akan bekerja secara serampangan dan tidak menuju ke sasaran yang tepat. Pemetaan pemilih dapat anda lakukan dengan adanya daftar tersebut.
6. Buatlah peta geografi pemilih dengan kategori: wilayah yang mayoritas mendukung, kemungkinan mendukung (atau belum memutuskan), dan tidak atau kurang mendukung. Peta ini dapat diperbaharui senantiasa dan dicek kembali setiap saat. Peta geografi pendukung memudahkan anda melakukan intervensi kegiatan seperti kampanye atau program lainnya.
7. Apabila dana anda cukup tersedia, maka bentuklah tim pemenangan beserta poskonya di daerah pemilihan untuk membantu kerja-kerja politik anda. Anda dapat menentukan sendiri orang-orang yang akan mengisi tim pemenangan itu, apa kerja-kerjanya, apa targetnya, bagaimana cara kerjanya, dan sebagainya. Pastikan bahwa mereka bekerja secara berdedikasi, militan, dan elegan. Tidak boleh tim pemenangan bekerja dengan cara yang melanggar hukum, meresahkan masyarakat, dan melakukan tindakan-tindakan manipulatif

lainnya. Semua itu sangat bergantung kepada anda sendiri dalam mempersiapkan tim (kadang berasal dari sanak saudara atau keluarga besar).

8. Calon anggota legislatif perempuan dapat membentuk relawan-relawannya di daerah pemilihan untuk memperkuat kerja-kerja tim kemenangan yang ada. Relawan-relawan tersebut dapat dikelola dengan baik dengan pertemuan-pertemuan atau melalui penggunaan media sosial apabila tersedia sarannya di daerah terkait.
9. Menggerakkan dukungan organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga yang menjadi jaringan kerja selama ini, seperti lembaga keagamaan, sosial, pendidikan, dan lainnya, untuk membantu kerja-kerja kampanye anda.
10. Bersama tim (sebaiknya tim sebagian besar berasal dari daerah pemilihan) dapat melakukan interaksi sosial dan budaya secara intensif dan luas, untuk menyampaikan visi dan programnya di wilayah, berdialog, berdiskusi, tatap muka, menemukan dan mendaftar berbagai persoalan atau isu strategis di lapangan, dan bagaimana meresponnya. Hal ini menjadi lebih mudah apabila pada fase pra pemilu telah terbangun interaksi yang baik antara calon anggota legislatif perempuan dengan masyarakat di daerah pemilihannya. Hari demi hari, mereka harus berinteraksi dengan massa pemilih secara produktif dan sistematis.
11. Teknik ‘makan bubur’⁹ mungkin dapat diterapkan oleh

9 Diungkapkan salah seorang peserta FGD ke-2 yang diselenggarakan oleh Kalyanamitra, yang berasal dari partai politik, yang berhasil memenangkan pemilihan legislatif di daerah Bogor.

calon anggota legislatif dalam menggarap pemilihnya, yaitu mulai dari pinggiran wilayah pemilihan kemudian ke tengah-tengah (apabila dipandang sentra suara pemilih menyebar). Teknik ini bergantung pada hasil pemetaan wilayah dan potensi suara di wilayah. Selain teknik tersebut, beberapa anggota dewan yang berhasil meraih suara terbanyak juga mempergunakan teknik ‘fokus wilayah’¹⁰. Artinya, wilayah-wilayah yang sudah dimasuki para pesaing dari partai politik sendiri atau partai politik lainnya, bila dianggap potensi suaranya tidak besar, maka calon anggota legislatif perempuan dapat menggarap wilayah-wilayah lain yang padat suara dengan persaingan yang relatif kecil.

12. Percampuran antara teknik segmentasi dan fokus wilayah dapat dilakukan oleh calon anggota legislatif perempuan dengan timnya dalam menggarap dan mengelola area politik yang menjadi targetnya. Apabila data real jumlah pemilih di tiap dusun atau desa dapat dimiliki lebih dini, maka penentuan segmen dapat dikerjakan, misalnya apakah jumlah ibu-ibu dan pemilih muda perempuan lebih besar di suatu dusun atau desa? Apakah di desa lain juga sama? Teknik percampuran ini sedikit memudahkan karena memuat kombinasi-kombinasi dinamis sesuai dengan situasi di lapangan. Apabila wilayahnya relatif perkotaan, maka hal yang sama juga dapat dilakukan oleh calon anggota legislatif perempuan dan timnya.
13. Melakukan kampanye penggalangan suara dengan cara-cara yang murah meriah, kreatif dan inovatif, menarik massa pemilih dengan segmentasi yang berbeda-beda melalui media kampanye yang unik dan

¹⁰ Hasil wawancara dengan calon anggota legislatif yang berhasil lolos pada Pemilu 2014.

kontekstual¹¹. Kampanye dapat mengombinasikan berbagai media mulai dari media audio (radio, dll), visual (poster, umbul-umbul, spanduk, dll) atau audio-visual (film, panggung musik, dll.). Kesenian-kesenian daerah, media sosial, pengajian, permainan-permainan lokal, dan lainnya dapat menjadi media kampanye yang mampu menarik minat masyarakat umum di wilayah target. Media lain adalah kunjungan-kunjungan langsung ke tiap kelompok sasaran (kendalanya adalah waktu yang terbatas dan medan jelajah yang luas). Bila memiliki jaringan kerja yang luas dengan berbagai pihak, maka para calon anggota legislatif perempuan dapat melakukan karya nyata di wilayah target, seperti pengobatan gratis, sembako murah, pelatihan kerajinan, pembagian lembar info, penyebaran brosur, mengamen, dan sebagainya. Semua itu dapat dilakukan dengan baik apabila data dasar wilayah pemilihannya sudah dimiliki. Lakukan semua itu dengan ikhlas dan kegembiraan supaya kelompok sasaran juga merasakan suasana kebatinan yang sama dengan apa yang dirasakan calon anggota legislatif terkait.

14. Calon anggota legislatif perempuan dapat memastikan bahwa massa pemilihnya mengenal dirinya dengan baik, misalnya gambar orangnya, nomor urut, namanya siapa, dan partainya apa. Tentu hal ini bergantung pada teknis kelengkapan alat-alat pemilu. Apabila massa pemilih tidak melek aksara, hanya dapat mengingat gambar atau nomor calon, maka perlihatkan kepada mereka bagaimana harus

11 Sebagian besar responden calon anggota legislatif menggunakan sarana dan media kampanye yang awam dipakai selama ini, sedangkan untuk kesenian daerah kurang maksimal dipakai.

mencoblos atau mencontreng kertas suaranya. Ketelitian dan kesabaran untuk mengajari massa pemilih yang mengalami keterbatasan tertentu adalah penting, apabila suara mereka memang signifikan untuk diraih. Hal teknis kecil ini dapat berpengaruh kepada perolehan suara anda.

15. Pada pemungutan suara (pencoblosan atau pencontrengan di TPS-TPS), calon anggota legislatif perempuan dan timnya harus bekerja ekstra untuk memastikan bahwa suara-suaranya tidak dicurangi atau dihilangkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Di tiap TPS setidaknya ada pemantaunya agar suara tidak hilang atau berkurang. Bila dana pribadi terbatas, maka calon anggota legislatif bersangkutan dapat bernegosiasi dengan partainya agar partainya dapat mengirimkan saksi-saksi partai ada di tiap TPS. Demikian pula harus dikawal suara yang diperoleh hingga ke tahapan yang lebih tinggi, misalnya dari TPS ke kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional. Cara lain yang lebih efisien adalah menjadikan massa pemilih atau relawan sebagai pemantau di tiap TPS. Hal ini mungkin terjadi bila sejak awal militansi massa pemilih atau relawan sudah dibangun. Di samping itu, apabila partai pengusung calon sungguh-sungguh bekerja maka mesin-mesinnya akan bergerak untuk mengamankan perolehan suara-suara para kadernya.
16. Calon anggota legislatif perempuan dan tim pemenangannya dapat melakukan penghitungan suara sendiri untuk mengantisipasi kecurangan-kecurangan perhitungan suara di TPS-TPS yang ada. Dengan sarana informasi dan media sosial yang tersedia saat ini, maka kecepatan perolehan hasil penghitungan suara

tidak menjadi persoalan lagi apalagi di daerah-daerah perkotaan ataupun yang terakses dengan jaringan internet atau telpon. Biasanya partai melakukan penghitungan perolehan suaranya sekaligus suara para kadernya.

17. Persiapan anggaran¹² harus dibuat oleh calon anggota legislatif dan timnya agar seluruh agenda kerja tidak terhambat pada fase pemilu ini. Anggaran harus akuntabel dan dilaporkan kepada partai pengusungnya, karena akhirnya akan diaudit oleh akuntan publik sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas suatu partai politik.

C. Fase Pasca Pemilu

Sentuhan terakhir dari suatu strategi kemenangan adalah kepastian jumlah suara yang diperoleh baik yang bersumber dari TPS-TPS, olahan tim pemenang, olahan badan pemenang pemilu partai pengusung maupun yang berasal dari penghitungan resmi KPU/KPUD. Calon anggota legislatif perempuan hendaknya memastikan bahwa tidak terjadi manipulasi-manipulasi suara atau kecurangan-kecurangan di tingkat lapangan tersebut dan di internal partai masing-masing akibat keputusan elite partai yang semenang-menang sehingga mengurangi angka perolehan suaranya. Apabila terjadi tindak-tanduk merugikan tersebut yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu di tingkat lapangan maupun di internal parpol masing-masing, maka para caleg dapat melaporkannya ke Bawaslu atau Bawaslu dan ke polisi secara mandiri ataupun melalui mekanisme partai masing-masing. Pada gilirannya tindak pencurangan tersebut dapat diproses di Mahkamah Konstitusi. Pengulangan pemilu

¹² Persiapan anggaran meliputi biaya tim, posko, media kampanye, transportasi, kegiatan khusus, ATK, dan lainnya.

dapat dilakukan apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran, yang sudah dinyatakan berketetapan hukum oleh Mahkamah Konstitusi.

Pengawasan fase ini juga penting untuk memastikan bahwa proses pemilu di lapangan berjalan secara demokratis, sesuai dengan amanat undang-undang, transparan, dan akuntabel. Pada gilirannya, apabila calon anggota legislatif terkait terpilih menjadi anggota dewan dengan diumumkan melalui media KPU/KPUD yang resmi, maka yang bersangkutan segera dapat mempersiapkan diri ke tahap selanjutnya yaitu persiapan pelantikan menjadi anggota DPR RI atau DPRD provinsi/kabupaten/kota dengan segala persiapan teknisnya. Namun yang terpenting dari itu ialah, bahwa babak baru realisasi janji-janji politik mereka di konstituen selama masa-masa kampanye di daerah pemilihan harus dibuktikan di kemudian hari. Konsistensi sikap dan tindakan anggota legislatif perempuan menjadi bukti nyata bagi konstituen di dapilnya bahwa yang bersangkutan dapat dipercaya dan amanah dalam menjalankan mandat masyarakat pemilih.

BAGIAN KELIMA

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Meskipun politik bagi kaum perempuan Indonesia bukanlah hal yang baru karena sejak kolonisasi Belanda sudah digeluti dan diperjuangkan, namun hak-hak politik dan ruang demokrasi harus selalu direbut. Arena politik real melalui parlemen dengan kekuasaan representatifnya merupakan wahana untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan strategis dan praktis kaum perempuan Indonesia. Dan untuk dapat memenangkan pertarungan kekuasaan representatif tersebut, diperlukan tindakan khusus sementara (*affirmative action*) guna mendorong adanya keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga politik eksekutif dan legislatif. Tindakan afirmasi ini mendorong agar angka 30 persen keterwakilan perempuan di kepengurusan partai-partai politik dari pusat sampai daerah dan untuk calon anggota legislatif (DPR RI, DPRD) dapat dipenuhi, meskipun angka tersebut kritis dan minimal. Setidaknya, dengan angka afirmasi 30 persen itu, lembaga-lembaga politik dan parlemen dapat diintegrasikan oleh kaum perempuan Indonesia untuk memenangkan kepentingan-kepentingan politiknya.

Sejak reformasi 1998, dengan berubahnya sistem pemilu tidak langsung menjadi sistem pemilu langsung, sebagai amanat UU Pemilu dan Parpol, maka kaum perempuan Indonesia yang hendak terjun ke dunia politik makin menghadapi tantangan baru, karena adanya perubahan-perubahan yang drastis di dalam kebijakan, mekanisme, dan teknis pelaksanaannya. Dan perubahan tersebut menuntut mereka untuk beradaptasi dengan keadaan yang berkembang, meskipun dampak negatifnya tidak begitu mudah dihalau. Misalnya, dengan perubahan tersebut di masyarakat kian

tumbuh politik uang, terjadi transaksi yang alot antara calon anggota legislatif perempuan dengan masyarakat pemilih di daerah pemilihan. Tak jarang, segala kesiapan dan persiapan calon anggota legislatif perempuan mulai dari modal politik, sosial, kultural, ekonomi, pada gilirannya bergantung kepada kehendak masyarakat pemilih. Ketidakberdayaan ini adalah ironi dalam real politik di Indonesia bagi kaum perempuan.

Dalam temuan dokumentasi ini berbagai pengalaman perempuan selama Pemilu 2014 dicoba dipotret melalui mereka yang berhasil terpilih menjadi anggota legislatif maupun yang tidak terpilih menjadi anggota legislatif. Pengalaman mereka dalam meraih suara untuk memenangkan pemilu yang lalu misalnya, melukiskan betapa tidak sederhananya dunia politik real yang mereka perebutkan itu. Tidaklah sesederhana teori-teori politik di dalam buku-buku teks politik yang bisa kita baca setiap saat. Real politik yang dihadapi calon-calon anggota legislatif perempuan di lapangan melampaui teori-teori, karena bergumul dengan realitas manusia yang selalu berubah-ubah dan dinamis. Masyarakat pemilih bukanlah robot-robot yang dengan sederhana dapat ditebak keinginan dan harapan-harapannya meskipun mereka terkadang dengan gamblang menuntut calon-calon anggota legislatif perempuan agar mewujudkan janji-janji politik mereka.

Pengalaman-pengalaman perempuan dalam dokumentasi ini menunjukkan berbagai tantangan, seperti konsistensi negara dalam memberlakukan afirmasi 30 persen keterwakilan perempuan masih lemah. Dalam pemilu lalu, terkesan partai-partai politik peserta pemilu mencomot begitu saja perempuan untuk dicalonkan menjadi anggota legislatif. Terkesan tindakan ini bersifat asal-asalan yang berakibat, bahwa banyak kader partai perempuan yang mungkin lebih berkualitas akhirnya tidak masuk dalam

daftar calon sementara partai mereka masing-masing. Partai-partai politik hanya mengkalkulasi kepentingannya sendiri untuk meraih suara di dapil dan meningkatkan jumlah perolehan kursinya tanpa ada kejelasan apakah tujuannya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan atau kehendak segilintir elit parpol. Negara tidak pernah menghukum partai-partai politik yang tidak merealisasikan kebijakan tersebut.

Di internal partai masing-masing, perempuan juga menghadapi tembok tebal kepentingan elite pimpinan partai. Di samping itu, sistem rekrutmen anggota ataupun kader partai kerap tidak terstandar, terbuka, akuntabel, apalagi dalam kerangka pencalonan anggota legislatif. Pengalaman mereka yang tidak terpilih menunjukkan betapa komitmen elite pimpinan parpol untuk memberlakukan kebijakan afirmasi secara konsisten sangat diperlukan. Mendukung kader-kader perempuan menjadi calon anggota legislatif adalah pola yang baik yang harus diterapkan di tubuh partai bersangkutan. Jadi, jangan hanya mencomot perempuan di luar kader partai hanya untuk kepentingan sesaat partai, umpamanya untuk mendongkrak perolehan suara partai karena yang dijagokan dianggap populer dan kuat secara finansial. Tindakan pragmatis partai semacam ini dalam jangka panjang akan merusak tatanan berpolitik perempuan, karena mereka dianggap pelengkap penderita parpol ataupun sapi perah kepentingan tertentu. Sistem rekrutmen itu harus ditopang oleh kelembagaan tim seleksi calon yang terdiri atas pimpinan perempuan di kepengurusan partai politik yang memuat orang-orang yang mumpuni dan jelas keberpihak kepentingannya terhadap perjuangan hak-hak perempuan.

Beberapa partai politik kelihatan mempunyai sistem perekrutan anggota ataupun kadernya, namun dalam partai yang profesional sistem ini harusnya dimuat di dalam AD/

ART partai, karena akan menjadi panduan resmi seluruh anggota dan kader partai terkait. Juga termasuk ketentuan-ketentuan pencalonan anggota legislatif bagi anggota dan kader partai. Dari dokumentasi ini kurang jelas bagaimana sistem rekrutmen itu ditempatkan, karena tampaknya baru sebatas aturan-aturan bersama yang mungkin tidak tertulis atau legal sehingga tidak cukup kuat aspek hukumnya apabila terjadi perkara atau sengketa untuk dapat diproses secara hukum, misalnya. Segala bentuk dukungan partai yang berupa kebijakan internal partai akan lebih baik dituangkan dalam bentuk aturan-aturan tertulis yang berlaku untuk semua, termasuk elite pimpinan partai. Dalam realitasnya, segala bentuk hukum atau aturan partai tidak berlaku bagi elite pimpinan partai (impunitas).

Pengalaman perempuan dalam pemilu yang lalu memperlihatkan pula betapa perlunya membangun kesiapan diri calon-calon anggota legislatif dari sisi modal politik yaitu dukungan dari masyarakat pemilih dan parpol; modal sosial yaitu hubungan yang intensif dengan berbagai pihak yang akan memilih di dapil; modal kultural yaitu dukungan masyarakat luas dan keluarga untuk dengan adil gender menerima perempuan dalam dunia politik; dan modal ekonomi yaitu ketersediaan dana untuk ongkos pemilu, bukan untuk politik uang. Selain itu, secara individual mereka diharapkan telah memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam memahami politik, demokrasi, isu-isu perempuan, negosiasi, logi, legislasi, dan sebagainya. Tanpa pengetahuan dan keterampilan yang memadai mengenai semua itu, calon-calon anggota legislatif perempuan akan mengalami hambatan-hambatan individual ketika menjadi anggota legislatif kelak. Pengetahuan yang memadai juga diperlukan saat hendak mencalonkan diri menjadi anggota legislatif, umpamanya tentang pemilu,

dapil, nomor urut, kampanye, sengketa pemilu, dan teknis lainnya.

Dengan rekaman pengalaman perempuan dalam Pemilu 2014 yang lalu ini, beberapa rekomendasi diusulkan untuk ditindaklanjuti lebih jauh oleh berbagai pihak:

1. Calon-calon anggota legislatif perempuan

Para calon anggota legislatif perempuan yang hendak maju setidaknya memiliki pemahaman yang memadai mengenai isu-isu perempuan pokok apa yang ada di dapilnya yang hendak diaspirasikan. Mereka semestinya tidak hanya menjadi corong kepentingan parpolnya yang program-program politiknya belum tentu sejalan dengan perjuangan kepentingan kaum perempuan di Indonesia. Penguasaan mereka mengenai isu-isu sensitif perempuan dan kelompok marjinal lainnya serta yang ada di dalam SDGs (*sustainable development goals*) perlu diperhatikan dalam persiapan mereka sehingga membantu mereka kelak apabila menjadi anggota legislatif. Selain itu, instrumen-instrumen HAM internasional yang memuat keputusan-keputusan mengenai promosi, proteksi, dan implementasi hak-hak perempuan dalam berbagai bidang, hendaknya mereka kuasai pula. Dan tak kalah pentingnya ialah, penguasaan hukum dan UU yang ada di Indonesia yang berkait dengan isu-isu perempuan.

Mereka juga mesti membangun komunikasi politik yang baik dengan masyarakat pemilihnya (konstituen) dan berbagai pihak dengan berfungsi sebagai pendidik politik. Artinya, mereka dapat melakukan pendidikan-pendidikan politik yang mendewasakan masyarakat dalam berdemokrasi yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan mempromosikan keadilan gender dan hak-hak perempuan. Dalam mengikis politik uang, maka mereka harus membiasakan masyarakat pemilih untuk mendahulukan aspirasi-aspirasi apa yang

hendak diperjuangkan daripada sekadar memberikan bantuan-bantuan sesaat yang dalam jangka panjang tidak menyelesaikan masalah.

Sesama calon anggota legislatif perempuan dari parpol yang sama ataupun lintas parpol harusnya dapat bekerjasama memenangkan suara dengan perspektif mendahulukan kepentingan publik perempuan daripada kepentingan diri pribadi dan parpolnya. Proses ini tentu sangat ideal namun perlu dipikirkan lebih jauh dalam rangka membangun kebersamaan sesama perempuan (*sisterhood*).

Mereka juga harus membentuk jaringan kerja yang baik jauh-jauh hari sebelum bertarung di dalam pemilu. Modal sosial ini penting untuk memperkuat posisi politik mereka apalagi yang menyangkut pengorganisasian dapil. Profil dapil dapat dikerjakan dengan mempergunakan jaringan kerja yang dimiliki. Dalam kampanye apalagi dengan media sosial akan membutuhkan jaringan kerja yang mendukung.

Para calon anggota legislatif perempuan juga harus memiliki pemahaman yang lengkap dan utuh mengenai teknis kepemiluan, mekanisme, dan lainnya. Mereka dapat mempersiapkan diri jauh-jauh hari mengenai hal itu, terutama memantau terus perubahan-perubahan yang mungkin berlangsung menyangkut semua itu. Hingga kini, belum diketahui bagaimana Pemilu 2019 akan dijalankan, karena UU Pemilu dan Parpolnya belum ada. Setidaknya, mereka dapat belajar banyak dari sumber-sumber informasi yang tersedia.

2. Pemerintah (KPU/KPUD, KPK, KPPA)

Kebijakan afirmasi 30 persen keterwakilan perempuan dalam semua bidang dan tingkatan, termasuk dalam politik adalah kewajiban hukum yang harus negara (pemerintah)

laksanakan. Ini adalah ketentuan konstitusional sehingga pemerintah secara nyata dan tegas dapat memaksa para pihak untuk melaksanakannya dan memberikan sanksi hukum yang tegas kepada yang melanggar dan tidak melaksanakannya.

Komisi pemilihan umum (KPU dan KPUD) harus taat hukum untuk memberlakukan kebijakan afirmasi 30 persen keterwakilan perempuan untuk calon anggota legislatif. Partai-partai politik yang membangkang atau menolak melaksanakannya dapat dikenakan sanksi hukum yaitu melarang parpol bersangkutan mengikuti pemilu. KPU dan KPUD hendaknya tidak melakukan diskriminasi terhadap perempuan yang mengikuti pemilu calon anggota legislatif. Semua aturan hukum di KPU dan KPUD yang terkait dengan pemilu harus disampaikan ke publik secara terbuka, transparan, dan bertanggungjawab. Proses sosialisasi pemilu harus sampai ke publik, parpol, dan bila mungkin tersedia lengkap di media sosial yang ada di situs-situs resmi KPU dan KPUD.

Dalam proses pemilu, peran KPK sangatlah penting untuk merekam data-data calon anggota legislatif yang terkait dengan harta kekayaan atau sumber dana mereka. Peran KPK untuk mengungkapkan ke publik calon-calon anggota legislatif mana yang akuntabel proses pencalegannya dan siapa yang tersangkut kasus korupsi. Bahkan dimungkinkan demi kemaslahatan umum, untuk membuka data transaksi calon-calon yang dianggap mencurigakan sebelum mereka masuk kedalam Daftar Calon Tetap (DCT). Oleh karena, tidak semua orang atau masyarakat mengetahui seluk-beluk informasi transaksi mereka yang akan menjadi anggota legislatif. Membuka ke publik data-data kekayaan dan sumber pendapatan para calon akan memudahkan masyarakat memilih menentukan sikap politik mereka di dalam pemilu.

Belakangan masyarakat kita disuguhi tontotan karikatural yang secara moral politik tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun secara hukum sah. Misalnya, calon anggota legislatif yang terjerat hukum dan dipidana kemudian berhak berpolitik kembali. Sekalipun UU Pemilu membolehkan hal itu, namun calon legislatif yang sudah terpidana apalagi dalam kasus korupsi, tidaklah pantas secara moral hukum untuk berhak berpolitik. Orang yang sudah berpengalaman korupsi, akan memiliki kecenderungan psikologis melakukan korupsi kembali. Oleh karena itu, perubahan dalam ketentuan hukum peradilan bagi anggota legislatif yang berkasus hendaknya dipertimbangkan kembali agar cita-cita luhur dalam dunia politik tidak dicemari oleh orang-orang yang korup.

Hampir sebagian besar perempuan di sini, yang dimuat pengalamannya pada Pemilu 2014 yang lalu, menyatakan bahwa Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak kurang berperan dalam mendorong perempuan masuk ke dunia politik, khususnya menjadi anggota legislatif. Penguatan-penguatan terhadap calon-calon anggota legislatif perempuan tidak optimal dikerjakan oleh kementerian ini. Mereka berkesan bahwa calon ataupun anggota legislatif perempuan jarang diajak kerjasama atau duduk bersama membahas strategi kemenangan mereka ataupun menggodok legislasi yang memperjuangkan kepentingan perempuan. Masing-masing pihak berjalan sendiri-sendiri, tanpa berkoordinasi dan berdiskusi.

Ada baiknya, sebelum dan selama pemilu berlangsung, para pihak yang terlibat tidak mengganggu jalannya pemilu dengan melakukan tindakan-tindakan pemerasan kepada para calon anggota legislatif perempuan. Misalnya, aparat keamanan, militer, dan lainnya, dilarang terlibat dalam proses pemilu kecuali melakukan apa yang menjadi tupoksinya.

Keterlibatan aparat pemerintah dalam memeras para calon anggota legislatif tentu merupakan tindakan tidak terpuji dan melawan hukum yang dapat diproses secara hukum.

3. DPR RI dan DPRD

Kebijakan afirmasi 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen adalah regulasi yang dibuat oleh parlemen. Namun demikian, kebijakan ini belum diimplementasikan secara konsisten di internal parlemen sendiri. Lihatlah bagaimana fraksi, komisi dan alat-alat kelengkapan parlemen lainnya, tidak mencerminkan keterwakilan itu. Akibatnya, isu-isu krusial kepentingan perempuan tidak masuk dalam proses legislasi, khususnya yang diusulkan oleh internal parlemen sendiri. Tidak dipahaminya politik afirmasi ini oleh kalangan anggota legislatif (perempuan dan laki-laki), akhirnya menelorkan banyak UU yang berbenturan dengan perjuangan hak-hak perempuan, bahkan cenderung melemahkan gerakan perempuan, misalnya UU pornografi. Jumlah anggota legislatif perempuan dan alat-alat kelengkapan parlemen yang minim, belum lagi kurang memadainya perspektif adil gender di kalangan mereka, menambah amburadulnya produk legislasi yang mereka hasilkan. Ujung-ujungnya masyarakat umum yang menjadi korban dari pemberlakuan UU tersebut. Demikian pula di tingkat daerah, banyak perda diskriminatif muncul paska reformasi 1998, yang kesemua itu memperlihatkan betapa buruknya kualitas perspektif anggota parlemen, termasuk perempuannya, terhadap perjuangan hak-hak perempuan.

Fungsi-fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang mereka miliki harus dipahami dalam bingkai kepentingan kaum perempuan Indonesia yang plural, maka kerjasama antar perempuan di parlemen dalam menjalankan berbagai fungsi itu harus lintas kepentingan parpol. Publik

perempuanlah yang harus menjadi acuan legislasi, anggaran, dan pengawasan mereka.

Dalam konteks pemilu, DPR RI dan DPRD harus membuat UU ataupun aturan hukum pemilu dan parpol lainnya yang tidak bertabrakan dengan kepentingan perempuan Indonesia. Hukum tidak boleh mendiskriminasi perempuan secara terbuka maupun tersembunyi. Sanksi yang tegas harus disertakan di dalam UU ataupun aturan terkait. Semua pihak harus diatur di dalam UU pemilu dan parpol yang adil dan tidak diskriminatif terhadap perempuan. Fungsi legislasi parlemen harus dijalankan secara optimal, berkeadilan, dan menjunjung tinggi hak-hak perempuan.

4. Partai-partai politik

Partai-partai politik harus secara konsisten memberlakukan kebijakan afirmasi 30 persen keterwakilan perempuan di semua bidang dan tingkatan di semua kepengurusan partai dan untuk menjadi anggota legislatif. Parpol adalah sarana awal kebijakan tersebut dipastikan dijalankan, kemudian di tingkat parlemen sendiri. Para elite pimpinan parpol harus hendaknya memberlakukan keterwakilan itu mulai dari dirinya sampai ke lini terbawah. Pastikan bahwa kebijakan tersebut diadopsi di dalam AD/ART, aturan partai, juklak, juknis, dan lainnya, sebagai aturan dasar organisasi yang berkekuatan hukum. Partai berkewajiban membuat sistem rekrutmen kader yang standar yang dimuat di dalam kebijakan tersebut. Parpol hendaknya lebih mendahulukan kader-kader perempuannya untuk maju menjadi anggota legislatif daripada secara instan mengambil dari luar partai atau mendorong laki-laki menjadi anggota legislatif. Parpol harus sungguh-sungguh mendukung para calon anggota legislatif perempuan untuk memenangkan pemilu dengan mengerahkan segenap sumberdaya partai, komitmen,

dan lainnya. Jangan ada pecah-belah di kalangan caleg perempuan, pemindahan dapil secara mendadak, mengganti caleg tiba-tiba, mengubah nomor urut mendadak, politik uang, calo pencalegan, tidak ada pembekalan caleg, tidak meregenerasi caleg, dan lainnya. Parpol dapat mendorong para caleg agar memperjuangkan aspirasi atau hak-hak perempuan daripada program-program politik partai yang belum tentu sinergis dengan hal itu. Karena pada akhirnya, perjuangan itu akan memenangkan *platform* politik parpol yang bersangkutan.

5. Masyarakat sipil

Politik bagi perempuan sangatlah penting dalam tata kelola kekuasaan bernegara dan berbangsa. Keterlibatan perempuan dalam perjuangan politik hendaknya menjadi perhatian serius kalangan masyarakat sipil. Masyarakat sipil dari berbagai kalangan: lembaga swadaya masyarakat, organisasi perempuan, akademisi, media, dan lainnya; sebetulnya memiliki peran penting untuk mendorong perempuan memasuki dunia politik guna memperjuangkan kepentingan kaum perempuan. Masyarakat sipil dapat menjadi mitra kritis para caleg perempuan dalam mempersiapkan diri mereka memasuki dunia politik, khususnya bagi pemula. Peran-peran edukasi, diseminasi informasi, publikasi, dan lainnya dapat dimainkan oleh kalangan masyarakat sipil. Forum-forum kritis untuk membedah kebijakan dan mengusulkan perbaikan ke parlemen atau pemerintah bisa dilakukan dalam kerangka peningkatan jumlah dan mutu keterwakilan perempuan. Hasil studi, penelitian, kertas kerja, dan sebagainya dapat diberikan kepada parpol, parlemen, dan pemerintah untuk meningkatkan kualitas para caleg perempuan. Masyarakat sipil dapat menginformasikan struktur jaringan kerja dan

sistem politik lokal sehingga memudahkan kerja-kerja para caleg perempuan.

Masyarakat sipil juga dapat membuat proses pemilu semakin demokratis dan transparan serta akuntabel yang memungkinkan perempuan tidak terdiskriminasi di dalamnya. Fungsi media massa dalam mengabarkan kabar baik juga berperan penting guna mengkampanyekan para caleg perempuan yang potensial. Sebaliknya, media dapat memperburuk suasana perpolitikan perempuan dengan informasi-informasi yang menyesatkan.

Masyarakat akademis dapat membantu para caleg perempuan dengan memasok mereka dengan hasil-hasil studi, penelitian, kajian, dan lainnya yang tak semata-mata menyangkut pengetahuan teknis pemilu atau politik praktis, akan tetapi bagaimana mematangkan sistem politik nasional yang ramah terhadap perempuan. Kajian-kajian kebijakan, model-model pemilu, dan seterusnya bisa diperankan oleh dunia akademis dalam rangka membantu perempuan menggeluti politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arendt, Hannah. *The Human Condition*, 2nd edition, intro by Margaret Canovan, Chicago and London: the University of Chicago Press, 1958 (1998).
- Arnail, Barbara. *Politics and Feminism*, Oxford: Blackwell Publisher, 1999.
- Benhabib, Syela, (ed.). *Democracy and Difference: Contesting The Boundaries of The Political*, United Kingdom: Princeton University Press, 1996.
- Blackburn, Susan. *Women and the State in Modern Indonesia*, New York: Cambridge University Press, 2004.
- D Butler, Robert. *18 Steps to Win a Local Election: A Candidate and Volunteer Workbook*, Independent Candidate Action Network, 2008 (<http://www.indyaction.org>)
- F Lane, Jeremy. *Bourdieu's Politics: Problems and Possibilities*, New York: Routledge, 2006.
- Fisip UI, Puskapol. *Analisis Perolehan Suara Dalam Pemilu 2014: OLIGARKI POLITIK DI BALIK KETERPILIHAN CALEG PEREMPUAN*, tp., tth.
- Indikator Politik Indonesia. *Efek Popularitas Calon Legislatif Terhadap Elektabilitas Partai Jelang Pemilu 2014: Temuan Survei di 45 Dapil*, Jakarta: April 2013.
- Jones, Helen, and Susanne MacGregor, (eds.). *Social Issues and Party Politics*, London and New York: Routledge, 1998.
- Kemitraan. *Merancang Sistem Politik Demokratis: Menuju Pemerintahan Presidensial yang Efektif*, Jakarta: 2011.

Kemitraan. *Meningkatkan Keterwakilan Perempuan: Penguatan Kebijakan Afirmasi*, Jakarta: 2011.

Komisi Pemilihan Umum. *Keputusan KPU No 412/Kpts/KPU/ Tahun 2014 Tentang Penetapan Parpol Peserta Pemilu Tahun 2014 Yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Parpol Peserta Pemilu secara Nasional dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014*, ttp., tth.

Lena Krook, Mona. *Quotas for Women in Politics: Gender and Candidate Selection Reform Worlwide*, New York: Oxford University Press, 2009.

Llyod, Moya. *Beyond Identity Politics: Feminism, Power and Politics*, London: SAGE publications, 2005.

Perludem, Yayasan. *Kajian Kodifikasi UU Pemilu*, Jakarta: 2014.

Pitkin, Hanna Fenichel. *The Concept of Representation*, Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1967.

Phillips, Anne. *The Politics of Presence*, Oxford: Clarendon Press, 1995.

Schofield, Norman, and Itai Sened. *Multiparty Democracy: Elections and Legislative Politics*, New York: Cambridge University Press, 2006.

Viriasova, Inna. *Life Beyond Politics: Toward The Notion of The Unpolitical* (PhD Thesis), London, Ontario and Canada: The School of Graduate and Postdoctoral Studies, Western University, 2013.

Website:

http://en.wikipedia.org/wiki/Political_strategy

<http://plato.stanford.edu/entries/political-representation/>

"....Orang beranggapan bahwa politik harus keras, maskulin, dan lainnya. Menurutku, tak boleh gerak-gerik politik itu harus kelaki-lakian, maka harus ada pengalaman perempuan di dalamnya. Pengalaman perempuan itu banyak hal, dan yang paling mudah dipahami ialah soal reproduksi perempuan. Misalnya melahirkan, hamil, haid, dan hal itu harus terimplementasikan menjadi kekayaan kebijakan yang harus dimiliki dalam pembangunan sehingga produk-produk pembangunan mempunyai kepekaan terhadap kaum perempuan." **(Encop Sofia, anggota DPRD Banten)**

"....Banyak masyarakat yang masih mengandalkan atau memakai cara-cara yang harusnya sudah ditinggalkan, misalnya politik uang. Banyak calon anggota legislatif saat terakhir kampanye melakukan '*nyawer*'. Masyarakat mau menerimanya. Itu sebetulnya harus dihilangkan, bahkan di Bogor ada istilah '*cilok di kecapan*'. Artinya, mau nyolok asal ada *gocapan*. Dalam berdemokrasi, kita harus memilih sesuai dengan hati nurani. Tetapi kadang-kadang hati nurani tertutup dengan selebar uang Rp 50 ribuan. Harus kita sampaikan ke masyarakat bahwa cara-cara membeli membuat orang yang dipilih tidak bertanggungjawab kepada masyarakat. Karena merasa sudah terpilih, sudah membayar, mengapa harus kembali ke masyarakat? Mengapa harus melihara hubungan dengan masyarakat?" **(Ade Munawaroh, anggota DPRD Bogor)**

kalyanamitra

Pusat Komunikasi dan Informasi Perempuan
Women's Communication and Information Centre

Organisasi ini didirikan pada 28 Maret 1985 dengan tujuan menjadi pusat komunikasi dan informasi perempuan dalam rangka membangun gerakan untuk melawan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan sekaligus melakukan pendidikan feminis, penyediaan perpustakaan perempuan, advokasi kebijakan, dan pendampingan kelompok-kelompok perempuan marjinal baik di perkotaan maupun di pedesaan.

1184 514-622-11700-3-0

